# LAPORAN AKHIR

# ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER DI PROPINSI JAWA BARAT


TIM PENELITI

Ir. Siti Sugiah M.Mugniesyah, MS
Dr. Ir. Machfud, MS
Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni,MS
Ir. Dwi Sadono, MSi
Rokhani, SP
Renata Widi Astuti, SP



**PUSAT STUDI WANITA**
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**
**2004**

# KATA PENGANTAR

Pudji syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT. karena berkat Rakhmat dan KaruniaNyalah kami dapat menyelesaikan Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Barat.

Dengan terselesaikannya laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa memfasilitasi kami dalam melaksanakan studi, terutama :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda dan Direktur Pendidikan Masyarakat, Departemen Pendidikan Nasional serta Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas RI yang telah merealisasikan Program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dan memberi peluang kepada Pusat Studi Wanita di Indonesia umumnya, khususnya PSW Institut Pertanian Bogor untuk berpartisipasi dalam melaksanakan Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender, khususnya di Propinsi Jawa Barat.
2. Pimpinan Proyek Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PPMPKPUG) , Departemen Pendidikan Nasional beserta staf, yang telah banyak memfasilitasi Tim Peneliti dalam melaksanakan studi ini, baik moril maupun materil.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Kepala Sub-dinas Pendidikan Luar Sekolah dan staff serta Pimpinan Proyek PPMPKPUG Propinsi Jawa Barat dan staff yang telah memberi dukungan dan memfasilitasi Tim Peneliti dalam memperoleh berbagai informasi dan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian studi ini.
4. Badan Perencanaan Daerah Propinsi Jawa Barat dan Forum PUS Propinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi dan memberi masukan kepada Tim Peneliti dalam menyelesaikan laporan.

5. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. khususnya Sdr. Drs. Asim Saputra , yang telah membantu dalam penyediaan dan pengolahan data SUSENAS 2000 – 2003 yang menjadi dasar penulisan laporan ini.
6. Kelompok Kerja (POKJA) PUG Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang telah memberi masukan dan saran bagi pelaksanaan studi ini.
7. Kepala Dinas dan Kasubdin PLS beserta staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan Kota Bekasi
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memfasilitasi Tim peneliti dalam pelaksanaan sampai terselesaikannya laporan ini.

Kami menyadari bahwa studi ini merupakan bagian dari proses belajar kami dalam menerapkan suatu Studi Analisis Kebijakan dengan Pendekatan GAP dan POP dalam bidang Pendidikan. suatu bidang baru bagi kami. Besar harapan kami bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bagian acuan dalam merumuskan position paper Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk tahun-tahun mendatang. Namun demikian, dengan menyadari adanya kekurangan yang ada dalam laporan ini, kami sangat mengharapkan masukan bagi kelengkapan dan perbaikan laporan ini.

Bogor, Nopember 2004

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR TABEL ..... ix

DAFTAR GAMBAR ..... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xvi

I. PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Perumusan Masalah ..... 9

1.3. Tujuan Studi ..... 10

1.4. Hasil Yang Diharapkan ..... 10

1.5. Pentingnya Penelitian ..... 11

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Konsep, Peranan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender ..... 12

2.2. Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan ..... 13

2.3. Metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Policy Outlook and Plan of Action (POP) : Pengertian dan Prosedur ..... 14

2.4. Program-Program Pendidikan ..... 20

2.5. Hasil Analisis GAP dan POP Tingkat Nasional dan Propinsi ..... 22

III. METODOLOGI PENELITIAN ..... 26

3.1. Kerangka Pemikiran ..... 26

3.2. Pendekatan di Lapangan ..... 30

3.3. Pengolahan dan Analisis Data ..... 32

IV. KEADAAN UMUM PROPINSI JAWA BARAT ..... 33
4.1. Geografi ..... 33
4.2. Demografi ..... 34
4.3. Profil Sumberdaya Manusia Jawa Barat ..... 37

V. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROPINSI JAWA BARAT .. 43
5.1. Visi dan Misi Pembangunan di Propinsi Jawa Barat ..... 43
5.2. Visi, Misi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Propinsi Jawa Barat ..... 45
5.3. Tujuan dan Sasaran Pendidikan ..... 47

VI. PROFIL GENDER DALAM PENDIDIKAN DI JAWA BARAT ..... ..... 48
6.1. Akses Terhadap Pendidikan Formal ..... 48
6.2. Kinerja Gender Menurut Jenjang Pendidikan/Sekolah.....115
6.3. Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Persen Buta Huruf.....117
6.4. Akses Terhadap Program Pendidikan Non-Formal.....122
6.5. Mutu dan Relevansi Pendidikan.....125
6.6. Manajemen Pendidikan.....132
6.7. Diskusi dan Pembahasan.....138

VII. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN ISU GENDER DALAM PENDIDIKAN DI JAWA BARAT.....139
7.1. Faktor-faktor Penyebab Kesenjangan Gender ..... 139
7.2. Isu-isu Gender.....147

VIII. REFORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG RESPONSIF GENDER ..... 151
8.1. Program Gender dalam Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat ..... 152
8.2. Kebijakan, Strategi, Target dan Sasaran Gender Bidang Pendidikan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) 2000-2004 ..... 157
8.3. Rencana Aksi Daerah Forum Pendidikan Untuk Semua Propinsi Jawa Barat ..... 160

8.4 Position Paper Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ..... 163

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..... 168
9.1. Kesimpulan ..... 168
9.2. Rekomendasi ..... 182
9.3. Meningkatkan Diseminasi dan Advokasi Informasi Kinerja Pembangunan Pendidikan ..... 191

DAFTAR PUSTAKA ..... 192
LAMPIRAN ..... 196

## DAFTAR TABEL


Tabel 4.1. Proporsi Pnduduk Berumur 3-6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Pra-Sekolah di Jawa Barat menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003 ..... 35

Tabel 4.2. Proporsi Penduduk Berumur 5-6 Tahun yang Bersekolah di Sekolah Dasar di Jawa Barat menurut Jenis Kelamin Tahun 2003 ..... 36

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Tahun 1999 – Tahun 2002 ..... 42

Tabel 6.1. Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Barat Tahun 2000 – 2003 ..... 48

Tabel 6.2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 tahun di Jawa Barat ..... 50

Tabel 6.3. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 – 12 tahun Menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. ..... 53

Tabel 6.4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13 – 15 tahun di Jawa Barat. ..... 55

Tabel 6.5. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13 – 15 tahun Menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. ..... 58

Tabel 6.6. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16 – 18 tahun di Jawa Barat pada Tahun 2000 - 2003 ..... 60

Tabel 6.7. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16 – 18 tahun Menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. ..... 63

Tabel 6.8. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 – 24 tahun di Jawa Barat Tahun 2000-2001 ..... 64

Tabel 6.9. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 – 24 tahun Menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. ..... 68

Tabel 6.10. Angka Partisipasi Kasar di Jawa Barat pada Tahun 2000 – 2003. ..... 70

Tabel 6.11. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat SD di Jawa Barat ..... 71

Tabel 6.12. Angka Partisipasi Kasar tingkat menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. ..... 75

Tabel 6.13. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP di Jawa Barat ..... 76

Tabel 6.14. Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. ..... 80

Tabel 6.15. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA di Jawa Barat....81

Tabel 6.16. Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.....85

Tabel 6.17. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat PT di Jawa Barat. .....86

Tabel 6.18. Angka Partisipasi Kasar tingkat PT menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.....90

Tabel 6.19. Angka Partisipasi Murni di Jawa Barat pada Tahun 2000 – 2003. .....91

Tabel 6.20. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tingkat SD di Jawa Barat .....93

Tabel 6.21. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD menurut Kelompok Pendapatan/ Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. .....96

Tabel 6.22. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tingkat SLTP di Jawa Barat....98

Tabel 6.23. Angka Partisipasi Murni tingkat SLTP menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.....103

Tabel 6.24. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tingkat SLTA di Jawa Barat ...105

Tabel 6.25. Angka Partisipasi Murni tingkat menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. .....108

Tabel 6.26. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tingkat PT di Jawa Barat.....111

Tabel 6.27. Angka Partisipasi Murni tingkat PT menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.....114

Tabel 6.28 Distribusi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen).....115

Tabel 6.29. Distribusi Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen) .....116

Tabel 6.30. Distribusi Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah .....117

Tabel 6.31. Distribusi Peserta Didik Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam Persen .....118

Tabel 6.32. Distribusi Peserta Didik Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen) .....119

Tabel 6.33. Distribusi Lulusan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen) ..... 120

Tabel 6.34. Angka Melek Huruf (AMH) di Propinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 1999 dan 2002 ..... 122

Tabel 6.35. Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun, 1999 dan 2002 ..... 121

Tabel 6.36. Indeks Paritas dan Disparitas pada Pendidikan Non-Formal di Jawa Barat Tahun 2000, Tahun 2002 dan Tahun 2003 ..... 123

Tabel 6.37. Program Kepemudaan Tahun 2001, 2002 dan 2003 ..... 124

Tabel 6.38. Indeks Paritas dan Disparitas dalam Program Kepemudaan di Jawa Barat ..... 124

Tabel 6.39. Distribusi Peserta Didik Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam Persen) ..... 126

Tabel 6.40. Distribusi Peserta Didik Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam Persen) ..... 126

Tabel 6.41. Distribusi Lulusan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam Persen) ..... 127

Tabel 6.42. Distribusi Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen) ..... 132

Tabel 6.43. Distribusi Guru DI Jawa Barat Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2003 ..... 133

Tabel 6.44. Distribusi Kepala Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen) ..... 134

Tabel 6.45. Distribusi Kepala Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah ..... 134

Tabel 6.46. Distribusi Pengawas Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen) ..... 135

Tabel 6.47. Distribusi Pengawas Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah ..... 135

Tabel 6.48. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003 ..... 136

Tabel 6.49. Indeks Paritas dan Disparitas Tutor Pendidikan Non-Formal di Jawa Barat Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Pendidikan Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 ..... 137

Tabel 7.1. Rata-rata Jarak Terdekat (Km) Yang Biasa Ditempuh dari Tempat Tinggal Ke Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2003 di Propinsi Jawa Barat ..... 141

Tabel 7.2. Persentase Penduduk yang Bersekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jarak Terdekat yang Biasa Ditempuh dari Tempat tinggal ke Sekolah ..... 141

Tabel. 7.3. Rata-rata Lama Perjalanan yang Biasa Ditempuh Penduduk yang Bersekolah dari Tempat Tinggal ke sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Propinsi Jawa Barat (Menit) ..... 142

Tabel 7.4. Persentase Penduduk yang Masih Bersekolah menurut Sarana Pergi ke Sekolah (2003) ..... 142

Tabel 7.5. Proporsi Siswa Sekolah Penerima Beasiswa di Jawa Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2003 ..... 144

Tabel 7.6. Persentase Penduduk yang Bersekolah dan Menerima Beasiswa menurut Penggunaan Beasiswa, Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan .. 144

Tabel 7.7. Proporsi Penduduk yang Bersekolah dan Menerima Beasiswa menurut Bentuk Beasiswa, Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan ..... 145

Tabel 7.8. Persentase Penduduk yang Bersekolah dan Menerima Beasiswa menurut Penggunaan Beasiswa, Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan ..... 145

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 6.1. Perkembangan APS kelompok usia 7 – 12 tahun di Jawa Barat. .....49

Gambar 6.2. Keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi anak kelompok usia 7-2 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota, 2003 .....51

Gambar 6.3. Perkembangan APS kelompok usia 7 – 12 tahun menurut Quartil pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.....52

Gambar 6.4. Perkembangan APS kelompok usia 13 – 15 tahun di Jawa Barat. .... ..54

Gambar 6.5. Keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi anak kelompok usia 13- 15 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota tahun 2003 .....56

Gambar 6.6. Perkembangan APS kelompok usia 13-15 tahun menurut Quartil pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.....58

Gambar 6.7. Perkembangan APS kelompok usia 16 – 18 tahun di Jawa Barat. .....59

Gambar 6.8. Keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi kelompok usia 16-18 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota tahun 2003 .....61

Gambar 6.9. Perkembangan APS kelompok usia 16-18 tahun menurut Quartil pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.....62

Gambar 6.10. Perkembangan APS kelompok usia 19 – 24 tahun di Jawa Barat .....64

Gambar 6.11. Keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi kelompok usia 19-24 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota tahun 2003 .....66

Gambar 6.12. Perkembangan APS kelompok usia 19-24 tahun menurut Quartil pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.....67

Gambar 6.13. Perkembangan APK tingkat SD di Jawa Barat.....71

Gambar 6.14. Keragaman APK tingkat SD antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, 2003 .....73

Gambar 6.15. Perkembangan APK tingkat SD menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat. .....74

Gambar 6.16. Perkembangan APK tingkat SLTP di Jawa Barat. .....76





Gambar 6.32. Keragaman APM tingkat SLTA antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, 2003 .....106

Gambar 6.33. Perkembangan APM tingkat SLTA menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat .....107

Gambar 6.34. Perkembangan APM tingkat PT di Jawa Barat. .....110

Gambar 6.35. Keragaman APM tingkat PT antar Kabupaten /Kota Jawa Barat,

Gambar 6.36. Perkembangan APM tingkat PT menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat ..... 113

Gambar 6.37. Angka Melek Huruf PendudukUsia 10 Tahun Ke Atas ..... 122

Gambar 6.38. Peserta Ujian dan Lulusan Pendidikan Non Formal di Jawa Barat ..... 125

Gambar 6.39. Pimpinan PKBM di Jawa Barat menurut Jenis Kelamin ..... 136

Gambar 6.40. Pimpinan Lembaga Kursus di Jawa Barat menurut Jenis Kelamin ..... 137

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Diagram Gender Analysis Pathway (GAP) Bidang Pendidikan (Diadaptasi dari Rosalin dkk., 2001) ..... 196

Lampiran 2. Rumus Beberapa Indikator Kesetaraan Gender dalam Pendidikan (Depdiknas, 2003) ..... 197

Lampiran 3. Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Tahun 2002 dan 2003 ..... 198

Lampiran 4. Angkatan Kerja di Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 dan 2002 ..... 199

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 1996, 1999 dan 2002 ..... 200

Lampiran 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Propinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1999 dan 2002 ..... 201

Lampiran 7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Propinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 dan 2002 ..... 202

Lampiran 8. Indeks Kemiskinan Manusia Propinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1998, 1999 dan 2002 ..... 203

Lampiran 9. Tujuan dan Sasaran Program Pendidikan di Jawa Barat Menurut Misi Program ..... 204

Lampiran 10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003 ..... 209

Lampiran 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003 ..... 210

Lampiran 12. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003 ..... 211

Lampiran 13. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas di Propinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kota Desa Tahun 2000 – 2003 ..... 212

Lampiran 14. Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin, Lainnya, dan yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis ..... 213

Lampiran 15. Sebaran Nilai UAN Tertulis Siswa SD Bekasi Jaya 1 menurut Rentang Nilai, Mata Pelajaran dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Tahun 2003/2004 ..... 214

Lampiran 32. Jadwal Kegiatan Program Aplikatif Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun ..... ....240

Lampiran 33. Pembagian Tugas Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat .... ....241

Lampiran 34. Backup Sektor Dalam Rangka Kegiatan Pemerataan bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 ..... ....242

Lampiran 35. Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 ..... ....243

Lampiran 36. Kabupaten Kota menurut Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 7-15 Tahun Terhadap Rata-rata x Tingkat Propinsi..... ....244

Lampiran 37. Kabupaten Kota menurut Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-24 Tahun Terhadap Rata-rata x Tingkat Propinsi..... ....245

Lampiran 38. Kabupaten / Kota menurut Kinerja Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi..... ....246

Lampiran 39. Kabupaten / Kota menurut Kinerja Partisipasi Pendidikan Lanjutan Pertama Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi ..... ....247

Lampiran 40. Kabupaten / Kota menurut Kinerja Partisipasi Pendidikan Lanjutan SLTA Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi. ..... ....248

Lampiran 41. Kabupaten / Kota menurut Kinerja Partisipasi Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi..... ....249

Lampiran 42. Kabupaten / Kota menurut Selisih Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 7-15 Tahun Terhadap Tingkat Propinsi..... ....250

Lampiran 43. Kabupaten / Kota menurut Selisih Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-24 Tahun Terhadap Tingkat Propinsi..... ....251

Lampiran 44. Kabupaten / Kota menurut Selisih Kinerja Partisipasi Pendidikan Dasar Terhadap Tingkat Propinsi..... ....252

Lampiran 45. Kabupaten / Kota menurut Selisih Kinerja Partisipasi Pendidikan Lanjutan Pertama Terhadap Tingkat Propinsi. ..... ....253

Lampiran 46. Kabupaten / Kota menurut Selisih Kinerja Partisipasi Pendidikan Lanjutan Atas Terhadap Tingkat Propinsi. ..... ....254

Lampiran 47. Kabupaten / Kota menurut Selisih Kinerja Partisipasi Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi Terhadap Tingkat Propinsi. ..... ....255

Lampiran 16. Sebaran Nilai UAN Praktek Siswa SD Bekasi Jaya 1 menurut Rentang Nilai, Mata Pelajaran dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Tahun 2003/2004 ..... ....215

Lampiran 17. Nama-nama Penerbit Beberapa Bahan Ajar SD dan SMP Menurut Mata Pelajaran ..... ....216

Lampiran 18. Analisis Materi Bahan Ajar Bahasa Indonesia (BI) ..... ....217

Lampiran 19. Analisis Materi Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ..... ....218

Lampiran 20. Analisis Materi Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ..... ....219

Lampiran 21. Analisis Materi Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ..... ....220

Lampiran 22. Analisis Materi Bahan Ajar Tangkas Pengetahuan Sosial dan Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 1,2,3,4,5 dan 6, Berbasis Kurikulum 2004 ..... ....221

Lampiran 23. Contoh-contoh Teks Bahan Ajar Bias Gender ..... ....222

Lampiran 24. Analisis Materi Bahan Ajar Muatan Lokal "Gelis Maca lan Nulis" dan "Wulang Basa" SD, "Ketrampilan Tata Busana" SLTP dan Pendidikan Budi Pekerti SMU/SMK/MA di Kabupaten Indramayu ..... ...231

Lampiran 25. Contoh-contoh Teks Bahan Ajar Muatan Lokal Bias Gender .. ....232

Lampiran 26. Karakteristik SDM yang Berpartisipasi dalam Penulisan Bahan Ajar Tangkas Berbahasa Indonesia dan Tangkas Pengetahuan Sosial SD Kelas 1,2,3,4,5 dan 6 ..... ....234

Lampiran 27. Sasaran Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Jawa Barat ..... ....235

Lampiran 28. Pola Pikir Program Aplikatif Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun ..... ....236

Lampiran 29. Program Aplikatif Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun ..... ....237

Lampiran 30. Ruang Lingkup Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2005 yang Relevan dengan Upaya Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun (APBD) ..... .... 238

Lampiran 31. Ruang Lingkup Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2005 dari APBN (Dalam Ribuan – Rp) ..... ....239

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dinyatakan bahwa visi pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (selanjutnya disebut PROPENAS) dinyatakan bahwa salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah terwujudnya sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung-jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia (Anonymous, 2000).

Terdapat 5 prioritas pembangunan nasional dalam PROPENAS, salah satu diantaranya adalah Program Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Ketahanan Budaya. Prioritas pembangunan ini dilaksanakan melalui pembangunan bidang-bidang : agama, pendidikan dan sosial budaya. Arah kebijakan pembangunan pendidikan menurut GBHN 1999-2004 mencakup 8 aspek, salah satu diantaranya adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

Berbagai program pendidikan telah dilaksanakan pemerintah dalam mewujudkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, diantaranya adalah Program Wajib Belajar 6 (enam) tahun pada tahun 1984 dan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun pada tahun 1994. Kedua program tersebut secara bertahap diharapkan dapat memperluas angka partisipasi pada tingkat pendidikan dasar. Data Susenas Tahun 2003

menunjukkan bahwa untuk Indonesia Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar telah mencapai 105,8. APK tersebut semakin menurun dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan formal, yakni 81,1 pada SMP, 50,9 pada SMU dan hanya 10,8 pada PT. Namun demikian, jika dilihat berdasar jenis kelaminnya, diketahui bahwa APK perempuan pada jenjang SD, SMU dan PT lebih rendah dibanding laki-laki, kecuali pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasar lokasinya, APK tersebut menunjukkan suatu ketimpangan yang cukup besar antara perkotaan dan perdesaan. Kecuali untuk pendidikan SD, di perdesaan APK tersebut berturut-turut sebesar 72,9 untuk jenjang pendidikan SMP, 35,8 pada jenjang SMU dan hanya 3,0 pada jenjang PT. Adapun di perkotaan, sebesar 93,7 pada SMP, 70, 6 pada SMU dan sebesar 19,3 pada PT. Berdasar jenis kelaminnya, di perdesaan APK perempuan sama rendahnya sebagaimana APK laki-laki, kecuali bahwa pada jenjang SMP APK perempuan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki, sebaliknya pada jenjang PT APK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Adapun di perkotaan , kecuali pada jenjang SMP, pada ketiga jenjang pendidikan lainnya, yaitu SD, SMU dan PT APK Perempuan lebih rendah dibanding APK Laki-laki (Nina Sardjunani, 2004).

Dengan demikian, pemerataan pendidikan belum terwujud. Pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, ayat 1, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Persamaan hak ini juga termaktub pada Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Di samping itu, juga komitmen pemerintah Indonesia yang telah *meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dengan menetapkan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Khusus mengenai pendidikan, pada Pasal 14 ayat 2 butir f dinyatakan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin mereka ikut serta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan hak, dan menjamin

kepada wanita pedesaan hak untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka.

Ini berarti, bahwa seharusnya, setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun domisilinya -perkotaan dan pedesaan- seharusnya akses terhadap pendidikan sampai jenjang yang tertinggi. Namun demikian, kita masih temukan adanya kesenjangan dalam partisipasi sekolah antara perempuan dengan laki-laki, terlebih di pedesaan, seperti tercermin dari *Gender-related Development Index (GDI)* atau Indeks Pembangunan Gender. Menurut Human Development Report 2000, GDI Indonesia tergolong pada "*medium human development*", dengan menduduki urutan ke 90 dari 174 negara yang diukur, lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Kamboja dan Myanmar. Khusus pada komponen Angka Melek Huruf (AMH) pada perempuan sebesar 80.5 persen, sementara pada laki-laki lebih tinggi, yaitu sekitar 10.5 persen atau sebesar 91.1 persen (United Nations Development Program, 2000). Adapun rata-rata lama sekolahnya, pada perempuan sebesar 6.1 tahun atau lebih rendah 1,2 tahun dibanding laki-laki yang rata-rata bersekolah selama 7.3 tahun (Anonymous, 2001).

Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli dan peneliti terdahulu, ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan diduga berhubungan dengan berbagai faktor, diantaranya adalah ideologi gender yang terinternalisasi pada hampir semua masyarakat. Ideologi atau sistem nilai gender sebagai bagian dari kebudayaan ini menjadikan individu-individu anggota masyarakat menafsirkan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki menjadi seperangkat acuan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, yang kemudian berpengaruh kepada hak-hak, distribusi sumberdaya dan kekuasaan, baik dalam lingkup rumahtangga, masyarakat dan negara. Sebagaimana halnya ras, kelas dan etnik, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Umum diketahui bahwa ideologi gender telah mengakibatkan masih tingginya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di berbagai tingkatan kelembagaan, mulai dari keluarga/rumahtangga, masyarakat, organisasi sampai dengan negara. Dalam kaitan itu,

sebagaimana dilaporkan Bank Dunia (2001), ketidaksetaraan gender dalam pendidikan paling banyak terjadi di kalangan kaum miskin. Ketidaksetaraan gender merugikan bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki, dewasa maupun anak-anak; mengurangi produktivitas sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan jaminan kemajuan ekonomi, dan dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas kehidupan. Tingkat buta huruf yang tinggi dan keterbatasan tingkat pendidikan ibu secara langsung merugikan anak-anak, dan berakibat pada buruknya kualitas perawatan anak serta meningkatnya angka kematian bayi dan kurangnya status gizi.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan, ditambah dengan pengaruh ideologi gender yang sangat kuat tentang pembagian peran yang kaku antara suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) – laki-laki pencari nafkah, perempuan mengurus rumahtangga-- telah membawa pada ketidaksetaraan dalam hal upah/pendapatan. Badan Pusat Statistik (2000) mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula rasio upah (perempuan terhadap laki-laki ), atau dengan perkataan lain, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin meningkat kesetaraan dalam akses terhadap sumberdaya ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan perempuan menjadi sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan individu-individu dan keluarga, dan pada gilirannya bangsa dan negara. Itu sebabnya visi pembangunan pemberdayaan perempuan adalah kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2000).

Di Propinsi Jawa Barat, dalam hal Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index* atau GDI), kondisinya serupa dengan Indonesia. Pada Tahun 1999 di propinsi ini IPGnya sebesar 54,6, menduduki ranking 18 dari 26 propinsi di Indonesia, dikelompokkan bersama propinsi Jambi dan Irian Jaya (Papua). Angka kedua komponen tersebut menunjukkan perkembangan, karena GDI pada 3 tahun sebelumnya menunjukkan ranking yang lebih rendah, yakni pada urutan ke 23 dari 27 propinsi di Indonesia (Badan Pusat Statistik,1997). Sekalipun data mutakhir belum tersedia, dewasa ini diharapkan kondisi tersebut membaik.

Secara umum diketahui bahwa keadaan penduduk Propinsi Jawa Barat dewasa ini cenderung meningkat. Data penduduk Jawa Barat Tahun 2002 sejumlah 36.914.883 juta

jiwa. 49,32 persen diantaranya adalah perempuan. Meskipun demikian, dilihat dari kelompok umurnya, pada kelompok umur 19-24 tahun, persentase penduduk perempuan menunjukkan lebih tinggi yakni sebanyak 50,62 persen dan pada kelompok umur 25 tahun ke atas hampir setara dengan laki-laki yaitu yaitu sebesar 49,92 persen . Ini menunjukkan bahwa pada kelompok usia produktif persentase perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki.

Dalam hal kualitas sumber daya manusianya, dewasa ini masih terdapat kesenjangan gender dalam pendidikan di Jawa Barat. Khusus pada komponen Angka Melek Huruf (AMH) diketahui bahwa pada perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, berturut-turut sebesar 89,2 persen dan 95,2 persen atau lebih rendah sekitar 6 persen. Adapun pada komponen rata-rata lama sekolah (RLS), penduduk perempuan rata-rata lama pendidikannya 6,2 tahun, lebih rendah sekitar satu tahun dibanding penduduk laki-laki yang rata-rata menikmati pendidikan selama 7,3 tahun (Anonymous, 2001). Kondisi tersebut relatif konsisten selama 4 tahun terakhir sebagaimana dikemukakan Krisnayani dkk. (2003) yang menyatakan bahwa AMH perempuan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 menunjukkan lebih rendah sekitar 5 % dibanding AMH Laki-laki.

Kondisi yang sama juga terjadi pada pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang SD, SLTP dan SLTA diketahui bahwa pada tahun 2001 persentase peserta didik laki-laki pada ketiga jenjang pendidikan tersebut berturut-turut sebesar 51,2 %, 51,9 % dan 53,8 % ; sementara untuk perempuan berturut-turut sebesar 48,78 %, 48,1 % dan 46,1 % (Dinas Pedidikan Jawa Barat, 2004). Namun demikian, kondisi tersebut sedikit menunjukkan perbedaan, jika dilihat berdasar data Angka Partisipasi Kasar (AP)nya. Pada jenjang pendidikan SD/MI, APK Perempuan lebih tinggi sekitar 6 persen dibanding APK Laki-laki, berturut-turut sebesar 56,08 % dan 50,92 % Adapun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi APK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pada jenjang SMP/MTs dan SMU/MA/SMK APK perempuan berturut-turut sebesar 33,63 % dan 16,67 %, sementara APK Laki-laki berturut-turut sebesar 38,8 % dan 26,87 % (Sub Dinas PLS, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2004). Data tersebut masih menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan rendah (SD), kesetaraan pendidikan antara penduduk laki-laki dan perempuan cenderung menguat, sebaliknya dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di pedesaan. Hal ini memperkuat laporan ESCAP

tahun 1998 dalam Badan Pusat Statistik (2000) yang mengemukakan bahwa angka partisipasi perempuan yang bersekolah semakin menurun dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Dalam hal penduduk buta huruf pada usia 10-44 tahun, secara umum persentase perempuan juga lebih tinggi dibanding laki-laki, terlebih di pedesaan, berturut-turut 5,1 persen dan 2,4 persen; sementara di kota perempuan sebanyak 1,4 persen dan laki-lakinya hanya 0,4 persen. Jumlah penduduk yang buta huruf diduga meningkat dengan meningkatnya anak putus sekolah SD, oleh karena anak-anak putus sekolah kelas 1 sampai kelas 3 cendrung menjadi buta huruf kembali. Lebih lanjut, di propinsi ini tingkat putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan dasar menengah, semakin tinggi tingkat putus sekolah tersebut. Renstra DIKNAS Jawa Barat (2001) menyatakan tingkat putus sekolah tersebut adalah 0,46 persen dari sekitar 4, 139 juta siswa Sekolah Dasar (SD), 0,87 persen dari 1, 140 juta murid SLTP, dan 0,71 persen dari 0,422 juta pada jenjang SMU, sementara pada sekolah kejuruan menunjukkan tertinggi yakni 0,97 persen dari 0,289 juta orang siswa SMK. Berdasar jenis kelaminnya, Krisnayani dkk. (2003) menyatakan bahwa sekalipun AMH dan Angka Partisipasi perempuan di persekolahan hampir selalu lebih rendah daripada laki-laki, namun dalam angka putus sekolah dan mengulang, siswa perempuan selalu lebih kecil dibanding siswa laki-laki.

Untuk merespon terhadap penduduk yang tidak akses pada pendidikan formal, Dikdis Propinsi Jawa Barat telah melaksanakan beragam program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), diantaranya melalui Program Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), Paket Kelompok Belajar (Kejar) A Setara Sekolah Dasar (SD) Paket Kejar B Setara SLTP, dan Paket Kejar C Setara SMU, Kelompok Belajar Usaha (KBU), dan Program Beasiswa/Magang, serta Program Lintas Sektoral lainnya. Partisipasi perempuan dalam PLS menunjukkan keragaman. Dalam hal Keaksaraan Fungsional partisipasi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, khususnya pada tahun 2001 dan 2002, sementara pada 2003 menunjukkan hampir setara. Namun demikian, untuk program PADU, Paket Kejar A, B dan C, partisipasi perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Sebaliknya pada Program Magang/Beasiswa, persentase peserta didik perempuan lebih tinggi daripada laki-laki (Sundis PLS, 2003; Mugniesyah, 2004).

Hal ini menunjukkan masih relatif tingginya kesenjangan gender dalam pendidikan formal maupun non-formal di propinsi ini.

Dihubungkan dengan permasalahan masih adanya ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia pada umumnya, Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO telah menandatangani Kesepakatan Dakar mengenai Kebijakan Pendidikan Untuk Semua atau PUS (*Education for All*), yang di dalamnya mencanangkan beberapa hal penting berkenaan kesetaraan gender dalam pendidikan, diantaranya yaitu :

a. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk minoritas etnik mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.

b. Mencapai perbaikan 50 persenpada tingkat melek huruf *(literacy)* orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.

c. Menghapus disparitas gender di pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik.

Komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan tersebut diperkuat dengan ditetapkannya INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan kepada pejabat negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001).

Menindaklanjuti kesepakatan Dakar serta merespon terhadap Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun menyusun Rencana Aksi Nasional "Pengarusutamaan Gender di bidang Pendidikan" di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Namun demikian, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 11 ayat (2), bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu dari bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Anonymous, 2002).

Dengan demikian, Rencana Aksi Nasional tersebut perlu ditindaklanjuti pada tingkat daerah, yakni untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).

Komitmen Propinsi Jawa Barat terhadap PUS dan Inpres No. 9 Tahun 2000 ditunjukkan oleh adanya kebijakan yang memprioritaskan Pembangunan Jawa Barat 2004 kepada "Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Jawa Barat". Untuk mewujudkan hal tersebut strategi yang ditempuh antara lain adalah melalui Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan. Dinyatakan lebih lanjut bahwa strategi tersebut dilaksanakan dengan memfasilitasi dan meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, Kabupaten/Kota dan Lembaga Non-Pemerintah dalam aspek pendidikan (Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2003). Untuk itu, Propinsi Jawa Barat telah menetapkan indikator kinerja berupa pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama 8,7 tahun dan AMH sebesar 97,6 % pada tahun 2008 dan bahwa IPM pada tahun 2010 diharapkan mencapai 80.

Permasalahannya adalah bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Propinsi Jawa Barat masih menghadapi banyak masalah, utamanya belum meratanya kinerja pendidikan di 16 kabupaten dan 8 kota yang ada di Jawa Barat. Dalam hal Indeks Pembangunan Gender (IPG), diketahui bahwa baru ada 2 kabupaten dan satu kota yang memiliki IPG sekitar 61 – 62 , sekitar 10 kabupaten dan 3 kota dengan IPG diantara 53- 58,5 persen dan selainnya antara 40 sampai dengan 49 persen (BPS, Bappenas, UNDP, 2001). Dengan perkataan lain terdapat 12 kabupaten dan 4 kota yang IPG nya tergolong sedang dan sisanya tergolong rendah. Kondisi yang demikian sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat Jawa Barat, karena kinerja pendidikan yang rendah dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran sekaligus penduduk miskin. Hal ini jika dibiarkan akan membawa pada rendahnya kualitas SDM, laki-laki dan perempuan, dan pada gilirannya akan membawa pada terganggunya stabilitas sosial dan rendahnya kemampuan bersaing SDM Jawa Barat dalam memasuki era globalisasi.

Upaya untuk mencapai kualitas dan pemerataan pendidikan baik pada jalur formal maupun non-formal tidak dapat terwujud secara sistematis jika setiap kabupaten dan kota yang ada di propinsi ini tidak memiliki kebijakan/program/proyek/kegiatan pendidikan di kedua jalur tersebut yang responsif gender. Oleh karena studi terdahulu (Krishnayani, dkk., 2003) belum dilaksanakan secara holistik, dengan demikian, agar

kebijakan/ program/proyek/kegiatan pendidikan di kedua jalur tersebut responsif gender maka diperlukan suatu studi lanjutan analis kebijakan pendidikan berwawasan gender yang diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengakselarasi Propinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan formal dan non-formal (PLS). Studi ini hanya akan berhasil guna jika didukung oleh data Profil Gender dan Pendidikan yang menunjukkan kinerja sistem pendidikan formal dan non-formal (PLS) di tingkat kabupaten/kota dan propinsi yang terpilah menurut jenis kelamin. Dengan demikian, studi kebijakan pendidikan berwawasan gender di Propinsi Jawa Barat ini menjadi strategis, karena sebagaimana dikemukakan dalam PROPENAS, dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

### 1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan dan program-program pembangunan pendidikan (formal dan non-formal) di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya sampai dengan Repeta 2004 ini ? Apakah pernyataan kebijakan, tujuan, visi, misi dan sasaran kebijakan pendidikan sudah responsif gender ? Isu gender apakah yang mempengaruhi kebijakan dan program pendidikan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota ?
2. Bagaimanakah Profil Gender dalam Pendidikan (formal dan non-formal) di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat ? Apakah kesetaraan dan keadilan gender dalam program pendidikan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sudah terwujud ? Jika ya dan sudah, faktor-faktor –termasuk isu gender- apakah yang mempengaruhinya ?
3. Apakah penyelenggara dan *stakeholders* -Dinas Pendidikan, Bappeda, DPRD, Guru-guru Sekolah, dan LSM Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota) telah sensitif gender dalam menyusun program pembangunan pendidikannya ? Apakah mereka telah berkontribusi dalam mengintegrasikan PUG dalam program pendidikan yang ada di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat ?

### 1.3. Tujuan Studi

Secara umum studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan/program pendidikan berwawasan gender di tingkat propinsi dan kabupaten/kota di Daerah Jawa Barat dengan menerapkan metodologi *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender dan *Policy Outlook and Plan Action (POP)* . Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Mempelajari dan menganalisis berbagai kebijakan/program/proyek/kegiatan pendidikan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mencakup pernyataan kebijakan, tujuan, visi, misi dan sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pendidikan (formal dan non formal) untuk mengetahui isu gender dalam kebijakan/program/proyek/kegiatan pendidikan tersebut.
2. Mempelajari dan menyusun Profil Gender dalam Pendidikan (formal dan non-formal) di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat, khususnya untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam program pendidikan formal dan non-formal di wilayah-wilayah tersebut.
3. Mempelajari faktor-faktor penyebab kesenjangan gender dalam pendidikan formal dan non formal tingkat Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
4. Mereformulasi kebijakan/program/proyek/kegiatan program pendidikan di tingkat propinsi, kabupaten/kota yang responsif gender secara partisipatif dalam arti melibatkan penyelenggara dan *stakeholders* -Dinas Pendidikan, Bappeda, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan LSM dan PSW dan atau *Focal Point*/Kelompok Kerja PUG di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota) - agar dapat memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Pendidikan Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota (kasus) di Jawa Barat.

### 1.4. Hasil Yang Diharapkan

Studi ini diharapkan dapat menghasilkan :

1) Profil Gender Dalam Pendidikan Formal dan Non-Formal Tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota Kasus di Propinsi Jawa Barat.
2) Draft Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG dalam Pembangunan Pendidikan di Propinsi Jawa Barat

## 1.5. Pentingnya Penelitian

Penelitian atau studi ini diharapkan memberi manfaat kepada berbagai pihak, khususnya bagi Pemerintah Daerah (propinsi, Kabupaten.Kota), Departemen Pendidikan Nasional dan para peneliti di lingkup Pusat Studi Wanita Institut Pertanian Bogor (PSW IPB), serta bagi pengembangan ilmu atau disiplin gender dan pembangunan itu sendiri.

Bagi pemerintah daerah, studi ini diharapkan dapat memberikan masukan data dan informasi tentang Profil Gender dalam Pendidikan di daerahnya masing-masing yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian sistem pendidikan nasional di tingkat daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal. Di samping itu, diharapkan dapat memfasilitasi dan mengakselarasi PUG Gender dalam Pendidikan, khususnya dalam REPETADA Tahun 2004 yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam pendidikan di Jawa Barat.

Bagi Departemen Pendidikan Nasional, studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dan sistem pendidikan nasional yang responsif gender dan demokratis dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Bagi para peneliti PSW IPB studi ini diharapkan dapat menjadi proses belajar dalam meningkatkan ketrampilan dalam menerapkan pendekatan/metode *Gender Analysis Pathway* (Alur Kerja Analisis Gender) dan *Policy Outlook and Plan Action* (POP) dalam melakukan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan pendidikan, khususnya untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Selain manfaat tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada perkembangan disiplin gender dan pembangunan (*Gender and Development),* khususnya dalam konteks pembangunan bidang pendidikan di Indonesia.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Konsep, Peranan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender

Terdapat banyak ahli yang mengemukakan pengertian gender. Donnel (1988) dan Eviota (1993) menyatakan bahwa gender berkenaan dengan perbedaan-perbedaan (dikotomi) sifat perempuan dan laki-laki yang tidak berdasar pada perbedaan biologis, tetapi berdasar pada hubungan atau relasi sosial budaya antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya yang lebih luas dan negara. Fakih (1994) mengartikannya sebagai sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial budaya. Pengertian kata gender kemudian diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam melalui proses sosialisasi, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Moser (1993) mengemukakan bahwa peranan gender adalah perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung-jawab tertentu dipersepsikan sebagai peranan perempuan dan laki-laki. Peranan gender ini dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Dinyatakan lebih lanjut bahwa peranan gender itu bersifat dinamis, itu sebabnya perubahan peranan gender sering terjadi sebagai respon terhadap perubahan situasi ekonomi, sumberdaya alam, dan/atau politik termasuk perubahan berupa pembangunan atau penyesuaian program struktural oleh kekuatan-kekuatan di tingkat nasional dan global.

Dalam PROPENAS 2000-2004 secara eksplisit dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula halnya dengan visi Program Pemberdayaan Perempuan adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan,2000). Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah dua konsep yang berbeda tapi berhubungan, namun oleh kalangan tertentu masih dipertukarkan pengertiannya. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya dikemukakan oleh International Labor Office atau ILO (2000).

Menurut ILO (2000), kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotipi, prasangka dan peranan gender yang kaku. Dinyatakan lebih lanjut bahwa perbedaan perilaku, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dipertimbangkan, dinilai, dan didukung secara setara; bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan menjadi sama, akan tetapi hak-hak, tanggung-jawab dan kesempatan mereka tidak ditentukan karena mereka terlahir sebagai laki-laki dan perempuan. Adapun keadilan gender (*gender equity*) diartikan sebagai keadilan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-kebutuhan mereka, mencakup perlakuan setara atau perlakuan yang berbeda akan tetapi dalam koridor pertimbangan kesamaan dalam hak-hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan dan manfaat.

## 2.2. Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan

Pengertian PUG dalam pembangunan pertama kali dikemukakan dalam Laporan Dewan Sosial dan Ekonomi, PBB (1997); selanjutnya pengertian ini digunakan oleh Bappenas RI dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan diartikan sebagai suatu proses penilaian implikasi dari setiap rencana aksi bagi perempuan dan laki-laki, mencakup peraturan, kebijakan-kebijakan atau program-program, pada setiap bidang dan pada semua tingkatan pembangunan. Itu sebabnya PUG dalam pembangunan dianggap menjadi suatu strategi untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari berbagai kebijakan-kebijakan dan program dalam semua bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh manfaatnya secara setara dan ketidaksetaraan tidak dilestarikan. Perolehan manfaat oleh individu laki-laki dan perempuan itu menjadi indikator penilaian tenatang sejauhmana pembangunan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan itu, Moser (1993) mengemukakan bahwa dalam perencanaan pembangunan

dapat dibedakan 2 tujuan pembangunan yakni pemenuhan kebutuhan praktis (*practical gender needs*) dan strategis gender (*strategical gender needs*).

Kebutuhan praktis gender mencakup kebutuhan-kebutuhan perempuan yang diidentifikasi dari peranan perempuan secara sosial dalam masyarakatnya. Kebutuhan praktis gender tidak menantang pembagian kerja gender atau posisi subordinasi pembagian kerja perempuan dalam masyarakatnya. Kebutuhan praktis gender merupakan respon terhadap kepentingan yang bersifat segera, diidentifikasi sebagai dalam suatu konteks khusus, bersifat praktis dan sering berkenaan dengan ketidaklayakan kondisi hidup, seperti ketersediaan air, kesehatan dan ketenagakerjaan. Dengan perkatan lain, pemenuhan kebutuhan praktis gender adalah pemenuhan terhadap kebutuhan yang segera dapat meringankan beban kehidupan perempuan, namun tidak menyinggung masalah ketimpangan yang ada antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat pembagian kerja seksual yang mengakar dalam masyarakat.

Kebutuhan strategis gender adalah identifikasi kebutuhan-kebutuhan perempuan yang disebabkan oleh adanya subordinasi posisi perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan ini juga beragam tergantung konteksnya, tapi umumnya berhubungan dengan pembagian kerja, kekuasaan, kontrol dan bisa berupa isu-isu Hak Azasi Manusia (HAM), tindak kekerasan terhadap perempuan, upah yang sama untuk pekerjaan dan waktu yang sama, dan kontrol perempuan terhadap tubuh mereka sendiri. Pemenuhan kebutuhan strategis gender akan membantu perempuan kepada pencapaian keadilan dan kesetaraan gender. Diakui bahwa kebutuhan strategis gender merupakan kebutuhan jangka panjang yang berupaya menghilangkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di dalam dan di luar rumahtangga serta menjamin hak dan peluang perempuan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka (seperti undang-undang persamaan hak, persamaan upah untuk pekerjaan yang sama).

## 2.3. Metode *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Policy Outlook and Plan of Action* (POP) : Pengertian dan Prosedur

*Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAG) merupakan alat analisis yang dikembangkan oleh Bappenas RI dengan Tim Konsultan Nasional untuk PUG dalam Progfram Pembangunan (Rosalin dkk.,2001) yang dapat

digunakan oleh (terutama) para perencana dalam melakukan proses perencanaan pembangunan yang responsif gender. Metode GAP adalah salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan dan/atau perencanaan program pembangunan. Dengan GAP, para perencana kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Dikemukakan oleh Rosalin dkk. (2001), bahwa selama ini kita mengenal Perencanaan Pembangunan pada beberapa tingkatan, sebagai berikut :

(1) Pada tingkat nasional direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro nasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
(2) Pada tingkat propinsi, direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro regional, yang berupa penetapan tujuan dan sasaran pembangunan propinsi.
(3) Pada tingkat kabupaten/kota, direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro daerah, yang berupa penetapan tujuan dan sasara pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan kebijakan pada masing-masing tingkatan administrasi tersebut, dilakukan perencanaan program untuk menyusun rencana program (termasuk proyek dan kegiatan di dalamnya) jangka menengah (setiap lima tahun) atau jangka pendek (setiap tahun) yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah (propinsi, kabupaten/kota, termasuk desa). Permasalahannya adalah bahwa perencanaan yang dilakukan selama ini belum tergolong perencanaan yang responsif gender.

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan program. Dalam melakukan perencanaan yang responsif gender, para perencana perlu melakukan analisis gender pada semua kebijakan dan program pembagunan. Perencanaan yang responsif gender diperlukan untuk beberapa alasan. Pertama, untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap, berkesinambungan. dan mencapai tingkat

kemungkinan keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Kedua, perencanaan yang responsif gender dilakukan dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan, termasuk pendidikan. Dengan demikian, tujuan perencanaan yang responsif gender adalah tersusunnva rencana kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang/sektor pembangunan dan di setiap lingkup pemerintahan.

Untuk itu perlu melakukan analisis gender atau tepatnya teknik analisis gender yang diartikan sebagai pengujian secara sistematis terhadap peranan-peranan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang memusatkan perhatiannya pada ketidakseimbangan kekuasaan, kesejahteraan dan beban kerja antara laki-laki dan perempuan di semua masyarakat. Istilah ini diterapkan terhadap proses pembangunan, khususnya untuk melihat bagaimana kebijaksanaan pada program pembangunan mempunyai dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan (Moser, 1993). Surbakti dkk. (2001) mengemukakan bahwa analisis gender merupakan langkah awal penyusunan tujuan pembangunan yang responsif gender.

Analisis gender dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor utama yang digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan gender. Keempat faktor tersebut adalah:

(1) Faktor akses. Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan
(2) Faktor kontrol. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan ?.
(3) Faktor partisipasi. Bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam program-program pembangunan ?.
(4) Faktor manfaat. Apakah perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan ?

Lebih lanjut Rosalin dkk. (2001) mengemukakan tahapan pelaksanaan metode GAP ke dalam 8 tahapan yang secara sistematis tercakup dalam 3 tahapan seperti terlihat pada Diagram GAP pada Lampiran 1. Secara rinci tahapan pelaksanaan GAP diuraikan di bawah ini.

*TAHAP I : Analisis Kebijakan Yang Responsif Gender*

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk kemudian mengidentifikasi adanya kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*). Tahap ini perlu dilakukan karena pada umumnya kebijakan dan program pemerintah hingga saat ini masih netral gender (*gender neutral*), dengan asumsi bahwa kebijakan dan program tersebut memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki.

Terdapat 4 (empat) langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu:

***Langkah 1 : Identifikasi tujuan dan atau sasaran kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan yang ada saat ini***

Pada umumnya kebijakan/program/proyek/kegiatan pemba-ngunan yang ada saat ini adalah netral gender, atau bahkan bias gender. Untuk itu, beberapa pertanyaan dasar dapat diajukan, seperti:

a) Tujuan dan atau sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan apa saja yang telah dirumuskan/ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender?
b) Apakah komitmen tersebut telah diintegrasikan dalam tujuan dan atau sasaran kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan tersebut ?
c) Apabila tidak/belum, apa yang perlu dilakukan ?

***Langkah 2 : Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan (eye-opener data)***

a) Data kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada saat ini memberikan dampak yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki, serta sekaligus dapat digunakan untuk menentukan perspektif/dimensi gender dari kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan yang akan dirumuskan.
b) Data ini harus dipilah menurut jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) sehingga para perencana dapat memahami adanya perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki. Di samping itu, data kualitatif dapat pula digunakan untuk melihat perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki.

Pada langkah ini pertanyaan dasar yang dapat diajukan, adalah : apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki ?

***Langkah 3 : Analisis sumber terjadinya dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (gender gap)***

Untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender, digunakan 4 (empat) faktor utama, yaitu: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh melalui teknik analisis gender. Beberapa pertanyaan mendasar yang dapat membantu mengungkapkan adanya kesenjangan gender, adalah :

a) Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan ?
b) Siapa yang menguasai (memiliki kontrol) terhadap sumber-sumber daya pembangunan tersebut ?.
c) Bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan ?
d) Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan atau sumber-sumberdaya pembangunan yang ada?

***Langkah 4 : Identifikasi masalah-masalah gender (gender issues)***

Pada tahap ini, para perencana dapat mengidentifikasi masalah-masalah gender berdasarkan empat faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender sebagaimana dihasilkan pada Langkah 3 di atas. Terdapat beberapa pertanyaan dasar yang dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah gender, diantaranya adalah :

a) Masalah-masalah gender apakah yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender ? Dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki ? Apakah kesenjangan terjadi di wilayah publik dan ataukah terjadi di wilayah domestik?
b) Mengapa terjadi kesenjangan gender tersebut?
c) Apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada mempersempit kesenjangan gender tersebut, tetap atau justru memperlebar kesenjangan tersebut ?
d) Apakah akar permasalahannya? Bagaimana mengatasinya ?

*TAHAP II : Formulasi Kebijakan Responsif Gender*

Tahap kedua ini terbagi menjadi 2 (dua) langkah, yaitu:

***Langkah 5 : Rumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang baru yang responsif gender***

Pada langkah kelima ini para perencana perlu merumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis gender yang dilakukan pada Langkah 1-4, sehingga menghasilkan kebijakan/ program/proyek/ kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Beberapa pertanyaan berikut diharapkan dapat membantu mengarahkan perumusan kembali kebijakari/progran/proyek/ kegiatan pembagunan agar responsif gender.

a) Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada?
b) Bagaimana pemerintah dapat memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender tersebut?
c) Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut ?
d) Alternatif kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan apa yang harus dikembangkan untuk memperkecil/ menghilangkan kesenjangan gender dan masalah-masalah gender yang telah diuraikan pada Langkah 3 dan Langkah 4 di atas ?
e) Rumusan tujuan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang bagaimana yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender pada kelompok sasaran?

***Langkah 6 : Identifikasi indikator gender (gender indicator)***

Pada langkah ini para perencana perlu mengidentifikasi indikator gender dari setiap kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan pada Langkah 5. Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu mengarahkan, seperti:

a) Indikator kuantitatif dan/atau kualitatif apa saja yang dapat diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender?.
b) Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan sudah berkurang, tetap, atau bahkan melebar ?
c) Apa ukuran keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender?.

*Tahap III : Rencana Aksi yang Responsif Gender*

Dengan merujuk hasil pada Tahap II di atas, pada tahap ketiga ini dilakukan 2 (dua) langkah, yaitu:

*Langkah 7 : Penyusunan rencana aksi*

Berdasarkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pemba-ngunan yang responsif gender perlu disusun rencana aksi yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan kesen-jangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun harus sesuai dengan tujuan kebijakan kesetaraan dan keadilan gender yang telah diidentifikasi pada Langkah 5 di atas.

*Langkah 8 : Identifikasi sasaran-sasaran (kuantitatif dan atau kualitatitif untuk setiap rencana aksi*

Sasaran-sasaran apa (kuantitatif dan/atau kualitatif yang perlu dirumuskan untuk setiap rencana aksi yang telah disusun pada Langkah 7 tersebut di atas? Pastikan bahwa dengan melakukan rencana aksi tersebut, maka kesenjangan gender akan berkurang atau hilang.

## 2.3. Program-Program Pendidikan

Program-Program Pendidikan yang dikemukakan dalam PROPENAS, khususnya untuk Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah bertujuan untuk: (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat; (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah dengan kualitas yang memadai; dan (4) terselenggaranya manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school/community based management*). Adapun sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah sampai dengan akhir tahun 2004 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI dan SLTP-MTs; (2) terwujudnya organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakunkan (*accountable*), dan mendorong partisipasi masyarakat; serta (3) terwujudnya manajemen

pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di seluruh SD dan MI serta SLTP dan MTs.

Khusus dalam Program Pendidikan Menengah yang mencakup Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA), pembinaannya ditujukan untuk : (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK, dan MA bagi seluruh masyarakat; (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia; (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik; (6) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat; (7) meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan; (8) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan, dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan menengah sampai dengan akhir tahun 2004 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK, dan MA; (2) meningkatnya daya tampung termasuk untuk lulusan SLTP dan MTs sebagai hasil penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak 5,6 juta siswa; (3) mewujudkan organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terukur (*accountable*), serta mendorong partisipasi masyarakat; serta (4) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di seluruh sekolah.

Khusus pada Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah, tujuan pembinaannya adalah untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan

keterampilan, potensi pribadi dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, program PLS diarahkan pada pemberian pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya. Adapun sasaran program PLS adalah penduduk atau warga belajar yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal yang meliputi : (1) penduduk yang masih buta aksara latin, angka, dan bahasa Indonesia; (2) warga belajar yang belum menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; dan (3) pemberdayaan tempat/sanggar pusat-pusat kegiatan pembelajaran masyarakat.

## 2.4. **Hasil Analisis GAP dan POP Tingkat Nasional dan Propinsi**

Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan di Tingkat Nasional telah dilakukan oleh Suryadi dan Pratitis (2001). Analisis tersebut mencakup 3 isu yang terkait dengan kesenjangan gender, yaitu akses terhadap semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, mutu pendidikan serta penjurusan program studi. Beberapa hasil temuannya tersebut antara lain mencakup:

(1) Dari data Susenas 1999 diketahui semakin sedikitnya penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dibanding laki-laki. Selain itu persentase penduduk perempuan yang buta huruf berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat 1998 adalah sebesar 14,46%, juga jauh lebih tinggi dari penduduk laki-laki yang mencapai angka 6,6%. Presentase penduduk perempuan yang melek huruf terus meningkat melek huruf terus meningkat, kini mencapai 85,54 % sementara pada laki-laki sebesar 93,4% (Susenas, 1996).

(2) Kesempatan memperoleh pendidikan untuk perempuan relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dikemukakan pula bahwa dari hasil pengamatan, proses pembelajaran cenderung masih belum berwawasan gender dan memihak laki-laki *(bias toward male)*. Laki-laki cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih diuntungkan dalam keseluruhan proses pendidikan .

(3) Walaupun angka partisipasinya lebih rendah, perempuan lebih mampu bertahan dibandingkan dengan laki-laki. Angka putus sekolah siswa perempuan selalu lebih kecil, khususnya pada SMU, SMK dan PT. Siswa perempuan juga lebih banyak yang

dapat menyelesaikan sekolah sampai lulus dibandingkan dengan lawan jenisnya. Gejala-gejala tersebut menunjukan bahwa peserta didik perempuan lebih optimal dalam memanfaatkan kesempatan belajar.

(4) Dijumpainya materi buku-buku pelajaran yang membahas status dan fungsi perempuan dalam masyarakat yang bias gender, yang dijumpai pada sebagian buku-buku pelajaran (khususnya seperti IPS, PPKN, Pendidikan Jasmani, Bahasa dan sastra Indonesia, serta kesenian) yang diamati cenderung belum berwawasan gender. Temuan lainnya adalah bahwa para pengembang kurikulum dan penulis buku-buku pelajaran lebih dominan laki-laki yaitu sebesar 85 % (Gramedia, 2000).

Selanjutnya Suryadi dan Pratitis (2001) berhasil mengidentifikasikan beberapa masalah gender dalam pembangunan pendidikan, antara lain :

(1) Kesenjangan gender yang paling menononjol terjadi di SMK dan PT, tetapi lebih seimbang pada SD, SLTP dan SMU. Kecenderungannya adalah bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan makin lebar kesenjangan gendernya. Kesenjangan ini secara umum dipengaruhi oleh nilai sosial budaya patriarki yang dianut masyarakat Indonesia, mulai nilai-nilai yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan untuk perempuan (khususnya pada pendidikan dasar) sampai dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan peran berdasar jenis kelamin dalam masyarakat dalam kaitannya dengan memilih jurusan atau keahlian pendidikan.

(2) Buku pelajaran yang bias gender, khususnya yang berhasil diamati pada mata-mata pelajaran tertentu seperti PPKN, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, dan sejenisnya, akan mempertahankan kesenjangan gender dalam waktu lama. Hal ini juga akan mengakibatkan perempuan tetap dianggap sebagai warga negara yang kurang produktif.

(3) Rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan akan mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efisien. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan perempuan yang relatif lebih tinggi untuk bertahan dan menyelesaikan studi di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan lebih rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas bagi murid perempuan dibandingkan murid laki-laki, serta lebih

tingginya angka kelulusan dan angka bertahan *(retention rate)* murid perempuan dibandingkan laki-laki.

(4) Posisi perempuan yang kurang strategis dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan, mengakibatkan kesenjangan gender terlembagakan (*institutionalized*) dalam berbagai dimensi sistem pendidikan.

(5) Masih terjadinya gejala pemisahan gender (*gender segregation*) dalam pemilihan jurusan atau program studi yang berakibat kepada diskriminasi gender (*gender discrimination)* pada institusi-institusi pekerjaan dan sistem penggajian.

Dari hasil studi GAP dan POP di Propinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh PSPW Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ((Krisnayani dkk, 2003) dikemukakan bahwa kebijakan pembangunan pendidikan di Propinsi Jawa Barat secara umum telah mengakomodasi apa yang diamanatkan kebijakan pendidikan tingkat nasional, yaitu mengusahakan pencapaian target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk seluruh anak. Dikemukakan pula bahwa kebijakan dan program pembangunan pendidikan di Propinsi Jawa Barat tidak diskriminatif, tetapi belum responsif gender. Dalam hal profil gender dalam pendidikan dilaporkan masih adanya kesenjangan gender baik dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Dari tabel yang disajikan Krisnayani dkk. (2003) secara umum dapat penulis interpretasikan – karena peneliti PPSW UPI tidak melakukan analisis/interpretasi data -- adanya kecenderungan dimana semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah Angka Partisipasi Murni (APM) siswa, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam hal manajemen pendidikan, data tahun 2001 menunjukkan bahwa kecuali pada jenjang pendidikan TK dan SD, pada jenjang pendidikan menengah dijumpai dominannya laki-laki baik sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas (Krishnayani, dkk., 2003). Kondisi ini menurut Krishnayani dkk. (2003) terjadi karena 5 hal, yaitu : (1) nilai sosial budaya masyarakat yang masih dominan patriarkhi, (2) kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadikan anak perempuan termarjinalisasi baik sebagai perempuan dan sebagai orang yang miskin, (3) persepsi pemegang kebijakan tentang KKG dan PUG yang berdampak pada belum cukupnya perhatian diberikan khusus pada

pemerataan pendidikan dan keadilan berdasarkan gender, (4) stereotipi tentang imaji perempuan dan laki-laki sebagai dampak sistem patriarkhi maupun akibat penciptaan dan penguatan imaji tersebut oleh media informasi dan (5) faktor pada diri perempuan itu sendiri (kendala situasional, inkompetensi dan inferioritas).

Selanjutnya, diketahui bahwa secara umum masih ditemukan adanya kesenjangan gender berupa lebih rendahnya akses perempuan Jawa Barat terhadap Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada hampir semua jenis program, kecuali pada program Keaksaraan Fungsional dan beasiswa/magang. Namun demikian, terdapat keragaman kecenderungan dalam periode 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2001 sampai dengan 2003 (Mugniesyah, 2004). Kecenderungannya adalah bahwa kecuali pada program Keaksaraan Fungsional dan magang/beasiswa, akses perempuan terhadap program pendidikan non-formal lebih rendah dibanding laki-laki. Demikian pula halnya dalam hal manajemen pendidikan, ketua PKBM, lembaga kursus dan tutor serta Penilik Sekolah didominasi laki-laki (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,2003; Mugniesyah, 2004).

# III. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Kerangka Pemikiran

Studi Lanjutan Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Barat ini mengacu pada metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender dan *Policy Outlook and Plan Action* (POP) yang dikemukakan oleh Rosalin dkk. (2001) dan Surbakti dkk. (2001), serta pada beberapa studi terdahulu, diantaranya yang dilakukan Suryadi dan Pratitis (2001), Depdiknas (2003), Bappenas (Sardjunani, 2003), dan Badan Pusat Statistik (2003).

Dengan mengacu pada Metode GAP dan POP yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya dan Lampiran 1, pada tahap pertama akan dilakukan 4 langkah yang secara rinci diuraikan di bawah ini.

Pada langkah pertama, dilakukan analisis tujuan dan atau sasaran dari kebijakan/ program/proyek/kegiatan pendidkan yang bersumber pada dokumen kebijakan makro, meso dan mikro pembangunan bidang pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota kasus di wilayah Jawa Barat. Dokumen tersebut tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ada dalam Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) serta dokumen lain yang relevan yang tersedia antara lain pada Kantor Dinas Pendidikan dan Bappeda tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota kasus di Jawa Barat.

Khusus pada tingkat kabupaten/kota kasus dianalisis pelaksanaan kebijakan pada tingkat progam/proyek dan kegiatan, termasuk di dalamnya kebijakan penerimaan guru setelah adanya otonomi daerah. Adapun pada tingkat sekolah (mikro), akan dianalisis ada tidaknya kebijakan yang bias gender antara lain dalam hal penerimaan murid dan pemilihan jurusan/bidang ilmu, serta dalam menghadapi permasalahan yang dialami siswa/i seperti putus sekolah, kehamilan, narkoba, kemiskinan, tawuran anak dan boloh sekolah. Selain itu, juga menganalisis kebijakan sekolah yang berkenaan dengan penugasan guru – antara lain mengikuti pendidikan dan atau pelatihan – serta mekanisme pengusulan/pengangkatan kepala sekolah.

Pada langkah kedua, menyusun Data Pembuka Wawasan (*Eye Opener Data*) yang memuat data dan informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang ditujukan untuk mempelajari sejauhmana kebijakan tersebut di atas dapat mewujudkan KKG dalam pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Mengacu pada Depdiknas (2001), Data Pembuka Wawasan yang memuat situasi pembangunan pendidikan di Jawa Barat ini akan mencakup 3 aspek utama, yaitu : (1) Akses dan Pemerataan Pendidikan, (2) Mutu dan Relevansi Pendidikan, dan (3) Manajemen Pendidikan.

Dalam hal akses dan pemerataan pendidikan akan dianalisis ada tidaknya kesenjangan gender pada pendidikan formal di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan indikator-indikator berupa data sekunder hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikumpulkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya kuesioner kor dan modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Kuesioner kor dikumpulkan setiap tahun, sementara data modul dikumpulkan setiap tiga tahun sekali; masing-masing survei menggunakan unit analisis rumahtangga. Variabel-variabel yang tertuang dalam kuesioner kor dan modul pendidikan tersebut diharapkan dapat menggambarkan situasi KKG bidang pendidikan pada tingkat rumahtangga dan masyarakat.

Variabel-variabel yang diperoleh dari SUSENAS antara lain meliputi akses pendidikan, yang terdiri atas : (a) Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan formal, wilayah (kabupaten-kota), lokasi (perkotaan dan perdesaan) dan kelompok pengeluaran rumahtangga yang semuanya merupakan data terpilah menurut jenis kelamin, (b) Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur, wilayah (kabupaten-kota), lokasi (perkotaan dan perdesaan) dan kelompok pengeluaran rumahtangga yang semuanya merupakan data terpilah menurut jenis kelamin, (c) pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan (d) kemampuan baca tulis

Selain bersumber data SUSENAS, juga menggunakan data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, khususnya yang berhubungan dengan data kinerja pendidikan berbasis sekolah. Data tersebut mencakup data terpilah menurut jenis kelamin yang terdiri atas proporsi siswa -jumlah dan persen- siswa menurut jenjang pendidikan dan jurusan/keahlian, persentase siswa yang putus sekolah, siswa yang

mengulang menurut jenjang pendidikan dan kelas, lulusan siswa menurut jenjang pendidikan, alokasi beasiswa, serta distribusi siswa berprestasi pada level kelembagaan sekolah (sistem pendidikan) dilakukan dengan menggunakan data primer dan/atau sekunder berbasis sekolah, khususnya di kabupaten/kota kasus (Kabupaten Indramayu dan Kota Bekasi).

Data SUSENAS dan data berbasis sekolah tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi analisis ada tidaknya kesetaraan dan kesenjangan gender dalam pendidikan. Dengan mengacu pada Depdiknas (2003), untuk mengetahui ada tidaknya kesetaraan gender diukur dengan menghitung Indeks Paritas, sementara untuk mengukur ada tidaknya dan seberapa besar kesenjangan diukur dengan menghitung Disparitas. Indeks Paritas (*Parity Index*) diartikan sebagai rasio kinerja pendidikan penduduk perempuan terhadap kinerja pendidikan penduduk laki-laki". Selanjutnya, IP tersebut akan dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu :

1. Indeks paritas yang mencapai angka satu mengindikasikan setaranya proporsi perempuan dan laki-laki yang memperoleh akse terhadap pendidikan.
2. Indeks paritas lebih besar dari satu mengindikasikan lebih besarnya proporsi perempuan yang memperoleh akses terhadap pendidikan.
3. Indeks paritas lebih kecil dari satu mengindikasikan lebih besarnya proporsi laki-laki yang memperoleh akses pendidikan dibanding perempuan.

Adapun Disparitas pendidikan diukur dengan menghitung selisih atau beda jumlah/persen siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada masing-masing jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Rumus penghitungan APS, APK dan APM serta Indeks Paritas dan Disparitas menggunakan rumus seperti terlihat pada Lampiran 2 (Depdiknas,2003).

Kinerja dalam Pendidikan Luar Sekolah, dilihat dari persentase akses anak perempuan dan laki-laki serta perempuan dan laki-laki (dewasa) dalam Program Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Paket Kejar A, B dan C, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Beasiswa/Magang, serta program-program lingkup Kepemudaan dan Olah Raga.

Mutu dan relevansi pendidikan yang berperspektif gender antara lain dianalisis melalui : (1) keberadaan materi bahan ajar yang bias gender, (2) proporsi penulis bahan

ajar perempuan terhadap penulis laki-laki, (3) proporsi pimpinan penerbit, kususnya yang tergabung dalam IKAPI Jawa Barat. Di samping itu, juga proporsi penduduk yang bersekolah dan belajar dibimbing orangtua/wali menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin, dari data Susenas 2003). Selanjutnya, mutu pendidikan ini juga mengemukakan data hasil Ujian Akhir Nasional (UAN), khususnya kasus di SD Negeri I, Bekasi Jaya, Kota Bekasi, sementara dari Kabupaten Indramayu berupa proporsi siswa peserta UAN. Khusus analisis bahan ajar, selain mengacu pada hasil penelitian terdahulu, juga menganalisis bahan ajar terbaru berdasar Kurikulum 2004, bahan ajar muatan lokal (MULOK), khususnya Kabupaten Indramayu, untuk SD, SLTP dan SMA/SMK. Khusus untuk PLS meliputi materi bahan ajar, dan proporsi peserta didik dan penyelenggara menurut kegiatan.

Pada aspek manajemen pendidikan diukur melalui proporsi : (1) profil tenaga kependidikan pada semua jenis (formal dan PLS atau non-formal) dan jenjang pendidikan dan (2) profil penentu kebijakan/pengambil keputusan di lingkungan Dinas Kependidikan, semuanya terpilah menurut jenis kelamin.

Data Pembuka Wawasan ini menghasilkan keluaran berupa Profil Gender dalam Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota Kasus di Jawa Barat.

Pada langkah ketiga, berdasar Data Pembuka Wawasan tersebut di atas selanjutnya akan dianalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, kontrol (manajemen pendidikan), partisipasi dan manfaat (antara lain dari mutu dan relevansi pendidikan) yang diperoleh SDM laki-laki dan perempuan pada kedua jenis dan berbagai jenjang pendidikan tersebut di atas. Selanjutnya, yakni langkah keempat, akan dianalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi ada tidaknya KKG dalam pendidikan dasar, menengah dan PLS. Dengan melakukan identifikasi masalah-masalah (isu-isu gender) dalam kebijakan/program/ proyek pendidikan di Wilayah Propinsi Jawa Barat, untuk menjawab aspek-aspek apa, dimana, mengapa dan bagaimana ada tidaknya kesenjangan gender dalam pendidikan.

Berdasar pada hasil-hasil yang diperoleh dari 4 langkah tersebut di atas, akan dilakukan tahap kedua, yang meliputi : (1) Reformulasi kebijakan/program/proyek/ kegiatan pendidikan formal (dasar dan menengah) yang responsif gender untuk

memperkecil kesenjangan gender, dan (2) penetapan indikator gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang berdasar pada hasil yang diperoleh dari hasil analisis kebijakan, data pembuka wawasan, serta analisis kesenjangan gender dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penetapan indikator gender ini lebih banyak ditentukan oleh pihak Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota kasus.

Hasil dari tahap 2 di atas akan dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Aksi Pembangunan atau *Policy Outlook and Plan Action* (POP) bidang pendidikan yang responsif gender yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi Rencana Aksi Daerah dan sasaran yang ingin dicapai untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan gender dalam program pendidikan formal dan non-formal di tingkat propinsi dan kabupaten/kota kasus di Jawa Barat.

### 3.2. Pendekatan di Lapangan

***Lokasi dan Waktu Penelitian***. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas 16 kabupaten dan 8 kota . Hal ini dilakukan mengingat studi terdahulu yang dilakukan oleh Krishnayani dkk. (2003) belum mengemukakan hasil yang komprehensif dan tidak menganalisis menurut kabupaten/kota, wilayah perkotaan-perdesaan dan kelompok pendapatan. Khusus untuk studi kasus, dipilih masing-masing 1 (satu) kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kota Bekasi. Pertimbangan pemilihan lokasi dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Indramayu menunjukkan terendah, sebaliknya Kota Bekasi menunjukkan tertinggi. Penentuan ini dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara partisipatif dengan melibatkankan Kelompok Kerja PUG Pendidikan Jawa Barat. Waktu penelitian selama 6 bulan dari bulan Juni sampai November 2004.

**Metode Penelitian**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dalam menganalisis data sekunder dan data primer yang mencakup variabel-variabel dalam lingkup akses dan pemerataan pendidikan dan sebagian dari aspek mutu serta relevansi yang berkenaan dengan program pendidikan formal dan non-formal seperti telah diuraikan di atas. Di samping itu hal yang sama dilakukan pada 2 wilayah Kabupaten/kota kasus, khususnya untuk

lebih memperoleh gambaran isu-isu/masalah gender dan non gender baik pada tingkat keluarga dan sekolah yang diduga mempengaruhi sudah rendah atau masih tingginya kesenjangan gender dalam pendidikan pada kabupaten/kota kasus. Adapun pendekatan kualitatif digunakan untuk melaksanakan analisis isi dokumen yang berkenaan dengan kebijakan/program/proyek/kegiatan pendidikan formal dan non formal pada tingkat propinsi, kabupaten/kota dan unit sekolah, wawancara dan Diskusi Kelompok Terarah *(Focus Group Discussion)* serta studi pustaka.

Analisis kebijakan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam periode 4 tahun terakhir (2000-2003) yang tertuang dalam Renstrada dan Repetada serta perkembangannya, khususnya setelah adanya Inpres No. 9 Tahun 2000. Seperti telah dikemukakan di atas, untuk ini termasuk di dalamnya kebijakan penerimaan guru setelah adanya otonomi daerah. Adapun pada tingkat sekolah, akan dianalisis ada tidaknya kebijakan yang bias gender antara lain dalam hal penerimaan murid dan pemilihan jurusan/bidang ilmu, serta dalam menghadapi permasalahan yang dialami siswa/i seperti putus sekolah, kehamilan, narkoba, kemiskinan, tawuran anak dan boloh sekolah. Selain itu, juga menganalisis kebijakan yang berkenaan dengan penugasan guru – antara lain mengikuti pendidikan dan atau pelatihan – serta mekanisme pengusulan/pengangkatan kepala sekolah. Adapun studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendukung terhadap hasil analisis kesenjangan gender dalam pendididikan di Jawa Barat.

***Penentuan Responden dan Informan***. Penentuan responden dan informan dilakukan secara purposif, mencakup pejabat dan penyelenggara/pelaksana serta *stakeholders*, khususnya yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan/program/ proyek serta pelaksana pendidikan formal yang representatif Propinsi dan Kabupaten/Kota kasus.

***Jenis dan Sumber Data***. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup data dan informasi sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya yang berkenaan dengan Kor dan modul pendidikan dari SUSENAS dalam periode tahun 2000- 2003. Informasi berupa dokumen kebijakan/program/proyek (visi, misi, tujuan dan sasaran) berkenaan pendidikan formal dan non-formal pada tingkat propinsi, kabupaten/kota diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Bappeda tingkat

Propinsi, Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang relevan. Data primer mencakup semua indikator-indikator atau variabel-variabel yang telah dikemukakan pada kerangka pemikiran, juga akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi, Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang terpercaya.

### 3.3. Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder akan dientri dan kemudian diolah ke dalam tabulasi, baik itu tabel frekuensi maupun silang yang menghubungkan variabel-variabel yang diteliti untuk menjawab tujuan dalam studi ini. Pengolahan data dilaksanakan dengan menggunakan Program Micro Excell. Hasil pengolahan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, histogram dan *scattered block diagram* untuk kemudian dianalisis dengan mengacu kepada konsep-konsep, teori dan pendekatan gender, untuk mendukung hasil analisis kuantitatif (Profil Gender dalam Pendidikan) hasil GAP serta untuk mendukung POP.

# IV. KEADAAN UMUM PROPINSI JAWA BARAT

Dalam bab ini dikemukakan secara singkat mengenai kondisi umum Propinsi Jawa Barat, khususnya meliputi kondisi geografis, demografi dan profil sumberdaya manusia yang mencerminkan hasil-hasil pembangunan manusia di propinsi ini. Yang terakhir ini dinilai penting diketahui, karena sebagaimana diketahui, *Human Development Report* atau HDR (Laporan Pembangunan Manusia atau LPM) yang pertama, pada tahun 1990, mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu memiliki banyak pilihan, diantaranya menyangkut pendidikan, pendapatan, kesehatan, lingkungan fisik dan kebebasan untuk bertindak (BPS, Bappenas dan UNDP, 2001) Selanjutnya, LPM merancang ukuran kemajuan sosial ekonomi, termasuk bidang pendidikan, yang sampai saat ini dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Sehubungan dengan itu, dalam bab ini akan dikemukakan kondisi sumberdaya manusia di Propinsi Jawa Barat secara singkat yang tercermin dari 4 indikator tersebut, yang bersumber dari BPS, Bappenas dan UNDP (2001) dan BPS, Bappenas dan UNDP (2004) .

## 4.1. Kondisi Geografis

Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak diantara $5{,}50^0$ – $7{,}50^0$ Lintang Selatan dan $104{,}48^0$ – $108{,}48^0$ Bujur Timur. Propinsi ini memiliki wilayah seluas 44 ribu $km^2$ atau sekitar 32,8 persen dari luas Pulau Jawa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, di sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, sementara di sebelah Selatan dan Barat berturut-turut berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Propinsi Banten (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2002).

Sebagaimana diketahui, sebelum adanya UU RI no. 23 Tahun 2000, wilayah Jawa Barat meliputi wilayah yang kini menjadi Propinsi Banten. Setelah ditetapkannya undang-undang tersebut, wilayah propinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 16 kabupaten dan 6 kota. Selanjutnya pada tahun 2002 dilakukan kembali pemekaran dengan dibentuknya

Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, sehingga dewasa ini terdapat 25 kabupaten, yang terdiri atas 16 kabupaten dan 9 kota . Dari 22 kabupaten/kota yang ada di propinsi ini, yang jaraknya terjauh dari ibukota propinsi, Bandung, adalah kabupaten Indramayu, yang berjarak sekitar 184 km. (Jawa Barat Dalam Angka 2002).

Berdasar hasil Sensus Pertanian 2003, khususnya data dalam Statistik Potensi Desa Propinsi Jawa Barat, di propinsi ini terdapat 5758 desa dan/atau kelurahan definitif. Jumlah desa tertinggi ada di Kabupaten Bandung, yakni sebanyak 436 desa, sementara terendah ditemukan di Kota Cimahi, yakni sebanyak 15 kelurahan. Adapun di kabupaten/kota kasus penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Indramayu terdapat 310 desa/kelurahan, sementara di Kota Bekasi sebanyak 52 desa/kelurahan. Selanjutnya, dari total desa di propinsi ini, sebanyak 3838 desa bertopografi datar, dan sisanya tergolong berbukit. Berdasar letak geografisnya, sebagian besar desa yakni 1650 desa tergolong desa dengan letak geografis lereng/punggung bukit, diikuti oleh desa pantai, 223 desa, dan sisanya, yakni 140 desa tergolong desa bertopografi lembah atau darah aliran sungai atau DAS. Sebagian besar desa pantai berada di Kabupaten Indramayu, yakni 41 desa, adapun di Kota Bekasi, dari sebanyak 52 kabupaten/kota hampir seluruhnya tergolong desa datar (BPS,2003)

## 4.2 Demografi

### 4.2.1. Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk Jawa Barat berdasar Sensus Penduduk Tahun 2000 sebanyak 35.723.473 orang, dengan komposisi 17.675.424 orang (49,48 persen) perempuan dan 18.048. 049 orang (50,52 persen) laki-laki. Berdasar lokasinya, dari total penduduk di propinsi ini terdapat 49,69 persen yang tinggal di pedesaan dan sisanya, yaitu 50,31 persen tinggal di perkotaan. Berdasar jenis kelaminnya, di perdesaan terdapat 49,47 persen perempuan dan 50,53 persen laki-laki; sementara di perkotaan terdapat 49,49 persen perempuan dan 50,51 persen laki-laki. Dengan perkataan lain, penduduk perempuan sedikit lebih rendah (0,5 persen) dibanding laki-laki. Data Susenas tahun 2002 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2002 tercatat sebanyak 36.914.883 orang, terdiri atas 18.206.556 perempuan (49,32 persen), dan sisanya 18.708.327 orang laki-laki (50,68 persen). Data Susenas pada tahun 2003 menunjukkan

bahwa jumlah penduduk meningkat lagi menjadi 37.980.422 orang, dimana perempuan meningkat sedikit dibanding tahun 2002, yakni sebanyak 49,34 persen. Dengan perkataan lain, sekalipun ada peningkatan dalam hal jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dalam periode 2000-2003, namun terdapat kecenderungan sedikit menurunnya persentase penduduk perempuan di Jawa Barat.

### 4.2.2. Struktur Umur Penduduk Menurut Kabupaten.

Pada Lampiran 3 dikemukakan data struktur umur penduduk di Jawa Barat menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin. Berdasar kedua lampiran tersebut terlihat bahwa secara umum, pola struktur umur penduduk pada kedua SUSENAS tersebut serupa, yakni persentase tertinggi penduduk laki-laki dan perempuan ada pada kelompok umur 25 tahun ke atas, diikuti oleh mereka pada kelompok umur kategori 0-6 tahun dan wajib belajar (7-12 tahun), 16-18 tahun, dan yang terendah pada kategori 13-15 tahun. Berdasar jenis kelaminnya, kecuali pada kelompok umur 19-24 tahun, pada kelompok umur selainnya persentase penduduk perempuan sedikit lebih rendah dari laki-laki, baik pada tahun 2002 maupun 2003. Pada kelompok umur 19-24 tahun terdapat penduduk perempuan berturut-turut 5,33 % pada tahun 2002 dan 5,25 % pada tahun 2003. Selanjutnya, penduduk laki-laki pada kelompok umur tersebut, meningkat sedikit, dari 4,99 % tahun ke 5,10 %; sebaliknya perempuan, menurun dari 5,22 % ke 5,25 % berturut-turut pada 2002 dan 2003.

### 4.2.3. Penduduk Berumur 3 – 6 Tahun Yang Bersekolah

Pada Tabel 4.1. disajikan data penduduk usia dini yang telah mengikuti pendiddikan Pra-Sekolah di Jawa Barat.

Tabel . Proporsi Penduduk Berumur 3-6 Tahun Yang Mengikuti Pendidikan Pra-Sekolah di Jawa Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003

| Kelompok Umur | Perkotaan | | Perdesaan | | Total Penduduk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (tahun) | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Perkotaan | Perdesaan |
| | | | | | | |
| 3-4 | 17,07 | 17,75 | 8,05 | 7,74 | 745 800 | 811500 |
| 5-6 | 35,01 | 35,27 | 15,97 | 16,19 | 760500 | 782400 |

Sumber : BPS (2003): Statistik Pendidikan Susenas 2003

Berdasar Tabel 4.1 diketahui bahwa penduduk baik pada kelompok umur 3-4 tahun dan 5-6 tahun di perkotaan yang telah mengikuti pendidikan Pra-Sekolah menunjukkan persentase yang lebih tinggi – dua kali lipatnya - dibanding perdesaan, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini diduga berhubungan dengan relatif lebih banyaknya fasilitas pendidikan pra sekolah yang ada di perkotaan dibanding perdesaan. Disamping itu, budaya untuk menyekolahkan anak pada dini usia, khususnya kelompok umur 2-4 tahun juga belum menjadi bagian kehidupan masyarakat pedesaan, oleh karena pada kelompok umur tersebut mayoritas anak masih di bawah pengasuhan orangtua atau kerabatnya.

Selanjutnya, pada Tabel 4.2. diketahui bahwa pada kelompok umur 5-6 tahun dijumpai anak-anak yang telah bersekolah di SD. Kecenderungannya seperti pada mereka yang bersekolah pada Pra-Sekolah, yakni di perkotaan menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibanding perdesaan, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, persentase anak perempuan di pedesaan menunjukkan lebih tinggi dibanding anak laki-laki, atau lebih tinggi sekiar 3.5 persen, sebaliknya di perkotaan.

Tabel . 4..2 Proporsi Penduduk Berumur 5-6 Tahun Yang Bersekolah di Sekolah Dasar di Jawa Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003

| Kelompok Umur | Perkotaan | | Perdesaan | |
|---|---|---|---|---|
| (tahun) | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Jawa Barat | 25,46 | 23,11 | 10,54 | 14,12 |

Sumber : BPS (2003): Statistik Pendidikan Susenas 2003

### 4.2.4. Angkatan Kerja

Seperti diketahui, profil penduduk dan tenaga kerja yang ditampilkan dalam Jawa Barat Dalam Angka tidak disajikan terpilah menurut jenis kelamin, kecuali untuk jumlah penduduk dan proyeksi penduduk Jawa Barat menurut kabupaten/kota. Itu sebabnya untuk mengetahui ini, digunakan sumber dari Sensus Penduduk Tahun 2000.

Hasil Sensus Penduduk Jawa Barat 2000 mengemukakan adanya 15 334 358 orang penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu. Berdasar status bekerjanya menunjukkan pola yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, seperti terlihat pada Lampiran 4. Diketahui bahwa persentase tertinggi perempuan

bekerja dengan status pekerja keluarga (14,20 %) dan sebagai buruh/karyawan (11,55%), diikuti oleh mereka yang bekerja sendiri (7,64 %). Adapun pada laki-laki, persentase tertinggi yaitu 27,87 % bekerja sebagai buruh/karyawan, diikuti mereka yang bekerja berusaha sendiri (21 %) dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap (10,41 %). Dengan demikian, angkatan kerja perempuan di Jawa Barat sebagian besar bekerja di sektor informal. Selanjutnya, jika dilihat menurut kabupaten/kota diketahui adanya keragaman pola. Persentase tertinggi perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga ditemukan di Kabupaten Cianjur dan terendah di Kota Bandung. Adapun mereka yang bekerja sebagai buruh ditemukan di Kota Bandung (22.29 %). Persentase tertinggi laki-laki yang bekerja sebagai karyawan juga dijumpai di Kota Bandung. Hal ini karena industri dan peluabng bekerja di ibukota propinsi jauh lebih besar dibanding kabupaten./kota lainnya. Persentase tertinggi perempuan yang bekerja dengan berusaha sendiri dijumpai di Kabupaten Cirebon, sementara pada laki-lakinya dijumpai di Kabupaten Sukabumi. Persentase tertinggi perempuan yang bekerja dengan berusaha dengan dibantu buruh tetap dijumpai di Ciamis (4.83 %), sementara laki-lakinya ditemukan di Kabupaten Majalengka (21 %).

### 4.3. Profil Sumberdaya Manusia

#### 4.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM didefinisikan sebagai adalah indeks komposit yang merupakan rata-rata dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu : lamanya hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf (persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih); dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan *purchasing power parity*/parita daya beli- dalam rupiah). Selanjutnya, dibedakan ke dalam 3 kategori : rendah (0-49), menengah (50-79) dan tinggi (80 lebih).

Pada Lampiran 5 dapat dilihat bahwa IPM Jawa Barat menurun dari 68,2 pada tahun 1996 kemudian oleh karena krisis ekonomi menurun menjadi 64.6 pada tahun

1999 dan mulai meningkat menjadi 65,8 pada tahun 2002 Dengan demikian, IPM Jawa Barat masih dalam kategori menengah. Dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia, IPM Jawa Barat ini ada pada rangking 14, 15, dan 17 berturut-turut pada tahun 1996, 1999 dan 2002. Nilai IPM Indonesia, berturut-turut sebesar 67,7 pada 1996, 64,3 pada 1999 dan 65,8 pada 2002.

Kecenderungan menurunnya IPM di propinsi ini dari tahun 1996 ke 1999 dan meningkat lagi pada tahun 2002 juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Meskipun di semua kabupaten dan kota di propinsi ini IPMnya tergolong menengah, namun dapat dilihat pergeseran nilai IPM tertinggi, yakni dari Kota Bandung berturut-turut pada tahun 1996 dan 1999 ke Kota Depok pada tahun 2002. Sementara posisi IPM terendah pada ketiga tahun tersebut masih diduduki oleh Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, berdasar rangking IPM di Jawa Barat, rangking teratas ada pada Kota Bandung pada tahun 1996 dan 1999, sementara pada tahun 2002 di Kota Depok. Adapun rangking terendah di propinsi ini masih di Kabupaten Indramayu, untuk ketiga tahun tersebut. Selanjutnya, mengacu pada BPS, Bappenas, UNDP (2001), jika pada kelompok menengah ini dibagi lagi ke dalam "menengah atas" (66.0 – 79,99) dan 'menengah bawah' (50.0 – 65.99), maka dari 22 kabupaten/kota, pada kondisi tahun 2002 hanya ada 4 kabupaten (Bandung, Tasikmalaya, Sumedang dab Bekasi) dan semua kota di Jawa Barat yang tergolong IPM 'menengah atas', selainnya tergolong 'menengah bawah'.

Untuk melihat rangking pada peta Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu adanya perkembangan jumlah kabupaten/kota berubah dari 291 pada tahun 1996 ke 294 pada tahun 1999 dan melonjak menjadi 341 pada tahun 2002. Berdasar jumlah kabupaten/kota tersebut, pada tahun 1996 hanya Kota Bandung yang menduduki rangking persis sama dengan Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 1999 tidak satupun yang menyamai rangking Jawa Barat, sementara pada tahun 2002, ternyata IPM Kota Depok melebihi rangking yang dicapai propinsi Jawa Barat.

Menurut Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2001, Visi Jawa Barat Tahun 2020 yang menargetkan capaian IPM sebesar 80 pada tahun 2010 dinilai sebagai target yang cukup ambisius, mengingat IPM Jawa Barat berada pada rangking 14 dan 15 berturut-turut pada tahun 1996 dan 1999 (BPS, BAPPENAS dan UNDP, 2001). Dikemukakan bahwa jika Jawa Barat mampu mempertahankan perkembangan seperti

bahwa jumlah penduduk meningkat lagi menjadi 37.980.422 orang, dimana perempuan meningkat sedikit dibanding tahun 2002, yakni sebanyak 49,34 persen. Dengan perkataan lain, sekalipun ada peningkatan dalam hal jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dalam periode 2000-2003, namun terdapat kecenderungan sedikit menurunnya persentase penduduk perempuan di Jawa Barat.

### 4.2.2. Struktur Umur Penduduk Menurut Kabupaten.

Pada Lampiran 3 dikemukakan data struktur umur penduduk di Jawa Barat menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin. Berdasar kedua lampiran tersebut terlihat bahwa secara umum, pola struktur umur penduduk pada kedua SUSENAS tersebut serupa, yakni persentase tertinggi penduduk laki-laki dan perempuan ada pada kelompok umur 25 tahun ke atas, diikuti oleh mereka pada kelompok umur kategori 0-6 tahun dan wajib belajar (7-12 tahun), 16-18 tahun, dan yang terendah pada kategori 13-15 tahun. Berdasar jenis kelaminnya, kecuali pada kelompok umur 19-24 tahun, pada kelompok umur selainnya persentase penduduk perempuan sedikit lebih rendah dari laki-laki, baik pada tahun 2002 maupun 2003. Pada kelompok umur 19-24 tahun terdapat penduduk perempuan berturut-turut 5,33 % pada tahun 2002 dan 5,25 % pada tahun 2003. Selanjutnya, penduduk laki-laki pada kelompok umur tersebut, meningkat sedikit, dari 4,99 % tahun ke 5,10 %; sebaliknya perempuan, menurun dari 5,22 % ke 5,25 % berturut-turut pada 2002 dan 2003.

### 4.2.3. Penduduk Berumur 3 – 6 Tahun Yang Bersekolah

Pada Tabel 4.1. disajikan data penduduk usia dini yang telah mengikuti pendiddikan Pra-Sekolah di Jawa Barat.

Tabel . Proporsi Penduduk Berumur 3-6 Tahun Yang Mengikuti Pendidikan Pra-Sekolah di Jawa Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003

| Kelompok Umur | Perkotaan | | Perdesaan | | Total Penduduk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (tahun) | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Perkotaan | Perdesaan |
| | | | | | | |
| 3-4 | 17,07 | 17,75 | 8,05 | 7,74 | 745 800 | 811500 |
| 5-6 | 35,01 | 35,27 | 15,97 | 16,19 | 760500 | 782400 |

Sumber : BPS (2003): Statistik Pendidikan Susenas 2003

Berdasar Tabel 4.1 diketahui bahwa penduduk baik pada kelompok umur 3-4 tahun dan 5-6 tahun di perkotaan yang telah mengikuti pendidikan Pra-Sekolah menunjukkan persentase yang lebih tinggi – dua kali lipatnya - dibanding perdesaan, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini diduga berhubungan dengan relatif lebih banyaknya fasilitas pendidikan pra sekolah yang ada di perkotaan dibanding perdesaan. Disamping itu, budaya untuk menyekolahkan anak pada dini usia, khususnya kelompok umur 2-4 tahun juga belum menjadi bagian kehidupan masyarakat pedesaan, oleh karena pada kelompok umur tersebut mayoritas anak masih di bawah pengasuhan orangtua atau kerabatnya.

Selanjutnya, pada Tabel 4.2. diketahui bahwa pada kelompok umur 5-6 tahun dijumpai anak-anak yang telah bersekolah di SD. Kecenderungannya seperti pada mereka yang bersekolah pada Pra-Sekolah, yakni di perkotaan menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibanding perdesaan, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, persentase anak perempuan di pedesaan menunjukkan lebih tinggi dibanding anak laki-laki, atau lebih tinggi sekiar 3.5 persen, sebaliknya di perkotaan.

Tabel . 4..2 Proporsi Penduduk Berumur 5-6 Tahun Yang Bersekolah di Sekolah Dasar di Jawa Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003

| Kelompok Umur | Perkotaan | | Perdesaan | |
|---|---|---|---|---|
| (tahun) | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Jawa Barat | 25,46 | 23,11 | 10,54 | 14,12 |

Sumber : BPS (2003): Statistik Pendidikan Susenas 2003

### 4.2.4. Angkatan Kerja

Seperti diketahui, profil penduduk dan tenaga kerja yang ditampilkan dalam Jawa Barat Dalam Angka tidak disajikan terpilah menurut jenis kelamin, kecuali untuk jumlah penduduk dan proyeksi penduduk Jawa Barat menurut kabupaten/kota. Itu sebabnya untuk mengetahui ini, digunakan sumber dari Sensus Penduduk Tahun 2000.

Hasil Sensus Penduduk Jawa Barat 2000 mengemukakan adanya 15 334 358 orang penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu. Berdasar status bekerjanya menunjukkan pola yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, seperti terlihat pada Lampiran 4. Diketahui bahwa persentase tertinggi perempuan

bekerja dengan status pekerja keluarga (14,20 %) dan sebagai buruh/karyawan (11,55%), diikuti oleh mereka yang bekerja sendiri (7,64 %). Adapun pada laki-laki, persentase tertinggi yaitu 27,87 % bekerja sebagai buruh/karyawan, diikuti mereka yang bekerja berusaha sendiri (21 %) dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap (10,41 %). Dengan demikian, angkatan kerja perempuan di Jawa Barat sebagian besar bekerja di sektor informal. Selanjutnya, jika dilihat menurut kabupaten/kota diketahui adanya keragaman pola. Persentase tertinggi perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga ditemukan di Kabupaten Cianjur dan terendah di Kota Bandung. Adapun mereka yang bekerja sebagai buruh ditemukan di Kota Bandung (22.29 %). Persentase tertinggi laki-laki yang bekerja sebagai karyawan juga dijumpai di Kota Bandung. Hal ini karena industri dan peluabng bekerja di ibukota propinsi jauh lebih besar dibanding kabupaten./kota lainnya. Persentase tertinggi perempuan yang bekerja dengan berusaha sendiri dijumpai di Kabupaten Cirebon, sementara pada laki-lakinya dijumpai di Kabupaten Sukabumi. Persentase tertinggi perempuan yang bekerja dengan berusaha dengan dibantu buruh tetap dijumpai di Ciamis (4.83 %), sementara laki-lakinya ditemukan di Kabupaten Majalengka (21 %).

### 4.3. Profil Sumberdaya Manusia

#### 4.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM didefinisikan sebagai adalah indeks komposit yang merupakan rata-rata dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu : lamanya hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf (persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih); dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan *purchasing power parity*/parita daya beli- dalam rupiah). Selanjutnya, dibedakan ke dalam 3 kategori : rendah (0-49), menengah (50-79) dan tinggi (80 lebih).

Pada Lampiran 5 dapat dilihat bahwa IPM Jawa Barat menurun dari 68,2 pada tahun 1996 kemudian oleh karena krisis ekonomi menurun menjadi 64.6 pada tahun

1999 dan mulai meningkat menjadi 65,8 pada tahun 2002 Dengan demikian, IPM Jawa Barat masih dalam kategori menengah. Dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia, IPM Jawa Barat ini ada pada rangking 14, 15, dan 17 berturut-turut pada tahun 1996, 1999 dan 2002. Nilai IPM Indonesia, berturut-turut sebesar 67,7 pada 1996, 64,3 pada 1999 dan 65,8 pada 2002.

Kecenderungan menurunnya IPM di propinsi ini dari tahun 1996 ke 1999 dan meningkat lagi pada tahun 2002 juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Meskipun di semua kabupaten dan kota di propinsi ini IPMnya tergolong menengah, namun dapat dilihat pergeseran nilai IPM tertinggi, yakni dari Kota Bandung berturut-turut pada tahun 1996 dan 1999 ke Kota Depok pada tahun 2002. Sementara posisi IPM terendah pada ketiga tahun tersebut masih diduduki oleh Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, berdasar rangking IPM di Jawa Barat, rangking teratas ada pada Kota Bandung pada tahun 1996 dan 1999, sementara pada tahun 2002 di Kota Depok. Adapun rangking terendah di propinsi ini masih di Kabupaten Indramayu, untuk ketiga tahun tersebut. Selanjutnya, mengacu pada BPS, Bappenas, UNDP (2001), jika pada kelompok menengah ini dibagi lagi ke dalam "menengah atas" (66.0 – 79,99) dan 'menengah bawah' (50.0 – 65.99), maka dari 22 kabupaten/kota, pada kondisi tahun 2002 hanya ada 4 kabupaten (Bandung, Tasikmalaya, Sumedang dab Bekasi) dan semua kota di Jawa Barat yang tergolong IPM 'menengah atas', selainnya tergolong 'menengah bawah'.

Untuk melihat rangking pada peta Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu adanya perkembangan jumlah kabupaten/kota berubah dari 291 pada tahun 1996 ke 294 pada tahun 1999 dan melonjak menjadi 341 pada tahun 2002. Berdasar jumlah kabupaten/kota tersebut, pada tahun 1996 hanya Kota Bandung yang menduduki rangking persis sama dengan Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 1999 tidak satupun yang menyamai rangking Jawa Barat, sementara pada tahun 2002, ternyata IPM Kota Depok melebihi rangking yang dicapai propinsi Jawa Barat.

Menurut Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2001, Visi Jawa Barat Tahun 2020 yang menargetkan capaian IPM sebesar 80 pada tahun 2010 dinilai sebagai target yang cukup ambisius, mengingat IPM Jawa Barat berada pada rangking 14 dan 15 berturut-turut pada tahun 1996 dan 1999 (BPS, BAPPENAS dan UNDP, 2001). Dikemukakan bahwa jika Jawa Barat mampu mempertahankan perkembangan seperti

tahun-tahun sebelumnya, propinsi ini baru akan bebas buta huruf dalam 10 tahun (diperkirakan tahun 2009), mencapai target pendidikan dasar 9 tahun dalam 13 tahun ( diperkirakan pada tahun 2012), dan menghapuskan ketimpangan gender di sekolah dasar dalam 7 tahun. Permasalahannya adalah bahwa propinsi ini terpengaruh kuat krisis ekonomi pada tahun 1997/8 yang lalu, yang menyebabkan propinsi ini posisinya menurun ke rangking 17 pada tahun 2002. Dengan demikian, capaian IPM 80 membutuhkan upaya besar yang bersifat antar sektor dan holistik.

### 4.3.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Sebagaimana diketahui, IPG adalah indeks komposit yang dibangun dari variabel-variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang memperhatikan disparitas jender. Komponen-komponen IPJ sama dengan IPM yang telah disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Khusus pada variabel standar hidup layak, diukur dari kontribusi perempuan dan laki-laki dalam penghasilan keluarga (BPS, Bappenas dan UNDP,2001). IPG ini dperkenalkan pada LPM 1995 namun datanya secara formal baru disajikan pada tahun 1999. Dengan demikian data yang tersedia mencakup tahun 1999 dan 2002. Kondisi IPG di Jawa Barat menurut kabupaten/kota disajikan pada Lampiran 6.

Berdasar lampiran tersebut diketahui bahwa capaian IPG Jawa Barat menunjukkan nilai 54,6 pada tahun 1999 dan 56,3 pada tahun 2002; keduanya menunjukkan capaian yang jauh lebih rendah dibanding capaian IPM Jawa Barat. Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan gender di propinsi ini, khususnya pada keempat variabel seperti telah dijelaskan di atas. Kondisi ini menempatkan Jawa Barat pada rangking 17 dan 21 dalam peta IPG di Indonesia. Nilai IPG Indonesia berturut-turut 55,9 pada tahun 1999 dan menjadi 59,2 pada 2002.

Berdasar pada kategorinya, pada tahun 1999 terdapat 5 kabupaten yang IPGnya tergolong rendah, yaitu Sukaburni, Majalengka, Indramayu, Karawang dan Bekasi, dan sisanya tergolong menengah bawah (50,0 – 65,99). Kondisi ini kemudian menunjukkan adanya perubahan. Data tahun 2002 menunjukkan perubahan, yakni hanya ada 4 kabupaten yang tergolong kategori rendah yaitu Garut, Cirebon, Indramayu dan Karawang. Dengan demikian, jika pada tahun 1999 terdapat 4 kabupaten di jalur

Pantura yang tergolong rendah, sekarang hanya ada 3 kabupaten saja. Kabupaten Sukabumi dan Bekasi meningkat ke dalam kategori menengah bawah, sebaliknya untuk Kabupaten Garut. Dalam peta Jawa Barat, pada kedua tahun tersebut, rangking IPG tertinggi dijumpai di Kota Bandung, sementara terendah di Kabupaten Indramayu. Adapun dalam peta Indonesia, ternyata tidak satu kabupaten/kota pun yang IPGnya berada sama dengan IPG Jawa Barat. Jika dilihat komponennya, selain pada variabel umur harapan hidup, pada 3 variabel lainnya, baik itu Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Kontribusi dalam Pendapatan menunjukkan nilai yang lebih rendah dibanding laki-laki. Kesenjangan tertinggi dijumpai pada variabel kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dimungkinkan, karena selain angkatan kerja perempuan di Jawa Barat lebih rendah dibanding laki-laki, sebagian besar dari mereka, sebagaimana dijelaskan di atas bekerja dengan status pekerja keluarga dan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain atau sektor informal yang memberi kontribusi pendapatan relatih rendah pula.

### 4.3.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Seperti diketahui, IDG adalah indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks ini menitikberatkan pada partisipasi , dengan cara mengukur ketimpangan gender dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Indikatornya adalah persentase perempuan yang menjadi tenaga profesional, teknisi, pegawai dan manajer, serta persentase penghasilan perempuan dibandingkan persentase penghasilan laki-laki. Berbeda dari IPG, IDG melihat ketimpangan kesempatan (akses) di beberapa bidang. Data IDG Jawa Barat menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran 7.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia menunjukkan peningkatan, dari 49,5 pada tahun 1999 menjadi 54,6 pada tahun 2002. Sebaliknya, IDG Jawa Barat selain berada di bawah nilai-nilai tersebut., kecenderungannya menunjukkan penurunan yakni dari 47,7 pada tahun 1999 menjadi 43,6 pada 2002. Kondisi tersebut, tampaknya disebabkan oleh menurunnya partisipasi perempuan Jawa Barat dalam parlemen, dari 7,8 % pada 1999 menjadi kurang dari separuhnya (3 %) pada 2002. Lebih lanjut, jika dilihat menurut kabupaten/kota, terdapat setidaknya 7 kabupaten dan 3 kota yang IDGnya

menurun, sisanya menunjukkan peningkatan. Kabupaten yang menurun IDGnya adalah Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bogor dan Sumedang; sementara untuk kota adalah Bogor, Sukabumi dan Cirebon. Dalam peta Jawa Barat, terjadi perubahan, yakni rangking teratas pada tahun 1999 diduduki Kabupaten Sumedang, pada tahun 2002 posisi tersebut dijumpai di Kabupaten Cianjur. Terdapat beberapa kabupaten yang menunjukkan peningkatan rangking cukup menyolok (hampir meningkat separuhnya), yaitu Kabupaten Kuningan, Purwakarta, dan Bekasi. Sebaliknya yang menurun cukup menyolok adalah : kabupaten Garut, Ciamis dan Purwakarta. Jika dilihat menurut komponennya, penyebab menurunnya IDG beragam antara lain menurunnya persen angkatan kerja dan partisipasi perempuan dalam parlemen, dan sebaliknya.

### 4.3.4. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

Indeks Kemiskinan Manusia adalah indeks komposit yang mengukur deprivasi (keterbelakangan) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan, standar hidup layak. Indeks ini disusun dari tiga indikator: penduduk yang diperkira tidak berumur panjang, ketertinggalan dalam pendidikan, dan keterbatasan terhadap pelayanan dasar. Indikator yang pertama diukur dengan peluang populasi untuk tidak bertahan hidup sampai umur 40 tahun ($P_1$). Indikator kedua diukur dengan angka buta huruf dewasa atau penduduk usia 15 tahun ke atas ($P_2$). Adapun keterbatasan akses pelayanan dasar ($P_3$) diukur dari persentase penduduk yang : tanpa akses terhadap air bersih, tidak memiliki akses ke sarana kesehatan, dan persentase balita yang tergolong dalam status gizi rendah dan menengah. Pada Lampiran 8 dikemukakan kondisi IKM di Jawa Barat menurut kabupaten/kota.

Seperti terlihat pada Lampiran 8, diketahui bahwa IKM Jawa Barat menunjukkan nilai yang tetap pada tahun 1998 dan 1999, yakni 26,9; dan selanjutnya menunjukkan perbaikan, yakni 23,0 pada tahun 2002. Dalam hal IKM ini, pada peta Indonesia, Propinsi Jawa Barat menduduki rangking 15 pada tahun 1999 dan meningkat ke posisi 11 pada tahun 2002. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, diketahui bahwa yang tertinggi IKMnya dijumpai di Kabupaten Cianjur, khususnya pada tahun 1998 dan 1999, sementara terendah Kota Cirebon. Pada tahun 2002 menunjukkan perubahan, Kota

Bandung ada pada posisi terendah dan tertingginya Kabupaten Karawang. Ini berarti ada perubahan, kecenderungan menurun dan sebaliknya. Kabupaten/kota yang menurun IKM nya (menjadi jauh lebih baik) adalah kabupaten : Bandung, Ciamis, Garut, dan Cianjur. Sebaliknya, yang meningkat secara menyolok adalah Kota Cirebon, Kabupaten Subang dan Kota Bogor.

Oleh karena IKM tidak dapat melihat kondisi gender dan kemiskinan, maka di bawah ini dikemukakan data dari Badan Pusat Statistik mengenai persentase penduduk miskin di Jawa Barat menurut status kepala rumahtangga (Tabel 4.3.).

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah-Tangga. Tahun 1999 – Tahun 2002

| Tahun | Jawa Barat | | | Indonesia | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total (000) | L | P | Total (000) |
| 1999 | 91.69 | 8.31 | 8393,4 | 91.41 | 8.59 | 47974,6 |
| 2000 | 92.22 | 7.78 | 6658,4 | 91.12 | 8.88 | 37256.9 |
| 2001 | 93.35 | 6.65 | 5532,3 | 92.06 | 7.94 | 37108.44 |
| 2002 | 93.11 | 6.89 | 4938,2 | 91.21 | 8.73 | 35680.48 |

Seperti dapat dilihat pada Tabel 4.3. persentase penduduk miskin pada rumahtangga yang dikepalai laki-laki senantiasa lebih tinggi dibanding rumahtangga yang dikepalai perempuan. Hal ini dimungkinkan karena definisi kepala rumahtangga yang digunakan BPS untuk perempuan hanyalah mereka yang berstatus janda, baik ditinggal mati atau cerai. Selanjutnya, dapat dilihat pula bahwa sebelum terjadi pemekaran propinsi persentase rumahtangga perempuan menunjukkan lebih tinggi dibanding setelah terjadi pemekaran, karena terdapat beberapa kabupaten yang relatif tertinggal kemajuannya yang kini termasuk Propinsi Banten. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di Jawa Barat dalam periode 1999 – 2002 tersebut lebih rendah dibanding rata-rata di Indonesia.

# V. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROPINSI JAWA BARAT

Kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Barat di bawah ini terutama mengacu pada pernyataan yang tercantum dalam RENSTRA Propinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000), Rencana Pembangunan Regional Makro Pendidikan Jawa Barat (Bappeda Jawa Barat, 2002) dan Materi Sosialisasi Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Tahun 2003 (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003).

Sejalan dengan meningkatnya respon Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap komitmen internasional dan nasional yang berkenaan dengan pemerataan pendidikan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, telah terdapat perkembangan yang berkenaan dengan kebijakan, strategi, program dan sasaran pembangunan pendidikan yang responsif gender sebagaimana tertuang dalam Profil Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Barat (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003), Analisis Situasi Kondisi serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) 2004-2009 (Forum PUS propinsi Jawa Barat, 2004) serta *Position Paper* Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Integrasi Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pendidikan Dengan Fokus Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat. Namun demikian, hasil perkembangan atau perubahan kebijakan, strategi, target dan prioritas sasaran tersebut dikemukakan dalam Bab. VIII tentang Reformulasi Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Barat.

Oleh karena studi ini memfokuskan pada program pendidikan 2000-2003, maka dalam Bab ini dikemukakan kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang ada dalam periode tersebut.

## 5.1. Visi dan Misi Pembangunan Propinsi Jawa Barat

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Jawa Barat telah menetapkan Visi Pembangunan Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam pernyataan di bawah ini.

Jawa Barat Dengan Iman dan Taqwa Sebagai Propinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010

Dengan Iman dan Taqwa, dimaksudkan bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasari oleh keimanan dan ketaqwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Termaju bermakna bahwa ketergantungan propinsi lain terhadap Jabar setinggi mungkin, dan ketergantungan Jabar terhadap propinsi lain sekecil mungkin. Keunggulan Jawa Barat diantaranya mencakup bidang industri strategis, lembaga litbang & pendidikan, jasa, sumber daya manusia dan sebagainya. Adapun Terdepan, merujuk pada pengertian dimana posisi Jawa Barat tidak lagi menjadi penyangga ibukota dalam arti tereksploitasinya sumberdaya Jawa Barat oleh DKI Jakarta, namun menjadi mitra sejajar yang saling menguntungkan, dan terdepan dalam menjalin kerjasama dengan ibukota negara.

Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 5 prioritas Pembangunan Jawa Barat, yaitu mencakup :

1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Jawa Barat
2) Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh
3) Memantapkan kinerja pemerintah daerah
4) Meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan
5) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah

Adapun indikator keberhasilan Visi Jawa Barat adalah pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80 pada tahun 2010. Selanjutnya, untuk mencapai Visi dan IPM 80, dirumuskan misi pembangunan Jawa Barat yang meliputi :

1. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik sehat.
2. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (*silih asih, silih asah, silih asuh, pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur, bageur, bener, pinter tur singer),*
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan terbuka.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal.
6. Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.

7. Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Berdasar misi tersebut telah disusun berbagai program dan kegiatan, yang diantaranya adalah Program Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan. Program. Selanjutnya, dinyatakan bahwa salah satu strategi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Jawa Barat adalah dengan "Peningkatan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang ditempuh melalui peningkatan kualitas, sarana dan akses dalam mendapatkan pelayanan pendidikan".

### 5.2. Visi, Misi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Visi pembangunan pendidikan Jawa Barat tertuang dalam pernyataan sebagai berikut :

Dengan Iman dan Taqwa Kualitas Pendidikan di Jawa Barat Terunggul Di Indonesia Pada Tahun 2008

Terunggul berarti kualitas pendidikan di Jawa Barat harus mencapai tertinggi (superior) dibanding propinsi-propinsi lainnya di Indonesia, termasuk propinsi-propinsi yang saat ini menjadi kompetitornya, seperti DKI Jaya, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Dengan mengacu pada misi Pembangunan Jawa Barat, Misi Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat meliputi :

1. Mengembangkan kehidupan manusia yang beriman dan bertaqwa, mandiri dan bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Jawa Barat (*silih asah, silih asih, silih asuh, cageur, bageur, bener, pinter tur singer)* dan berwawasan kebangsaan .
2. Menciptakan suasana kondusif dalam upaya mengembangkan pendidikan guna mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, trengginas, sehat jasmani dan rohani, kreatif, inovatif dan produktif serta memiliki keunggulan kompetitif.
3. Mempelopori perubahan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatkan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Meningkatkan penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan global.

Adapun Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat bidang pendidikan untuk terwujudnya visi dan misi pendidikan meliputi :

(1) Percepatan/Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jawa Barat.
(2) Rintisan "DESA CERDAS" Dalam Rangka Mendukung Program "Raksa Desa".
(3) Peningkatan Mutu Pendidikan di Jawa Barat.
(4) Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat.
(5) Peningkatan dan Pemanfaatan IPTEK Dalam Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat.
(6) Pengembangan Program-program Unggulan. Program ni meliputi pendidikan formal dan non-formal.
    a. Pendidikan formal meliputi
        - Implementasi Manajemen berbasis Sekolah (MBS)
        - Implementasi *Broad Based Education & Life Skills*
        - Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
        - Pengembangan Sekolah IPK/IPOR (SD, SMP, SMA, SMK)
        - Pengembangan Sekolah Perpustakaan
        - Pengembangan Pendidikan Inklusi
    b. Pendidikan Nonformal meliputi :
        - Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
        - Pengembangan Diklusemas/Kursus-kursus keterampilan

Adapun dalam Rencana Pembangunan Regional Makro Pendidikan Jawa Barat (Bappeda Jawa Barat, 2002) telah dituangkan secara rinci kebijakan yang akan ditempuh Propinsi Jawa Barat. Dinyatakan bahwa strategi mendasar pendidikan Jawa Barat diarahkan pada peningkatan partisipasi pendidikan, dengan kebijakan pendidikan yang meliputi :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
2) Memenuhi kekurangan guru pada berbagai jenjang pendidikan serta meningkatkan kinerja profesional guru disertai peningkatan kesejahteraannya.
3) Meninjau ulang muatan lokal pada kurikulum sekolah dasar, menengah dan tinggi

4) Mengkaji bidang pendidikan menengah dalam rangka memasuki pasar kerja.
5) Memberikan bantuan dan kemudahan fasilitas bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu yang berprestasi.
6) Meningkatkan baca tulis bagi siswa dan mahasiswa.
7) Mengembangkan sistem informasi pendidikan

### 5.3. Tujuan dan Sasaran Pendidikan

Berdasarkan misi dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, dirumuskan tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) yang akan dicapai melalui pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat antara tahun 2001-2005, yang selengkapnya disajikan pada Lampiran 9.

Dari pernyataan beragam kebijakan pendidikan Propinsi Jawa Barat tersebut di atas, khususnya yang dirumuskan pada periode tahun 2000-2004, diketahui bahwa pemerintah Propinsi Jawa Barat mempunyai komitmen terhadap pembangunan pendidikan yang diamanatkan oleh berbagai undang-undang yang relevan dengan pendidikan. Namun demikian, dari semua pernyataan kebijakan di atas, sasaran kebijakan pembangunan termasuk pembangunan pendidikan di Jawa Barat bersifat netral gender, dalam arti tidak merujuk pada salah satu kelompok, laki-laki atau perempuan. Sebagaimana sering dikemukakan oleh para penentu kebijakan dari beragam sektor, termasuk pendidikan di tingkat pusat maupun daerah, kebijakan pendidikan ditujukan kepada setiap individu anggota masyarakat, tidak membedakan laki-laki dan perempuan (tidak diskriminatif). Namun demikian, untuk melihat apakah kebijakan yang netral gender tersebut dalam pelaksanaannya telah mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kita akan melihat bukti-bukti hasil pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat, yang akan dikemukakan pada hasil analisis Langkah 2, yang akan dikemukakan pada BAB VI. Data Pembuka Wawasan ini akan memberikan fakta sejauhmana kebijakan pada periode tahun 2000 – 2004 tercermin dalam Kinerja Pendidikan di Propinsi Jawa Barat.

# VI. PROFIL GENDER DALAM PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL DI JAWA BARAT

## 6.1. Akses Terhadap Pendidikan Formal.

### 6.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) mencerminkan persentase penduduk kelompok usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan formal. Gambaran mengenai perkembangan akses penduduk laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan pada periode tahun 2000 – 2003 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Barat Tahun 2000 – 2003

| Kelompok Usia / Jenis Kelamin | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 7 - 12 tahun | | | | |
| Laki-laki | 95.3 | 95 | 96.2 | 95.9 |
| Permpuan | 95.7 | 95.7 | 97 | 96.6 |
| Total | 95.5 | 95.4 | 96.6 | 96.3 |
| Disparitas | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| Indeks Paritas | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 13 - 15 tahun | | | | |
| Laki-laki | 73 | 72 | 75.6 | 75.6 |
| Perempuan | 75.7 | 72.8 | 75.7 | 76.2 |
| Total | 74.3 | 72.4 | 75.6 | 75.9 |
| Disparitas) | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |
| Indeks Paritas | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 16 - 18 tahun | | | | |
| Laki-laki | 49.2 | 44.6 | 45.2 | 45.3 |
| Perempuan | 48 | 39.2 | 40.2 | 41.6 |
| Total | 48.7 | 42 | 42.8 | 43.5 |
| Disparitas | -1.2 | -5.4 | -5 | -3.7 |
| Indeks Paritas | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 19 - 24 tahun | | | | |
| Laki-laki | 11.4 | 12.6 | 11.6 | 11 |
| Perempuan | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 7.5 |
| Total | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 9.2 |
| Disparitas | -3.2 | -4.9 | -3.7 | -3.5 |
| Indeks Paritas | 0.72 | 0.61 | 0.68 | 0.68 |

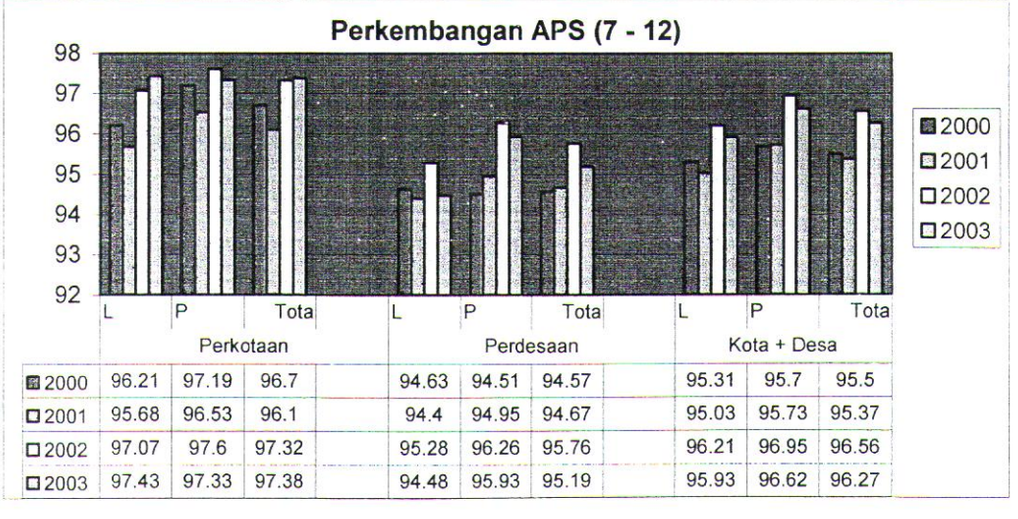
Data pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa secara umum pada periode 2000 – 2004 terdapat kecenderungan bahwa semakin meningkat kelompok umur penduduk, laki-laki dan perempuan, semakin menurun APS. Lebih lanjut, pada periode tersebut terdapat kesetaraan gender dalam hal APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13 – 15 tahun, yang ditunjukkan oleh IP sekitar 1 pada kedua kelompok umur tersebut, sementara disparitasnya juga sangat rendah.

Namun demikian, dengan meningkatnya kelompok umur, IPnya semakin rendah yang berarti ada kesenjangan akses terhadap pendidikan formal dengan semakin meningkatnya kelompok umur, dimana APS perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Gejala ini juga didukung oleh nilai disparitasnya yang bertanda negatif. Berdasar tahunnya, terdapat kecenderungan meningkatnya disparitas antara tahun 2000 ke 2001 dan kemudian sedikit menurun pada 2 tahun berikutnya. Hal ini diduga terjadi karena dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dirasakan oleh hampir semua anggota masyarakat di Jawa Barat, khususnya kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, jika dibandingkan tahun 2000, pada tahun 2003 APS pada kelompok usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun menunjukkan peningkatan, sebaliknya pada kelompok usia 16 – 18 tahun dan 19 – 24 tahun terjadi penurunan. Hal ini diduga berhubungan dengan banyaknya beasiswa yang diberikan bagi Program Wajib Belajar 9 tahun melaui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), sementara pada kedua kelompok umur selanjutnya relatif sulit melanjutkan sekolah karena adanya kecenderungan meningkatnya biaya pendidikan.

### 6.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 12 Tahun.

**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 APS anak pada kelompok usia 7-12 tahun baik perkotaan maupun di perdesaan, laki-laki dan perempuan menunjukkan peningkatan, akan tetapi APS di perkotaan lebih besar dibandingkan APS di perdesaan, seperti dapat dilihat pada Gambar 6.1.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Tota | L | P | Tota | L | P | Tota |
| 2000 | 96.21 | 97.19 | 96.7 | 94.63 | 94.51 | 94.57 | 95.31 | 95.7 | 95.5 |
| 2001 | 95.68 | 96.53 | 96.1 | 94.4 | 94.95 | 94.67 | 95.03 | 95.73 | 95.37 |
| 2002 | 97.07 | 97.6 | 97.32 | 95.28 | 96.26 | 95.76 | 96.21 | 96.95 | 96.56 |
| 2003 | 97.43 | 97.33 | 97.38 | 94.48 | 95.93 | 95.19 | 95.93 | 96.62 | 96.27 |

Gambar 6.1. Perkembangan APS kelompok usia 7 – 12 tahun di Jawa Barat.

Berdasar IP dan Disparitasnya, seperti terlihat pada Tabel 6.2. secara umum tidak ada kesenjangan antara APS anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun demikian, jika dilihat menurut lokasinya, APS anak laki-laki dan perempuan di perkotaan pada kelompok usia 7-12 tahun relatif lebih tinggi dibanding mereka yang ada di pedesaan. Di perkotaan, APS anak perempuan dan laki-laki berturut-turut sebesar 97.3 persen dan 97.4 persen, sementara di perdesaan berturut-turut sebesar 95,9 persen dan 94.5 persen. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan APS menurut wilayah. Hal ini dimungkinkan, karena sekalipun Program Wajib Belajar diberlakukan untuk kedua wilayah, namun karena relatif lebih rendahnya fasilitas dan prasarana pendidikan di pedesaan menjadikan masih adanya kesenjangan tersebut.

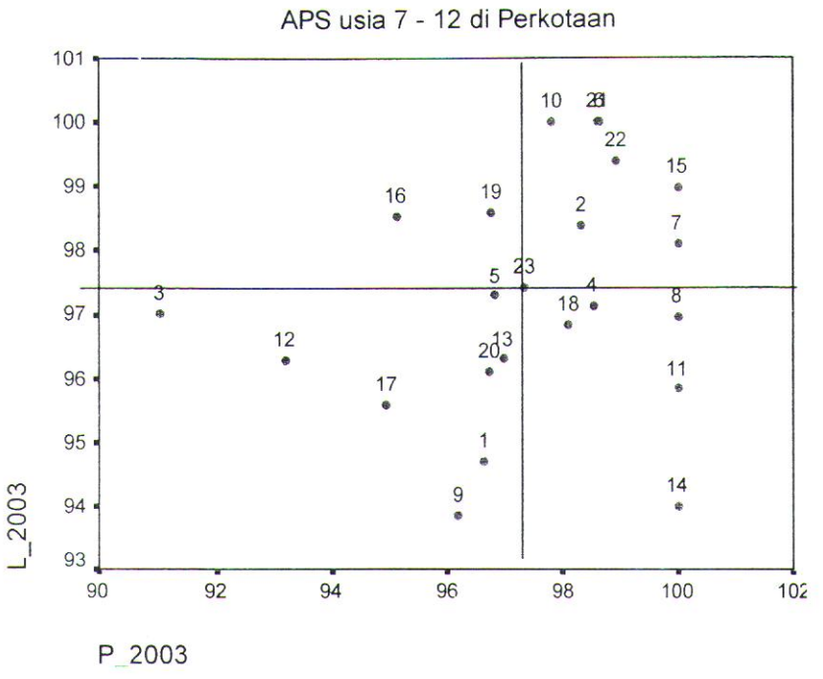
Tabel 6.2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun di Jawa Barat.

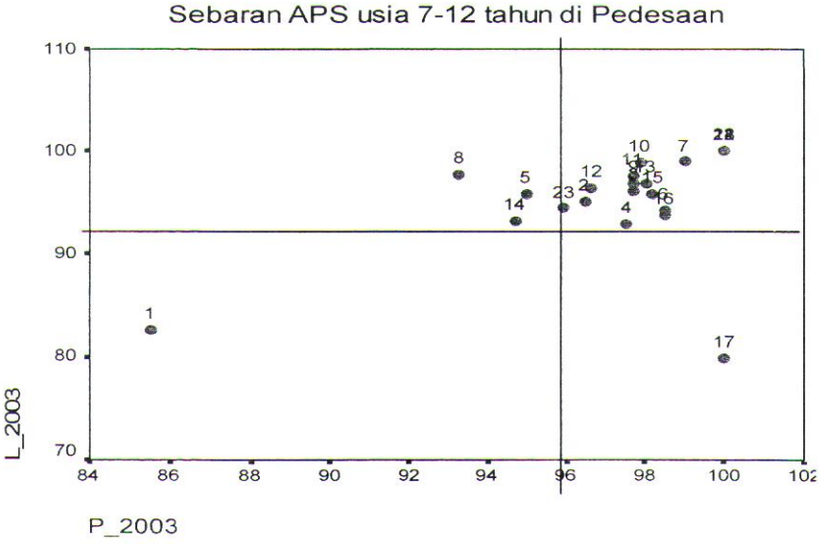
| Wilayah/Jenis Kelamin | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Perkotaan | | | | |
| Laki-laki | 96.2 | 95.7 | 97.1 | 97.4 |
| Perempuan | 97.2 | 96.5 | 97.6 | 97.3 |
| Total | 96.7 | 96.1 | 97.3 | 97.4 |
| Disparitas | 1 | 0.8 | 0.5 | -0.1 |
| Indeks Paritas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| Perdesaan | | | | |
| Laki-laki | 94.6 | 94.4 | 95.3 | 94.5 |
| Perempuan | 94.5 | 95 | 96.3 | 95.9 |
| Total | 94.6 | 94.7 | 95.8 | 95.2 |
| Disparitas | -0.1 | 0.6 | 1 | 1.4 |
| Indeks Paritas | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Perkotaan + Perdesaan | | | | |
| Laki-laki | 95.3 | 95 | 96.2 | 95.9 |
| Perempuan | 95.7 | 95.7 | 97 | 96.6 |
| Total | 95.5 | 95.4 | 96.6 | 96.3 |
| Disparitas | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| Indeks Paritas | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |

Sekalipun terdapat kesetaraan gender pada APS kelompok umur 7 -12 tahun ini pada setiap tahunnya, namun masih ada disparitas antar kedua jenis kelamin. Di perkotaan kecenderungannya menunjukkan penurunan, bahkan pada tahun 2003 disparitasnya menjadi negatif. Sebaliknya di pedesaan menunjukkan kecenderungan disparitas yang positif, yang berarti APS anak perempuan lebih tinggi dibanding anak laki-laki.

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Sekolah kelompok usia 7 – 12 tahun menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota seperti ditunjukkan Gambar 6.2 dan Lampiran 11.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

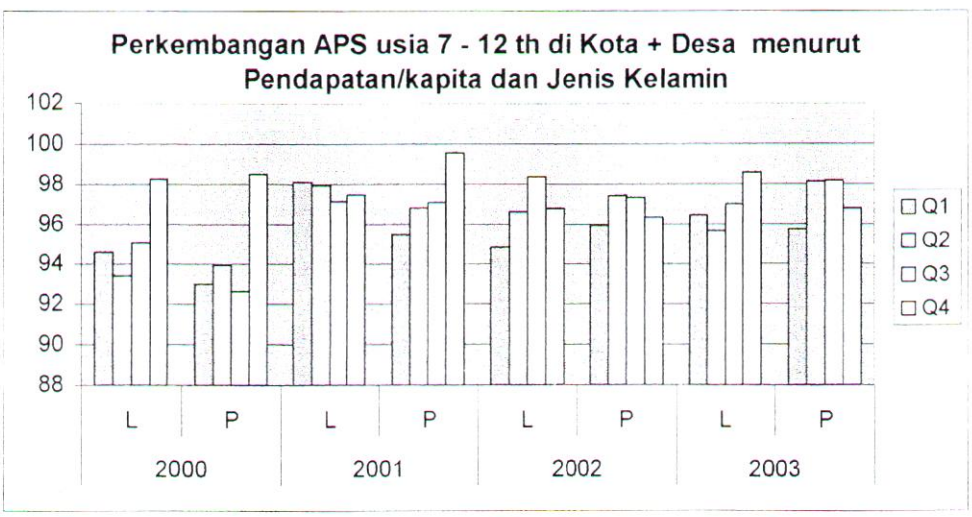
Gambar 6.2. Keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi anak kelompok usia 7-2 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota, 2003

Gambar 6.2 menunjukkan adanya keragaman APS kelompok usia 7 – 12 tahun antar wilayah Kabupaten/Kota menurut lokasinya. Bila dibandingkan dengan APS di tingkat propinsi, diketahui bahwa di wilayah Perkotaan, ditemukan adanya 13 kabupaten/kota (59,1persen) yang memiliki APS anak laki-laki di bawah APS tingkat propinsi, sedangkan pada anak perempuan didapati di 10 Kabupaten/Kota (45 persen). Kabupaten/Kota yang APS anak laki-lakinya terendah dibandingkan tingkat propinsi adalah Kabupaten Cirebon dan pada anak perempuan adalah Kabupaten Cianjur. Terdapat 8 Kabupaten/ Kota yang APS kelompok usia 7-12 tahun laki-laki dan perempuan yang lebih rendah dibandingkan tingkat Propinsi, yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur, Garut, Cirebon, Indramayu, Subang serta Kota Bogor dan Kota Cirebon.

Di wilayah perdesaan dijumpai adanya 6 kabupaten kota yang memiliki APS anak laki-laki di bawah APS tingkat propinsi, sedangkan untuk anak perempuan dijumpai di 4 kabupaten/kota. Kabupaten/Kota yang APS anak laki-lakinya terendah adalah Kota Bogor, dan untuk anak perempuan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, dan Purwakarta merupakan dua kabupaten yang APS anak laki-laki dan perempuannya lebih rendah dari rata-rata tingkat propinsi.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Seperti terlihat pada Gambar 6.3, perkembangan APS kelompok usia 7 – 12 tahun pada periode 2000 – 2003 menunjukkan keragaman menurut quartil pendapatan per kapita dan jenis kelamin.




Gambar 6.3. Perkembangan APS kelompok usia 7 – 12 tahun menurut Quartil pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Selanjutnya, Tabel 6.3. menunjukkan data APS 7-12 tahun menurut kelompok pendapatan per kapita per bulan –dikategorikan ke dalam 4 Quartil - dan jenis kelamin dalam periode 2000 – 2004. Apabila membanding antara tahun 2000 sampai 2003. APS anak perempuan menunjukkan kenaikan kecuali untuk kelompok pendapatan Quartil Keempat (Q4) (selanjutnya disebut Quartilnya saja). sedangkan untuk anak laki-laki menunjukkan kenaikan untuk semua kelompok quartil pendapatan. Yang menarik adalah bahwa pada tahun 2003, APS anak perempuan pada kelompok pendapatan Q3 (50-75 persen) lebih tinggi dibanding kelompok pengeluaran selainnya: sebaliknya pada anak laki-laki kecuali pada Q-2 dan Q-3.

Tabel 6.3. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 – 12 tahun Menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah | Quartil Pendapatan / kapita/bln | Kelompok Usia 7 – 12 Tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Perkotaan | Q1 | 97.22 | 90.63 | 96.91 | 95.45 | 97.87 | 100 | 96.29 | 93.19 |
| | Q2 | 92.36 | 97.73 | 98.50 | 96.77 | 96.84 | 98.17 | 97.14 | 98.54 |
| | Q3 | 100 | 94.78 | 97.06 | 97.30 | 98.6 | 97.62 | 96.84 | 98.11 |
| | Q4 | 97.14 | 95.69 | 97.45 | 99.54 | 96.76 | 96.36 | 98.59 | 96.76 |
| Perdesaan | Q1 | 93.94 | 93.68 | 95.31 | 93.58 | 93.61 | 97.99 | 96.12 | 97.7 |
| | Q2 | 89.32 | 91.84 | 96.97 | 96.83 | 96.1 | 95.89 | 92.98 | 97.52 |
| | Q3 | 94.94 | 94.79 | 95.31 | 97.96 | 100 | 97.42 | 97.78 | 93.26 |
| | Q4 | 99.28 | 98.25 | 95.10 | 97.37 | 98.89 | 97.96 | 97.56 | 97.68 |
| Kota+Desa | Q1 | 94.63 | 93.01 | 98.10 | 95.48 | 94.83 | 95.93 | 96.43 | 95.73 |
| | Q2 | 93.43 | 93.98 | 97.94 | 96.79 | 96.61 | 97.4 | 95.67 | 98.12 |
| | Q3 | 95.06 | 92.65 | 97.14 | 97.06 | 98.33 | 97.29 | 97 | 98.16 |
| | Q4 | 98.28 | 98.48 | 97.45 | 99.54 | 96.76 | 96.36 | 98.59 | 96.76 |

Catatan : Q1 : < Rp.103 208,-; Q2 : Rp.103.208 – Rp.159.544; Q3 : Rp.159.544 – Rp.252.860,8 dan Q5 : > Rp.252.860,8.

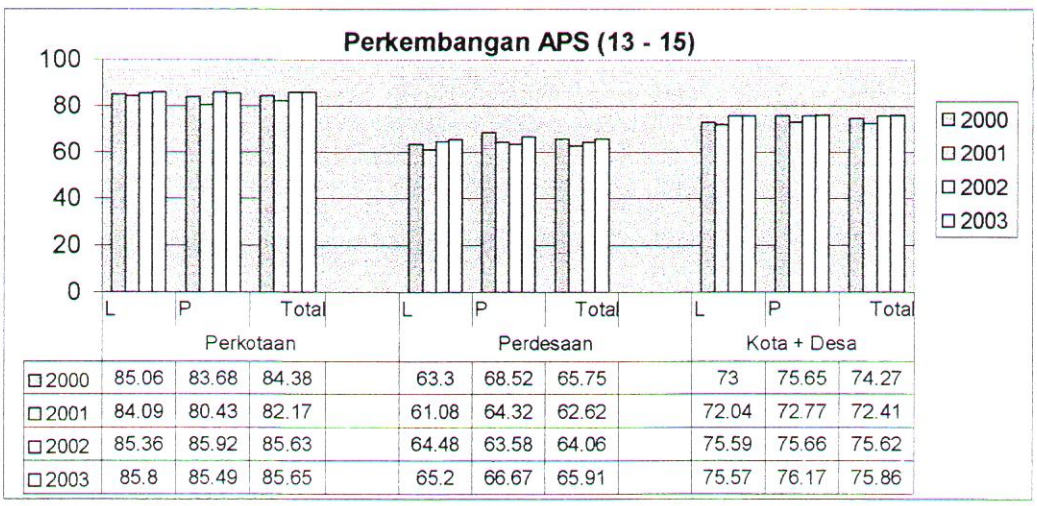
Secara umum dalam periode 4 tahun, terdapat kecenderungan APS anak laki-laki dan perempuan yang berbeda menurut wilayah dan pendapatan. Di perkotaan, pada kelompok pendapatan terendah, APS anak laki-laki fluktuatif, sementara pada anak perempuan menunjukkan kecenderungan meningkat tahun demi tahun. Pada kelompok pendapatan Q2 dan Q3, APS anak laki-laki cenderung menurun, sebaliknya pada anak perempuan. Sementara pada kelompok pengeluaran tertinggi, APS anak laki-laki cenderung meningkat secara linier, sebaliknya perempuan. Hal terakhir ini, diduga berhubungan dengan relatif masih besarnya pengaruh nilai budaya kawin relatif muda pada anak perempuan di Jawa Barat.

Apabila membanding pengaruh pendapatan (quartil pendapatan) terhadap APS menurut daerah, khususnya data pada tahun 2003; diketahui bahwa di daerah perkotaan baik pada pendapatan Quartil Kedua (Q2) dan Quartil Ketiga (Q3) APS anak perempuan lebih besar dibandingkan APS anak laki-laki, sebaliknya pada Quartil Pertama (Q1) dan Keempat (Q4). Di perdesaan, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi quartil pendapatan per kapita per bulan, APS anak perempuanpun semakin tinggi kecuali pada Quartil Ketiga (Q3). Lebih lanjut, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita (kelompok quartil), semakin tinggi APS untuk anak laki-laki, sementara untuk anak perempuan menunjukan kenaikan dari Q1 ke Q2, cenderung tetap atau tidak ada perbedaan antara Q2 dan Q3 dan menurun dari Q 3 ke Q 4.

### 6.1.1.2. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun.

#### a. Keragaman Antara Kelompok Perkotaan dan Perdesaan.

Seperti halnya pada kelompok usia 7-12 tahun, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 APS anak pada kelompok usia 13 – 15 tahun baik perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan peningkatan, dan mempunyai kecenderungan yang sama yaitu APS di perkotaan lebih besar dibandingkan APS di perdesaan, seperti dapat dilihat pada Gambar 6.4. Diketahui bahwa APS pada kelompok 13 – 15 tahun lebih kecil.dibandingkan dengan APS pada kelompok usia 7-12 tahun.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 2000 | 85.06 | 83.68 | 84.38 | 63.3 | 68.52 | 65.75 | 73 | 75.65 | 74.27 |
| 2001 | 84.09 | 80.43 | 82.17 | 61.08 | 64.32 | 62.62 | 72.04 | 72.77 | 72.41 |
| 2002 | 85.36 | 85.92 | 85.63 | 64.48 | 63.58 | 64.06 | 75.59 | 75.66 | 75.62 |
| 2003 | 85.8 | 85.49 | 85.65 | 65.2 | 66.67 | 65.91 | 75.57 | 76.17 | 75.86 |

Gambar 6.4. Perkembangan APS kelompok usia 13 – 15 tahun di Jawa Barat.

Apabila dibandingkan dengan APS pada kelompok 7 – 12 tahun, ternyata APS pada kelompok 13 – 15 tahun menunjukkan kesenjangan (disparitas) yang lebih besar

antara anak laki-laki dan anak perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Akan tetapi di dua lokasi ini terdapat kecenderungan penurunan indeks paritas dari tahun 2000 ke tahun 2003. Data pada Tabel 6.4 menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan yang besar antara APS anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Akan tetapi, jika dibandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar. Pada saat APS anak perempuan di perkotaan 85,5 persen, di perdesaan baru sekitar 66,7 persen. Perbedaan juga terjadi pada anak laki-laki, dengan APS 85,8 persen di perkotaan dan APS 65,2 persen di perdesaan.

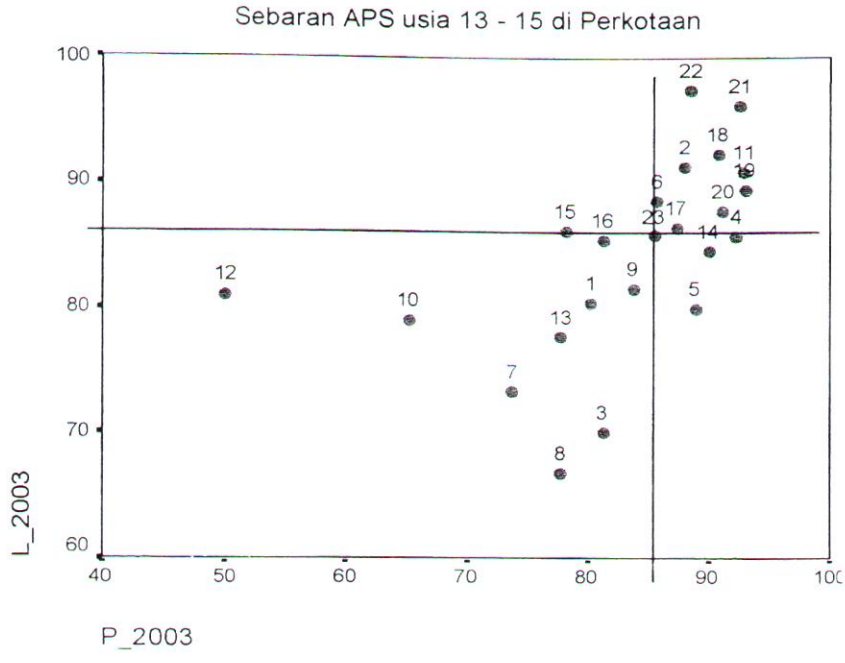
Tabel 6.4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13 – 15 tahun di Jawa Barat.

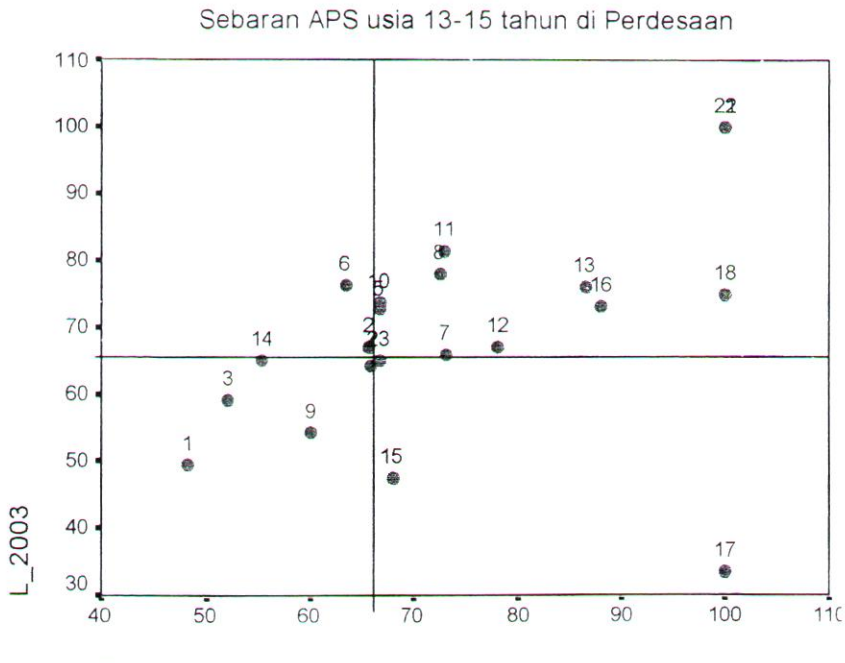
| Wilayah/Jenis Kelamin | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Perkotaan | | | | |
| Laki-laki | 85.1 | 84.1 | 85.4 | 85.8 |
| Perempuan | 83.7 | 80.4 | 85.9 | 85.5 |
| Total | 84.4 | 82.2 | 85.6 | 85.7 |
| Disparitas | -1.4 | -3.7 | 0.6 | -0.3 |
| Indeks Paritas | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 1.00 |
| Perdesaan | | | | |
| Laki-laki | 63.3 | 61.1 | 64.5 | 65.2 |
| Perempuan | 68.5 | 64.3 | 63.6 | 66.7 |
| Total | 65.8 | 62.6 | 64.1 | 65.9 |
| Disparitas | 5.2 | 3.2 | -0.9 | 1.5 |
| Indeks Paritas | 1.08 | 1.05 | 0.99 | 1.02 |
| Perkotaan + Perdesaan | | | | |
| Laki-laki | 73.0 | 72.0 | 75.6 | 75.6 |
| Perempuan | 75.7 | 72.8 | 75.7 | 76.2 |
| Total | 74.3 | 72.4 | 75.6 | 75.9 |
| Disparitas | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
| Indeks Paritas | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |

Berdasar disparitasnya, secara umum ada kecenderungan dimana disparitas APS 13-15 tahun di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Namun demikian, di pedesaan, disparitas tersebut menunjukkan positif, yang berarti bahwa akses laki-laki terhadap pendidikan lebih rendah dibanding perempuan.

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, APS pada kelompok usia 13 – 15 tahun menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota seperti ditunjukkan Gambar 6.5 dan Lampiran 11.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

Gambar 6.5. Keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi anak kelompok usia 13- 15 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota tahun 2003

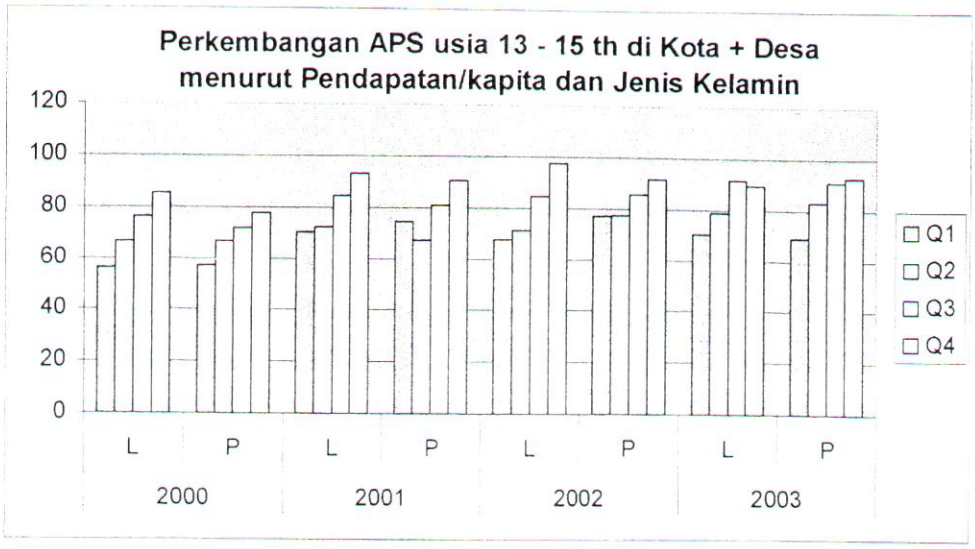
Gambar 6.5 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan APS di Tingkat Propinsi Jawa Barat, di wilayah Perkotaan, khususnya pada anak laki-laki terdapat sebanyak 12 Kabupaten/Kota (55 persen) yang mempunyai APS berada di bawah APS tingkat Propinsi, sedangkan pada anak perempuan terdapat sebanyak 10 Kabupaten/Kota (45 persen). Hal ini menunjukkan bahwa akses anak perempuan terhadap pendidikan di perkotaan relatif lebih besar dibanding di perdesaan. Kabupaten/Kota yang APS anak laki-lakinya terendah dibandingkan tingkat Propinsi adalah Kabupaten Kuningan, sementara pada anak perempuan ditemukan di Kabupaten Indramayu. Terdapat 9 Kabupaten/Kota yang APS kelompok usia 13-15 tahunnya lebih rendah dibandingkan tingkat Propinsi, yaitu Kabupaten-kabupaten Bogor, Cianjur, Ciamis, Cirebon, Majalengka, Indramayu, serta Subang.

Di wilayah perdesaan, terdapat sebanyak 7 Kabupaten/Kota (32 persen) yang APS anak laki-lakinya berada di bawah tingkat Propinsi, sedangkan untuk anak Perempuannya didapati di 8 Kabupaten/Kota (36 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok usia 13-15 tahun sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota mempunyai akses pendidikan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan APS pada tingkat Propinsi. Apabila kita cermati, ternyata Kota Depok dan Bekasi merupakan 2 wilayah Kota yang mempunyai APS tertinggi, sementara yang tergolong memiliki APS 13-15 tahun terendah adalah Kabupaten Bogor untuk anak perempuan dan Kota Bogor untuk anak laki-laki.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Pada Gambar 6.6. disajikan data perkembangan APS Usia 13-15 tahun di Jawa Barat menurut kelompok pendapatan per kapita. Sementara pada Tabel 6.6. disajikan data hubungan antara APS Penduduk Usia 13-15 tahun menurut kelompok pendapatan per kapita per bulan pada periode tahun 2000 -2003 dan jenis kelamin

Apabila dibandingkan dengan perkembangan APS untuk kelompok usia 7-12 tahun pada periode 2000 – 2003, maka pada kelompok usia 13– 15 tahun terdapat kecenderungan yang lebih konsisten. Untuk pendapatan antara Q2 sampai dengan Q4 menunjukkan adanya hubungan yang linier antara pendapatan per kapita dengan APS Usia 13-15 tahun, yang berarti bahwa semakin tinggi quartil pendapatan per kapita per bulan maka semakin tinggi APS baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan pada kelompok usia 13-15 tahun.




Gambar 6.6. Perkembangan APS kelompok usia 13-15 tahun menurut Quartil pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Menurut daerahnya, seperti terlihat pada Tabel 6.5., diketahui bahwa di daerah perkotaan baik pada kelompok pendapatan Quartil Kedua (Q2) dan Quartil Keempat (Q4) APS anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki, dan keadaan sebaliknya terdapat pada kelompok Quartil Pertama (Q1) dan keempat (Q3).

Pada wilayah perdesaan, APS anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan pada quartil pendapatan pertama, ketiga dan keempat (Q1, Q3, dan Q4), akan tetapi pada Quartil Kedua (Q2) APS anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki.

Tabel 6.5. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13 – 15 tahun Menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah | Quartil Pendapatan / kapita | Kelompok Usia 13 – 15 Tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Perkotaan | Q1 | 73.33 | 68.18 | 72.73 | 76.19 | 70.37 | 96.78 | 80.96 | 50 |
| | Q2 | 76.19 | 69.23 | 83.02 | 72.86 | 80.68 | 88.13 | 85.71 | 92.22 |
| | Q3 | 89.72 | 86.05 | 85.07 | 80.77 | 85.96 | 86.29 | 92.29 | 90.73 |
| | Q4 | 92.25 | 87.38 | 93.20 | 90.74 | 97.35 | 91.82 | 89.48 | 92.94 |
| Perdesaan | Q1 | 48.39 | 66.61 | 54.76 | 47.62 | 50 | 44.12 | 59.26 | 52.05 |
| | Q2 | 56.24 | 68.57 | 57.58 | 56.67 | 51.43 | 54.16 | 64.29 | 65.85 |
| | Q3 | 68.39 | 69.22 | 59.38 | 77.78 | 55.35 | 72.34 | 78.05 | 72.5 |
| | Q4 | 77.67 | 72.24 | 67.57 | 80.49 | 62.49 | 69.69 | 81.47 | 72.97 |
| Kota+Desa | Q1 | 56.27 | 57.16 | 70.73 | 74.60 | 67.73 | 77.08 | 70.51 | 69.09 |
| | Q2 | 66.79 | 67.16 | 72.36 | 67.48 | 71.46 | 77.26 | 78.88 | 83.05 |
| | Q3 | 76.23 | 71.93 | 84.60 | 80.84 | 84.5 | 85.65 | 91.56 | 90.92 |
| | Q4 | 85.29 | 77.58 | 93.20 | 90.74 | 97.35 | 91.82 | 89.48 | 92.94 |

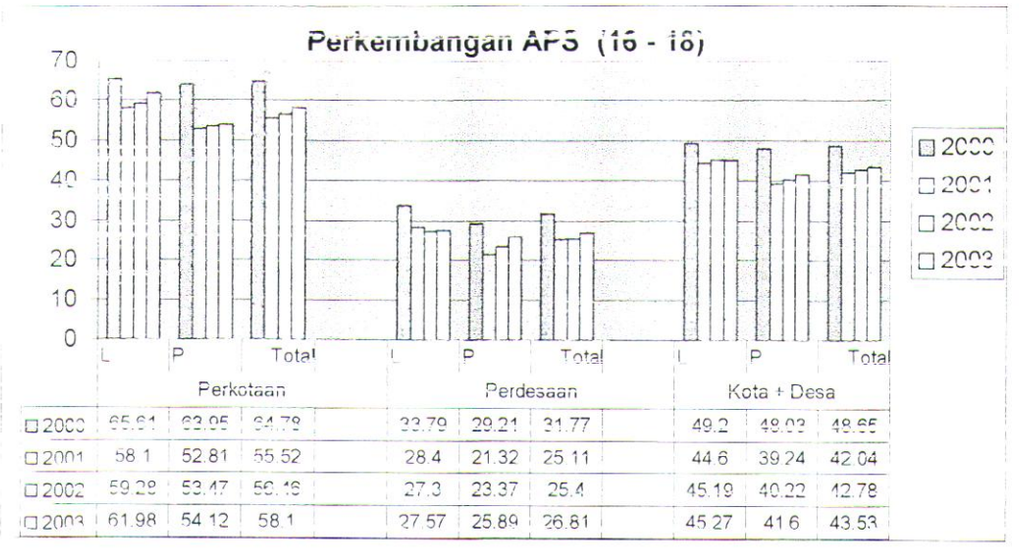
Catatan : Seperti pada Tabel 6.3.

### 6.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun.

**a. Keragaman Antara Kelompok Perkotaan dan Perdesaan.**

Seperti halnya pada kelompok usia sebelumnya, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 APS anak pada kelompok usia 16 – 18 tahun baik perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan peningkatan, akan tetapi terjadi penurunan APS dari tahun 2000 ke tahun 2001. Seperti dapat dilihat pada Gambar 6.7, dari tahun ke tahun APS di perkotaan lebih besar dibandingkan APS di perdesaan. Apabila dibandingkan dengan APS pada kelompok usia 7-12 tahun, dan 13-15 tahun, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi kelompok usia maka APS semakin kecil.

Apabila dibandingkan antara APS pada kelompok usia sebelumnya, ternyata terdapat kecenderungan bahwa kesenjangan (disparitas) antara anak laki-laki dan anak perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan semakin besar. Pada kelompok usia 16 – 18 tahun ini, baik di perkotaan maupun di pedesaan APS untuk anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 2000 | 65.61 | 63.95 | 64.78 | 33.79 | 29.21 | 31.77 | 49.2 | 48.03 | 48.65 |
| 2001 | 58.1 | 52.81 | 55.52 | 28.4 | 21.32 | 25.11 | 44.6 | 39.24 | 42.04 |
| 2002 | 59.29 | 53.47 | 56.19 | 27.3 | 23.37 | 25.4 | 45.19 | 40.22 | 42.78 |
| 2003 | 61.98 | 54.12 | 58.1 | 27.57 | 25.89 | 26.81 | 45.27 | 41.6 | 43.53 |

Gambar 6.7. Perkembangan APS kelompok usia 16 – 18 tahun di Jawa Barat.

Seperti dapat dilihat pada Tabel 6.6 perbedaan (disparitas) tersebut lebih besar di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Akan tetapi di dua wilayah ini terdapat kecenderungan penurunan kesenjangan dan indeks paritas dari tahun 2000 ke tahun 2002, akan tetapi terjadi kenaikan dari tahun 2002 ke tahun 2003. Data pada Tabel 6.6 juga menunjukkan bahwa selain perbedaan yang besar antara APS anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan, antar wilayah

perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Pada tahun 2003 misalnya, pada saat APS anak perempuan di perkotaan 54,1 persen, di perdesaan baru 25,9 persen. Perbedaan juga terjadi pada anak laki-laki, dengan APS 62,0 persen di perkotaan dan APS 27,6 persen di perdesaan (Tabel 6.6).

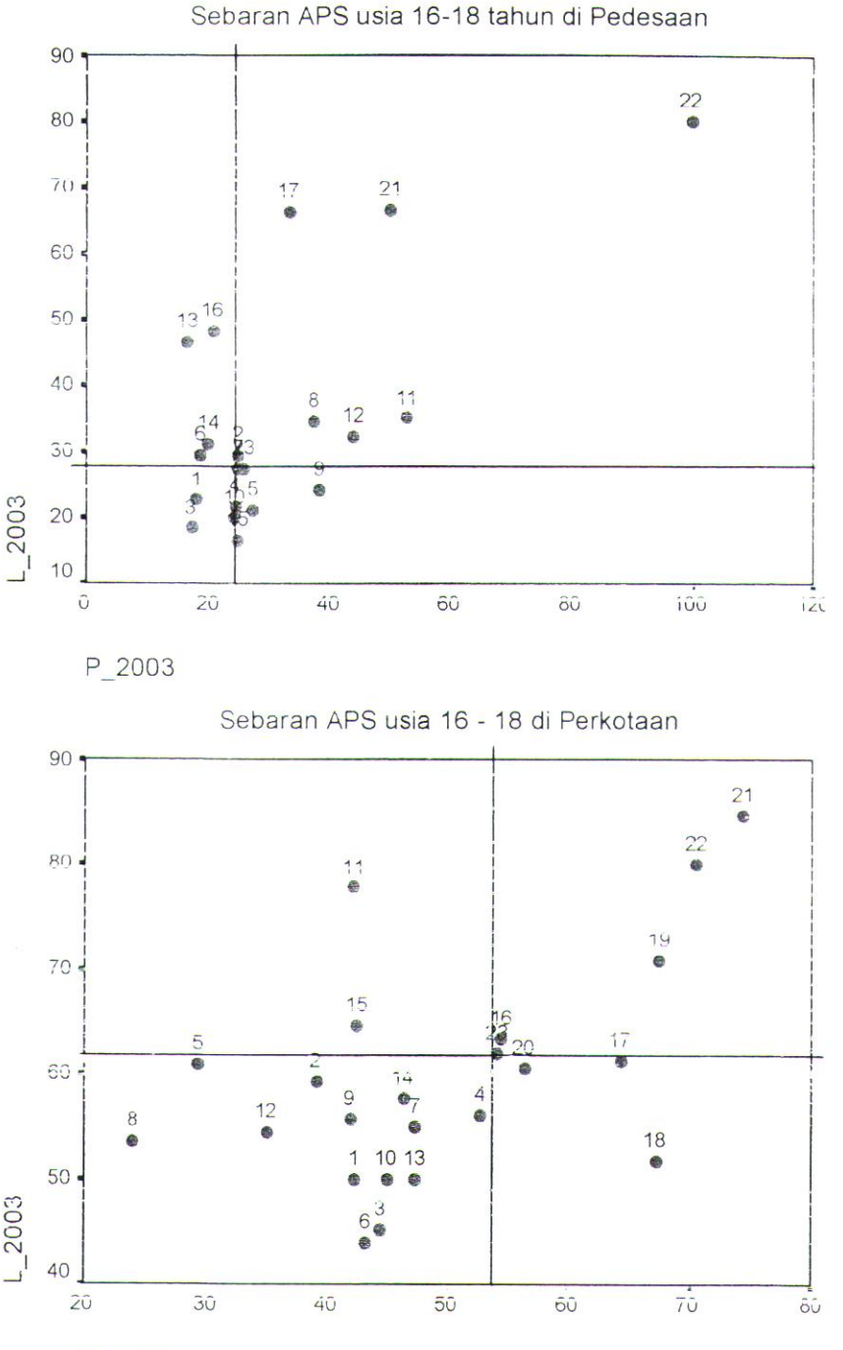
Tabel 6.6. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16 – 18 tahun di Jawa Barat Pada Tahun 2000 - 2003

| Wilayah/Jenis Kelamin | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Perkotaan | | | | |
| Laki-laki | 65.6 | 58.1 | 59.3 | 62.0 |
| Perempuan | 64.0 | 52.8 | 53.5 | 54.1 |
| Total | 64.8 | 55.5 | 56.5 | 58.1 |
| Disparitas | -1.7 | -5.3 | -5.8 | -7.9 |
| Indeks Paritas | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.87 |
| Perdesaan | | | | |
| Laki-laki | 33.8 | 28.4 | 27.3 | 27.6 |
| Perempuan | 29.2 | 21.3 | 23.4 | 25.9 |
| Total | 31.8 | 25.1 | 25.4 | 26.8 |
| Disparitas | -4.6 | -7.1 | -3.9 | -1.7 |
| Indeks Paritas | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.94 |
| Perkotaan + Perdesaan | | | | |
| Laki-laki | 49.2 | 44.6 | 45.2 | 45.3 |
| Perempuan | 48.0 | 39.2 | 40.2 | 41.6 |
| Total | 48.7 | 42.0 | 42.8 | 43.5 |
| Disparitas | -1.2 | -5.4 | -5.0 | -3.7 |
| Indeks Paritas | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Sekolah kelompok usia 16 – 18 tahun menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota seperti ditunjukkan Gambar 6.8 dan Lampiran 11. Jika di bandingkan dengan APS di Tingkat Propinsi Jawa Barat, pada wilayah Perkotaan untuk anak laki-laki terdapat sebanyak 16 Kabupaten/Kota (73 persen) yang mempunyai APS berada di bawah tingkat Propinsi, sedangkan untuk Perempuan terdapat sebanyak 15 Kabupaten/Kota (68 persen). Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, jumlah Kabupaten/Kota yang APS 16-18 tahunnya lebih rendah dari rata-rata Propinsi adalah lebih besar.

Kabupaten/Kota yang APS anak laki-lakinya terendah dibandingkan tingkat Propinsi adalah Kabupaten Tasikmalaya dan untuk anak perempuan adalah Kabupaten Kuningan. Terdapat 5 Kota yang mempunyai APS kelompok usia 16-18 tahun yang.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

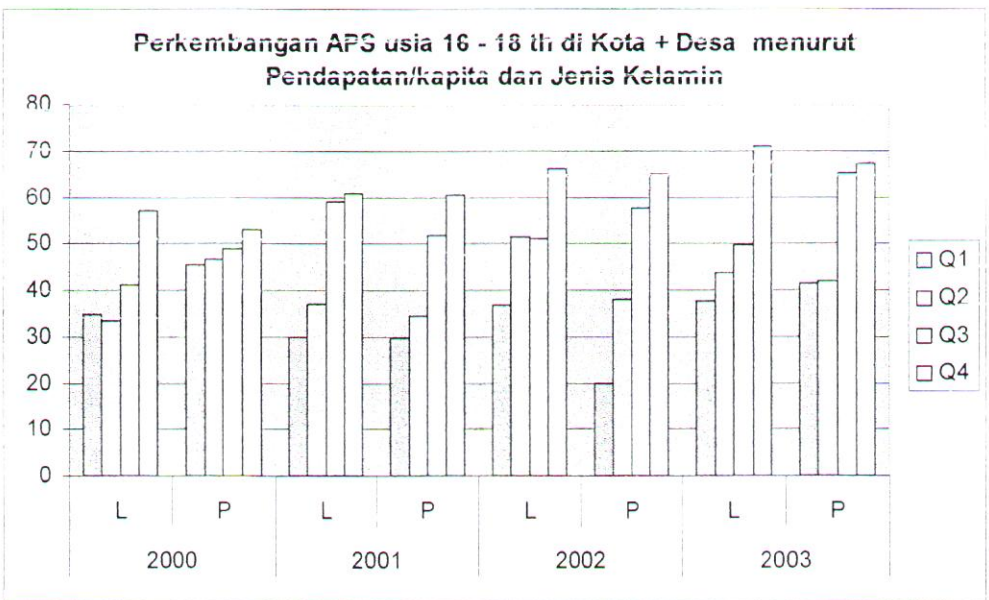
Gambar 6.8. Keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi anak kelompok usia 16 - 18 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota tahun 2003

lebih tinggi dari rata-rata tingkat Propinsi, baik anak laki-laki maupun perempuan, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok.

Di perdesaan, dari sejumlah 19 Kabupaten/Kota yang data APSnya tersedia. Terdapat sebanyak 8 Kabupaten/Kota (42 persen) yang APS anak laki-lakinya berada di bawah tingkat Propinsi, sedangkan untuk kelompok Perempuan terdapat sebanyak 11 Kabupaten/Kota (58 persen). Kabupaten Subang merupakan wilayah yang mempunyai APS untuk anak perempuan yang terendah, sedangkan untuk anak laki-laki adalah di Kabupaten Karawang. Terdapat 6 wilayah kabupaten/kota yang mempunyai APS anak laki-laki dan perempuan yang lebih besar dari rata-rata tingkat propinsi, yaitu Kabupaten Kuningan, Sumedang, Indramayu, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Gambar 6.9. menunjukkan. Perkembangan APS pada penduduk kelompok usia 16-18 tahun menurut pendapatan dan jenis kelamin.




Gambar 6.9. Perkembangan APS kelompok usia 16-18 tahun menurut Quartil pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Pada gambar 6.9. tersebut ditunjukkan bahwa semakin tinggi quartil pendapatan per kapita maka semakin tinggi APS pada kelompok usia 16-18 tahun baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Apabila dibandingkan pendapatan per kapita (quartil pendapatan) terhadap APS, seperti yang ditunjukkan data pada Tabel 6.7,

maka pada keadaan tahun 2003 di daerah perkotaan APS untuk anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan, kecuali pada Quartil Ketiga (Q3). Pada daerah perdesaan APS anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki kecuali pada Quartil Pertama (Q1). Secara umum baik di perkotaan maupun di perdesaan, semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk maka semakin tinggi APS kelompok usia 16-18 tahun untuk anak perempuan dan anak laki-laki.

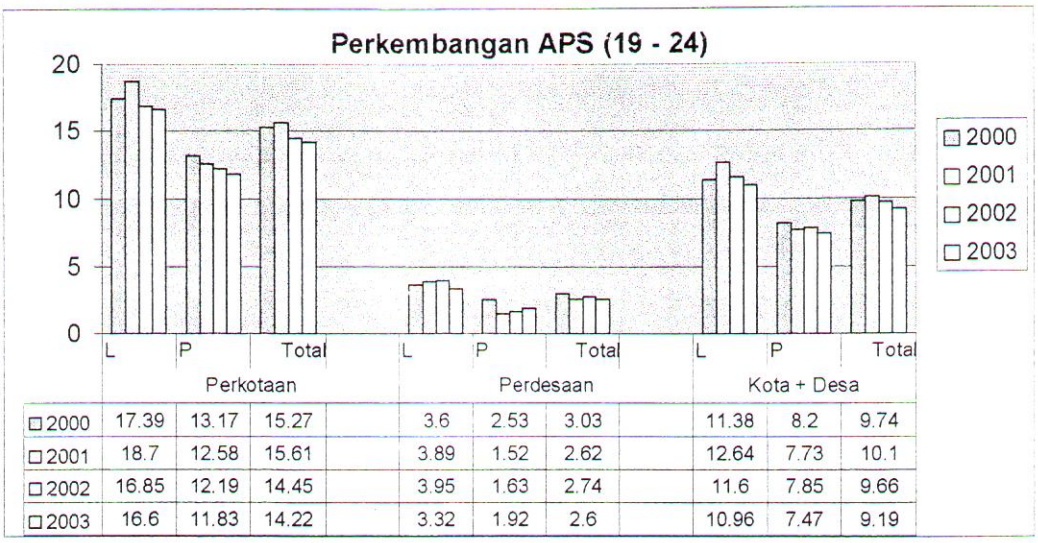
Tabel 6.7. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16 – 18 tahun Menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah | Quartil Pendapatan / kapita | Kelompok Usia 16 – 18 tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Perkotaan | Q1 | 56.67 | 53.33 | 47.17 | 31.43 | 69.56 | 31.82 | 54.54 | 35.01 |
| | Q2 | 65.38 | 54.44 | 41.10 | 44.74 | 67.5 | 46.75 | 56.03 | 52.69 |
| | Q3 | 76.92 | 63.64 | 59.38 | 52.38 | 51.43 | 58.65 | 51.73 | 67.24 |
| | Q4 | 76.15 | 67.95 | 60.90 | 60.51 | 66.26 | 65.01 | 70.88 | 67.47 |
| Perdesasn | Q1 | 23.53 | 27.03 | 22.95 | 13.70 | 16.09 | 6.67 | 18.46 | 17.39 |
| | Q2 | 28.79 | 28.46 | 29.03 | 10.71 | 23.08 | 19.36 | 21.82 | 24.49 |
| | Q3 | 33.52 | 32.15 | 33.33 | 24.59 | 39.62 | 28.81 | 34.54 | 37.52 |
| | Q4 | 35.29 | 40.11 | 25.76 | 14.58 | 19.43 | 17.64 | 35 | 52.93 |
| Perkotaan + Perdesaan | Q1 | 34.78 | 45.45 | 29.93 | 29.75 | 36.88 | 19.81 | 37.66 | 41.48 |
| | Q2 | 33.56 | 46.7 | 37.12 | 34.56 | 51.47 | 38.04 | 43.81 | 41.93 |
| | Q3 | 41.25 | 48.9 | 59.05 | 51.75 | 51.1 | 57.64 | 49.71 | 65.22 |
| | Q4 | 57.22 | 52.98 | 60.90 | 60.51 | 66.26 | 65.01 | 70.88 | 67.47 |

### 6.1.1.4. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 – 24 Tahun.

#### a. Keragaman Antara Kelompok Perkotaan dan Perdesaan.

Perkembangan APS kelompok usia 19-24 tahun berbeda dengan APS pada kelompok usia sebelumnya. Pada kelompok usia ini, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 APS pada kelompok usia 19-24 tahun baik perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan penurunan, peningkatan APS terjadi dari tahun 2000 ke tahun 2001. Seperti dapat dilihat pada Gambar 6.10, dari tahun ke tahun APS di perkotaan lebih besar dibandingkan APS di perdesaan. Apabila dibandingkan dengan APS pada kelompok usia di bawah 19–24 tahun, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi kelompok usia maka APS semakin kecil.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 2000 | 17.39 | 13.17 | 15.27 | 3.6 | 2.53 | 3.03 | 11.38 | 8.2 | 9.74 |
| 2001 | 18.7 | 12.58 | 15.61 | 3.89 | 1.52 | 2.62 | 12.64 | 7.73 | 10.1 |
| 2002 | 16.85 | 12.19 | 14.45 | 3.95 | 1.63 | 2.74 | 11.6 | 7.85 | 9.66 |
| 2003 | 16.6 | 11.83 | 14.22 | 3.32 | 1.92 | 2.6 | 10.96 | 7.47 | 9.19 |

Gambar 6.10. Perkembangan APS kelompok usia 19 – 24 tahun di Jawa Barat.

Selanjutnya, pada Tabel 6.8 dikemukakan Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk umur 19 – 24 tahun di Jawa Barat untuk periode 2000 -2003..

Tabel 6.8. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 – 24 tahun di Jawa Barat Tahun 2000 -2001.

| Wilayah/Jenis Kelamin | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Perkotaan | | | | |
| Laki-laki | 17.4 | 18.7 | 16.9 | 16.6 |
| Perempuan | 13.2 | 12.6 | 12.2 | 11.8 |
| Total | 15.3 | 15.6 | 14.5 | 14.2 |
| Disparitas | -4.2 | -6.1 | -4.7 | -4.8 |
| Indeks Paritas | 0.76 | 0.67 | 0.72 | 0.71 |
| Perdesaan | | | | |
| Laki-laki | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.3 |
| Perempuan | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 |
| Total | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| Disparitas | -1.1 | -2.4 | -2.3 | -1.4 |
| Indeks Paritas | 0.70 | 0.39 | 0.41 | 0.58 |
| Perkotaan + Perdesaan | | | | |
| Laki-laki | 11.4 | 12.6 | 11.6 | 11.0 |
| Perempuan | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 7.5 |
| Total | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 9.2 |
| Disparitas | -3.2 | -4.9 | -3.8 | -3.5 |
| Indeks Paritas | 0.72 | 0.61 | 0.68 | 0.68 |

Bila dibandingkan antara APS pada kelompok usia sebelumnya, ternyata terdapat perbedaan kecenderungan kesenjangan (disparitas) antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada kelompok usia 19 – 24 tahun, kesenjangan APS di perkotaan

lebih besar dibandingkan di perdesaan, dengan kecenderungan yang sama bahwa APS kelompok perempuan lebih kecil dibandingkan kelompok laki-laki (Tabel 6.8).

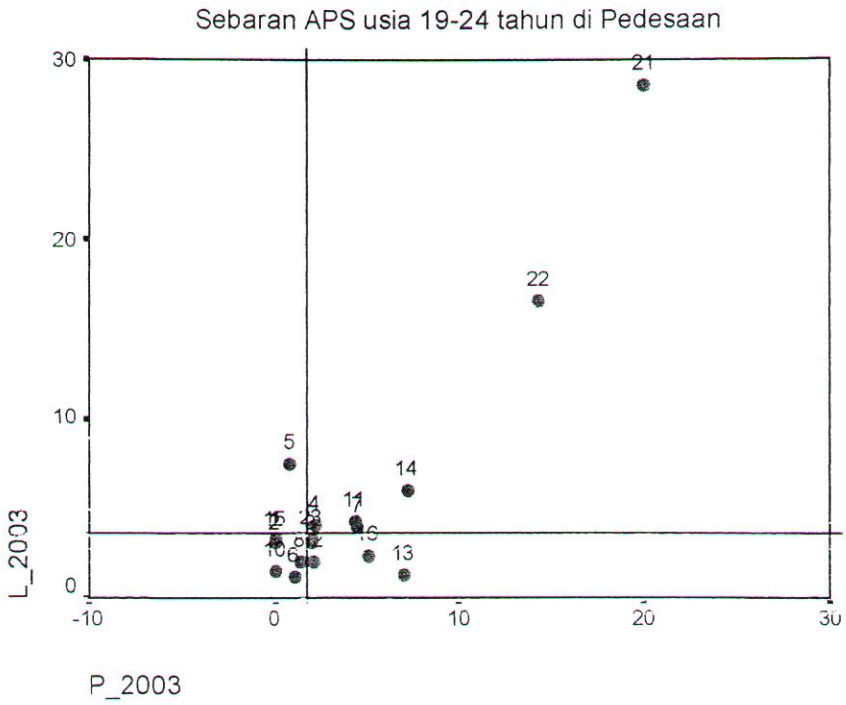
Di daerah perkotaan dan perdesaan, dari tahun 2001 ke tahun tahun 2003 terdapat kecenderungan perubahan kesenjangan dan indeks paritas yang sama, yaitu terjadi peningkatan indeks paritas dan penurunan kesenjangan antara APS laki-laki dan perempuan.

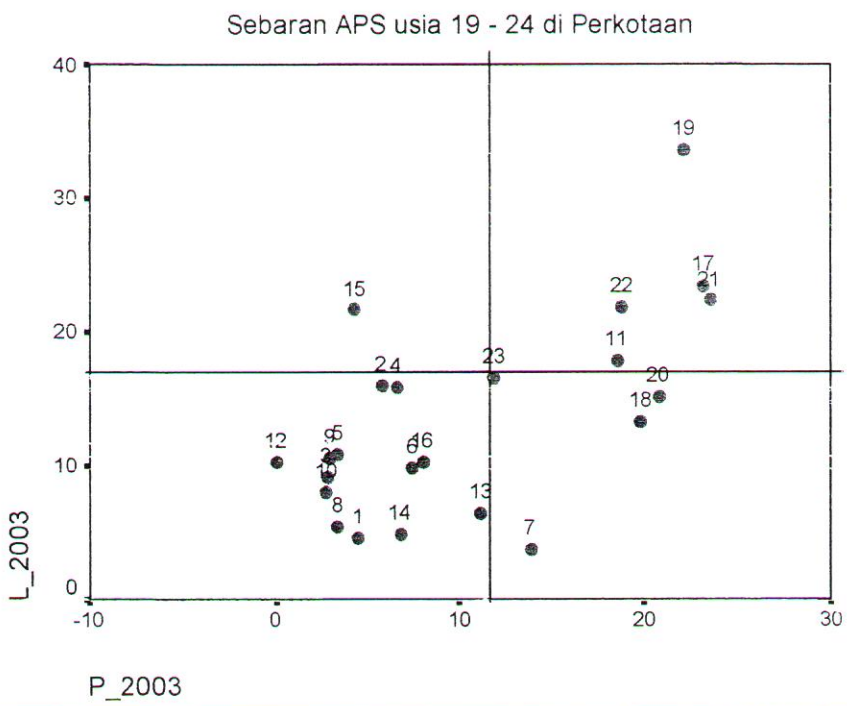
Data pada Tabel 6.8 juga menunjukkan bahwa selain perbedaan yang besar antara APS anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan, antar wilayah perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Pada tahun 2003 misalnya, pada saat APS anak perempuan di perkotaan 11,8 persen, di perdesaan hanya mencapai 1.9 persen. Perbedaan juga terjadi pada anak laki-laki, dengan APS 16,6 persen di perkotaan dan APS 3,3 persen di perdesaan .

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Gambar 6.11 dan Lampiran 11 meunjukkan keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi kelompok usia 19-24 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota tahun 2003. Seperti terlihat pada Gambar 6.11., Angka Partisipasi Sekolah penduduk pada kelompok usia 19 – 24 tahun menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota.

Jika dibandingkan dengan APS di Tingkat Propinsi Jawa Barat, di wilayah Perkotaan untuk anak laki-laki terdapat sebanyak 16 Kabupaten/Kota (73 persen) yang mempunyai APS berada di bawah tingkat Propinsi, sedangkan untuk kelompok Perempuan terdapat sebanyak 14 Kabupaten/Kota (64 persen). Keadaan serupa terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun, yang menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di daerah perkotaan mempunyai APS lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Kabupaten/Kota yang APS untuk anak laki-laki nya terendah dibandingkan tingkat Propinsi adalah Kabupaten Tasikmalaya, sementara untuk anak perempuan dijumpai di Kabupaten Kuningan. Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang APS kelompok usia 19-24 tahun-nya lebih tinggi dari rata-rata tingkat Propinsi, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan, yaitu Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok.



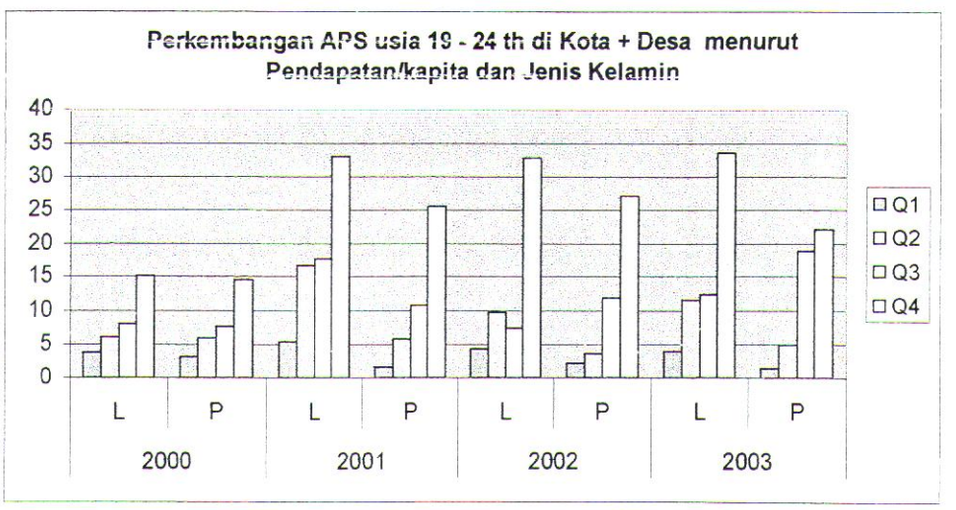

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

Gambar 6.11. Keragaman tingkat akses terhadap pendidikan bagi kelompok usia 19-24 tahun di perkotaan dan perdesaan, antar Kabupaten/Kota tahun 2003

Di wilayah Pedesaan, dari sejumlah 17 Kabupaten/Kota yang data APSnya tersedia untuk anak laki-laki terdapat sebanyak 10 Kabupaten/Kota (59 persen) yang mempunyai APS berada di bawah tingkat Propinsi, sedangkan untuk anak Perempuan terdapat di sebanyak 7 Kabupaten/Kota (41 persen). Terdapat sebanyak 6 Kabupaten yang APS laki-laki dan perempuan lebih rendah dari rata-rata tingkat Propinsi. Ke enam Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Majalengka dan Karawang, Kuningan dan Taskimalaya. Apabila dilihat dari wilayahnya, diketahui bahwa wilayah pedesaan di Kota Bekasi mempunyai APS yang tertinggi disusul Kota Depok. Kabupaten Bogor, Sukabumi, Majalengka dan Karawang merupakan 4 wilayah yang APS kelompok perempuannya terendah, dan untuk penduduk laki-laki dijumpai di Kabupaten Tasikmalaya.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Perkembangan dari tahun 2000 ke tahun 2003, seperti dapat dilihat pada Gambar 6.12 menunjukkan bahwa semakin tinggi quartil pendapatan per kapita maka semakin tinggi APS pada kelompok usia 19-24 tahun baik pada kelompok penduduk laki-laki maupun anak perempuan. Namun demikian, pada setiap tahunnya terdapat kesenjangan APS yang berbeda antara penduduk laki-laki dan perempuan, kecuali pada tahun 2001. Pada tahun 2000 terdapat kecenderungan kesetaraan akses antara penduduk laki-laki dan perempuan, sementara mulai tahun 2001 sampai tahun 2003 ada kesenjangan, dimana APS anak laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding anak perempuan untuk setiap kategori pendapatan.




Gambar 6.12. Perkembangan APS kelompok usia 19-24 tahun menurut Quartil pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Lebih lanjut, apabila dibandingkan pendapatan per kapita per bulan (quartil pendapatan) terhadap APS kelompok usia 19-24 tahun (Tabel 6.9), diketahui bahwa di daerah perkotaan, APS untuk penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan penduduk laki-laki, kecuali pada Quartil Ketiga (Q3). Di daerah perdesaan, untuk semua kelompok Quartil pendapatan, APS penduduk perempuan juga lebih kecil dibandingkan penduduk laki-laki.

Seperti telihat pada Tabel 6.9., secara umum terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi APS penduduk pada kelompok umur 19 – 24 tahun, untuk setiap tahunnya, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, jika dilihat menurut wilayah dan jenis kelaminnya menunjukkan kecenderungan yang sedikit berbeda . Di perkotaan APS laki-laki pada kelompok pengeluaran tertinggi cenderung menunjukkan peningkatan, sebaliknya pada kelompok pengeluaran terendah (Q1). Sementara pada anak perempuan menunjukkan peningkatan antara 2000-2003, kemudian menurun lagi. Adapun di perdesaan, pada Q1 menunjukkan sedikit peningkatan baik pada laki-laki maupun perempuan, kecuali pada tahun 2002. Sebaliknya pada kelompok pendapatan tertinggi, APS perempuan cenderung meningkat antara 2002 – 2003, sebaliknya pada laki-laki.

Tabel 6.9. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 – 24 tahun Menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah | Quartil Pendapatan / kapita | 19 – 24 tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Perkotaan | Q1 | 5.88 | 6.9 | 5.71 | 5.80 | 7.4 | 3.93 | 10.34 | 0 |
| | Q2 | 12.56 | 10.34 | 20.83 | 7.04 | 11.5 | 5.4 | 15.86 | 6.56 |
| | Q3 | 17.7 | 13.01 | 18.10 | 11.01 | 7.69 | 12.24 | 13.29 | 19.78 |
| | Q4 | 22.27 | 23.19 | 33.14 | 25.50 | 32.87 | 27.15 | 33.59 | 22.14 |
| Perdesaan | Q1 | 1.86 | 0.45 | 0.85 | 1.45 | 1.14 | 0 | 3.06 | 1.94 |
| | Q2 | 2.67 | 1.06 | 6.12 | 3.39 | 6.9 | 0 | 4.12 | 2.13 |
| | Q3 | 3.86 | 2 | 2.15 | 3.09 | 3.84 | 3.71 | 2 | 1.35 |
| | Q4 | 5.14 | 3.25 | 11.84 | 0.00 | 6.35 | 2.74 | 4.29 | 4.29 |
| Perkotaan + Perdesaan | Q1 | 3.85 | 3.1 | 5.40 | 1.69 | 4.28 | 2.15 | 3.92 | 1.53 |
| | Q2 | 6.07 | 5.91 | 16.67 | 5.86 | 9.79 | 3.68 | 11.72 | 4.89 |
| | Q3 | 8.16 | 7.67 | 17.69 | 10.87 | 7.49 | 12 | 12.49 | 18.84 |
| | Q4 | 15.24 | 14.62 | 33.14 | 25.50 | 32.87 | 27.15 | 33.59 | 22.14 |

### 6.1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK).

Gambaran mengenai perkembangan akses terhadap pendidikan, khususnya APK pada penduduk laki-laki dan perempuan di Jawa Barat antara tahun 2000 – 2003 dapat dilihat pada Tabel 6.10. Pada bagian ini juga disajikan Indeks Paritas dan Disparitas gender dalam bidang pendidikan formal berdasar APK yang disajikan menurut keragaman antar wilayah pedesaan dan perkotaan, antar Kabupaten/Kota dan antar kelompok pendapatan per kapita per bulan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio antara jumlah siswa yang sedang mengikuti tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu, mencerminkan persentase penduduk yang sedang mengikuti pendidikan formal tertentu, tanpa memperhatikan usianya.

Tabel 6.10. Angka Partisipasi Kasar di Jawa Barat pada Tahun 2000 – 2003.

| Tingkat Pendidikan/ Jenis Kelamin | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | SD | | | |
| Laki-Laki | 104.16 | 104.78 | 104.34 | 103 |
| Perempuan | 103.3 | 105.24 | 104.58 | 102.7 |
| Total | 103.73 | 105 | 104.46 | 102.85 |
| Disparitas | -0.86 | 0.46 | 0.24 | -0.3 |
| Indeks Paritas | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | SLTP | | | |
| Laki-Laki | 72.69 | 72.87 | 75.87 | 76.39 |
| Perempuan | 75 | 70.15 | 76.09 | 77.47 |
| Total | 73.8 | 71.5 | 75.97 | 76.91 |
| Disparitas | 2.31 | -2.72 | 0.22 | 1.08 |
| Indeks Paritas | 1.03 | 0.96 | 1.00 | 1.01 |
| | SLTA | | | |
| Laki-Laki | 49.2 | 42.79 | 44.07 | 44.96 |
| Perempuan | 49.06 | 37.74 | 36 | 40.34 |
| Total | 49.13 | 40.38 | 40.16 | 42.77 |
| Disparitas | -0.14 | -5.05 | -8.07 | -4.62 |
| Indeks Paritas | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.90 |
| | PT | | | |
| Laki-Laki | 9.29 | 10.07 | 11.72 | 10.85 |
| Perempuan | 6.73 | 6.9 | 8.32 | 7.56 |
| Total | 7.97 | 8.43 | 9.96 | 9.18 |
| Disparitas | -2.56 | -3.17 | -3.4 | -3.29 |
| Indeks Paritas | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.70 |

Tabel 6.10 secara umum menunjukkan kecenderungan dimana semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APK, baik untuk anak laki-laki maupun

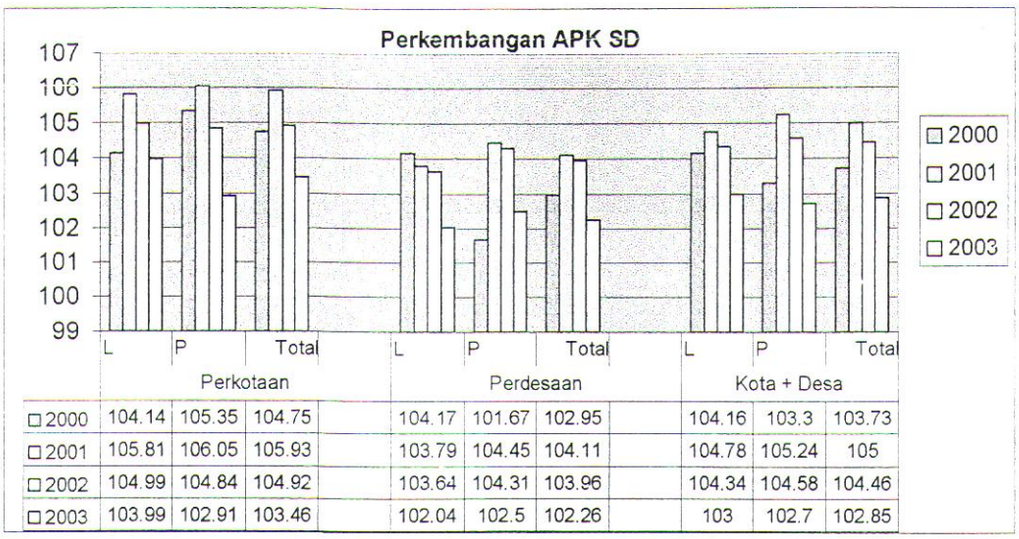
perempuan. Selain itu dijumpai kecenderungan dimana APK anak perempuan pada jenjang SD dan SLTP cenderung sama atau sedikit lebih tinggi dari anak laki-laki, sebaliknya pada jenjang SLTA dan PT. Ini menunjukkan gambaran bahwa akses anak perempuan terhadap jenjang pendidikan menengah atas dan tinggi sedikit lebih rendah dibanding laki-laki. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan data tahun 2000, maka pada tahun 2003 APK pada jenjang pendidikan SD dan SLTA menunjukkan penurunan, sebaliknya pada jenjang pendidikan SLTP dan PT terjadi peningkatan Namun demikian, jika dilihat perkembangan dari tahun 2002 ke tahun 2003 maka dapat dilihat terjadinya peningkatan APK pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA untuk penduduk laki-laki dan perempuan. Pada periode yang sama, untuk jenjang pendidikan SD dan PT terjadi penurunan baik penduduk laki-laki maupun perempuan

Pada Tabel 6.10 ditunjukkan pula adanya perbedaan akses pendidikan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada jenjang pendidikan SD, SLTA dan PT pada tahun 2003 data menunjukkan bahwa APK perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki, sedangkan APK pada jenjang pendidikan SLTP untuk perempuan adalah lebih besar dibandingkan laki-laki..Berdasarkan kondisi pada tahun 2003, ternyata indeks paritas dari jenjang pendidikan SLTP ke PT menunjukkan kecenderungan menurun, yang berarti semakin besarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dengan kecenderungan lebih didominasi penduduk laki-laki.

### 6.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD.

**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

APK tingkat SD di daerah perkotaan dari tahun 2000 ke tahun 2001 menunjukkan peningkatan, akan tetapi sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 menunjukkan penurunan, baik untuk anak perempuan maupun laki-laki, seperti ditunjukkan Gambar 6.13. Gambar 6.13 juga menunjukkan terjadinya perkembangan yang berbeda untuk daerah perdesaan, dimana untuk anak laki-laki APK tingkat SD sudah mengalami penurunan sejak tahun 2000, sedangkan untuk anak perempuan mempunyai kecenderungan yang sama seperti di perkotaan. Secara umum, APK tingkat SD di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.




| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
| 2000 | 104.14 | 105.35 | 104.75 | 104.17 | 101.67 | 102.95 | 104.16 | 103.3 | 103.73 |
| 2001 | 105.81 | 106.05 | 105.93 | 103.79 | 104.45 | 104.11 | 104.78 | 105.24 | 105 |
| 2002 | 104.99 | 104.84 | 104.92 | 103.64 | 104.31 | 103.96 | 104.34 | 104.58 | 104.46 |
| 2003 | 103.99 | 102.91 | 103.46 | 102.04 | 102.5 | 102.26 | 103 | 102.7 | 102.85 |

Gambar 6.13. Perkembangan APK tingkat SD di Jawa Barat

Pada Tabel 6.11. ditunjukkan perkembangan APK , IP dan Disparitas pada jenjang pendidikan tingkat SD di Jawa Barat. Secara umum tidak ada kesenjangan antara APK tingkat SD untuk anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Terdapat kecenderungan bahwa disparitas APK tingkat SD semakin rendah dari tahun ke tahun khususnya di perkotaan, sedangkan di perdesaan kecenderungan penurunan disparitas mulai terjadi sejak tahun 2001.

Tabel 6.11. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat SD di Jawa Barat.

| Daerah/Jenis Kelamin | SD | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | Perkotaan | | | |
| Laki-Laki | 104.14 | 105.81 | 104.99 | 103.99 |
| Perempuan | 105.35 | 106.05 | 104.84 | 102.91 |
| Total | 104.75 | 105.93 | 104.92 | 103.46 |
| Disparitas | 1.21 | 0.24 | -0.15 | -1.08 |
| Indeks Paritas | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| | Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 104.17 | 103.79 | 103.64 | 102.04 |
| Perempuan | 101.67 | 104.45 | 104.31 | 102.5 |
| Total | 102.95 | 104.11 | 103.96 | 102.26 |
| Disparitas | -2.5 | 0.66 | 0.67 | 0.46 |
| Indeks Paritas | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| | Perkotaan + Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 104.16 | 104.78 | 104.34 | 103 |
| Perempuan | 103.3 | 105.24 | 104.58 | 102.7 |
| Total | 103.73 | 105 | 104.46 | 102.85 |
| Disparitas | -0.86 | 0.46 | 0.24 | -0.3 |
| Indeks Paritas | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

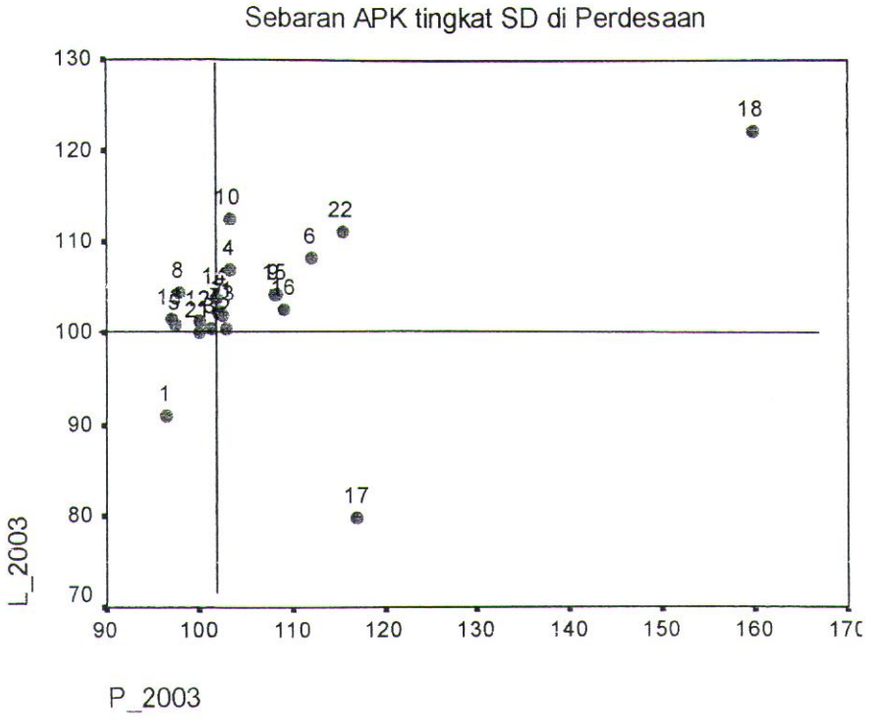
Jika dibandingkan APK untuk masing-masing jenis kelamin anak antara wilayah perkotaan dan perdesaan tidak terlihat adanya kesenjangan yang berarti. APK tingkat SD untuk anak perempuan di perkotaan 102,91 persen, di perdesaan sebesar 102,5 persen. pada anak laki-laki, dengan APK 103,99 persen di perkotaan dan APK sebesar 102,04 persen di perdesaan. Dilihat dari sisi indeks paritas, yaitu APK perempuan dibagi dengan APKlaki-laki, maka dari tahun 2001 ke tahun 2003 realtif tidak terjadi perubahan relatif stabil.

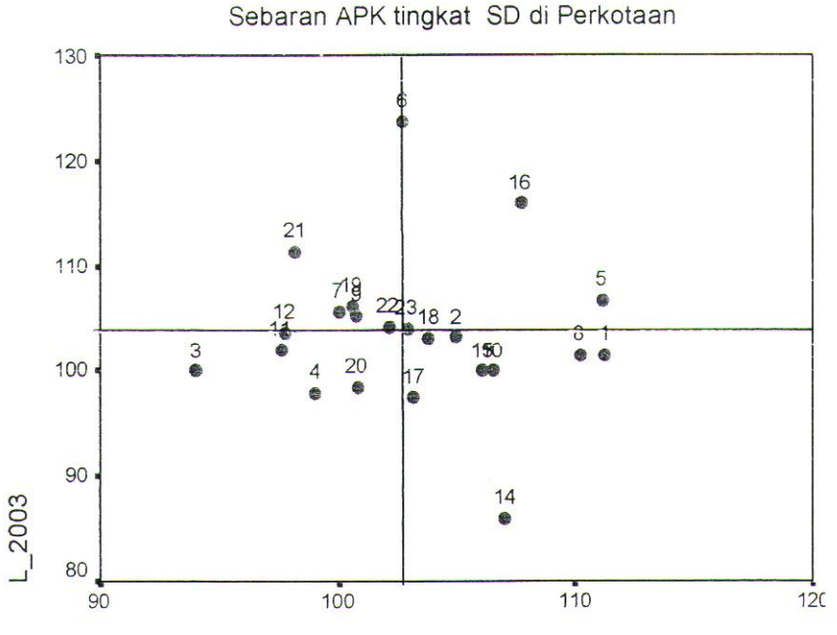
**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Kasar tingkat SD tahun menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota seperti ditunjukkan Gambar 6.14 dan Lampiran 12. Pada Gambar 6.14 dapat dilihat bahwa keragaman APK tingkat SD Kabupaten/Kota di Perkotaan lebih besar dibandingkan di Perdesaan.

Di bandingkan dengan APK tingkat SD di Tingkat Propinsi, data pada Gambar 6.14 menunjukkan bahwa pada wilayah Perkotaan, untuk anak laki-laki terdapat sebanyak 14 Kabupaten/Kota (64 persen) yang mempunyai APK berada di bawah tingkat Propinsi, sedangkan untuk kelompok Perempuan terdapat di sebanyak 11 Kabupaten/Kota (50 persen). Kabupaten/Kota yang APK tingkat SD untuk anak laki-laki nya terendah dibandingkan tingkat Propinsi adalah Kabupaten Purwakarta dan untuk anak perempuan adalah Kabupaten Cianjur. Terdapat 5 Kabupaten/ Kota yang APK tingkat SD baik laki-laki maupun perempuan yang lebih rendah dibandingkan tingkat Propinsi, yaitu Kabupaten Cianjur, Indramayu, Bandung, Sumedang dan Kota Cirebon.

Pada wilayah perdesaan, APK tingkat SD lebih terpusat di sekitar rata-rata tingkat Propinsi dibandingkan di perkotaan. Dari sejumlah 20 Kabupaten/Kota yang datanya APK nya tersedia, ternyata jumlah Kabupaten/Kota pada wilayah perdesaan yang APK tingkat SDnya lebih rendah dari rata-rata Propinsi adalah sebanyak 8 Kabupaten/Kota untuk anak laki-laki, dan sebanyak 10 Kabupaten/Kota. Kota Bogor adalah wilayah dengan APK tingkat SD untuk anak perempuan yang terendah, sedangkan yang terendah untuk anak laki-laki adalah Kabupaten Bogor. Kota Sukabumi merupakan wilayah dengan APK tingkat SD yang tertinggi baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.



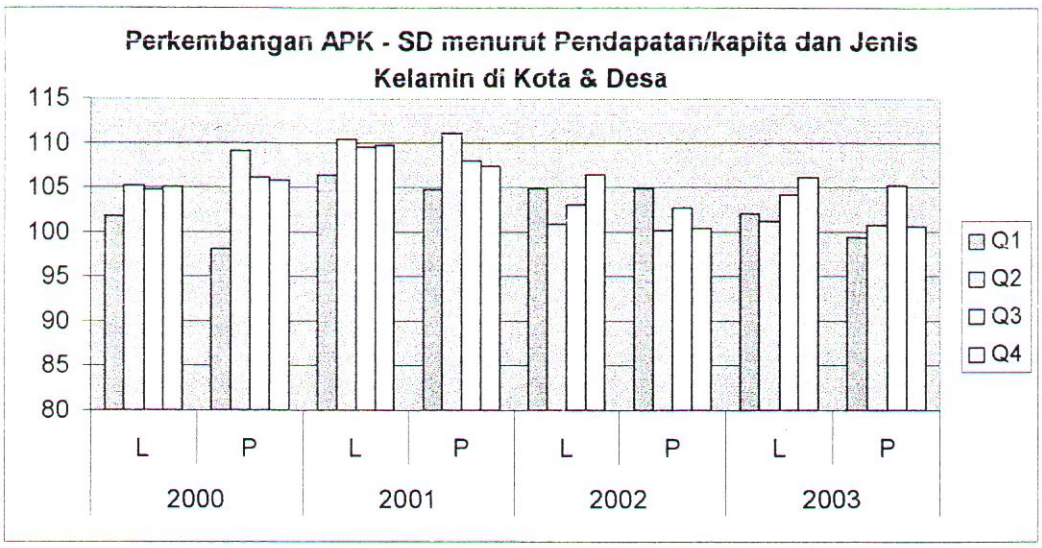

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

Gambar 6.14. Keragaman APK tingkat SD antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, 2003.

Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang APK tingkat SD untuk laki-laki dan perempuan yang lebih rendah dari rata-rata tingkat Propinsi. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bogor, Subang, Garut, Indramayu, Cianjur dan Kota Bekasi.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Perkembangan APK tingkat SD pada periode 2000 – 2003 seperti yang disajikan pada Gambar 6.15 menunjukkan keragaman antar quartil pendapatan per kapita. untuk anak laki-laki dan perempuan. Apabila dibandingkan antara tahun 2000 dan tahun 2003, APK tingkat SD untuk kelompok laki-laki menunjukkan peningkatan dengan semakin tingginya tingkat pendapatan, kecuali pada tahun 2002 dan 2003, peningkatan pendapatan dari Quartil Pertama (Q1) ke Quartil Kedua (Q2) tidak disertai dengan peningkatan APK, bahkan sebaliknya (penurunan). Untuk anak perempuan, peningkatan pendapatan dari Q3 ke Q4 tidak disertai dengan peningkatan APK bahkan terjadi penurunan.




Gambar 6.15. Perkembangan APK tingkat SD menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Apabila dibandingkan pengaruh pendapatan per kapita (quartil pendapatan) menurut daerah data pada tahun 2003 seperti disajikan pada Tabel 6.15 menunjukkan bahwa di daerah perkotaan baik pada Quartil Kedua (Q2) dan Quartil Ketiga (Q3), APK anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki, dan keadaan sebaliknya terdapat pada Quartil Pertama (Q1) dan keempat (Q4). Pada wilayah perdesaan, APK tingkat SD untukkelompok perempuan yang lebih besar dari anak

laki-laki hanya dijumpai pada penduduk dengan pendapatan pada Quartil Pertama (Q1).

Tabel 6.12. Angka Partisipasi Kasar tingkat menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah dan Quartil Pendapatan / kapita | SD | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | Perkotaan | | | | | | | |
| Q1 | 106.94 | 104.69 | 101.03 | 105.68 | 117.01 | 109.1 | 103.7 | 97.73 |
| Q2 | 105.71 | 108.11 | 112.03 | 112.9 | 99.47 | 98.17 | 97.96 | 99.03 |
| Q3 | 104.4 | 104.35 | 109.56 | 108.11 | 102.79 | 103.17 | 103.16 | 103.8 |
| Q4 | 105.88 | 105.19 | 109.79 | 107.34 | 106.48 | 100.4 | 106.14 | 100.54 |
| | Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 102.27 | 97.3 | 103.76 | 98.93 | 97.87 | 103.36 | 100.49 | 101.15 |
| Q2 | 104.35 | 110.34 | 107.58 | 107.94 | 103.9 | 104.11 | 107.02 | 103.31 |
| Q3 | 113.1 | 108.89 | 104.69 | 111.22 | 107.03 | 102.59 | 104.45 | 97.75 |
| Q4 | 101.04 | 93.33 | 96.08 | 103.51 | 102.22 | 106.13 | 102.44 | 102.33 |
| | Kota+Desa | | | | | | | |
| Q1 | 101.84 | 98.09 | 106.37 | 104.83 | 104.9 | 104.92 | 102.03 | 99.4 |
| Q2 | 105.17 | 109.09 | 110.4 | 111.06 | 100.89 | 100.19 | 101.16 | 100.77 |
| Q3 | 104.76 | 106.16 | 109.56 | 107.97 | 103.02 | 102.77 | 104.14 | 105.26 |
| Q4 | 105.13 | 105.84 | 109.79 | 107.34 | 106.48 | 100.4 | 106.14 | 100.54 |

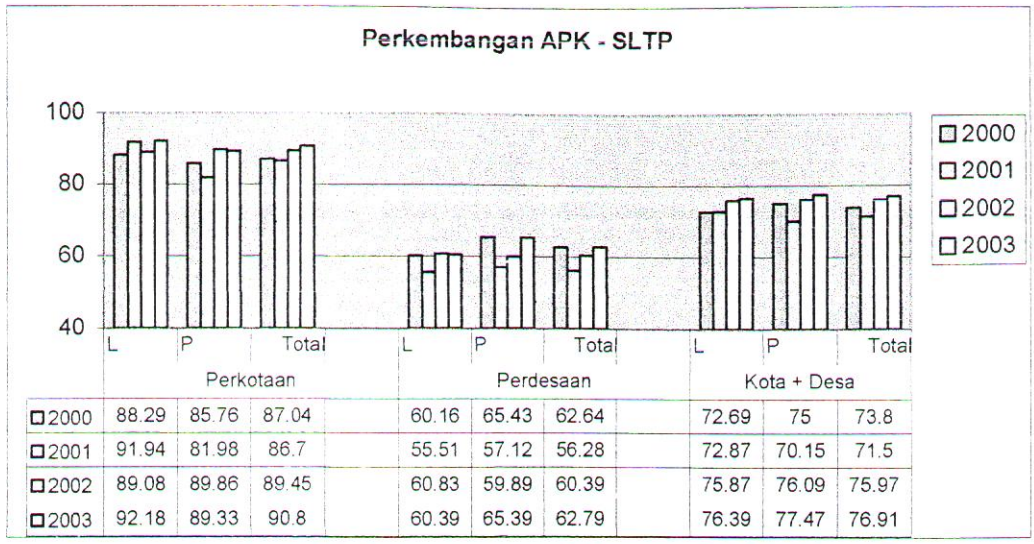
Catatan : Seperti pada Tabel 6.3

### 6.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP.

**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

Secara umum APK tingkat SLTP di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Perkembangan dari tahun 2001 ke tahun 2003 menunjukkan adanya kenaikan APK tingkat SLTP di daerah perkotaan dan perdesaan, baik untuk anak perempuan maupun laki-laki.

Secara umum terdapat kesenjangan antara APK tingkat SLTP untuk kelompok anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan, dan kesenjangan yang terjadi di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan, kecuali pada keadaan tahun 2001. Pada periode tahun 2002-2003, kesenjangan dan indeks paritas mengalami pergeseran. Di Perkotaan kesenjangan bergeser dari dominasi perempuan ke laki-laki, sedangkan di perdesaan terjadi sebaliknya yaitu yang tadinya dominasi laki-laki bergeser ke dominasi perempuan.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 2000 | 88.29 | 85.76 | 87.04 | 60.16 | 65.43 | 62.64 | 72.69 | 75 | 73.8 |
| 2001 | 91.94 | 81.98 | 86.7 | 55.51 | 57.12 | 56.28 | 72.87 | 70.15 | 71.5 |
| 2002 | 89.08 | 89.86 | 89.45 | 60.83 | 59.89 | 60.39 | 75.87 | 76.09 | 75.97 |
| 2003 | 92.18 | 89.33 | 90.8 | 60.39 | 65.39 | 62.79 | 76.39 | 77.47 | 76.91 |

Gambar 6.16. Perkembangan APK tingkat SLTP di Jawa Barat.

Selanjutnya, untuk melihat indeks Paritas dan Disparitasnya, pada Tabel 6.13. disajikan data perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP di Jawa Barat.

Tabel 6.13. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP di Jawa Barat.

| Daerah/Jenis Kelamin | SLTP | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | Perkotaan | | | |
| Laki-Laki | 88.29 | 91.94 | 89.08 | 92.18 |
| Perempuan | 85.76 | 81.98 | 89.86 | 89.33 |
| Total | 87.04 | 86.7 | 89.45 | 90.8 |
| Disparitas | -2.53 | -9.96 | 0.78 | -2.85 |
| Indeks Paritas | 0.97 | 0.89 | 1.01 | 0.97 |
| | Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 60.16 | 55.51 | 60.83 | 60.39 |
| Perempuan | 65.43 | 57.12 | 59.89 | 65.39 |
| Total | 62.64 | 56.28 | 60.39 | 62.79 |
| Disparitas | 5.27 | 1.61 | -0.94 | 5 |
| Indeks Paritas | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 1.08 |
| | Perkotaan + Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 72.69 | 72.87 | 75.87 | 76.39 |
| Perempuan | 75 | 70.15 | 76.09 | 77.47 |
| Total | 73.8 | 71.5 | 75.97 | 76.91 |
| Disparitas | 2.31 | -2.72 | 0.22 | 1.08 |
| Indeks Paritas | 1.03 | 0.96 | 1.00 | 1.01 |

Jika membandingkan APK untuk masing-masing jenis kelamin anak antara wilayah perkotaan dan perdesaan terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar. Pada tahun 2003 APK tingkat SLTP untuk anak perempuan di perkotaan 89,33 persen, di perdesaan sebesar 65,39 persen dan untuk anak laki-laki, dengan APK 92,18 persen di

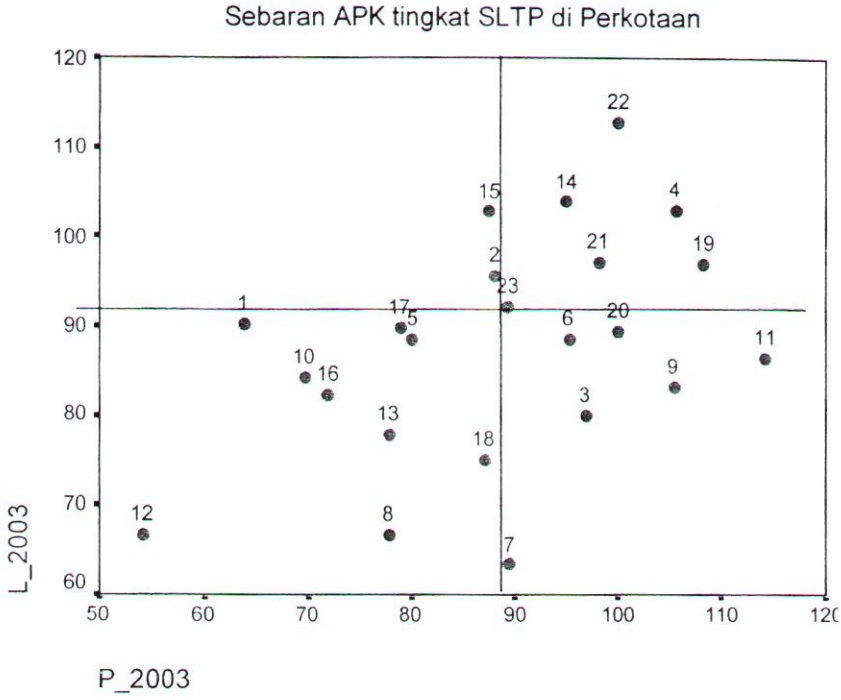
perkotaan dan APK sebesar 60,39 persen di perdesaan. Dilihat dari sisi indeks paritas, yaitu APK perempuan dibagi dengan APKlaki-laki, maka dari tahun 2001 ke tahun 2003 relatif tidak terjadi perubahan atau relatif stabil.

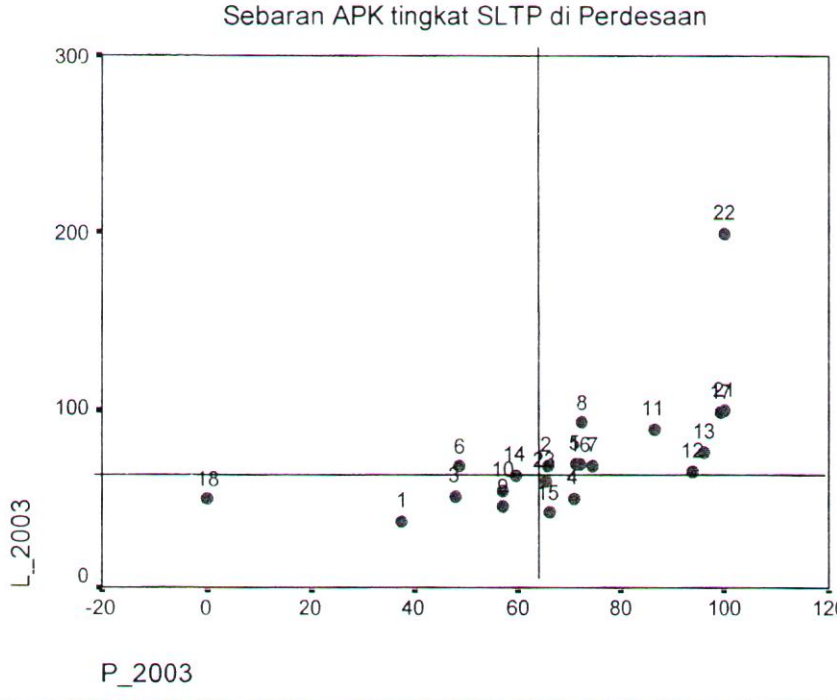
**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Selanjutnya disajikan data mengenai sebaran Keragaman APK tingkat SLTP antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, khususnya tahun 2003 seperti terlihat pada Gambar 6.17 dan Lampiran 12. Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP di perkotaan lebih tersebar sedangkan di perdesaan lebih mengelompok disekitar rata-rata tingkat Propinsi.

Pada wilayah Perkotaan, APK tingkat SLTP untuk anak laki-laki terdapat sebanyak 15 Kabupaten/ Kota (75 persen) yang mempunyai APK berada di bawah tingkat Propinsi, sedangkan untuk kelompok Perempuan terdapat sebanyak 11 Kabupaten/Kota (55 persen). Kabupaten/Kota yang APK tingkat SLTP untuk anak laki-laki nya terendah dibandingkan tingkat Propinsi adalah Kabupaten Ciamis dan untuk anak perempuan adalah Kabupaten Indramayu. Terdapat 9 Kabupaten/ Kota yang APK tingkat SLTP lebih rendah dibandingkan rata-rata Propinsi baik laki-laki maupun perempuan, yaitu Kabupaten Bogor, Garut, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi.

Selanjutnya, seperti terlihat Gambar 6.17., di wilayah perdesaan, dari sejumlah 20 Kabupaten/Kota yang data APK nya tersedia, ternyata jumlah Kabupaten/Kota yang APK tingkat SLTPnya lebih rendah dari rata-rata Propinsi adalah sebanyak 5 Kabupaten/Kota (25 persen) baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, yaitu Kab. Bogor, Cirebon, Cianjur, Majalengka dan Kota Sukabumi. Kabupaten Bogor adalah wilayah dengan APK tingkat SLTP untuk anak laki-laki yang terendah, sedangkan yang terendah untuk anak perempuan adalah Kota Sukabumi. Dibandingkan dengan di perkotaan, di perdesaan jumlah Kabupaten/Kota yang APK tingkat SLTPnya di atas rata-rata Propinsi lebih banyak yaitu sebanyak 10 Kabupaten/Kota.



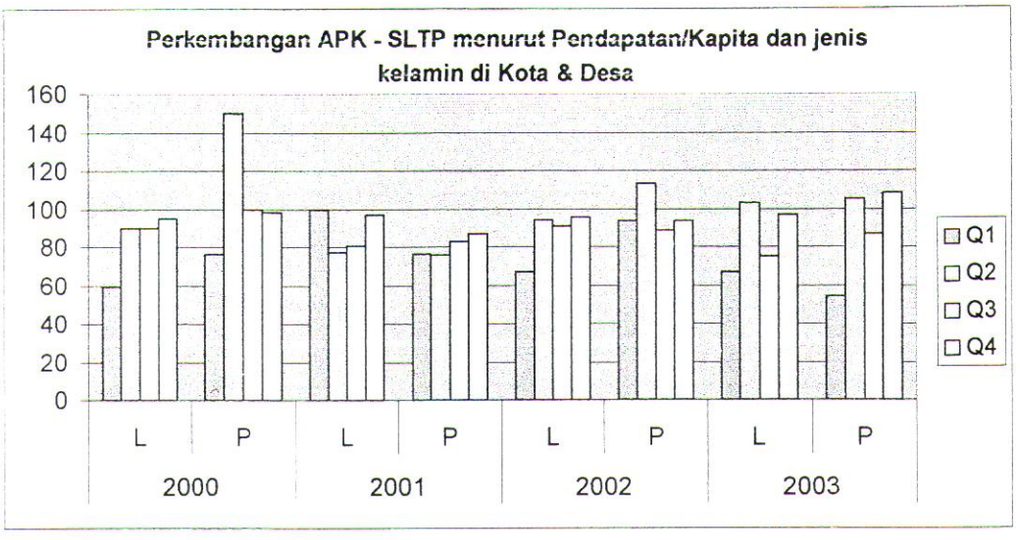




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

Gambar 6.17. Keragaman APK tingkat SLTP antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, tahun 2003.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Perkembangan APK tingkat SLTP pada periode 2000 – 2003 seperti yang disajikan pada Gambar 6.18 menunjukkan keragaman antar quartil pendapatan per kapita per bulan. Pengaruh peningkatan pendapatan terhadap APK tingkat SLTP baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai pola yang sama. Pada periode 2000-2003, kecuali tahun 2001 peningkatan pendapatan dari Q1 ke Q2, dan dari Q3 ke Q4 disertai dengan peningkatan APK, sedangkan peningkatan baik untukuntuk anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi peningkatan pendapatan dari Q2 ke Q3 malah disertai dengan penurunan APK tingkat SLTP.




Gambar 6.18. Perkembangan APK tingkat SLTP menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Tabel 6.14. menyajikan data hubungan antara pendapatan per kapita (quartil pendapatan) terhadap APK menurut daerah, khususnya pada tahun 2003. Seperti terlihat pada Tabel 6.14, di daerah perkotaan baik pada Quartil Kedua (Q2),Quartil Ketiga (Q3), dan quartil keempat (Q4), APK tingkat SLTP anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki, dan keadaan sebaliknya terdapat pada Quartil Pertama (Q1). Di perdesaan, APK tingkat SLTP untuk anak perempuan yang lebih besar dari anak laki-laki hanya dijumpai pada rumahtangga dengan pendapatan pada Quartil Pertama (Q2), sedangkan pada quartil pendapatan Q1, Q3, dan Q4 APK anak laki-laki lebih besar.

Tabel 6.14. Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Quartil Pendapatan / kapita | SLTP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | Perkotaan | | | | | | | |
| Q1 | 59.26 | 76.32 | 100 | 76.19 | 66.67 | 93.55 | 66.68 | 54.17 |
| Q2 | 90 | 150 | 77.36 | 75.71 | 94.31 | 113.55 | 102.86 | 105.55 |
| Q3 | 89.83 | 100 | 80.6 | 82.69 | 90.67 | 88.25 | 74.98 | 87.01 |
| Q4 | 95.29 | 98.48 | 97.09 | 87.04 | 95.58 | 93.65 | 96.84 | 108.24 |
| | Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 38.71 | 64.44 | 40.48 | 44.05 | 48.58 | 35.29 | 51.85 | 47.94 |
| Q2 | 100 | 111.11 | 51.52 | 56.67 | 60 | 50 | 50 | 70.73 |
| Q3 | 79.07 | 75.38 | 56.25 | 68.52 | 60.71 | 68.09 | 92.68 | 72.5 |
| Q4 | 87.5 | 68.29 | 78.38 | 80.49 | 60 | 78.78 | 88.87 | 86.48 |
| | Kota+Desa | | | | | | | |
| Q1 | 71.19 | 75.64 | 73.88 | 70.06 | 64.41 | 73.72 | 65.88 | 81.33 |
| Q2 | 94.12 | 134.78 | 66.53 | 69.39 | 83.49 | 93.21 | 85.99 | 93.44 |
| Q3 | 79.45 | 91.8 | 79.65 | 82.25 | 86.98 | 87.58 | 73.92 | 85.21 |
| Q4 | 96.47 | 97.06 | 97.09 | 87.04 | 95.58 | 93.65 | 96.84 | 108.24 |

Catatan : Seperti pada Tabel 6.3.

### 6.1.1.3. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SLTA

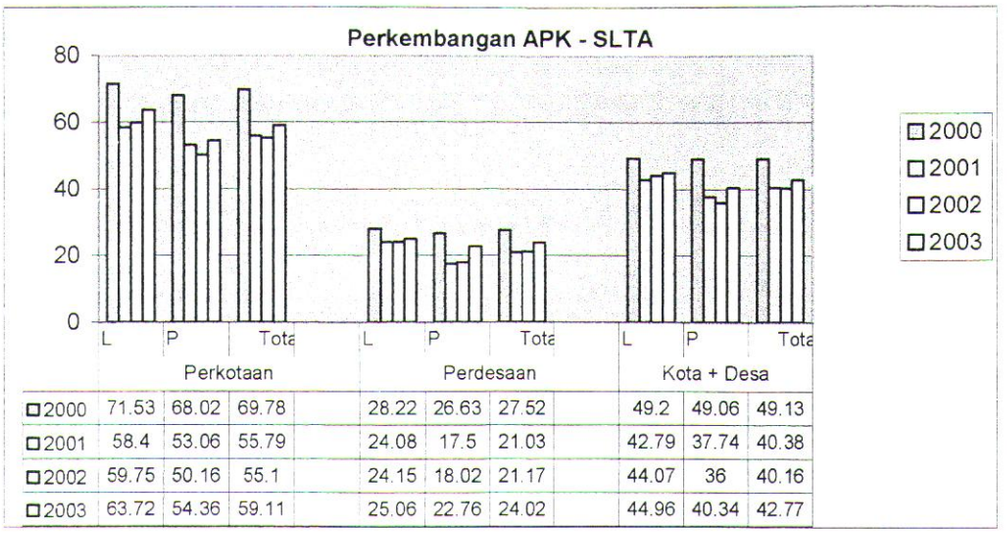
**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

Secara umum APK tingkat SLTA di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Perkembangan dari tahun 2000 ke tahun 2001 menunjukkan penurunan APK tingkat SLTA untuk anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Akan tetapi dari tahun 2001 ke tahun 2003 terjadi kecenderungan yang sama yaitu kenaikan APK (Gambar 6.19).

Secara umum terdapat kesenjangan antara APK tingkat SLTA untuk anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan, dan kesenjangan yang terjadi di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan, kecuali pada keadaan tahun 2001. Keadaan ini bertolak belakang dengan APK tingkat SLTP. Data pada Tabel 6.15 menunjukkan bahwa kesenjangan terjadi dengan dominasi akses pendidikan untuk anak laki-laki..

Jika dibandingkan APK untuk masing-masing jenis kelamin anak antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar. Pada tahun 2003 APK tingkat SLTA untuk anak perempuan di perkotaan 54,36

persen, di perdesaan sebesar 22,76 persen dan untuk anak laki-laki, dengan APK 63,72 persen di perkotaan dan APK sebesar 25,06 persen di perdesaan (Tabel 6.15).




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 71.53 | 68.02 | 69.78 | 28.22 | 26.63 | 27.52 | 49.2 | 49.06 | 49.13 |
| 2001 | 58.4 | 53.06 | 55.79 | 24.08 | 17.5 | 21.03 | 42.79 | 37.74 | 40.38 |
| 2002 | 59.75 | 50.16 | 55.1 | 24.15 | 18.02 | 21.17 | 44.07 | 36 | 40.16 |
| 2003 | 63.72 | 54.36 | 59.11 | 25.06 | 22.76 | 24.02 | 44.96 | 40.34 | 42.77 |

Gambar 6.19. Perkembangan APK tingkat SLTA di Jawa Barat.

Dilihat dari sisi indeks paritas, yaitu APK perempuan dibagi dengan APK laki-laki, maka dari tahun 2002 ke tahun 2003 terjadi peningkatan dan yang terjadi di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan.

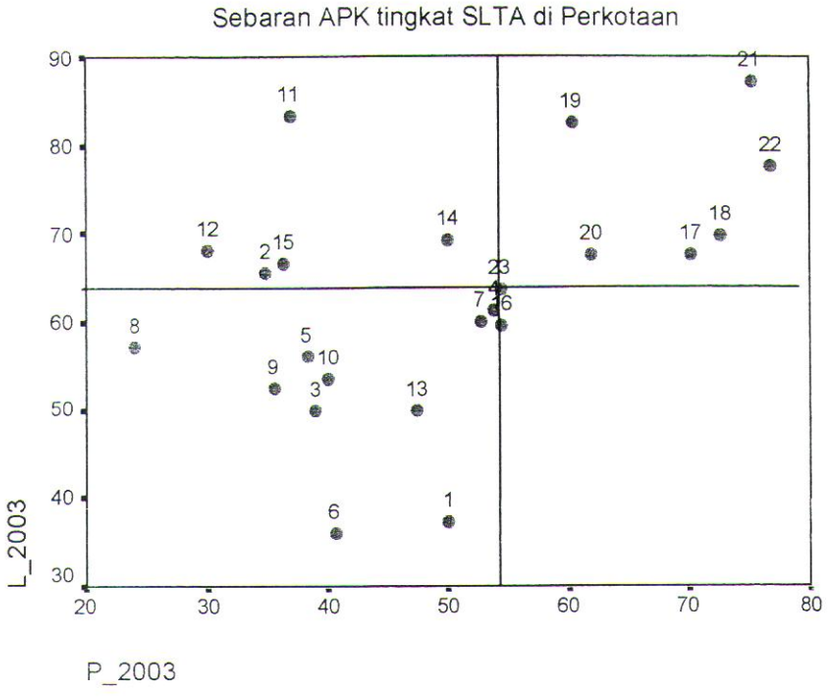
Tabel 6.15. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA di Jawa Barat.

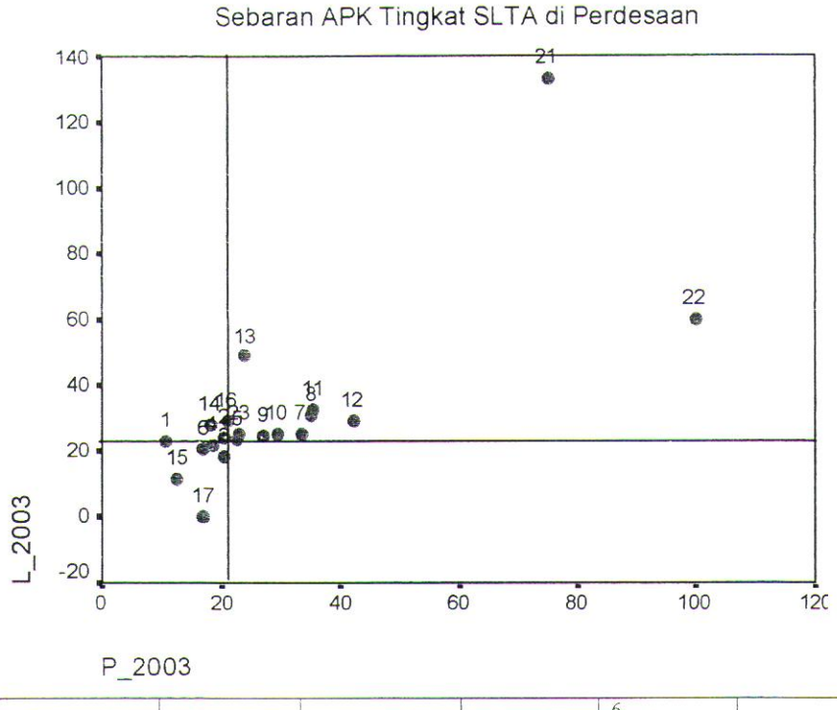
| Daerah/Jenis Kelamin | SLTA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | Perkotaan | | | |
| Laki-Laki | 71.53 | 58.4 | 59.75 | 63.72 |
| Perempuan | 68.02 | 53.06 | 50.16 | 54.36 |
| Total | 69.78 | 55.79 | 55.1 | 59.11 |
| Disparitas | -3.51 | -5.34 | -9.59 | -9.36 |
| Indeks Paritas | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.85 |
| | Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 28.22 | 24.08 | 24.15 | 25.06 |
| Perempuan | 26.63 | 17.5 | 18.02 | 22.76 |
| Total | 27.52 | 21.03 | 21.17 | 24.02 |
| Disparitas | -1.59 | -6.58 | -6.13 | -2.3 |
| Indeks Paritas | 0.94 | 0.73 | 0.75 | 0.91 |
| | Perkotaan + Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 49.2 | 42.79 | 44.07 | 44.96 |
| Perempuan | 49.06 | 37.74 | 36 | 40.34 |
| Total | 49.13 | 40.38 | 40.16 | 42.77 |
| Disparitas | -0.14 | -5.05 | -8.07 | -4.62 |
| Indeks Paritas | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.90 |

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA tahun menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota, seperti ditunjukkan Gambar 6.20 dan Lampiran 12. Di perkotaan, APK tingkat SLTA untuk anak laki-laki terdapat sebanyak 11 Kabupaten/Kota (50 persen) yang mempunyai APK berada di bawah tingkat Propinsi, sedangkan untuk Perempuan terdapat sebanyak 15 Kabupaten/Kota (68 persen). Kabupaten/ Kota yang APK tingkat SLTA untuk anak laki-laki nya terendah dibandingkan tingkat Propinsi adalah Kabupaten Tasikmalaya dan untuk anak perempuan adalah Kabupaten Kuningan. Terdapat 6 Kota yang APK tingkat SLTA lebih tinggi dibandingkan rata-rata Propinsi, yaitu Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi dan Depok, dan terdapat sebanyak 10 Kabupaten yang mempunyai APK laki-laki dan perempuan yang lebih rendah dari rata-rata tingkat propinsi. Ke-10 Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Cianjur, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, dan Subang.

Di wilayah perdesaan, dari sejumlah 19 Kabupaten/Kota yang data APK nya tersedia, ternyata jumlah Kabupaten/Kota pada wilayah perdesaan yang APK tingkat SLTAnya lebih rendah dari rata-rata Propinsi adalah sebanyak 10 Kabupaten/Kota (58 persen) untuk anak laki-laki dan 9 Kabupaten/Kota (53 persen) untuk perempuan. Kota Bogor adalah wilayah dengan APK tingkat SLTA untuk anak laki-laki yang terendah, sedangkan yang terendah untuk anak perempuan adalah Kabupaten Bogor. Dibandingkan dengan di perkotaan, di perdesaan jumlah Kabupaten/Kota yang APK tingkat SLTAnya di atas rata-rata Propinsi lebih banyak yaitu sebanyak 9 Kabupaten/Kota. Walaupun demikian masih terdapat sebanyak 8 Kabupaten yang mempunyai APK laki-laki dan perempuan yang lebih rendah dari rata-rata tingkat propinsi. Ke delapan Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung, Cianjur, Garut, Karawang, dan Kota Bogor.



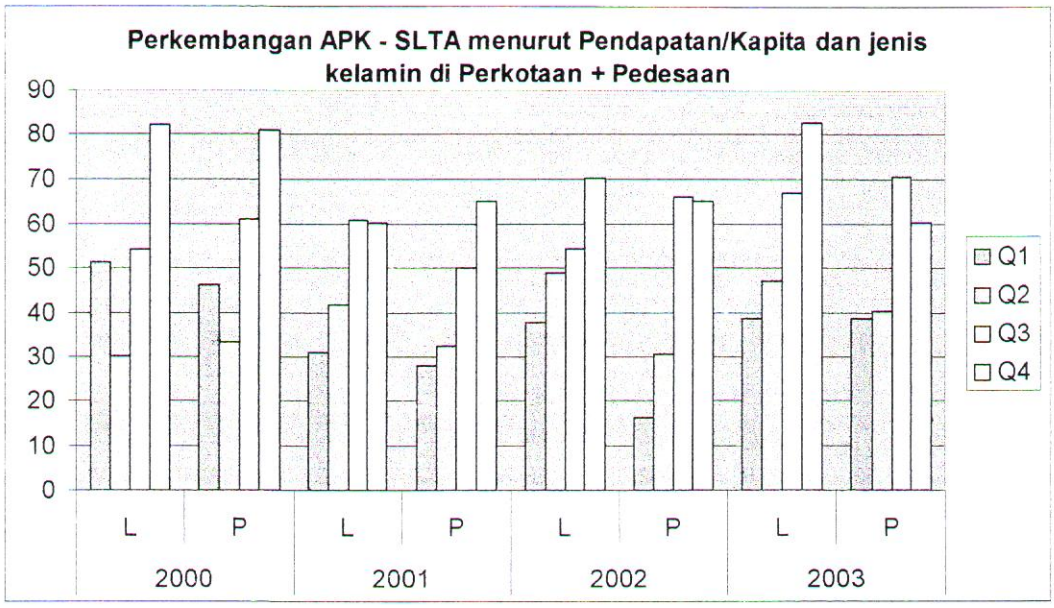




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

Gambar 6.20. Keragaman APK tingkat SLTA antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, tahun 2003.

### c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.

Perkembangan APK tingkat SLTA pada periode 2000 – 2003 seperti yang disajikan pada Gambar 6.21 menunjukkan keragaman antar quartil pendapatan per kapita. Pengaruh peningkatan pendapatan terhadap APK tingkat SLTA pada anak laki-laki diiringi juga dengan peningkatan APK, kecuali pada tahun 2000. Untuk anak perempuan, sejak tahun 2001 sampai 2002 menunjukkan kecenderungan bahwa peningkatan pendapatan dari Q2 sampai dengan Q4 disertai dengan peningkatan APK, akan tetapi sejak tahun 2003 peningkatan pendapatan dari Q3 ke Q4 menunjukkan penurunan.




Gambar 6.21. Perkembangan APK tingkat SLTA menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Pada Tabel 6.16. dikemukakan data pendapatan per kapita per bulan (quartil pendapatan) menurut daerah data pada tahun 2003 . Tabel 6.16 menunjukkan bahwa di daerah perkotaan, kecuali pada pendapatan pada quartil ketiga (Q3), APK tingkat SLTA untuk anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Di perdesaan, kecuali pada quartil pendapatan kedua (Q2) APK tingkat SLTA anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Secara umum di perdesaan kondisi tahun 2003 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan penduduk diiringi dengan peningkatan APK baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 6.16. Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah dan Quartil Pendapatan / kapita | SLTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | Perkotaan | | | | | | | |
| Q1 | 80.00 | 60.00 | 47.17 | 42.86 | 82.62 | 40.90 | 68.17 | 30.01 |
| Q2 | 42.31 | 37.93 | 47.95 | 43.42 | 65.00 | 38.96 | 61.21 | 53.76 |
| Q3 | 58.11 | 66.67 | 60.94 | 50.79 | 54.20 | 67.28 | 69.61 | 72.69 |
| Q4 | 81.11 | 81.25 | 60.26 | 64.97 | 70.09 | 65.01 | 82.53 | 60.33 |
| | Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 19.61 | 27.03 | 19.67 | 15.07 | 10.34 | 6.67 | 18.46 | 20.29 |
| Q2 | 11.76 | 20.00 | 29.03 | 7.14 | 20.51 | 12.91 | 21.82 | 18.37 |
| Q3 | 26.00 | 44.00 | 29.17 | 21.31 | 37.73 | 32.19 | 30.91 | 35.02 |
| Q4 | 30.23 | 28.57 | 28.79 | 12.50 | 30.54 | 14.70 | 32.50 | 35.28 |
| | Kota+Desa | | | | | | | |
| Q1 | 51.25 | 46.30 | 31.13 | 28.06 | 37.90 | 16.27 | 38.68 | 38.64 |
| Q2 | 30.23 | 33.33 | 41.71 | 32.57 | 48.95 | 30.68 | 47.14 | 40.26 |
| Q3 | 54.26 | 60.98 | 60.77 | 50.02 | 54.44 | 66.00 | 66.88 | 70.50 |
| Q4 | 82.22 | 80.87 | 60.26 | 64.97 | 70.09 | 65.01 | 82.53 | 60.33 |

Catatan : Seperti pada Tabel 6.3

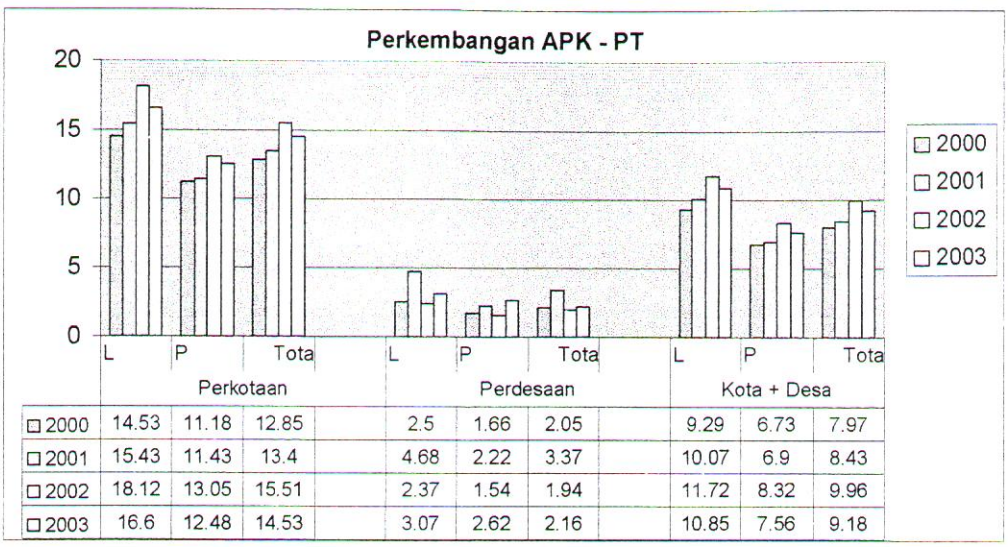
### 6.1.1.4. Angka Partisipasi Kasar tingkat Perguruan Tinggi (PT)

**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

Secara umum APK pada berbagai tingkat pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka APK penduduk semakin rendah, dan APK tingkat PT adalah terendah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kesenjangan APK tingkat PT semakin besar pada daerah perdesaan. Di perkotaan, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan, APK tingkat PT menunjukkan peningkatan dari tahun 2000-2002, akan tetapi menurun dari tahun 2002 ke tahun 2003. Di pedesaan kenaikan APK tingkat PT terjadi pada periode 2000-2001, dan menurun dari 2001 ke 2002, dan kemudian meningkat lagi dari tahun 2002 ke tahun 2003 (Gambar 6.22).

Pada Tabel 6.17 disajikan data APK Tingkat Perguruan Tinggi (PT) di Propinsi Jawa Barat. Secara umum terdapat kecenderungan bahwa APK perempuan baik di perkotaan dan di perdesaan terhadap PT lebih rendah dibanding laki-laki. Namun demikian, jika dilihat di masing-masing wilayah diketahui bahwa di perkotaan kesenjangan gender yang ada lebih rendah dibanding di perdesaan. Seperti terlihat pada Tabel 6.17. IP di perkotaan relatif lebih tinggi dibanding di perkotaan,

kecuali untuk perdesaan pada tahun 2003. Di perkotaan nilai IP di atas 0,7, sementara di perdesaan di bawah 0,66 , kecuali di perdesaan pada tahun 2003 menunjukkan IP lebih tinggi yaitu 0.85.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 14.53 | 11.18 | 12.85 | 2.5 | 1.66 | 2.05 | 9.29 | 6.73 | 7.97 |
| 2001 | 15.43 | 11.43 | 13.4 | 4.68 | 2.22 | 3.37 | 10.07 | 6.9 | 8.43 |
| 2002 | 18.12 | 13.05 | 15.51 | 2.37 | 1.54 | 1.94 | 11.72 | 8.32 | 9.96 |
| 2003 | 16.6 | 12.48 | 14.53 | 3.07 | 2.62 | 2.16 | 10.85 | 7.56 | 9.18 |

Gambar 6.22. Perkembangan APK tingkat PT di Jawa Barat.

Di perkotaan disparitas tertinggi dijumpai pada tahun 2002, yakni sekitar 5 persen. Berbeda dari perkotaan, di perdesaan, oleh karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama kurang akses maka disparitasnya kurang dari 3 persen.

Tabel 6.17. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat PT di Jawa Barat.

| Daerah/Jenis Kelamin | PT | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | Perkotaan | | | |
| Laki-Laki | 14.53 | 15.43 | 18.12 | 16.6 |
| Perempuan | 11.18 | 11.43 | 13.05 | 12.48 |
| Total | 12.85 | 13.4 | 15.51 | 14.53 |
| Disparitas | -3.35 | -4 | -5.07 | -4.12 |
| Indeks Paritas | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
| | Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 2.5 | 4.68 | 2.37 | 3.07 |
| Perempuan | 1.66 | 2.22 | 1.54 | 2.62 |
| Total | 2.05 | 3.37 | 1.94 | 2.16 |
| Disparitas | -0.84 | -2.46 | -0.83 | -0.45 |
| Indeks Paritas | 0.66 | 0.47 | 0.65 | 0.85 |
| | Perkotaan + Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 9.29 | 10.07 | 11.72 | 10.85 |
| Perempuan | 6.73 | 6.9 | 8.32 | 7.56 |
| Total | 7.97 | 8.43 | 9.96 | 9.18 |
| Disparitas | -2.56 | -3.17 | -3.4 | -3.29 |
| Indeks Paritas | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.70 |

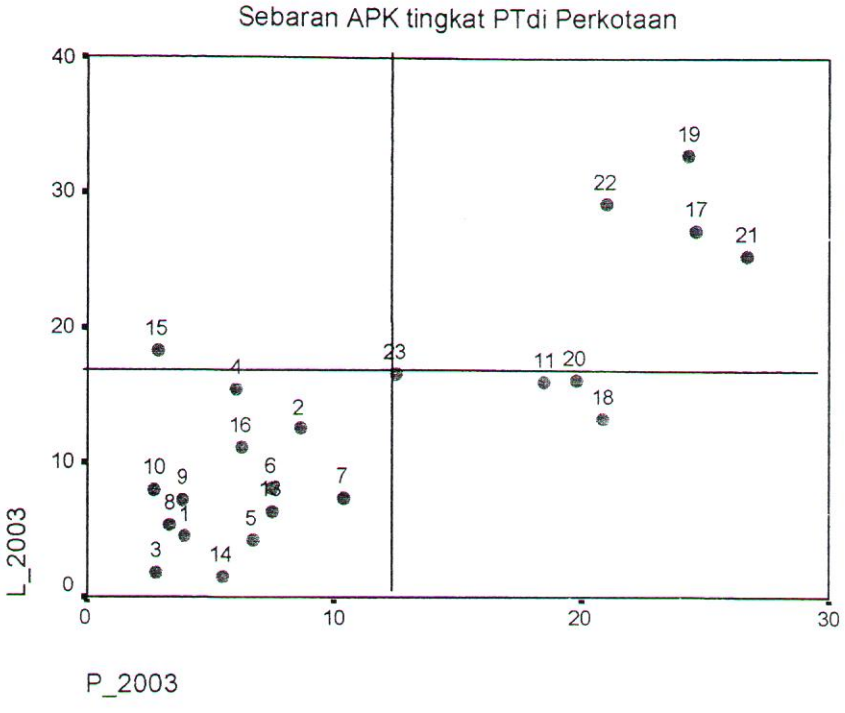
Walaupun demikian, jika kita cermati, sejak tahun 2002 terdapat kecenderungan penurunan kesenjangan pada periode 4 tahun tersebut. Keadaan ini ditunjukkan oleh data bahwa pada periode 2001-2003 akses penduduk perempuan terhadap pendidikan tinggi (PT) baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan kecenderungan meningkat.

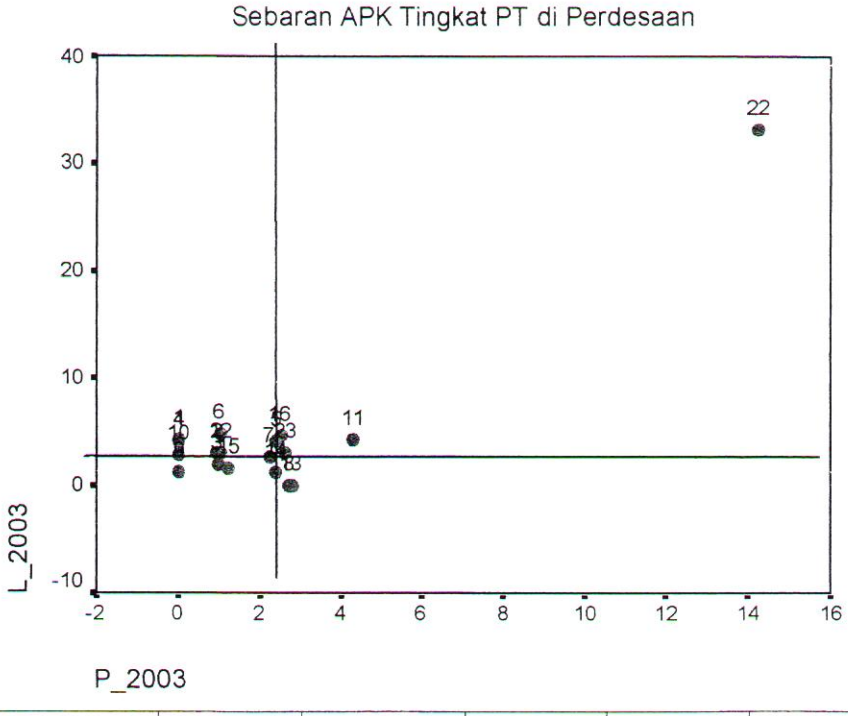
**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Kasar tingkat PT menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota serta wilayah seperti terlihat pada Gambar 6.23 dan Lampiran 12.. Terlihat bahwa di wilayah Perkotaan, terdapat sebanyak 17 Kabupaten/Kota (77 persen) yang mempunyai APK tingkat PT anak laki-laki yang berada di bawah APK-PT tingkat Propinsi, yaitu kabupaten-kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Camis, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Subang, Karawang, Bekasi, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi. Adapun pada kelompok perempuannya terdapat di sebanyak 15 Kabupaten/Kota (68 persen), yakni kabupaten-kabupaten seperti yang ada pada kelompok laki-laki, kecuali Kota Bandung dan Kota Cirebon. APK tingkat PT untuk anak laki-laki yang terendah dijumpai ada di adalah Kabupaten Purwakarta, sementara untuk anak perempuan ada di Kabupaten Indramayu. Lebih lanjut, terdapat 4 kota yang memiliki PT yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Propinsi, yaitu Kota Bogor, Bandung, Cirebon, Bekasi dan Depok.

Di wilayah perdesaan, dari sejumlah 17 Kabupaten/Kota yang data APK nya tersedia, ternyata jumlah Kabupaten/Kota pada wilayah perdesaan yang APK tingkat PTnya lebih rendah dari rata-rata Propinsi adalah sebanyak 9 Kabupaten/Kota (53 persen) untuk anak laki-laki dan 13 Kabupaten/Kota (76 persen) untuk perempuan.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa akses anggota keluarga dan masyarakat di banyak kabupaten terhadap pendidikan tinggi masih relatif rendah. Hal ini dimungkinkan oleh karena banyak hal, alasan utama adalah faktor ekonomi. Sebagaimana diketahui di beberapa kabupaten di Jawa Barat didominasi oleh masyarakat petani dan mereka yang bekerja di sektor informal yang memberikan penghasilan keluarga relatif rendah. Di pihak lain, pada masyarakat Sunda di jawa Barat masih dijumpai budaya kawin pada umur muda



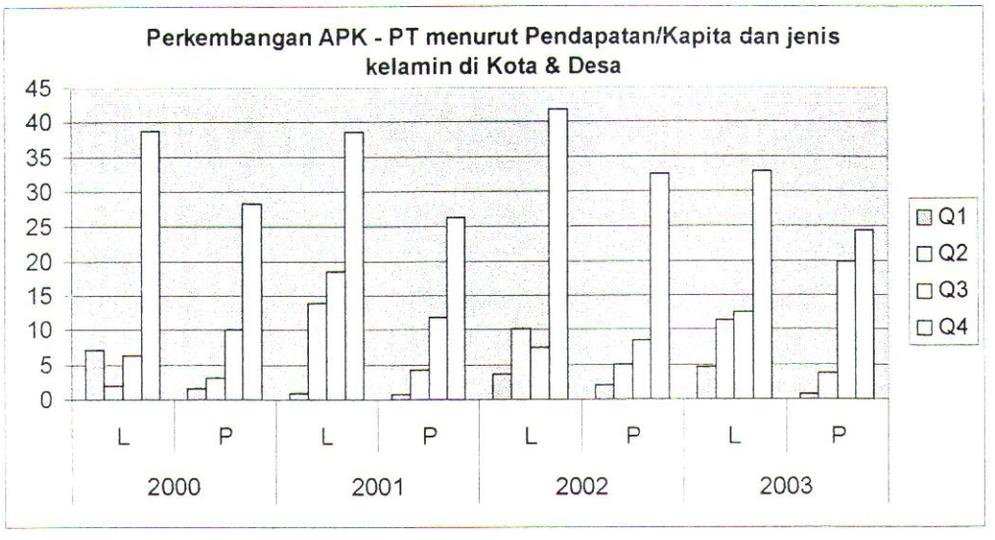




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

Gambar 6.23. Keragaman APK tingkat PT antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, tahun 2003.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Perkembangan APK tingkat PT pada periode 2000 – 2003 seperti yang disajikan pada Gambar 6.24 menunjukkan keragaman antar quartil pendapatan per kapita. Pengaruh peningkatan pendapatan terhadap APK tingkat PT pada penduduk perempuan dari tahun ke tahun selalu diiringi juga dengan peningkatan APK. Pada penduduk laki-laki, kecenderungan yang sama terjadi, kecuali pada tahun 2000 dan tahun 2002.




Gambar 6.24. Perkembangan APK tingkat PT menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Apabila dibandingkan pengaruh pendapatan per kapita (quartil pendapatan) menurut daerah data pada tahun 2003 seperti disajikan pada Tabel 6.18 menunjukkan bahwa di daerah perkotaan, kecuali pada pendapatan pada quartil ketiga (Q3), APK tingkat PT untuk anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Keadaan ini juga dijumpai pada APK tingkat PT. Di perdesaan, kecuali pada quartil pendapatan kedua (Q3) APK tingkat PT anak perempuan juga lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Secara umum di perdesaan kondisi tahun 2003 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan penduduk diiringi dengan peningkatan APK baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebagai pengecualian adalah pada Q2 dan Q3 di pedesaan.

Tabel 6.18. Angka Partisipasi Kasar tingkat PT menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Quartil Pendapatan / kapita | PT | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | Perkotaan | | | | | | | |
| Q1 | 7.5 | 3.45 | 2.86 | 2.9 | 7.4 | 3.93 | 10.35 | 0 |
| Q2 | 2.27 | 2.04 | 18.75 | 5.63 | 14.16 | 7.43 | 15.38 | 6.01 |
| Q3 | 6.61 | 10.57 | 18.97 | 11.93 | 7.7 | 8.64 | 13.29 | 20.87 |
| Q4 | 38.84 | 28.19 | 38.66 | 26.35 | 41.73 | 32.46 | 32.82 | 24.35 |
| | Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 2.86 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 2.04 | 0.97 |
| Q2 | 0 | 6.25 | 2.04 | 1.69 | 3.45 | 0 | 4.12 | 0 |
| Q3 | 2.7 | 2.47 | 3.23 | 4.12 | 3.85 | 2.47 | 0 | 2.7 |
| Q4 | 0 | 4.48 | 9.21 | 0.95 | 1.59 | 2.74 | 4.29 | 4.29 |
| | Kota+Desa | | | | | | | |
| Q1 | 7.22 | 1.57 | 0.87 | 0.84 | 3.64 | 2.15 | 4.73 | 0.76 |
| Q2 | 1.92 | 3.08 | 14.02 | 4.35 | 10.17 | 5.06 | 11.41 | 3.75 |
| Q3 | 6.34 | 10 | 18.54 | 11.87 | 7.5 | 8.47 | 12.49 | 19.88 |
| Q4 | 38.77 | 28.35 | 38.66 | 26.35 | 41.73 | 32.46 | 32.82 | 24.35 |

Catatan : Seperti pada Tabel 6.3

### 6.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM).

Seperti halnya dengan uraian mengenai APS dan APK, disparitas gender dalam bidang pendidikan formal berdasarkan angka partisipasi murni di Jawa Barat akan diuraikan berdasarkan keragaman antar wilayah pedesaan dan perkotaan, antar Kabupaten/Kota dan antar kelompok pendapatan per kapita penduduk. Berbeda dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) mencerminkan persentase penduduk yang sedang mengikuti pendidikan formal tertentu, dengan memperhatikan kelompok usia tertentu pada jenjang pendidikan yang bersangkutan..

Gambaran mengenai perkembangan akses terhadap pendidikan penduduk laki-laki dan perempuan antara tahun 2000 – 2003 berdasarkan APM disajikan pada Tabel 6.19. Secara umum terlihat adanya kecenderungan dimana semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APM, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada setiap tahun terdapat kecenderungan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah APM baik pada siswa laki-laki maupun perempuan. Yang menarik adalah bahwa APM Anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki pada SD dan SMP untuk setiap tahunnya, sebaliknya pada PT dan SLTA pada tahun 2000, Kesetaraan gender yang ditunjukkan oleh IP = 1 ditemukan untuk jenjang SD, SLTP dan SMU khusus tahun 2001. Pada tahun 2001 – 2003 untuk SMU dan PT untuk semua

tahun menunjukkan IP yang negatif atau perempuan kurang akses dibanding laki-laki. Namun demikian, tingkat kesenjangannya relatif rendah, seperti ditunjukkan oleh nilai disparitas yang kurang dari 1 persen.

Tabel 6.19. Angka Partisipasi Murni di Jawa Barat pada Tahun 2000 – 2003.

| Tingkat Pendidikan/ Jenis Kelamin | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | SD | | | |
| Laki-Laki | 92.44 | 93.42 | 93.59 | 92.22 |
| Perempuan | 93.14 | 93.45 | 94.07 | 92.69 |
| Total | 92.78 | 93.44 | 93.82 | 92.45 |
| Disparitas | 0.7 | 0.03 | 0.48 | 0.47 |
| Indeks Paritas | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| | SLTP | | | |
| Laki-Laki | 56.96 | 56.38 | 60.98 | 56.96 |
| Perempuan | 62.58 | 58.07 | 60.57 | 58.14 |
| Total | 59.66 | 57.23 | 60.79 | 57.53 |
| Disparitas | 5.62 | 1.69 | -0.41 | 1.18 |
| Indeks Paritas | 1.10 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |
| | SLTA | | | |
| Laki-Laki | 39.12 | 32.88 | 35.24 | 36.14 |
| Perempuan | 40.47 | 31.22 | 30.66 | 32.99 |
| Total | 39.76 | 32.09 | 33.02 | 34.65 |
| Disparitas | 1.35 | -1.66 | -4.58 | -3.15 |
| Indeks Paritas | 1.03 | 0.95 | 0.87 | 0.91 |
| | PT | | | |
| Laki-Laki | 7.19 | 7.47 | 8.41 | 8.01 |
| Perempuan | 5.55 | 5.79 | 6.64 | 6.03 |
| Total | 6.34 | 6.6 | 7.5 | 7 |
| Disparitas | -1.64 | -1.68 | -1.77 | -1.98 |
| Indeks Paritas | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.75 |

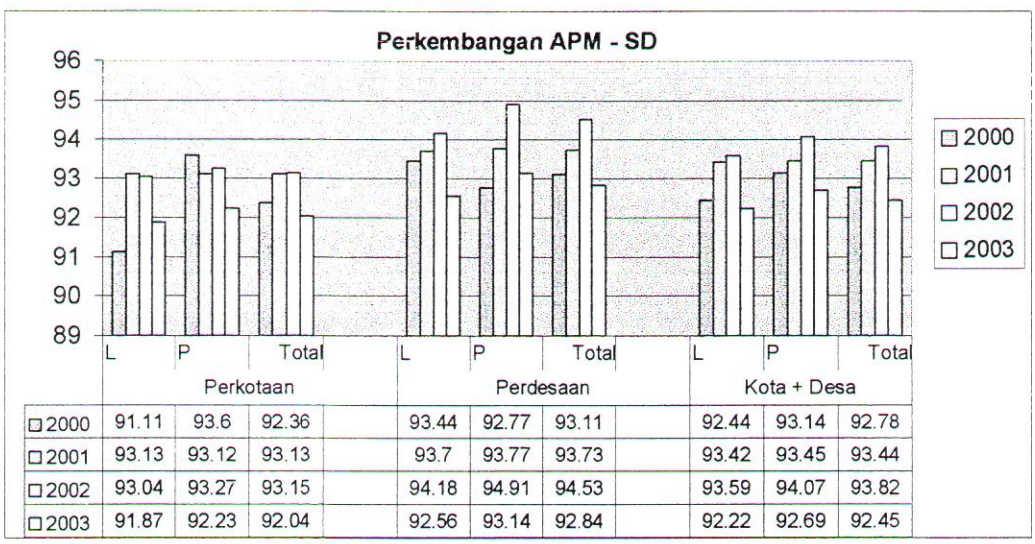
Temuan lainnya adalah bahwa jika dibanding dengan tahun 2000, pada tahun 2003 APM pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA menunjukkan penurunan, sebaliknya pada jenjang pendidikan PT menunjukkan peningkatan. Lebih lanjut, dari tahun 2002 ke tahun 2003 terlihat adanya perkembangan APM yang berbeda; yakni ditemukan adanya peningkatan pada tingkat SLTA dan penurunan pada tingkat PT, baik untuk penduduk laki-laki dan perempuan. Pada Tabel 6.22 ditunjukkan perbedaan akses pendidikan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada jenjang pendidikan SLTA dan PT pada tahun 2003 data menunjukkan bahwa APM perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki, sedangkan APM pada jenjang pendidikan SD dan SLTP untuk perempuan adalah lebih besar dibandingkan laki-

laki..Berdasarkan kondisi pada tahun 2003, ternyata indeks paritas dari jenjang pendidikan SLTP ke PT menunjukkan kecenderungan menurun, yang berarti semakin besarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dengan kecenderungan lebih didominasi penduduk laki-laki.

### 6.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD.

**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

Perkembangan APM tingkat SD dari tahun 2002 ke tahun 2003 menunjukkan kecenderungan penurunan. Keadaan ini terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan baik pada anak laki-laki maupun perempuan (Gambar 6.25). Secara umum, APM tingkat SD di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan di perdesaan, untuk anak laki-laki maupun perempuan.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 2000 | 91.11 | 93.6 | 92.36 | 93.44 | 92.77 | 93.11 | 92.44 | 93.14 | 92.78 |
| 2001 | 93.13 | 93.12 | 93.13 | 93.7 | 93.77 | 93.73 | 93.42 | 93.45 | 93.44 |
| 2002 | 93.04 | 93.27 | 93.15 | 94.18 | 94.91 | 94.53 | 93.59 | 94.07 | 93.82 |
| 2003 | 91.87 | 92.23 | 92.04 | 92.56 | 93.14 | 92.84 | 92.22 | 92.69 | 92.45 |

Gambar 6.25. Perkembangan APM tingkat SD di Jawa Barat.

Secara umum terdapat kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan, kecuali pada tahun 2000 di perkotaan yang ditunjukkan oleh indeks paritas APM yang berkisar 1 (satu). Jika dilihat dari nilai APMnya terdapat kesenjangan dengan dominasi anak perempuan, khususnya pada tahun 2002 dan 2003 baik di perkotaan maupun di perdesaan. Walaupun demikian terdapat kecenderungan bahwa kesenjangan tersebut di perdesaan cenderung menurun dari tahun 2002 ke tahun 2003, akan tetapi di daerah perkotaan kesenjangan tersebut meningkat. Baik di perkotaan maupun di perdesaan APM tingkat SD di dominasi murid perempuan. Lebih lanjut, jika membandingkan APM menurut jenis kelamin anak dan wilayah, khususnya pada tahun 2003, diketahui tidak terlihat adanya

kesenjangan yang berarti. APM tingkat SD untuk anak perempuan di perkotaan 92,23 persen, di perdesaan sebesar 93,14 persen, untuk anak laki-laki diperkotaan APM 91,87 persen dan perdesaan sebesar 92,56 persen di perdesaan (Tabel 6.20).

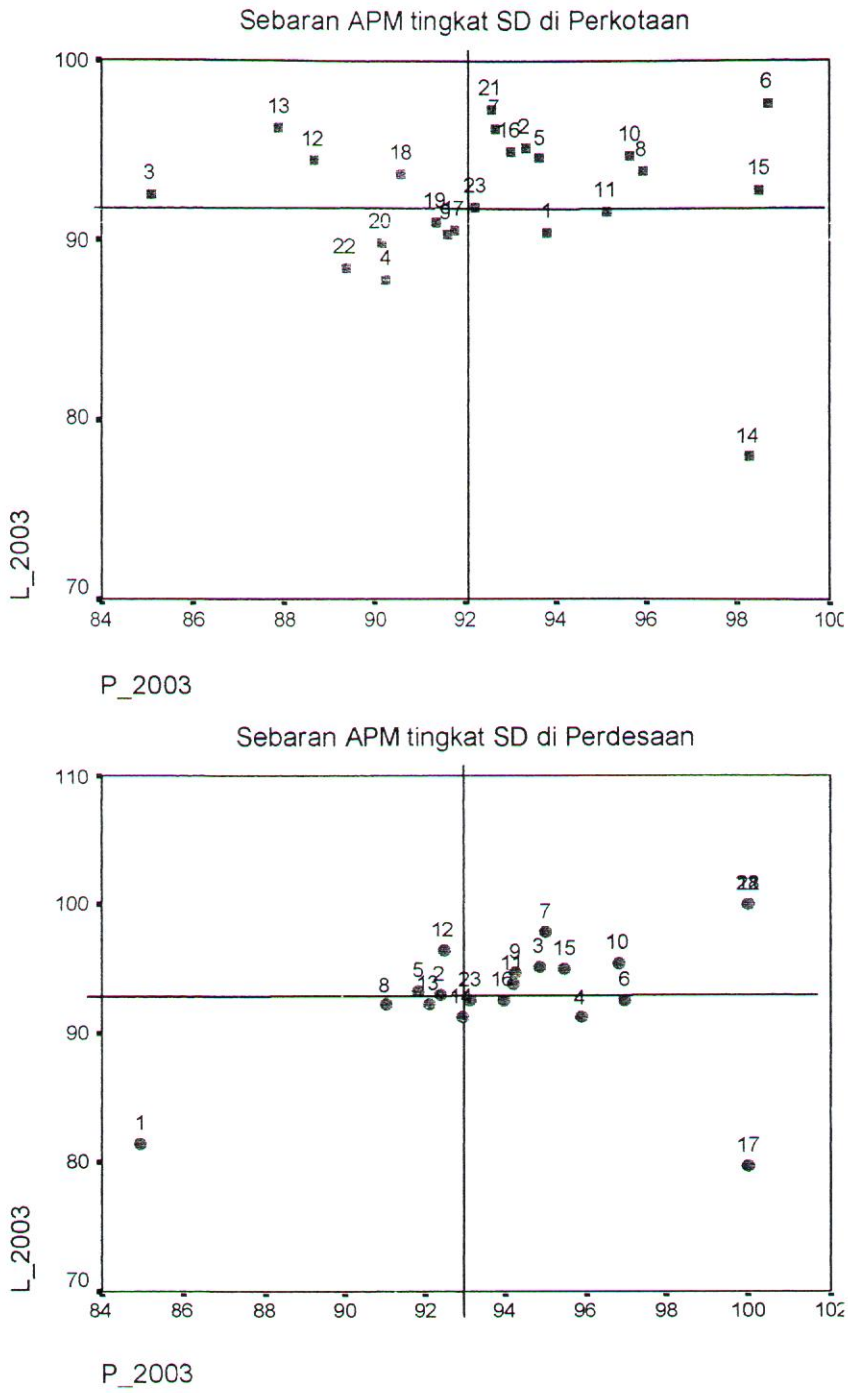
Tabel 6.20. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tingkat SD di Jawa Barat

| Daerah/Jenis Kelamin | SD | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | Perkotaan | | | |
| Laki-Laki | 91.11 | 93.13 | 93.04 | 91.87 |
| Perempuan | 93.6 | 93.12 | 93.27 | 92.23 |
| Total | 92.36 | 93.13 | 93.15 | 92.04 |
| Disparitas | 2.49 | -0.01 | 0.23 | 0.36 |
| Indeks Paritas | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 93.44 | 93.7 | 94.18 | 92.56 |
| Perempuan | 92.77 | 93.77 | 94.91 | 93.14 |
| Total | 93.11 | 93.73 | 94.53 | 92.84 |
| Disparitas | -0.67 | 0.07 | 0.73 | 0.58 |
| Indeks Paritas | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| | Perkotaan + Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 92.44 | 93.42 | 93.59 | 92.22 |
| Perempuan | 93.14 | 93.45 | 94.07 | 92.69 |
| Total | 92.78 | 93.44 | 93.82 | 92.45 |
| Disparitas | 0.7 | 0.03 | 0.48 | 0.47 |
| Indeks Paritas | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Murni tingkat SD tahun menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota. Seperti ditunjukkan Gambar 6.26 dan Lampiran 13, APM tingkat SD di perdesaan lebih terpusat disekitar rata-rata Propinsi dibandingkan dengan di perkotaan.

Diketahui bahwa di perkotaan, terdapat sebanyak 9 Kabupaten/Kota (41 persen) yang mempunyai APM tingkat SD pada anak laki-laki yang berada di bawah rata-rata Propinsi, sedangkan untuk anak perempuan terdapat sebanyak 10 Kabupaten/Kota (45 persen). Kabupaten/Kota yang APM tingkat SD untuk anak laki-lakinya terendah dibandingkan APM tingkat Propinsi adalah Kabupaten Purwakarta, sementara pada anak perempuan adalah Kabupaten Cianjur. Terdapat 6 Kabupaten/ Kota yang APM tingkat SD lebih rendah dibandingkan rata-rata Propinsi, yaitu Kabupaten Bandung, Cirebon, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon dan Kota Depok.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

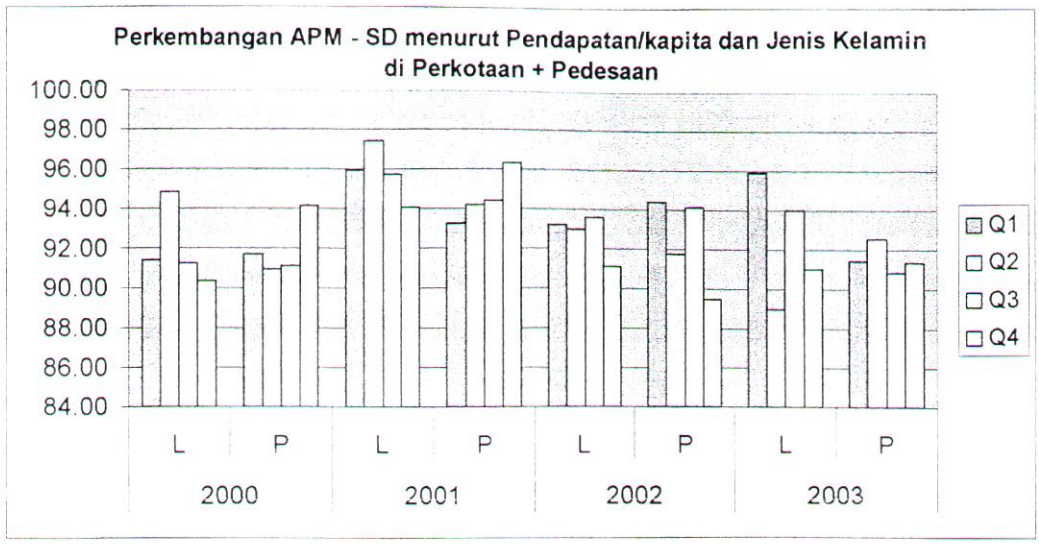
Gambar 6.26. Keragaman APM tingkat SD antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, 2003

Membanding antar wilayah, diketahui bahwa di perdesaan, APM tingkat SD lebih terpusat di sekitar rata-rata tingkat Propinsi. Dari sejumlah 20 Kabupaten/Kota yang data APM nya tersedia, ternyata jumlah Kabupaten/Kota pada wilayah perdesaan yang APM tingkat SDnya lebih rendah dari rata-rata Propinsi dijumpai di 6 Kabupaten/Kota (30 persen) untuk anak laki-laki, dan sebanyak 7 Kabupaten/Kota (35 persen) untuk anak perempuan. APM jenjang SD terendah untuk anak perempuan dijumpai di Kabupaten Bogor, sementara untuk anak laki-laki dijumpai di Kota Bogor. Kota-kota Sukabumi, Depok dan Bekasi merupakan wilayah yang mempunyai APM tingkat SD tertinggi (Gambar 6.26). Kabupaten Bogor, Purwakarta, Kuningan, dan Subang merupakan 4 Kabupaten yang APM laki-laki dan perempuan lebih rendah dari rata-rata tingkat Propinsi.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Perkembangan APM tingkat SD pada periode 2000 – 2003 seperti yang disajikan pada Gambar 6.27 menunjukkan keragaman antar quartil pendapatan per kapita untuk anak laki-laki dan perempuan serta dari tahun ke tahun terjadi perbedaan kecenderungan APM dengan meningkatnya pendapatan per kapita. APM SD pada anak laki-laki tahun 2000 bahwa pada kelompok pendapatan Q2 menunjukkan tertinggi (sekitar 94.3 %), sementara APM anak perempuan persentase tertinggi dijumpai pada kelompok terkaya (Q4). Kecuali pada kelompok termiskin pertama (Q1), pada tahun 2001 terdapat peningkatan APM SD untuk anak laki-laki dan perempuan pada semua kelompok pendapatan, sebaliknya pada tahun 2002. Adapun pada tahun 2002 ke 2003, untuk APM perempuan menunjukkan kenaikan, kecuali yang terjadi pada tahun 2003, kecuali pada kelompok pendapatan termiskin pertama dan terakhir, APM SD anak laki-laki meningkat, sebaliknya pada perempuan cenderung menurun.

Perubahan dari tahun 2000 ke 2001 dimungkinkan, oleh karena diduga, oleh karena adanya krisis ekonomi berkepanjangan , pemerintah memberikan beasiswa Jaring Pengaman Nasional (*Social Safety Net*) kepada mereka yang ada di bangku Sekolah Dasar. Adapun kecenderungan menurunnya APM SD pada anak perempuan yang terjadi pada tahun 2003, khususnya pada kelompok termiskin pertama (Q1), selain faktor ekonomi juga diduga berhubungan dengan relatif lebih mudahnya bagi mereka masuk ke pasar tenaga kerja baik di sektor informal dan formal.




Gambar 6.27. Perkembangan APM tingkat SD menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Data APM tingkat SD menurut tingkat pendapatan per kapita dan daerah, disajikan pada Tabel 6.21

Tabel 6.21. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah dan Quartil Pendapatan / kapita | SD | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | Perkotaan | | | | | | | |
| Q1 | 93.06 | 95.31 | 90.72 | 92.05 | 91.49 | 98.18 | 94.44 | 88.64 |
| Q2 | 94.29 | 86.49 | 97.74 | 93.55 | 92.11 | 89.64 | 87.76 | 90.24 |
| Q3 | 89.01 | 89.57 | 95.59 | 94.59 | 93.71 | 94.44 | 93.69 | 90.57 |
| Q4 | 90.85 | 94.16 | 94.04 | 96.33 | 91.1 | 89.47 | 91.04 | 91.35 |
| | Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 93.94 | 91.89 | 95.31 | 93.05 | 93.08 | 97.32 | 95.15 | 94.83 |
| Q2 | 95.65 | 96.55 | 96.97 | 95.24 | 94.81 | 95.89 | 91.23 | 95.87 |
| Q3 | 95.24 | 97.78 | 93.75 | 97.96 | 97.66 | 97.42 | 92.22 | 91.01 |
| Q4 | 94.79 | 90.00 | 93.14 | 94.74 | 97.78 | 93.88 | 93.90 | 94.19 |
| | Perkotaan+Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 91.41 | 91.72 | 95.95 | 93.24 | 93.21 | 94.43 | 95.93 | 91.44 |
| Q2 | 94.83 | 90.91 | 97.46 | 94.17 | 92.97 | 91.76 | 88.98 | 92.54 |
| Q3 | 91.27 | 91.10 | 95.71 | 94.44 | 93.57 | 94.16 | 94.01 | 90.82 |
| Q4 | 90.38 | 94.16 | 94.04 | 96.33 | 91.1 | 89.47 | 91.04 | 91.35 |

Catatan : Seperti pada Tabel 6.3

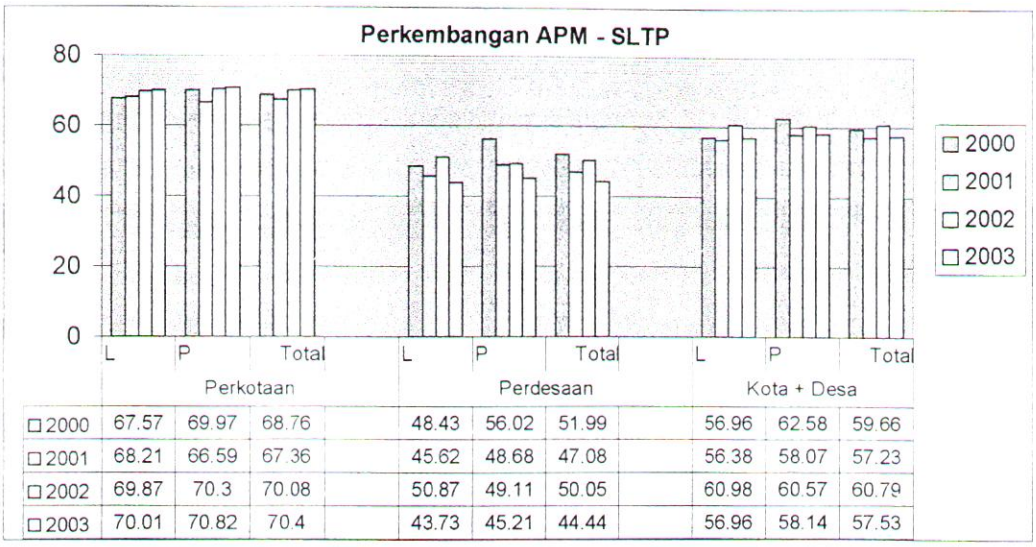
Pada Tabel 6.21 terlihat bahwa secara umum adanya kecenderungan dimana semakin tinggi kelompok pendapatan semakin tinggi APM anak perempuan , kecuali pada tahun 2002 dan 2003. Sementara pada anak laki-laki polanya menunjukkan bahwa APM mereka cenderung meningkat dari kelompok pengeluaran termiskin pertama (Q1) ke Q2, sebaliknya pada Q ke Q4 menunjukkan menurun. Namun demikian, jika dilihat menurut wilayahnya diketahui bahwa di perkotaan, anak laki-laki, khususnya pada tahun 2001 dan 2003 memiliki APM yang cenderung meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Kecenderungan ini hanya dijumpai pada anak perempuan pada tahun 2003. Satu hal yang perlu dicatat disini, antara tahun 2001 – 2003, di pedesaan terdapat kecenderungan dimana APM anak perempuan meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan, khususnya sampai dengan kelompok pendapatan Q3, untuk kemudian menurun pada kelompok pendapatan Q4. Khusus pada tahun 2002, di perdesaan, APM tingkat SD untuk perempuan yang lebih besar dari anak laki-laki hanya dijumpai pada penduduk dengan pendapatan pada Quartil Pertama (Q1). Ini menunjukkan bahwa program wajib belajar telah mendedah keluarga miskin.

### 6.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP.

**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

Perkembangan APM tingkat SLTP dalam periode 2000-2003 menunjukkan kecenderungan yang tidak sama baik antar daerah maupun jenis kelamin. Di perkotaan, APM tingkat SLTP untuk anak laki-laki menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, seperti dapat dilihat pada Gambar 6.28 dan Tabel 6.22. Untuk anak perempuan, dari tahun 2000 ke tahun 2001 terjadi penurunan, akan tetapi dari tahun 2001 ke tahun 2003 menunjukkan kenaikan. Di perdesaan, APM anak perempuan menunjukkan APM dari tahun ke tahun, sedangkan APM anak laki-laki menunjukkan pola menurun pada periode 2000 ke tahun 2001, sebaliknya dari tahun 2002 ke tahun 2003.

Angka indeks paritas menunjukkan adanya ketidak setaraan dalam hal akses anak laki-lki dan perempuan dalam hal pendidikan tingkat SLTP baik di perkotaan maupun di perdesaan., akan tetapi dari tahun 2000 ke tahun 2003 menunjukkan peningkatan kesetaraan, seperti ditunjukkan Tabel 6.22.




| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
| 2000 | 67.57 | 69.97 | 68.76 | 48.43 | 56.02 | 51.99 | 56.96 | 62.58 | 59.66 |
| 2001 | 68.21 | 66.59 | 67.36 | 45.62 | 48.68 | 47.08 | 56.38 | 58.07 | 57.23 |
| 2002 | 69.87 | 70.3 | 70.08 | 50.87 | 49.11 | 50.05 | 60.98 | 60.57 | 60.79 |
| 2003 | 70.01 | 70.82 | 70.4 | 43.73 | 45.21 | 44.44 | 56.96 | 58.14 | 57.53 |

Gambar 6.28. Perkembangan APM tingkat SLTP di Jawa Barat.

Kesenjangan APM tingkat SLTP lebih besar di perdesaan di bandingkan di perkotaan. Di perkotaan, kesenjangan gender yang ditandai dengan akses yang lebih besar pada anak perempuan terjadi pada tahun 2002 dan 2003 dengan kecenderungan yang meningkat (dari 0.43 menjadi 0,81).

Tabel 6.22. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tingkat SLTP di Jawa Barat

| Daerah/Jenis Kelamin | SLTP | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | Perkotaan | | | |
| Laki-Laki | 67.57 | 68.21 | 69.87 | 70.01 |
| Perempuan | 69.97 | 66.59 | 70.3 | 70.82 |
| Total | 68.76 | 67.36 | 70.08 | 70.4 |
| Disparitas | 2.4 | -1.62 | 0.43 | 0.81 |
| Indeks Paritas | 1.04 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| | Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 48.43 | 45.62 | 50.87 | 43.73 |
| Perempuan | 56.02 | 48.68 | 49.11 | 45.21 |
| Total | 51.99 | 47.08 | 50.05 | 44.44 |
| Disparitas | 7.59 | 3.06 | -1.76 | 1.48 |
| Indeks Paritas | 1.16 | 1.07 | 0.97 | 1.03 |
| | Perkotaan + Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 56.96 | 56.38 | 60.98 | 56.96 |
| Perempuan | 62.58 | 58.07 | 60.57 | 58.14 |
| Total | 59.66 | 57.23 | 60.79 | 57.53 |
| Disparitas | 5.62 | 1.69 | -0.41 | 1.18 |
| Indeks Paritas | 1.10 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |

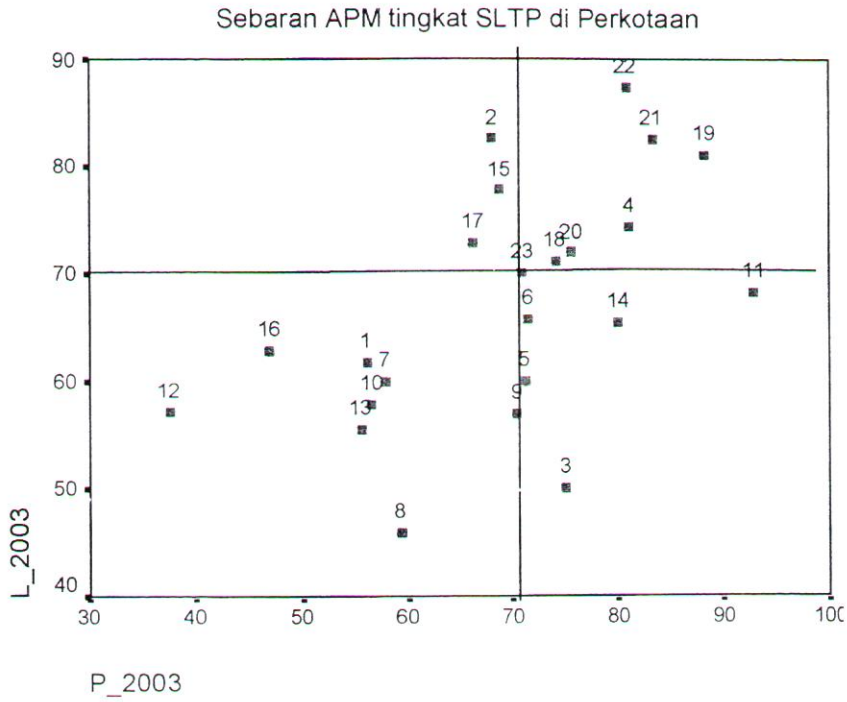
Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2001, kesenjangan yang terjadi sebesar 1,62 dengan akses yang lebih besar pada anak laki-laki. Di perdesaan,

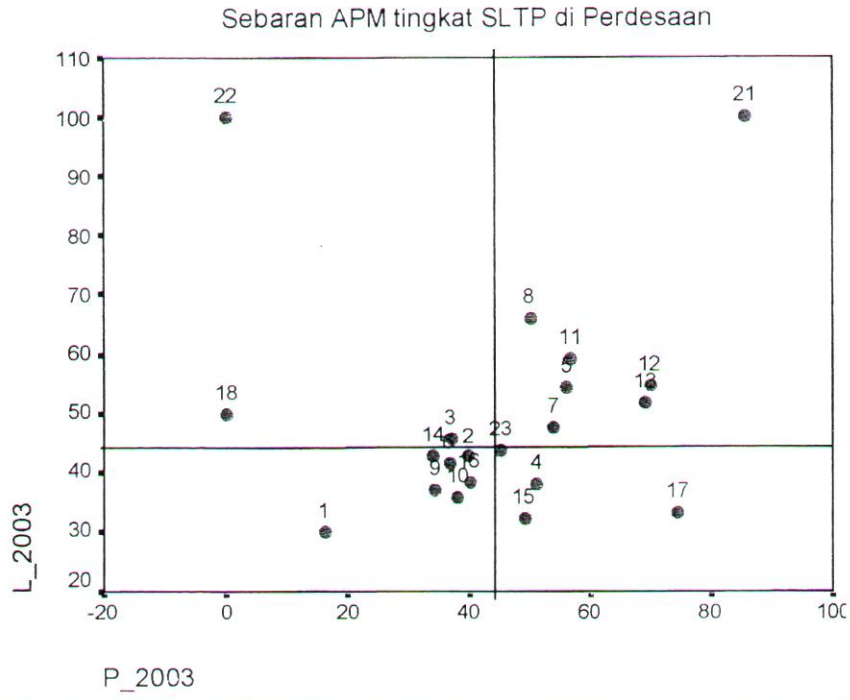
diketahui bahwa kesenjangan dengan APM lebih besar pada anak perempuan untuk tahun 2000, 2001, dan 2003, dengan kesenjangan berturut-turut sebesar 7,59; 3,06 dan 1,48 persen; akan tetapi pada tahun 2002 lebih besar pada anak laki-laki dengan kesenjangan sebesar 1,76 persen, sekalipun kesenjangannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut, dengan membandingkan APM anak laki-laki dan perempuan menurut wilayahnya,khususnya dari data pada tahun 2003 diketahui bahwa APM anak perempuan di perkotaan sebesar 70,82 persen sedangkan di pedesaan hanya sebesar 45,21 persen, sementara pada anak laki-laki memiliki APM sebesar 70,01 persen dan 43,73 persen, berturut-turut di perkotaan dan perdesaan. Di pedesaan kecenderungan APM anak perempuan dan anak laki-laki menurun pada periode 4 tahun itu. Namun demikian APM tertinggi pada anak laki-laki terjadi pada 2002, sementara pada anak perempuan pada 2000. Dengan mengacu pada nilai IP dan disparitasnya, diketahui bahwa meskipun APM SLTP di pedesaan lebih rendah dibanding di perkotaan namun tingkat kesenjangan gendernya menunjukkan kesamaan, karena IP di pedesaan dan diperkotaan menunjukkan rasio lebih dari 1 (satu), kecuali pada tahun 2001 di perkotaan. Namun demikian, oleh karena pada tahun 2003 kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan cukup besar, dan bahwa disparitasnya menunjukkan 1.48 persen, tampaknya perhatian untuk meningkatkan APM anak laki-laki di pedesaan sedikit lebih besar dibanding anak perempuan harus menjadi perhatian.

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Murni tingkat SLTP antar Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Barat pada tahun 2003 menunjukkan keragaman, seperti ditunjukkan Gambar 6.29, APM tingkat SLTP di perdesaan lebih terpusat disekitar rata-rata Propinsi dibandingkan dengan di perkotaan. Di wilayah perkotaan, untuk anak laki-laki terdapat sebanyak 13 Kabupaten/Kota (59 persen) yang mempunyai APM tingkat SLTP yang berada di bawah rata-rata Propinsi, sedangkan untuk anak perempuan terdapat sebanyak 11 Kabupaten/Kota (50 persen). Kabupaten/Kota yang APM tingkat SLTP untuk anak laki-laki terendah dibandingkan tingkat Propinsi adalah Kabupaten Kuningan dan untuk anak perempuan adalah Kabupaten Indramayu.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | 11. Sumedang | 12. Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | 15. Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota Bogor | 18. Kota Sukabumi | 19 Kota Bandung | 20. Kota Cirebon | 21. Kota Bekasi | 22. Kota Depok | | |

Gambar 6.29. Keragaman APM tingkat SLTP antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, 2003

Berbeda dari di perkotaan, di daerah perdesaan, APM tingkat SLTP lebih terpusat di sekitar rata-rata tingkat propinsi.. Dari sejumlah 20 Kabupaten/Kota yang data APM nya tersedia, dijumpai adanya 10 Kabupaten/Kota di perdesaan yang APM anak laki-laki dan anak perempuannya lebih rendah dari rata-rata Propinsi (50 persen). Kota Sukabumi dan Kota Depok adalah wilayah dengan APM tingkat SLTP untuk anak perempuan yang terendah, sedangkan APM anak laki-laki terendah terdapat Kabupaten Bogor. Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang APM tingkat SLTPnya di atas rata-rata Propinsi, yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi dan Kota Depok (Gambar 6.29dan Lampiran 13)

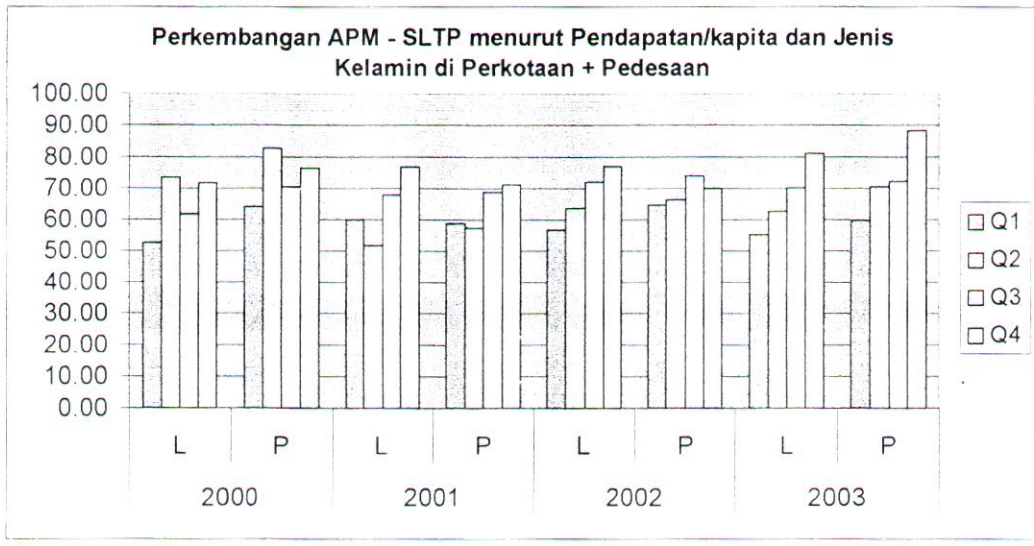
**d. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Perkembangan APM tingkat SLTP pada periode 2000 – 2003 seperti yang disajikan pada Gambar 6.30 menunjukkan keragaman antar quartil pendapatan per kapita untuk anak laki-laki dan perempuan, serta perbedaan kecenderungan APM dengan meningkatnya pendapatan per kapita dari tahun ke tahun.

Perkembangan hubungan antara tingkat pendapatan dengan APM pada periode tahun 2000-2003 menunjukkan kecenderungan kenaikan APM tingkat SLTP untuk kelompok laki-laki seiring dengan peningkatan pendapatan dari Q3 ke Q4.. Kecenderungan yang sama terjadi pada anak perempuan, kecuali pada tahun 2002 yang menunjukkan penurunan APM. Terjadinya peningkatan APM baik pada anak-laki maupun perempuan seiring dengan peningkatan pendapatan dari Q1 ke Q2 juga terlihat selama periode tahun 2000-2003, kecuali pada tahun 2001 yang menunjukkan penurunan.

Tabel 6.23 menunjukkan kecenderungan hubungan antara pendapatan dengan APM Tingkat SLTP. Apabila membanding APM Tingkat SLTP pada masing-masing tingkat pendapatan per kapita menurut daerah, data pada tahun 2003 menunjukkan bahwa di daerah perkotaan APM anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki, kecuali pada kelompok tingkat pendapatan Quartil Pertama (Q1). Seperti dapat dilihat pada Tabel 6.23 APM perempuan pada kelompok Q1 ini sebesar 37,50 persen sedangkan laki-laki 57,14 persen. Ini berarti bahwa anak perempuan pada kelompok pengeluaran termiskin di pedesaan jauh lebih rendah aksesnya terhadap pendidikan menengah pertama, padahal pada anak laki-laki pada semua kelompok pendapatan

termasuk yang terendah memiliki akses yang lebih besar. APM anak perempuan lebih besar dibanding anak laki-laki,khususnya pada golongan tingkat pendapatan Q2.




Gambar 6.30. Perkembangan APM tingkat SLTP menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat.

Dalam periode 2000 sampai 2003, terdapat keragaman pola hubungan antara pendapatan dengan APM SLTP di Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2000 APM anak perempuan lebih tinggi dibanding APM anak laki-laki, untuk semua kelompok pendapatan. Pada tahun 2001 dan 2002 menunjukkan pola dimana APM anak laki-laki cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan, sementara pada anak perempuan APM mereka yang berasal dari kelompok pendapatan tertinggi lebih rendah dibanding kelompok pendapatan 75 % (Q3). Adapun pada tahun 2003, sekalipun kecenderungannya APM anak perempuan dan anak laki-laki sama, yakni menunjukkan hubungan linier anatar pendapatan dan APM Tingkat SLTP, namun APM perempuan lebih tinggi dibanding APM laki-laki.

Jika membanding antar wilayah, di perkotaan terdapat kecenderungan dimana APM anak perempuan lebih tinggi dari APM anak laki-laki untuk setiap tahun dalam periode 2000-2003, sementara di perdesaan kecenderungan yang sama didapati pada tahun 2000 dan 2001. Kecenderungan sebaliknya terjadi pada tahun 2002 dan 2003, kecuali pada kelompok pengeluaran Q2. Lebih tingginya nilai APM di perkotaan, baik untuk laki-laki dan perempuan diduga berhubungan dengan jauh lebih baiknya kondisi fasilitas dan prasaranan sekolah, serta jauh lebih mudahnya akses keluarga miskin terhadap beragam sumber dana yang memungkinkan mereka akses terhadap

bea siswa, baik itu GNOTA, bantuan perorangan termasuk dari lembaga / yayasan lainnya.

Tabel 6.23. Angka Partisipasi Murni tingkat SLTP menurut Kelompok Pendapatan/Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah dan Quartil Pendapatan / kapita | SLTP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | Perkotaan | | | | | | | |
| Q1 | 44.44 | 71.05 | 60.61 | 69.05 | 55.56 | 90.33 | 57.14 | 37.50 |
| Q2 | 80.00 | 85.71 | 58.49 | 62.86 | 71.59 | 77.96 | 74.28 | 81.11 |
| Q3 | 69.49 | 74.42 | 68.66 | 69.23 | 75.03 | 74.52 | 71.12 | 74.01 |
| Q4 | 71.76 | 77.27 | 76.7 | 71.3 | 77 | 70.01 | 81.06 | 88.24 |
| | Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 35.48 | 60.00 | 36.9 | 40.48 | 40 | 32.35 | 45.68 | 36.98 |
| Q2 | 64.29 | 77.78 | 42.42 | 46.67 | 45.72 | 41.66 | 38.09 | 51.22 |
| Q3 | 58.14 | 70.77 | 48.44 | 64.81 | 48.21 | 65.96 | 65.85 | 50.00 |
| Q4 | 54.17 | 58.54 | 67.57 | 68.29 | 55 | 63.63 | 59.24 | 56.75 |
| | Perkotaan+Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 52.54 | 64.10 | 59.86 | 58.81 | 56.7 | 64.59 | 55.27 | 59.67 |
| Q2 | 73.53 | 82.61 | 51.76 | 57.48 | 63.43 | 66.34 | 62.74 | 70.71 |
| Q3 | 61.64 | 70.49 | 67.91 | 68.93 | 71.98 | 74.08 | 70.22 | 72.49 |
| Q4 | 71.76 | 76.47 | 76.7 | 71.3 | 77 | 70.01 | 81.06 | 88.24 |

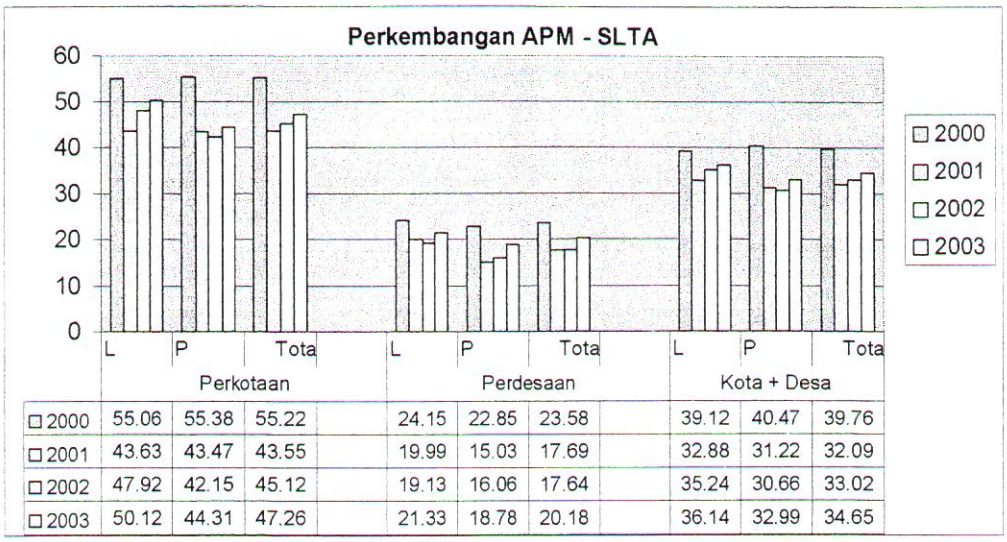
### 6.1.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA.

**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

Perkembangan APM tingkat SLTA dari tahun 2000 ke tahun 2003 menunjukkan kecenderungan yang tidak sama baik antar daerah maupun antar jenis kelamin (Gambar 6.31). Dari Gambar 6.31 terlihat bahwa APM SLTA di perdesaan jauh lebih rendah dibanding APM SLTA di perkotaan, hampir lebih dari separuhnya. Membanding antar jenis kelamin di masing-masing lokasi, terlihat bahwa APM anak laki-laki dan perempuan pada tahun 2000 lebih tinggi dibanding tahun-tahun berikutnya. Beda dari perkotaan, khusus di pedesaan APM anak perempuan lebih rendah dibanding anak laki-laki untuk setiap tahunnya.

Terlihat bahwa di perkotaan, APM tingkat SLTA untuk anak laki-laki menunjukkan penurunan dari tahun 2000 ke tahun 2001, selanjutnya dari 2001 ke tahun 2003 menunjukkan kenaikan. Untuk anak perempuan, dari tahun 2000 ke tahun 2002 terjadi penurunan, akan tetapi dari tahun 2002 ke tahun 2003 menunjukkan

sedikit kenaikan. Di perdesaan, kecenderungan perubahan APM untuk anak laki-laki dan perempuan sama dengan kecenderungan perkembangan APM untuk anak perempuan di perkotaan.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Tota | L | P | Tota | L | P | Tota |
| 2000 | 55.06 | 55.38 | 55.22 | 24.15 | 22.85 | 23.58 | 39.12 | 40.47 | 39.76 |
| 2001 | 43.63 | 43.47 | 43.55 | 19.99 | 15.03 | 17.69 | 32.88 | 31.22 | 32.09 |
| 2002 | 47.92 | 42.15 | 45.12 | 19.13 | 16.06 | 17.64 | 35.24 | 30.66 | 33.02 |
| 2003 | 50.12 | 44.31 | 47.26 | 21.33 | 18.78 | 20.18 | 36.14 | 32.99 | 34.65 |

Gambar 6.31. Perkembangan APM tingkat SLTA di Jawa Barat.

Angka indeks paritas menunjukkan adanya ketidak setaraan akses pendidikan tingkat SLTA baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kalau pada tahun 2000 dan 2001 di perkotaan sudah menunjukkan kesetaraan, ternyata terjadi ketidak setaraan pada tahun 2002 dan 2003 dengan dominasi pada anal laki-laki, seperti dapat dilihat pada Tabel 6.24. Di perdesaan sejak tahun 2000 sampai 2003 terjadi ketidak setaraan dengan dominasi pada anak laki-laki, akan tetapi sejak tahun 2001 ketidak setaraan tersebut semakin menurun. Dalam hubungan ini kesenjangan semakin menurun dalam pengertian bahwa akses anak perempuan terhadap pendidikan SLTA di pedesaan semakin meningkat.

Kesenjangan APM tingkat SLTA lebih kecil di perdesaan dibandingkan di perkotaan, khususnya pada tahun 2002 dan 2003. Di perkotaan, kesenjangan dengan akses yang lebih besar pada anak perempuan terjadi pada tahun 2002 dan tahun 2003 dengan kecenderungan yang meningkat (dari 5,77 menjadi 5,81). Di perdesaan, menunjukkan bahwa kesenjangan dengan APM lebih besar pada anak laki-laki sejak tahun 2000 sampai tahun 2003 masing-masing dengan kesenjangan 1,3; 4,96; 3,07; dan 2,05 persen..

Jika dibandingkan APM untuk masing-masing jenis kelamin anak antara wilayah perkotaan dan perdesaan, kesenjangan yang terjadi adalah cukup besar. Pada tahun 2003 misalnya, APM anak perempuan di perkotaan sebesar 44,31 persen

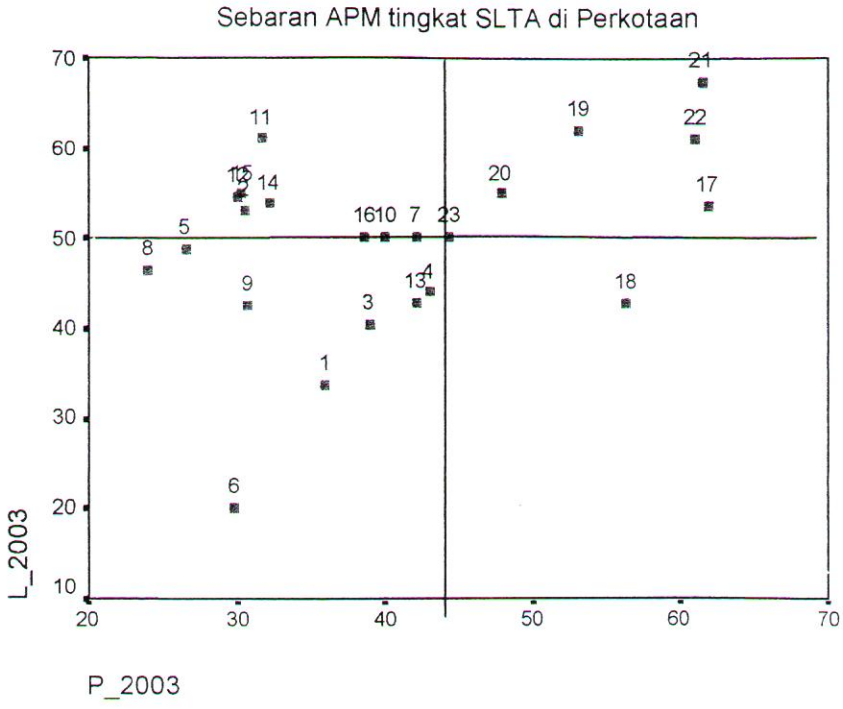
sedangkan di pedesaan hanya sebesar 18,78 persen, dan untuk anak laki-laki diperkotaan APM sebesar 50,12 persen dan perdesaan sebesar 21,33 persen.

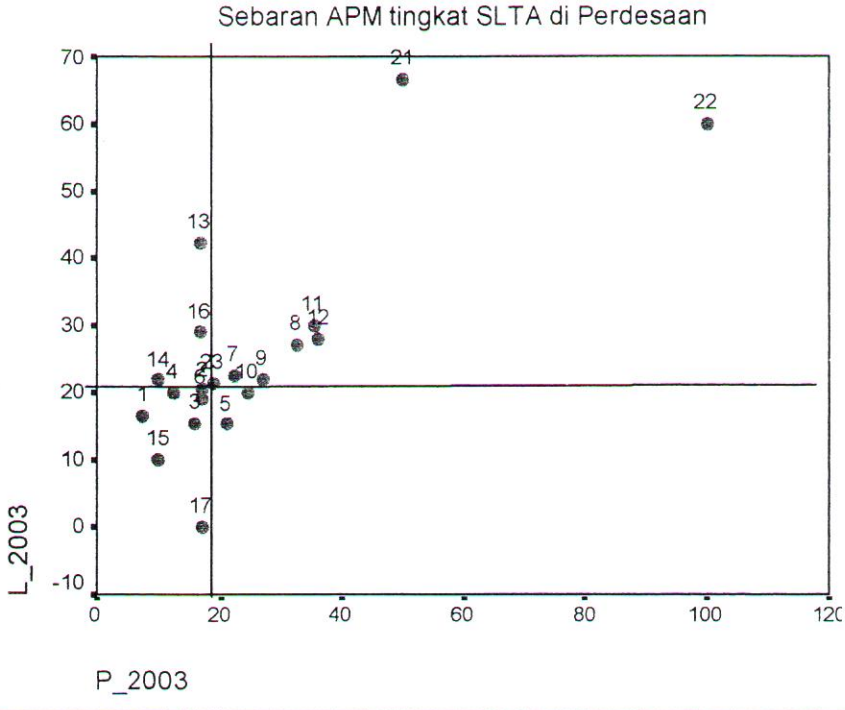
Tabel 6.24. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tingkat SLTA di Jawa Barat

| Daerah/Jenis Kelamin | SLTA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | Perkotaan | | | |
| Laki-Laki | 55.06 | 43.63 | 47.92 | 50.12 |
| Perempuan | 55.38 | 43.47 | 42.15 | 44.31 |
| Total | 55.22 | 43.55 | 45.12 | 47.26 |
| Disparitas | 0.32 | -0.16 | -5.77 | -5.81 |
| Indeks Paritas | 1.01 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| | Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 24.15 | 19.99 | 19.13 | 21.33 |
| Perempuan | 22.85 | 15.03 | 16.06 | 18.78 |
| Total | 23.58 | 17.69 | 17.64 | 20.18 |
| Disparitas | -1.3 | -4.96 | -3.07 | -2.55 |
| Indeks Paritas | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 0.88 |
| | Perkotaan + Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 39.12 | 32.88 | 35.24 | 36.14 |
| Perempuan | 40.47 | 31.22 | 30.66 | 32.99 |
| Total | 39.76 | 32.09 | 33.02 | 34.65 |
| Disparitas | 1.35 | -1.66 | -4.58 | -3.15 |
| Indeks Paritas | 1.03 | 0.95 | 0.87 | 0.91 |

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Murni tingkat SLTA menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota. Seperti ditunjukkan Gambar 6.32 dan Lampiran 13, APM tingkat SLTA di perdesaan lebih terpusat disekitar rata-rata Propinsi dibandingkan dengan di perkotaan. Di perkotaan, APM tingkat SLTA yang berada di bawah rata-rata Propinsi untuk pada laki-laki terdapat di sebanyak 12 Kabupaten/Kota (55 persen), yaitu hampir di semua kabupaten-kabupaten di wilayah selatan dan utara : Bandung, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Cirebon, Subang, Cianjur, Bogor dan Bekasi. Adapun pada anak perempuan dijumpai di 16 Kabupaten/Kota (73 persen) atau 4 Kabupaten/Kota lebih banyak dibanding pada anak laki-laki, kecuali di Kota-kota Bekasi dan Depok dan Kabupaten-kabupaten Ciamis, Sumedang, Cirebon, Majalengka, dan Indramayu.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| | | 11. | 12. | | | 15. | |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | Sumedang | Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota | 18. Kota | 19 Kota | 20. Kota | 21. Kota | | | |
| Bogor | Sukabumi | Bandung | Cirebon | Bekasi | 22. Kota Depok | | |

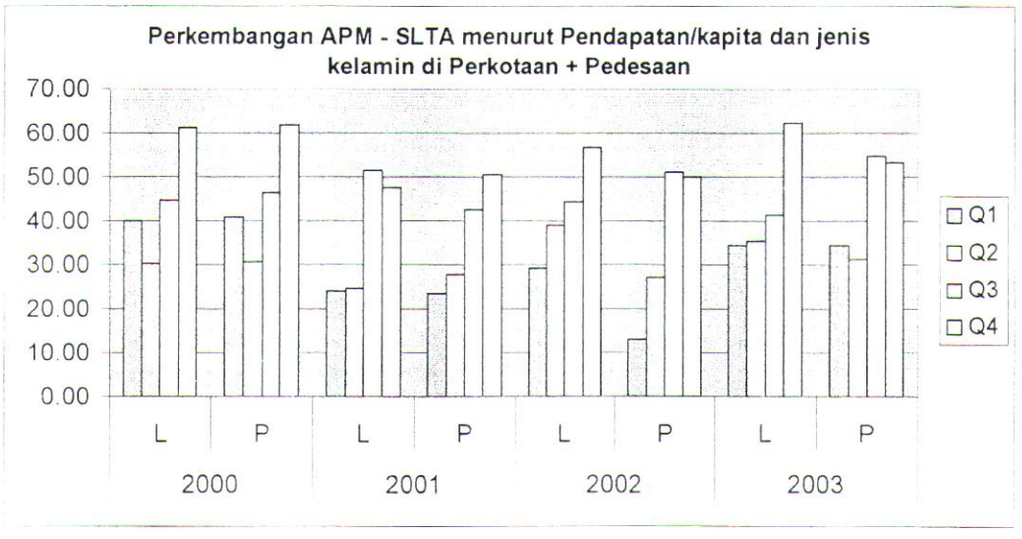
Gambar 6.32. Keragaman APM tingkat SLTA antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, 2003

Terdapat 11 Kabupaten/Kota yang APM tingkat SLTAnya baik laki-laki maupun perempuan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat propinsi, yaitu Kabupaten Kuningan, Garut, Cirebon, Bekasi, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis, Bogor, Cianjur, Bandung dan Subang. Selanjutnya terdapat 6 Kabupaten/Kota yang APM tingkat SLTP lebih tinggi dibandingkan rata-rata Propinsi, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Di perdesaan, APM tingkat SLTA lebih terpusat di sekitar rata-rata tingkat Propinsi dibandingkan di perkotaan. Dari sejumlah 19 Kabupaten/Kota yang data APM nya tersedia, kondisi dimana APM tingkat SLTAnya lebih rendah dari rata-rata Propinsi dijumpai di 9 Kabupaten/ Kota (47 persen) untuk anak laki-laki dan sebanyak 10 Kabupaten/Kota (53 persen) untuk anak perempuan. Kabupaten Bogor adalah wilayah dengan APM tingkat SLTA anak perempuan yang terendah, sedangkan APM yang terendah untuk anak laki-laki dijumpai di Kota Bogor. Terdapat 7 Kabupaten/Kota yang APM tingkat SLTA untuk laki-laki dan perempuan yang di bawah rata-rata Propinsi, yaitu Kabupaten Bogor, Bndung, Sukabumi, Tasikmalaya, Cianjur, Karawang dan Kota Bogor.

### c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.

Perkembangan APM tingkat SLTA pada periode 2000 – 2003 disajikan pada Gambar 6.33 di bawah ini.




Gambar 6.33. Perkembangan APM tingkat SLTA menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat

Berdasar Gambar. 6.33. dapat dicermati adanya pola yang beragam dalam hubungan antara tingkat pendapatan dengan APM Tingkat SLTA. Pada tahun 2000. kecenderungan pola APM-SLTA anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Pada tahun 2001, APM-SLTA anak laki-laki tidak menunjukkan hubungan yang linier, karena APM-SLTA Anak laki-laki pada kelompok pendapatan Q3 lebih besar dibanding Q4. Pada tahun 2001 ini hanya pada anak perempuan ada hubungan linier antara pendapatan dengan APM-SLTA mereka. Pada tahun 2002 hubungan yang linier dijumpai baik pada laki-laki dan perempuan, sementara pada tahun 2004 hanya pada laki-laki yang linier, karena pada perempuan APM dari siswa pada kelompok pengeluaran termiskin lebih tinggi dibanding kelompok pendapatan 50 % (Q2). Ini berarti, pada tahun 2000, peningkatan pendapatan dari Q2 ke Q4 disertai dengan kenaikan APM baik anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan pada tahun 2003, peningkatan pendapatan dari Q1 ke Q4 diiringi dengan peningkatan APM untuk laki-laki, sementara pada anak perempuan peningkatan terjadi dari Q2 ke Q3. Peningkatan pendapatan dari Q1 ke Q2 dan Q3 ke Q4 disertai dengan penurunan APM anak perempuan. Lebih lanjut, dilihat menurut daerahnya, hubungan antara APM-SLTA dengan tingkat pendapatan per kapita menunjukkan pola seperti terlihat pada Tabel 6.25.

Tabel 6.25. Angka Partisipasi Murni tingkat menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah dan Quartil Pendapatan / kapita/bulan | SLTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | Perkotaan | | | | | | | |
| Q1 | 56.67 | 56.00 | 35.85 | 31.43 | 65.22 | 27.27 | 54.54 | 30.01 |
| Q2 | 42.31 | 34.48 | 27.4 | 38.16 | 53.75 | 33.76 | 43.97 | 43.01 |
| Q3 | 47.30 | 51.52 | 51.56 | 42.86 | 44.48 | 51.75 | 42.81 | 56.35 |
| Q4 | 61.11 | 62.50 | 47.44 | 50.32 | 56.7 | 50.01 | 62.14 | 53.18 |
| | Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 17.65 | 27.03 | 18.03 | 10.96 | 10.34 | 5 | 15.39 | 15.94 |
| Q2 | 11.76 | 20.00 | 19.35 | 3.57 | 12.82 | 12.91 | 20.00 | 12.25 |
| Q3 | 22.00 | 32.00 | 27.78 | 19.67 | 32.07 | 27.11 | 27.27 | 32.52 |
| Q4 | 25.58 | 26.19 | 22.73 | 10.42 | 16.66 | 14.7 | 30.00 | 35.28 |
| | Perkotaan+Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 40.00 | 40.74 | 24.09 | 23.57 | 29.31 | 13.1 | 34.30 | 34.32 |
| Q2 | 30.23 | 30.77 | 24.75 | 27.81 | 38.99 | 27.13 | 35.41 | 31.27 |
| Q3 | 44.68 | 46.34 | 51.43 | 42.29 | 44.28 | 50.94 | 41.14 | 54.65 |
| Q4 | 61.11 | 61.74 | 47.44 | 50.32 | 56.7 | 50.01 | 62.14 | 53.18 |

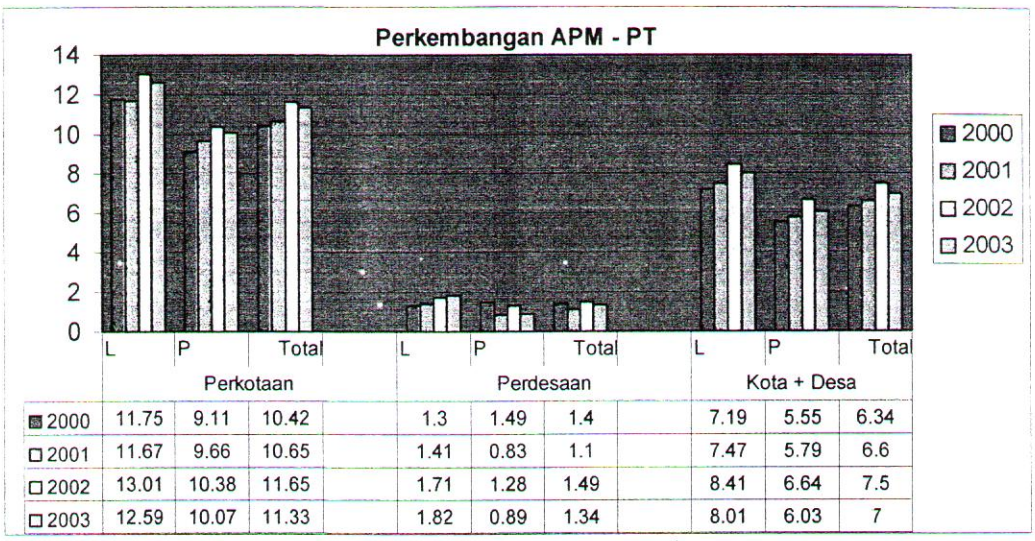
Dari tabel di atas dapat kita lihat hal yang menarik, yakni APM –Anak laki-laki dari keluarga berpendapatan termiskin di perkotaaan, khususnya pada tahun 2001 menunjukkan APM yang lebih tinggi dibanding kelompok pendapatan lainnya. Sementara pada tahun 2003, mereka (anak laki-laki) yang berasal dari kelompok pendapatan Q-2 dan Q-3 memiliki APM lebih tinggi dibanding perempuan. Khusus data pada tahun 2003, menunjukkan bahwa di daerah perkotaan APM anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki pada semua kelompok tingkat pendapatan kecuali pada quartil Q3. Pada kelompok pendapatan Q3 ini APM perempuan sebesar 56,35 persen sedangkan anak laki-laki sebesar 42,81. Di daerah perdesaan menunjukkan keadaan yang berbeda, dimana akses pendidikan SLTA lebih besar pada anak perempuan pada semua kelompok tingkat pendapatan, kecuali pada tingkat pendapatan Q2 di mana APM anak perempuan lebih kecil, dengan kesenjangan 7,75 persen..

### 6.1.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Perguruan Tinggi.

**a. Keragaman antar Perkotaan dan Perdesaan.**

Seperti dapat dilihat pada Gambar 6.34 APM-tingkat PT di perdesaan menunjukkan jauh lebih rendah dibanding APM di perkotaan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sekalipun APM di perdesaan tergolong relatif rendah, terdapat hubungan yang linier antara pendapatan dengan APM PT, khususnya pada anak laki-laki, tidak demikian halnya pada anak perempuan di perdesaan dan mereka yang ada di perkotaan. APM-PT pada perempuan di pedesaan menunjukkan pola yang khusus, karena APM –PT dari kelompok pengeluaran termiskin menunjukkan angka lebih tinggi dibanding dibanding 3 kelompok lainnya. Adapun Di perkotaan ada kecenderungan dimana anak laki-laki dan perempuan pada kelompok pendapatan Q-3 menunjukkan APM PT yang lebih tinggi dibanding mereka pada Q4.

Jika dilihat dalam periode 2000 – 2001, perkembangan APM tingkat PT dari tahun 2000 ke tahun 2003 menunjukkan kecenderungan yang tidak sama baik antar daerah maupun antar jenis kelamin. Di perkotaan, APM tingkat PT untuk laki-laki menunjukkan penurunan dari tahun 2000 ke tahun 2001, selanjutnya dari 2001 ke tahun 2002 menunjukkan kenaikan, dan kemudian dari tahun 2002 ke 2003 menunjukkan kenaikan kembali.




| | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Kota + Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 2000 | 11.75 | 9.11 | 10.42 | 1.3 | 1.49 | 1.4 | 7.19 | 5.55 | 6.34 |
| 2001 | 11.67 | 9.66 | 10.65 | 1.41 | 0.83 | 1.1 | 7.47 | 5.79 | 6.6 |
| 2002 | 13.01 | 10.38 | 11.65 | 1.71 | 1.28 | 1.49 | 8.41 | 6.64 | 7.5 |
| 2003 | 12.59 | 10.07 | 11.33 | 1.82 | 0.89 | 1.34 | 8.01 | 6.03 | 7 |

Gambar 6.34. Perkembangan APM tingkat PT di Jawa Barat.

Pada penduduk perempuan, dari tahun 2000 ke tahun 2002 terjadi kenaikan, akan tetapi dari tahun 2002 ke tahun 2003 menunjukkan penurunan. Di perdesaan, kecenderungan perubahan APM untuk laki-laki sama dengan kecenderungan perkembangan APM untuk perempuan di perkotaan. Sebaliknya, kecenderungan perubahan APM perempuan di pedesaan sama dengan kecenderungan perubahan APM laki-laki di perkotaan.

` Tabel 6.26 memperlihatkan angka indeks paritas dan disparitas pada PT. Tabel tersebut menunjukkan adanya ketidak setaraan akses pendidikan tingkat PT baik di perkotaan maupun di perdesaan, dengan tingkat kesenjangan yang cukup besar. Di perdesaan pada tahun 2000, ketidak setaraan dijumpai dengan dominasi perempuan yang menunjukkan tingkat kesenjangan sebesar 0,19 persen. Selanjutnya dari tahun 2001 ke tahun 2003 terjadi pergeseran ketidak setaraan dengan dominasi laki-laki. Pada periode 2001-2003 ini tingkat kesenjangan adalah sebesar 0,58; 0,43 dan 0,93 persen. Dari tahun 2002 ke tahun 2003 ketidak setaraan tersebut semakin menurun.

Ketidak-setaraan dalam hal akses terhadap pendidikan tinggi, jauh lebih besar di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Di perkotaan, ketidak setaraan dijumpai dengan dominasi laki-laki, dengan tingkat kesenjangan sebesar 2,64 persen di tahun 2000, 2,01 persen pada tahun 2001; 2,63 persen pada tahun 2002, dan pada tahun 2003 sebesar 2,52 persen .

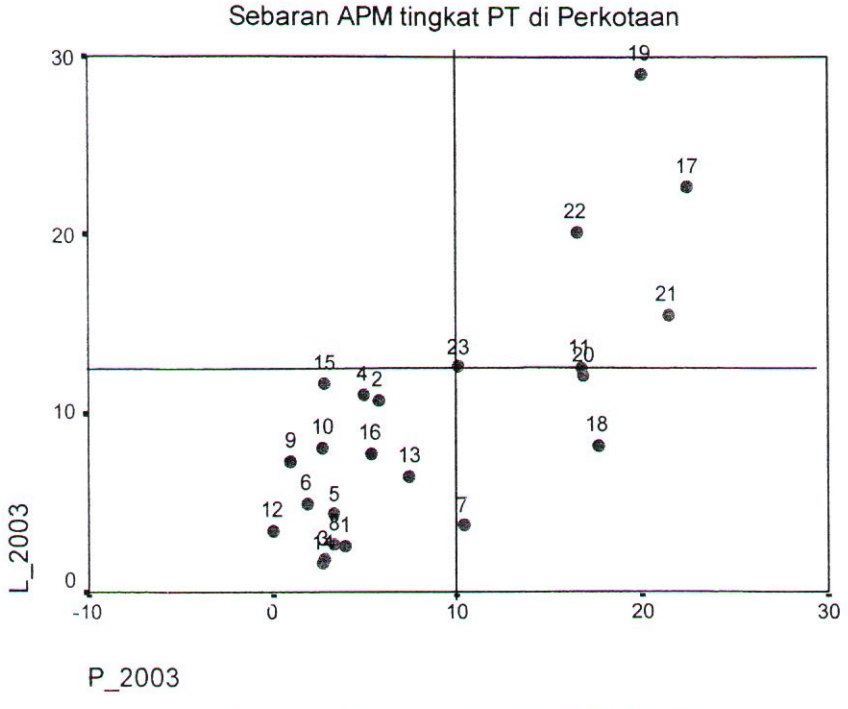
Tabel 6.26. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tingkat PT di Jawa Barat.

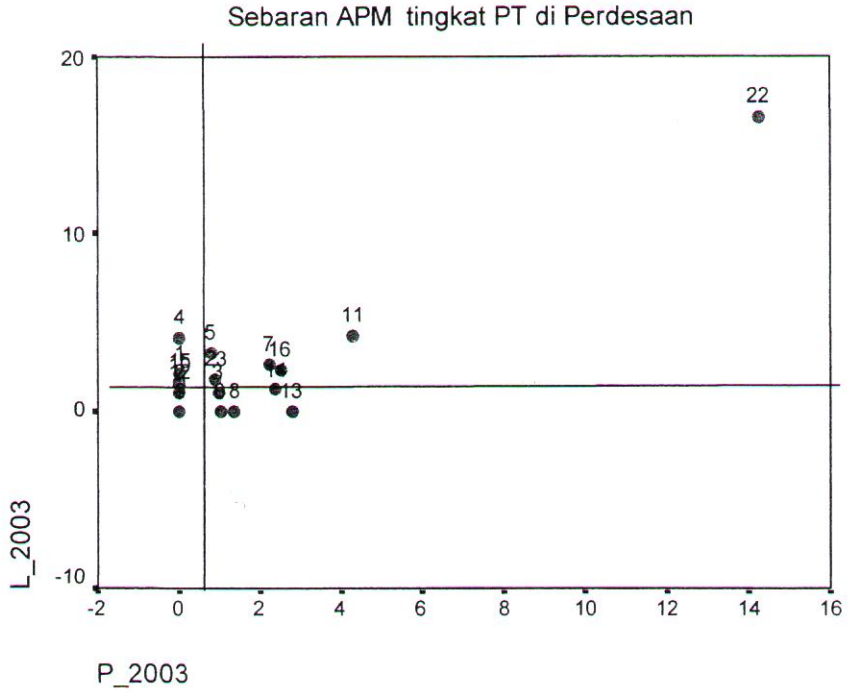
| Daerah/Jenis Kelamin | PT | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | Perkotaan | | | |
| Laki-Laki | 11.75 | 11.67 | 13.01 | 12.59 |
| Perempuan | 9.11 | 9.66 | 10.38 | 10.07 |
| Total | 10.42 | 10.65 | 11.65 | 11.33 |
| Disparitas | -2.64 | -2.01 | -2.63 | -2.52 |
| Indeks Paritas | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |
| | Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 1.3 | 1.41 | 1.71 | 1.82 |
| Perempuan | 1.49 | 0.83 | 1.28 | 0.89 |
| Total | 1.4 | 1.1 | 1.49 | 1.34 |
| Disparitas | 0.19 | -0.58 | -0.43 | -0.93 |
| Indeks Paritas | 1.15 | 0.59 | 0.75 | 0.49 |
| | Perkotaan + Perdesaan | | | |
| Laki-Laki | 7.19 | 7.47 | 8.41 | 8.01 |
| Perempuan | 5.55 | 5.79 | 6.64 | 6.03 |
| Total | 6.34 | 6.6 | 7.5 | 7 |
| Disparitas | -1.64 | -1.68 | -1.77 | -1.98 |
| Indeks Paritas | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.75 |

Dengan membanding APM untuk masing-masing jenis kelamin anak antara wilayah perkotaan dan perdesaan, diketahui adanya kesenjangan yang sangat besar. Pada tahun 2003 misalnya, APM anak perempuan di perkotaan sebesar 10,07 persen sedangkan di pedesaan hanya sebesar 0,89 persen, dan untuk anak laki-laki diperkotaan APM sebesar 12,59 persen dan perdesaan sebesar 1,82 persen.

**b. Keragaman Antar Kabupaten/Kota.**

Angka Partisipasi Murni tingkat PT menunjukkan keragaman antar Kabupaten/Kota. Seperti ditunjukkan Gambar 6.35, APM tingkat PT di perdesaan lebih terpusat disekitar rata-rata Propinsi dibandingkan dengan di perkotaan. Di wilayah perkotaan, untuk laki-laki terdapat sebanyak 18 Kabupaten/Kota (82 persen) yang mempunyai APM tingkat PT yang berada di bawah rata-rata Propinsi, sedangkan untuk perempuan terdapat sebanyak 14 Kabupaten/Kota (64 persen). Kabupaten/Kota yang APM tingkat PT untuk laki-laki terendah dibandingkan tingkat Propinsi adalah Kabupaten Karawang dan untuk perempuan adalah Kabupaten Subang. Terdapat 4 Kabupaten/ Kota yang APM tingkat PT lebih tinggi dibandingkan rata-rata Propinsi, yaitu Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok (Lampiran 13).



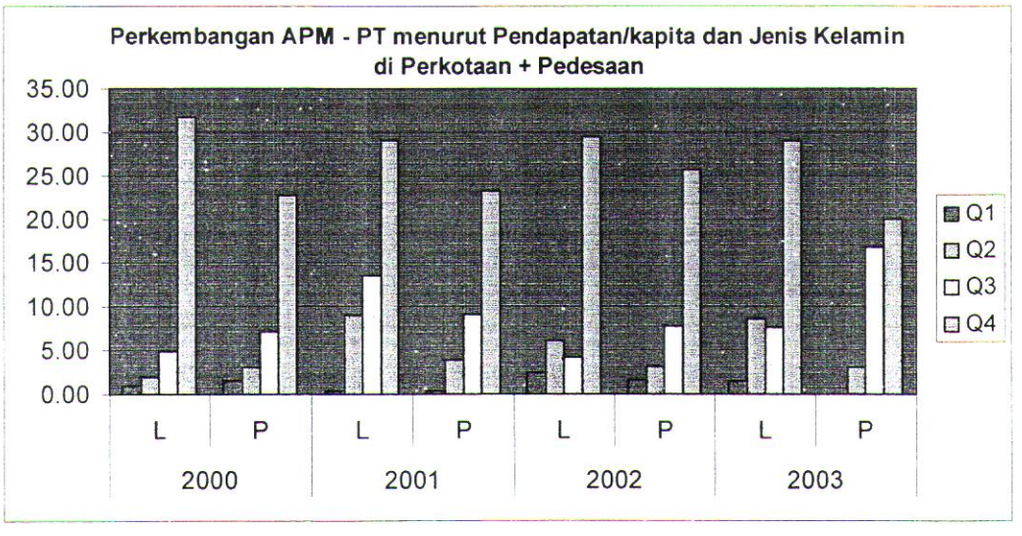

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bogor | 2. Sukabumi | 3. Cianjur | 4. Bandung | 5. Garut | 6. Tasikmalaya | 7. Ciamis | 8. Kuningan |
| | | 11. | 12. | | | 15. | |
| 9. Cirebon | 10. Majalengka | Sumedang | Indramayu | 13. Subang | 14. Purwakarta | Karawang | 16. Bekasi |
| 17. Kota | 18. Kota | 19 Kota | 20. Kota | 21. Kota | | | |
| Bogor | Sukabumi | Bandung | Cirebon | Bekasi | 22. Kota Depok | | |

Gambar 6.35. Keragaman APM tingkat PT antar Kabupaten /Kota Jawa Barat, 2003.

Di daerah perdesaan, APM tingkat PT lebih terpusat di sekitar rata-rata tingkat Propinsi dibandingkan di perkotaan. Dari sejumlah 17 Kabupaten/Kota yang data APM nya tersedia, ternyata jumlah Kabupaten/Kota pada wilayah perdesaan yang APM tingkat PTnya lebih rendah dari rata-rata Propinsi adalah sebanyak 10 Kabupaten/Kota (59 persen) baik untuk laki-laki dan sebanyak 8 Kabupaten/Kota (47 persen) untuk perempuan. Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang APM untuk penduduk perempuannya terendah yaitu Kabupaten Indramayu, Karawang, Cirebon, Bandung, Sukabumi dan Kabupaten Bogor. APM laki-laki terendah dijumpai di Kabupaten Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon dan Kabupaten Subang.

**c. Keragaman antar kelompok pendapatan/kapita.**

Perkembangan APM tingkat PT pada periode 2000 – 2003 seperti yang disajikan pada Gambar 6.36 menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi APM tingkat PT penduduk laki-laki dan perempuan di perkotaan maupun di perdesaan. Terdapat perbedaan yang sangat tajam antara penduduk dengan tingkat penghasilan tinggi (Q4) dan tingkat pendapatan di bawahnya dalam hal akses pendidikan tinggi, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, sebagian besar keluarga yang mampu sajalah yang akses terhadap PT.




Gambar 6.36. Perkembangan APM tingkat PT menurut Quartil Pendapatan per kapita pada periode 2000 – 2003 di Jawa Barat

Berdasar daerahnya, khususnya data pada tahun 2003 (Tabel 6.30). diperoleh pola bahwa di perkotaan APM penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan penduduk laki-laki, pada semua kelompok tingkat pendapatan kecuali pada quartil Q3. Pada kelompok pendapatan Q3 ini APM perempuan sebesar 17.58 persen sedangkan anak laki-laki sebesar 8,18 persen. Di daerah perdesaan menunjukkan keadaan yang sama, dimana akses pendidikan PT yang lebih besar pada penduduk perempuan hanya dijumpai pada kelompok pendapatan Q3. Pada kelompok penduduk dengan tingkat pendapatan tertinggi di perdesaan tenyata APM laki-laki sama dengan APM perempuan, seperti ditunjukkan Tabel 6.27.

Tabel 6.27. Angka Partisipasi Murni tingkat PT menurut Kelompok Pendapatan /Kapita dan Jenis Kelamin di Jawa Barat.

| Daerah dan Quartil Pendapatan / kapita | PT | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | Perkotaan | | | | | | | |
| Q1 | 2.50 | 3.45 | 1.43 | 1.45 | 5.55 | 1.96 | 3.45 | 0.00 |
| Q2 | 2.27 | 2.04 | 12.5 | 4.93 | 8.85 | 4.73 | 11.06 | 4.92 |
| Q3 | 4.96 | 8.13 | 13.79 | 9.17 | 4.28 | 7.92 | 8.18 | 17.58 |
| Q4 | 31.70 | 22.87 | 29.07 | 23.23 | 29.44 | 25.67 | 29.01 | 19.93 |
| | Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 1.43 | 2.00 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.02 | 0.97 |
| Q2 | 0.00 | 6.25 | 0 | 1.69 | 1.72 | 0 | 4.12 | 0.00 |
| Q3 | 1.35 | 2.47 | 1.08 | 3.09 | 2.56 | 2.47 | 0.00 | 1.35 |
| Q4 | 0.00 | 4.48 | 6.58 | 0 | 1.59 | 2.74 | 4.29 | 4.29 |
| | Perkotaan+Perdesaan | | | | | | | |
| Q1 | 1.03 | 1.57 | 0.44 | 0.42 | 2.41 | 1.63 | 1.58 | 0.00 |
| Q2 | 1.92 | 3.08 | 8.97 | 3.88 | 6.19 | 3.22 | 8.61 | 3.07 |
| Q3 | 4.93 | 7.14 | 13.48 | 9.07 | 4.17 | 7.77 | 7.68 | 16.74 |
| Q4 | 31.72 | 22.68 | 29.07 | 23.23 | 29.44 | 25.67 | 29.01 | 19.93 |

Catatan : Seperti pada Tabel 6.3.

Hal yang memprihatinkan adalah bahwa jika pada tahun-tahun sebelumnya APM-PT pada anak perempuan dari kelompok pendapatan terendah akses terhadap PT – sekalipun jumlahnya kecil, namun pada tahun 2003 ini APM mereka sebesar 0 ntuk diperkotaan dan hanya 0.97 di perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena biaya sekolah di PT menunjukkan kenaikan cukup nyata pada tahun tersebut, sehingga sekalipun otonomi daerah memfasilitasi munculnya PT-PT di daerah Tingkat II, namun tidak dapat mendorong meningkatnya partisipasi penduduk, baik laki-laki maupun perempuan untuk memasuki PT. Di pihak lain, dewasa ini berkembang anggapan

bahwa menjadi sarjana jauh lebih sulit mencari pekerjaan dibanding mereka yang berpendidikan lebih rendah karena ketatnya persaingan, sementara pasar tenaga kerja di Indonesia, termasuk di Jawa Barat menunjukkan kelesuan akibat krisis ekonomi berkepanjangan.

### 6.2. Kinerja Gender Menurut Jenjang Pendidikan/Sekolah

Berbeda dari akses terhadap pendidikan yang diperoleh dari SUSENAS, di bawah ini dikemukakn data kinerja pendidikan di Jawa Barat yang sumberdatanya diperoleh dari sekolah. Sebagaimana diketahui, data pada tingkat sekolah dibutuhkan untuk memperoleh sejauh mana kesenjangan gender dalam pendidikan dipengaruhi oleh kelembagaan pendidikannya itu sendiri. Untuk itu di bawah ini dikemukakan gambaran umum gender pada basis sekolah di Jawa Barat.

#### 6.2.1. Keadaan Sekolah di Jawa Barat

Seperti terlihat pada Tabel 6.28 tidak terdapat perkembangan jumlah sekolah yang berarti selama 3 tahun, antara 2001 samapai 2003, kecuali untuk SLB. Jumlah SLB meningkat sekitar 5 persen dalam periode tersebut. Membanding status sekolah, sebagian besar sekolah ternyata tergolong milik swasta, kecuali untuk Sekolah Dasar. Tingginya persentase SD ini tampaknya berhubungan dengan kebijakan SD Inpres pada masa Orde Baru.

Tabel 6. 28. Distribusi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen)

| Jenjang | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah |
| TK | 0.6 | 99.4 | 3318 | 0.6 | 99.4 | 3318 | 0.6 | 99.4 | 3318 |
| RA | 0.1 | 99.9 | 1498 | 0.1 | 99.9 | 1498 | 0.1 | 99.9 | 1498 |
| SD | 97.3 | 2.7 | 20550 | 97.3 | 2.7 | 20550 | 97.3 | 2.7 | 20550 |
| MI | 2.3 | 97.7 | 3252 | 2.3 | 97.7 | 3252 | 2.3 | 97.7 | 3252 |
| SMP | 48.8 | 51.2 | 2248 | 48.8 | 51.2 | 2248 | 48.8 | 51.2 | 2248 |
| MTs | 8.0 | 92.0 | 1587 | 8.0 | 92.0 | 1587 | 8.0 | 92.0 | 1587 |
| SMU | 30.6 | 69.4 | 972 | 30.6 | 69.4 | 972 | 30.6 | 69.4 | 972 |
| MA | 13.8 | 86.2 | 529 | 13.8 | 86.2 | 529 | 13.8 | 86.2 | 529 |
| SMK | 10.1 | 89.9 | 651 | 10.1 | 89.9 | 651 | 10.1 | 89.9 | 651 |
| SLB | 7.1 | 92.9 | 169 | 7.1 | 94.5 | 218 | 12.4 | 90.4 | 218 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Dalam hal sekolah SMP, persentasenya menunjukkan lebih proporsional antara sekolah negeri dan swasta. Yang paling menyolok adalah bahwa semua sekolah di

bawah Departemen Agama dominan sebagai sekolah swasta, berturut-turut sebesar 86 persen untuk MTs, dan 97,7 % untuk MI, sementara untuk RA hampir 100 %.

### 6.2.2. Profil Peserta Didik

Tabel 6.29 di bawah ini menyajikan data tentang peserta didik menurut jenjang pendidikan dan status sekolah pada periode waktu 2001 – 2003.

Tabel 6. 29. Distribusi Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen)

| Jenjang Pendidikan | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| TK | 51.5 | 48.5 | 127537 | 45.0 | 55.0 | 130087 | 45.0 | 55.0 | 132689 |
| RA | 49.1 | 50.9 | 52910 | 45.0 | 55.5 | 53963 | 45.0 | 55.0 | 55042 |
| SD | 50.7 | 49.3 | 4327510 | 45.0 | 55.0 | 4414060 | 45.0 | 55.0 | 4502341 |
| MI | 51.8 | 48.2 | 482496 | 45.0 | 55.0 | 492146 | 45.0 | 55.0 | 501989 |
| SMP | 51.3 | 48.7 | 1134823 | 45.0 | 55.0 | 1157519 | 55.0 | 45.0 | 1180669 |
| MTs | 49.2 | 50.8 | 318918 | 55.0 | 45.0 | 325296 | 55.0 | 45.0 | 331802 |
| SMU | 49.5 | 50.5 | 426673 | 55.0 | 45.0 | 435206 | 55.0 | 45.0 | 443910 |
| MA | 49.7 | 50.3 | 151927 | 55.0 | 45.0 | 154966 | 55.0 | 45.0 | 158065 |
| SMK | 61.8 | 38.2 | 298959 | 55.0 | 45.0 | 304938 | 55.0 | 45.0 | 311036 |
| SLB | 54.7 | 45.3 | 7435 | 55.0 | 45.0 | 7656 | 55.0 | 45.0 | 7888 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Terdapat beberapa pola, yaitu pertama pola adanya kecenderungan meningkatnya jumlah dan persentase murid perempuan dari tahun 2000 ke 2001 lalu tetap antara 2002 sampai 2003, yakni pada jenjang pendidikan TK, RA, SD dan MI, sebaliknya pada murid laki-laki. Kedua kecenderungan meningkatnya murid perempuan antara tahun 2000 ke 2001 lalu menurum sesudahnya, yakni dijumpai pada jenjang pendidikan SMP dan SMU. Selainnya berpola menunjukkan penurunan dari 2000 ke 2001 dan 2002, yakni MTs dan tetap, yakni SLB.

Selanjutnya, untuk melihat ada tidaknya kesetaraan gender dalam pendidikan formal tersebut, pada Tabel 6.30 disajikan Indeks Paritas dan Disparitas menurut jenjang pendidikan. Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya kesetaraan gender pada jenjang RA,SD, MTs, SMU dan MA pada tahun 2001, sementara pada jenjang pendidikan selainnya menunjukkan adanya kesenjangan, dimana kesenjangan lebih besar ditemukan pada SMK dan SLB. Selanjutnya terlihat adanya peningkatan IP menjadi 1.2. pada tahun 2001 dan 2002, yakni untuk TK, RA,SD dan MI, kecuali pada SMP kemudian menurun menjadi 0,8.

Tabel 6.30. Distribusi Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah

| Jenjang Pendidikan | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP | D | IP | D | IP | D |
| TK | 0.9 | -3 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 |
| RA | 1.0 | 2 | 1.2 | -39 | 1.2 | 10 |
| SD | 1.0 | -1 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 |
| MI | 0.9 | -4 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 |
| SMP | 0.9 | -3 | 1.2 | 10 | 0.8 | -10 |
| MTs | 1.0 | 2 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SMU | 1.0 | 1 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| MA | 1.0 | 1 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SMK | 0.6 | -24 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SLB | 0.8 | -9 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Namun demikian, terdapat penurunan IP yang dijumpai pada MTs, SMU, MA dan SMK. Hal ini diduga berhubungan dengan menurunnya kondisi ekonomi orangtua murid, yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasar nilai disparitasnya, terlihat sejauh mana kesenjangan yang ada diantara peserta didik. Pada tabel di atas, pada tahun 2003, pada jenjang TK,RA, SD dan MI akses perempuan lebih tinggi 10 persen dibanding anak laki-laki, sebaliknya pada jenjang pendidian selainnya akses anak laki-laki 10 persen lebih tinggi dibanding siswa perempuan.

## 6.3. Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Persen Buta Huruf.

### 6.3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Perkembangan angka melek huruf di Propinsi Jawa Barat menurut daerah dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 6.31. Berdasar data pada tabel tersebut diketahui bahwa dalam periode 4 tahun terdapat kecenderungan meningkatnya AMH baik pada laki-laki maupun perempuan, baik di daeerah perkotaan maupun perdesaan, kecuali antara tahun 2000 - 2001. Dalam periode 2000-2004 untuk daerah perkotaan dan perdesaan terjadi kenaikan AMH laki-laki rata-rata 0,29 persen per tahun, dan untuk AMH perempuan sebesar 0,57 persen per tahun. Kenaikan AMH perempuan ini diduga berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan perempuan dalam program pendidikan. Namun demikian, secara umum AMH pada perempuan lebih rendah dibanding AMH laki-laki, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Selanjutnya baik penduduk laki-laki meupun perempuan, AMH di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan AMH di perdesaan. khususnya di tingkat propinsi Jawa Barat.

Tabel 6.31. Perkembangan AMH menurut Daerah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat, 2000 – 2004.

| Daerah | Jenis | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | L | 97.87 | 97.53 | 97.83 | 98.35 |
| | P | 94.39 | 93.72 | 94.63 | 95.39 |
| | Total | 96.12 | 95.64 | 96.24 | 96.88 |
| | | | | | |
| Perdesaan | L | 94.11 | 94.19 | 94.39 | 95.06 |
| | P | 87.34 | 87.01 | 88.30 | 88.98 |
| | Total | 90.74 | 90.61 | 91.36 | 92.06 |
| | | | | | |
| Perkotaan + Perdesaan | L | 95.88 | 95.93 | 96.21 | 96.73 |
| | P | 90.70 | 90.50 | 91.64 | 92.26 |
| | Total | 93.29 | 93.22 | 93.94 | 94.52 |

Perincian perkembangan AMH menurut Kabupaten/Kota di daerah Perkotaan dan Perdesaan dapat dilihat pada Tabel 6.32. Jika kita membanding antar kabupaten/kota, diketahui bahwa pada tahun 2003, Kota Bandung menduduki rangking pertama untuk perempuan dan rangking kedua untuk laki-laki. Kota Sukabumi menduduki rangkin pertama dari segi AMH Laki-laki dan rangkin kedua untuk perempuan. AMH perempuan dan laki-laki di kota tersebut, dalam periode 2000 – 2003 menunjukkan persentase yang lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat. Adapun rangking terendah adalah Kabupaten Indramayu, yang pada tahun 2003 ini penduduknya memiliki AMH sebesar 71,0 persen pada perempuan dan 87.1 persen pada laki-laki . Persentase tersebut meningkat relatif nyata dari kondisi tahun 1999.

Berdasar data dari tahun 2002 - 2003, terlihat bahwa kecenderungan yang terjadi antar kabupaten/kota dapat dibedakan ke dalam kecenderungan menurun, tetap dan meningkat. Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, dan Kota Bekasi merupakan 4 wilayah yang mengalami kenaikan AMH Perempuan akan tetapi untuk laki-laki mengalami penurunan. Kabupaten Indramayu, Karawang dan Bekasi merupakan Kabupaten yang menunjukkan penurunan dari segi AMH perempuan, akan menunjukkan kenaikan untuk laki-laki. Terdapat satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan yang mengalami penurunan AMH Laki-laki dan Perempuan.

Kabupaten/Kota yang lain, yaitu sebanyak 13 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan AMH baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan

Tabel 6.32. Perkembangan AMH Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Usia di Atas 10 Tahun di daerah Perkotaan dan Perdesaan Jawa Barat, 2000 – 2003.

| No | Kabupaten / Kota | Tahun 2000 | | Tahun 2001 | | Tahun 2002 | | Tahun 2003 | | Rangking Th. 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Kab. Bogor | 96.7 | 91.3 | 94.0 | 87.4 | 94.5 | 91.1 | 96.6 | 91.8 | 15 | 15 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 97.9 | 92.0 | 97.5 | 93.4 | 96.7 | 93.5 | 97.7 | 94.6 | 13 | 12 |
| 3 | Kab. Cianjur | 96.6 | 91.4 | 98.1 | 95.2 | 97.9 | 94.6 | 98.6 | 95.3 | 10 | 10 |
| 4 | Kab. Bandung | 99.2 | 96.7 | 98.6 | 96.6 | 98.1 | 96.3 | 98.7 | 97.7 | 8 | 3 |
| 5 | Kab. Garut | 98.0 | 94.6 | 97.9 | 95.7 | 97.7 | 94.9 | 98.8 | 96.8 | 5 | 7 |
| 6 | Kab. Tasikmalaya | 99.0 | 97.1 | 98.4 | 97.4 | 99.0 | 96.3 | 98.6 | 97.5 | 9 | 4 |
| 7 | Kab. Ciamis | 97.6 | 93.8 | 96.8 | 91.4 | 97.7 | 94.2 | 97.6 | 94.3 | 14 | 13 |
| 8 | Kab. Kuningan | 95.9 | 89.8 | 95.6 | 88.3 | 95.2 | 88.2 | 94.6 | 86.6 | 18 | 17 |
| 9 | Kab. Cirebon | 94.8 | 87.4 | 94.7 | 86.6 | 93.6 | 83.7 | 92.9 | 85.3 | 20 | 19 |
| 10 | Kab. Majalengka | 93.7 | 87.5 | 92.5 | 86.1 | 95.8 | 88.1 | 96.1 | 89.2 | 16 | 16 |
| 11 | Kab. Sumedang | 96.3 | 92.3 | 96.6 | 92.1 | 97.4 | 94.2 | 97.8 | 95.2 | 11 | 11 |
| 12 | Kab. Indramayu | 82.1 | 67.0 | 85.5 | 64.6 | 86.5 | 71.4 | 87.1 | 71.0 | 22 | 22 |
| 13 | Kab. Subang | 90.4 | 80.5 | 91.6 | 83.2 | 90.6 | 81.3 | 92.4 | 83.2 | 21 | 20 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 98.0 | 93.9 | 95.5 | 91.0 | 97.7 | 93.3 | 97.7 | 93.7 | 12 | 14 |
| 15 | Kab. Karawang | 92.5 | 85.5 | 92.6 | 82.5 | 92.0 | 85.4 | 93.2 | 83.0 | 19 | 21 |
| 16 | Kab. Bekasi | 92.9 | 82.7 | 93.7 | 83.1 | 94.8 | 89.7 | 95.2 | 86.2 | 17 | 18 |
| 17 | Kota Bogor | 99.5 | 98.6 | 98.3 | 92.7 | 99.1 | 96.3 | 98.8 | 97.2 | 6 | 6 |
| 18 | Kota Sukabumi | 98.8 | 97.2 | 99.1 | 97.4 | 99.4 | 98.2 | 99.9 | 99.1 | 1 | 2 |
| 19 | Kota Bandung | 99.9 | 98.5 | 99.7 | 98.5 | 99.4 | 98.6 | 99.7 | 99.4 | 2 | 1 |
| 20 | Kota Cirebon | 97.9 | 94.2 | 98.2 | 92.5 | 98.1 | 93.6 | 98.7 | 95.8 | 7 | 9 |
| 21 | Kota Bekasi | 96.8 | 95.9 | 97.9 | 94.5 | 99.3 | 97.1 | 99.0 | 97.4 | 3 | 5 |
| 22 | Kota Depok | - | - | 97.9 | 95.3 | 98.4 | 94.6 | 98.9 | 96.1 | 4 | 8 |
| | ***Jawa Barat*** | ***95.9*** | ***90.7*** | ***95.9*** | ***90.5*** | ***96.2*** | ***91.6*** | ***96.7*** | ***92.3*** | | |

### 6.3.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Sebagaimana dikemukakan dalam LPM Indonesia 2001, indikator RLS yang digunakan oleh Indonesia berbeda dari 1995 HDR, dalam arti tidak menggunakan variabel angka *enrolment* gabungan SD sampai perguruan tinggi, tapi berdasar pada *means years of schooling* dengan alasan angkanya relatif stabil. Adapun RLS Jawa Barat menurut kabupaten/kota disajikan pada Tabel 6.35. Sebagaimana terlihat dari Tabel 6.35. di tingkat propinsi terdapat peningkatan RLS baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan, yaitu 0,5 persen pada penduduk perempuan dan 0,4 persen pada penduduk laki-laki.

Tabel 6. 33. Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 1999 dan 2002

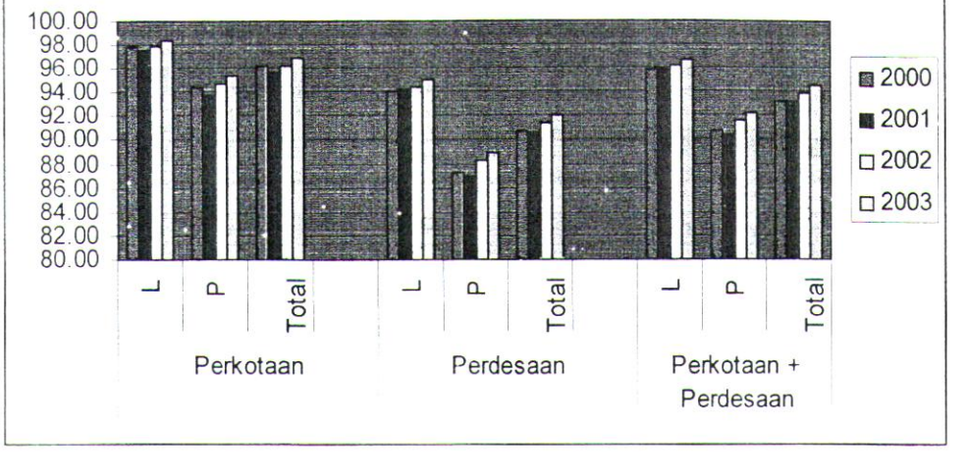
| Provinsi/Kabupaten/ Kota | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | | | | Rangking RLS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1999 | | 2002 | | 1999 | | 2002 | |
| | P | L | P | L | P | L | P | L |
| 03. Bogor | 7.5 | 8.5 | 5.6 | 6.8 | 6 | 6 | 17 | 16 |
| 04. Sukabumi | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| 05. Cianjur | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 06. Bandung | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 07. Garut | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| 08. Tasik malaya | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 10 | 14 | 10 | 11 |
| 09. Ciamis | 6.0 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 11 | 10 | 13 | 17 |
| 10. Kuningan | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 14 | 12 | 14 | 15 |
| 11. Cirebon | 5.0 | 6.4 | 5.4 | 6.7 | 18 | 15 | 20 | 18 |
| 12. Majalengka | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 7.0 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| 13. Sumedang | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 14. Indramayu | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 15. Subang | 4.7 | 6.0 | 4.7 | 5.9 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| 16. Purwakarta | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 7.4 | 13 | 13 | 12 | 10 |
| 17. Karawang | 4.7 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 20 | 20 | 16 | 14 |
| 18. Bekasi | 6.2 | 7.4 | 6.8 | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 71. Bogor | 8.7 | 9.8 | 8.9 | 10.4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 72. Sukabumi | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 9.2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 73. Bandung | 9.0 | 10.3 | 9.8 | 10.9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 74. Cirebon | 7.7 | 9.2 | 8.2 | 9.5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 76. Bekasi | 8.7 | 10.1 | 9.8 | 11.0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 77. Depok | - | - | 9.1 | 10.3 | - | - | 3 | 4 |
| ***32. Jawa Barat*** | ***6.2*** | ***7.3*** | ***6.7*** | ***7.7*** | | | | |

Berdasar polanya, terdapat satu kabupaten yang menunjukkan penurunan AMH perempuan yaitu Kabupaten Bogor. Terdapat 10 kabupaten/kota menunjukkan peningkatan AMH perempuan, yaitu Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon dan Insramayu. Satu kabupaten yaitu Kabupaten Subang menunjukkan tidak ada perkembangan, sementara sisanya tergolong meningkat yaitu Kabupaten Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi dan semua yang ada di Jawa Barat.

### 6.3.3. Persen Buta Huruf

Gambar 6.37. di bawah ini mengemukakan data persentase penduduk 10 – 44 tahun di Jawa Barat menurut jenis kelamin dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000

Gambar 6.37. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas




Sumber : Badan Pusat Statistik Popinsi Jawa Barat, 2004

Berdasar Gambar 6.37 dapat dilihat bahwa di Jawa Barat, secara umum dalam periode tahun 2000-2003 terdapat kecenderungan peningkatan persentase AMH penduduk baik di perdsaan maupun perkotaan, kecuali pada tahun 2001. Namun demikian, persentase AMH penduduk perempuan di kedua wilayah tersebut (perkotaan dan perdesaan) masih lebih rendah dibanding AMH laki-laki. Lebih lanjut, membanding antar wilayah, AMH baik penduduk perempuan dan laki-laki di perdesaan masih jauh lebih rendah dibanding di perkotaan. Pada Lampiran 13 dapat dilihat distribusi AMH menurut Kabupaten/Kota di propinsi ini.. Di perkotaan, terdapat 11 Kabupaten yang AMHnya lebih rendah dibanding rata-rata AMH Tingkat Propinsi, yaitu Karawang, Bekasi, Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Ciamis, Kuningan, Garut, Cianjur dan Bogor. Sementara di perdesaan hanya terdapat 6 kabupaten saja, yaitu kabupaten-kabupaten Karawang, Bekasi, Subang, Indramayu, dan Bogor. Dengan demikian, kondisi di perkotaan tidak sebaik di perdesaan.

### 6.3.5. Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya

Pada Lampiran 14a sampai dengan Lampiran 14c disajikan data persentase kemampuan membaca dan menulis Huruf Latin dan Huruf Lainnya serta mereka yang Tidak Mampu Baca Tulis menurut jenis kelamin dan wilayah pada periode 2000 – 2003. Seperti terlihat pada lampiran-lampiran tersebut, kemampuan membaca dan

menulis huruf latin penduduk di perkotaan menunjukkan persentase lebih besar dibanding perdesaan, baik pada laki-laki mapun perempuan. Namun menurut jenis kelaminnya, persentase perempuan dan laki-laki yang mampu membaca dan menulis huruf latin di perdesaan lebih rendah dibanding perkotaan, sebaliknya untuk kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya (diduga huruf Arab). Untuk yang tidak mampu membaca dan menulis, proporsi perempuan lebih besar dibanding mereka yang ada di perkotaan dan dibanding laki-laki di perdesaan. Sebaliknya pada AMH , dimana persentase perempuan di perdesaan lebih rendah dibanding mereka yang ada di perkotaan dan dibanding laki-laki di perdesaan.

## 6.4. Akses Terhadap Program Pendidikan Non-formal

### 6.4.1. Akses Terhadap Program PADU, Paket A-B-C, dan Kelompok Belajar Usaha (KBU).

Dalam sub-bab ini dikemukakan berbagai aspek yang berkenaan dengan peserta didik Program PADU, Paket A-B-C, dan Kelompok Belajar Usaha (KBU).

Data peserta didik dalam pendidikan non-formal di Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 6.35.

Tabel 6.35. Peserta Didik Pendidikan Non-formal di Propinsi Jawa Barat Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003

| Jenis Pendidikan Luar Sekolah | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total (N) | L | P | Total (N) | L | P | Total (N) |
| KF | 37.0 | 63.0 | 2500 | 23.3 | 76.7 | 2400 | 45.9 | 54.1 | 51250 |
| PADU | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 45.9 | 1799000 | 63.5 | 36.5 | 1691255 |
| Paket A | 57.0 | 43.0 | 3330 | 72.5 | 27.5 | 3380 | 55.7 | 44.3 | 3760 |
| Paket B | 56.0 | 44.0 | 21875 | 59.5 | 40.5 | 20035 | 59.2 | 40.8 | 27280 |
| Paket C | 76.7 | 23.3 | 675.0 | 73.0 | 27.0 | 9185 | 69.0 | 31.0 | 13122 |
| KBU | 62.3 | 37.7 | 2340 | 43.1 | 56.9 | 3000 | 64.3 | 35.7 | 3055 |
| Magang/Beasiswa | 35.9 | 64.1 | 680 | 13.1 | 86.9 | 2100 | 32.1 | 67.9 | 2583 |

Sumber : Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah-Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Dari tabel di atas, terlihat bahwa secara umum akses perempuan terhadap pendidikan non formal juga relatif rendah dibanding laki-laki, khususnya pada Program PADU, Paket A, B dan C serta KBU. Sebaliknya, pada program Keaksaraan Fungsional dan magang/beasiswa, persentase peserta didik laki-laki relatif lebih rendah dibanding perempuan. Namun demikian terdapat sedikit perkembangan selama 3 tahun tersebut, yakni persentase perempuan pada kedua program tersebut meningkat dari 63 % pada 2001 menjadi 76,7 % pada tahun 2002 dan menurun drastis menjadi hanya 54,1 % pada 2003. Hal ini menjadikan adanya kesenjangan gender dalam pendidikan non-

formal tersebut, yang didukung oleh hasil penghitungan Indeks Paritas dan Disparitas yang hasilnya disajikan pada Tabel 6.36

Tabel 6.36. Indeks Paritas dan Disparitas Pada Pendidikan Non-Formal Di Jawa Barat Tahun 2000, Tahun 2002 dan Tahun 2003

| Jenjang | Tahun 2001 | | Tahun 2002 | | Tahun 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | IP | D | IP | D | IP | D |
| KF | 1.7 | 26 | 3.3 | 53 | 1.2 | 8 |
| PADU | 0.0 | 0 | 0.8 | -8 | 0.6 | -27 |
| Paket A | 0.8 | -14 | 0.4 | -45 | 0.8 | -11 |
| Paket B | 0.8 | -12 | 0.7 | -19 | 0.7 | -18 |
| Paket C | 0.3 | -53 | 0.4 | -46 | 0.4 | -38 |
| K B U | 0.6 | -25 | 1.3 | 14 | 0.6 | -29 |
| Magang/Beasiswa | 1.8 | 28 | 6.6 | 74 | 2.1 | 36 |

Sumber : Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah-Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

. Berdasar data pada Tabel 6.36. diketahui bahwa IP untuk Program KF dan Magang/Beasiswa berturut-turut 1,7 dan 1,8; sementara pada program selainnya lebih rendah dari 1 yang berarti peserta laki-laki lebih rendah atau kurang akses dibanding perempuan. Dalam hal disparitasnya, terlihat bahwa untuk kedua program tersebut berturut-turut sebesar 26 dan 28. Disparitas tertinggi ditemukan pada Program Paket C, meskipun kecenderungannya menunjukkan penurunan, dari -53 pada 2001 ke -46 pada 2002 dan menurun lagi menjadi -38 pada 2003. Untuk program PADU dan Paket A menunjukkan pola serupa, kecuali untuk KBU. Perubahan dalam IP dan Disparitas tersebut tampaknya berhubungan dengan adanya himbauan untuk memprioritaskan perempuan, khususnya pada 2001 sehingga partisipasi perempuan cenderung jauh lebih meningkat ketimbang laki-laki.

### 6.4.2. Akses Terhadap Program Kepemudaan.

Dalam hal program kepemudaan, kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 6.37. Seperti terlihat pada Tabel 6.37., pada tahun 2001, kecuali pada Program SP3 yang cenderung menunjukkan keikutsertaaan laki-laki dan perempuan yang proporsional, pada program selainnya menunjukkan lebih tingginya persentase peserta laki-laki yang akses dalam program kepemudaan. Selanjutnya, pada Tahun 2002 partisipasi perempuan lebih tinggi pada Program PPAN, yakni hampir 2 kalinya. Sementara pada program lainnya menunjukkan kecenderungan lebih rendahnya akses perempuan terhadap program kepemudaan, terlebih dalam program Penyuluhan HIV/Aids, Miras, Narkoba dan Merokok serta program PPAP. Hal ini diduga karena

dipengaruhi oleh stereotipi imej tentang anggapan bahwa yang potensial terkena HIV/Aids, Miras, Narkoba dan Merokok adalah laki-laki, demikian pula lainnya.

Tabel 6.37. Program Kepemudaan Tahun 2001, 2002 dan 2003

| Jenis Program | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | N L+P | L | P | N L+P | L | P | N L+P |
| Pelatihan Kerukunan Umat Beragama bagi Pemuda | 72.0 | 28.0 | 50 | 62.9 | 37.1 | 35 | - | - | - |
| Penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba, Miras & Merokok | - | - | - | 83.8 | 16.3 | 400 | 54.9 | 45.1 | 750 |
| Pelatihan Mitra Kamtibmas bagi Pemuda | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 16.7 | 30 |
| Kelompok Usaha Pemuda Produktif | 73.3 | 26.7 | 15 | 62.5 | 37.5 | 80 | 55.3 | 44.7 | 170 |
| Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP) | 83.3 | 16.7 | 60 | 80.0 | 20.0 | 25 | 83.3 | 16.7 | 30 |
| Pertukaran Pemuda Antar Negara ( PPAN ) | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 3 | 50 | 50 | 2 |
| Sarjana Penggerak Pem bangunan di Pedesaan (SP3) | 53.3 | 46.7 | 45 | 66.7 | 33.3 | 45 | 60 | 40 | 25 |
| Life Skill Kepemudaan | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 6 | 95.7 | 4.3 | 94 |
| Dialog Kepemudaan | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 50 | 66.7 | 33.3 | 300 |

Sumber : Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah-Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Untuk melihat kesenjangan gender dalam Program Kepemudaan, pada Tabel 6.38. dikemukakan Indeks Paritas dan Disparitas dalam program tersebut.

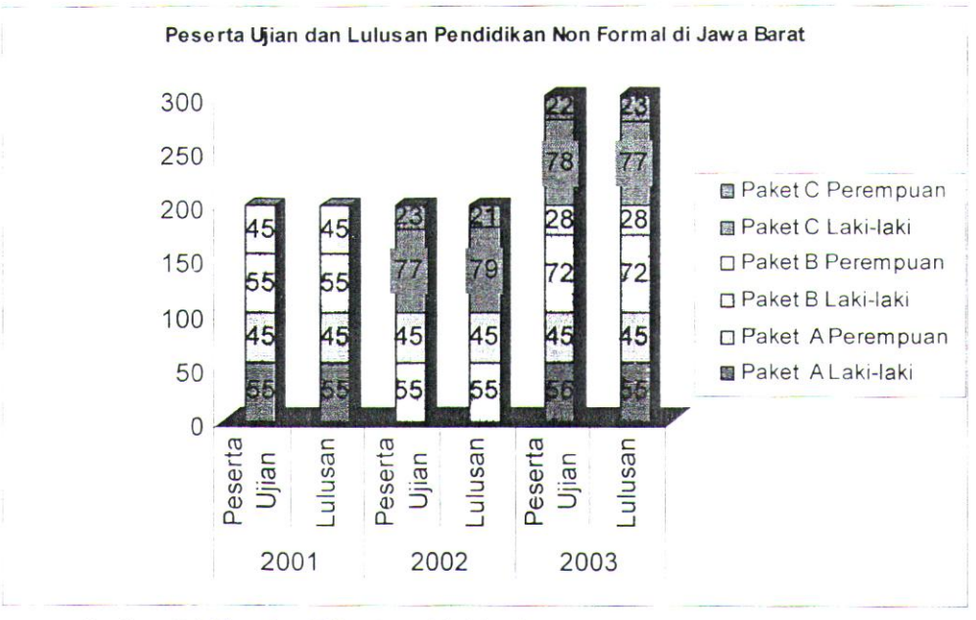
Tabel 6.38. Indeks Paritas dan Disparitas Dalam Program Kepemudaan di Jawa Barat

| Jenis Program | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP | D | IP | D | IP | D |
| Pelatihan Kerukunan Umat Beragama bagi Pemuda | 0.39 | 44.00 | 0.59 | 25.7 | - | - |
| Penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba, Miras dan Merokok | - | - | 0.19 | 67.5 | 0.8 | -9.9 |
| Pelatihan Mitra Kamtibmas bagi Pemuda | - | - | - | - | 0.2 | 66.7 |
| Kelompok Usaha Pemuda Produktif | 0.36 | 46.67 | 0.6 | 25.0 | 0.8 | 10.6 |
| Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP) | 0.20 | 66.67 | 0.25 | 60.0 | 0.2 | 66.7 |
| Pertukaran Pemuda Antar Negara ( PPAN ) | - | - | 2 | 33.3 | 1.0 | 0.0 |
| Sarjana Penggerak Pem bangunan di Pedesaan (SP3) | 0.88 | -6.67 | 0.5 | 33.3 | 0.7 | 20.0 |
| Life Skill Kepemudaan | - | - | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 91.5 |
| Dialog Pemuda | - | - | 1 | 0.0 | 0.5 | 33.3 |

Berdasar data pada tabel di atas, ditemukan bahwa IP dalam program kepemudaan pada tahun 2001 tidak ada yang sama dengan 1, semuanya di bawah 1, ini berarti bahwa akses perempuan terhadap program tersebut lebih rendah dibanding laki-laki. Namun demikian, pada tahun 2002 ditemukan IP sebesar 1, khususnya pada Dialog Pemuda dan sebesar 2 pada program Pertukaran Pemuda Antar Negara ( PPAN ).

Selanjutnya terjadi perubahan lagi, dimana pada tahun 2003 kesetaraan gender dijumpai pada Program PPAN.

Sejauh mana peserta pendidikan non formal akses terhadap Ujian dan manfaat yang diperoleh dari partisipasi mereka dalam program tersebut dapat dilihat dari Gambar 6.35. Berdasar gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa akses perempuan sebagai partisipan Ujian Paket A, B dan C senantiasa lebih rendah dibanding laki-laki , bahkan pada Paket B dan C kurang dari 30 persen, yakni pada tahun 2002 dan 2003. Namun demikian, ampir semua peserta ujian, laki-laki maupun perempuan, mayoritas menunjukkan kelulusan dalam ujian yang diikutinya, baik itu untuk Paket A, Paket B maupun paket C.




Sumber : Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah-Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Gambar 6.38. Peserta Ujian dan Lulusan Pendidikan No Formal di Jawa Barat

## 6.5. Mutu dan Relevansi Pendidikan

### 6.5.1. Angka Putus Sekolah, Mengulang dan Lulusan

Perkembangan angka putus sekolah peseerta didik pada berbagai jenjang pendidikan dari tahun 2001 – 2003 disajikan pada Tabel 6.39. Berdasarkan data pada Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat keragaman dalam perkembangan angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Apabila dibandingkan antara tahun 2001 dan 2003, angka putus sekolah murid laki-laki

menunjukkan penurunan pada jenjang RA, MI, SMP, SMU dan SMK. Pada murid perempuan terjadi penurunan pada jenjang TK, SD, dan MTs. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pada sebagian besar jenjang pendidikan terjadi kenaikan putus sekolah pada murid perempuan.

Tabel 6.39. Distribusi Peserta Didik Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen)

| Jenjang | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| TK | 50.8 | 49.2 | 360 | 54.9 | 45.1 | 350 | 54.8 | 45.2 | 343 |
| RA | 48.3 | 51.7 | 58 | 51.8 | 48.2 | 83 | 48.1 | 51.9 | 108 |
| SD | 52.6 | 47.4 | 20448 | 65.0 | 35.0 | 19835 | 55.0 | 45.0 | 19439 |
| MI | 66.7 | 33.3 | 21 | 46.2 | 53.8 | 13 | 46.2 | 53.8 | 13 |
| SMP | 59.2 | 40.8 | 16848 | 55.0 | 45.0 | 16343 | 55.0 | 45.0 | 16017 |
| MTs | 41.5 | 58.5 | 5699 | 48.0 | 52.0 | 6729 | 48.0 | 52.0 | 6931 |
| SMU | 60.3 | 39.7 | 5414 | 55.0 | 45.0 | 5252 | 55.0 | 45.0 | 5147 |
| MA | 51.0 | 49.0 | 1003 | 51.0 | 49.0 | 1033 | 51.0 | 49.0 | 1049 |
| SMK | 66.8 | 33.2 | 3242 | 55.0 | 45.0 | 3145 | 55.0 | 45.0 | 3207 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Dalam hal peserta didik yang mengulang (Tabel 6.40), terlihat bahwa anak perempuan menunjukkan persentase mengulang yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki (lebih dari 50 %) pada jenjang pendidikan TK dan RA, kecuali pada RA tahun 2002; MI, SMP, dan SMK untuk semua tahun. Selanjutnya juga dapat dilihat adanya kecenderungan meningkatnya persentase anak perempuan yang mengulang pada kurun waktu 3 tahun tersebut, yaitu pada jenjang SD, MI dan MA.

Tabel 6.40. Distribusi Peserta Didik Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen)

| Jenjang | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| TK | 32.0 | 68.0 | 19021 | 34.0 | 66.0 | 18451 | 45.0 | 55.0 | 18082 |
| RA | 48.1 | 51.9 | 1744 | 52.0 | 48.0 | 2488 | 47.9 | 52.1 | 3231 |
| SD | 76.8 | 23.2 | 224003 | 65.0 | 35.0 | 217283 | 45.0 | 55.0 | 212938 |
| MI | 22.1 | 77.9 | 8709 | 32.7 | 67.3 | 15199 | 21.8 | 78.2 | 13159 |
| SMP | 46.3 | 53.7 | 115994 | 45.0 | 55.0 | 112514 | 45.0 | 55.0 | 110264 |
| MTs | 44.7 | 55.3 | 37078 | 90.2 | 9.8 | 5508 | 42.0 | 58.0 | 36541 |
| SMU | 45.4 | 54.6 | 46710 | 45.0 | 55.0 | 45309 | 45.0 | 55.0 | 44403 |
| MA | 51.1 | 48.9 | 7019 | 61.0 | 39.0 | 5191 | 43.8 | 56.2 | 7323 |
| SMK | 22.0 | 78.0 | 22801 | 45.0 | 55.0 | 22117 | 45.0 | 55.0 | 21675 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Lebih lamanya waktu yang ditempuh anak pada jenjang TK dan RA dimungkinkan oleh adanya kecenderungan dimana orangtua memasukkan anaknya

pada usia terlalu dini (sekitar 4 tahun) sehingga anak akan menempuh waktu lebih 2 tahun di TK. Kecenderungan ini diduga lebih meningkat di daerah perkotaan, sejalan dengan meningkatnya peluang perempuan (isteri, ibu) untuk bekerja, sehingga TK dapat berfungsi sebagai "tempat penitipan anak". Di lain pihak, lebih tingginya persentase perempuan yang mengulang pada jenjang pendidikan menengah diduga berhubungan dengan faktor beban kerja dan atau rendahnya pendampingan dari orangtua karena lebih rendahnya pendidikan orangtua mereka, serta rendahnya akses mereka terhadap kursus-kursus karena rendahnya kemampuan ekonomi orangtua mereka. Belum adanya kejelasan ini tentang alasan mengapa anak perempuan pada tingkat pendidikanmenengah lebih banyak yang mengulang dibanding laki-laki, memerlukan suatu penelitian lebih lanjut. Kasus menurun drastisnya persentase siswa perempuan yang mengulang pada tahun 2002 dan meningkat tajam pada tahun 2003 misalnya, menimbulkan tanda tanya besar. Tabel selanjutnya mengemukakan lulusan peserta didik menurut jenjang pendidikan pada periode 3 tahun, 2000 – 2003.

Tabel 6.41. Distribusi Lulusan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen)

| Jenjang Pendidikan | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| TK | 53.0 | 47.0 | 161426 | 55.0 | 45.0 | 166269 | 55.0 | 45.0 | 169594 |
| RA | 48.0 | 52.0 | 28278 | 53.0 | 47.0 | 4111 | 48.0 | 52.0 | 32256 |
| SD | 65.0 | 35.0 | 630304 | 61.0 | 39.0 | 549797 | 65.0 | 35.0 | 669291 |
| MI | 45.0 | 55.0 | 100059 | 33.0 | 67.0 | 101780 | 22.0 | 78.0 | 101682 |
| SMP | 52.0 | 48.0 | 328297 | 53.0 | 47.0 | 338451 | 65.0 | 35.0 | 348604 |
| MTs | 45.0 | 55.0 | 125690 | 90.2 | 9.8 | 151950 | 41.0 | 59.0 | 141000 |
| SMU | 51.0 | 49.0 | 116483 | 49.8 | 50.2 | 119993 | 35.0 | 65.0 | 121593 |
| MA | 48.0 | 52.0 | 100913 | 61.0 | 39.0 | 104890 | 44.0 | 56.0 | 106792 |
| SMK | 55.0 | 45.0 | 88621 | 55.0 | 45.0 | 90429 | 55.0 | 45.0 | 93225 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Seperti terlihat pada Tabel 6.41, maka jika membanding antara 2001 dan 2003, dapat dilihat adanya kecenderungan penurunan lulusan peserta didik perempuan, yakni pada TK dan SMP, sebaliknya pada jenjang pendidikan MI, MTs, SMU dan MA. Adapun pada RA dan SMK menunjukkan tidak ada perkembangan persentase lulusan.

. Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa persentase lulusan siswa perempuan pada jenjang TK, SD, SMP dan SMK menunjukkan persentase lebih rendah dibanding siswa laki-laki, sebaliknya pada jenjang pendidikan menengah umum dan agama, khususnya SMU dan MA. Dengan demikian daya bertahan perempuan pada jenjang

pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan lebih besar dibanding laki-laki, sekalipun persen mengulangnya relatif sedikit lebih tinggi. Terdapat beberapa faktor yang diduga berhubungan dengan ini, antara lain diduga tingkat kenakalan remaja laki-laki lebih tinggi sehingga mereka bermasalah dalam penyelesaian sekolahnya. Untuk ini pula diperlukan penelitian yang holistik untuk mengetahui beragam alasan yang bisa menjelaskan gender dalam pendidikan menengah.

Dalam hal kesenjangan gender, maka kesenjangan tertinggi dimana lulusan perempuan jauh lebih rendah dibanding anak lakilaki dijumpai pada tahun 2001 khususnya untuk SD dan MTs, dan MA, sementara kesenjangan sebaliknya dijumpai pada jenjang pendidikan MI, dimana lulusan peserta didik laki-laki jauh lebih rendah dibanding anak perempuan. Yang menarik adalah bahwa pada tahun 2003, lulusan peserta didik MI anak perempuan hampir 3 kali lipatnya anak laki-laki, sebaliknya pada SD. Sulit menjelaskan sebab-sebab terjadinya fenomena ini, namun diduga karena jumlah murid anak perempuan MI lebih besar dibanding anak laki-lakinya

### 6.5.2. Hasil Ujian Akhir Nasional (UAN)

Hasil UAN untuk Ujian Tertulis untuk kasus SD di Kota Bekasi dapat dilihat pada Lampiran 15 dan Lampiran 16. Seperti terlihat pada Lampiran 15, siswa yang memperoleh nilai lebih dari 8 untuk mata ajaran PPKN dan Bahasa Sunda didominasi oleh perempuan, sementara untuk mata ajaran Agama, Bahasa Inggeris IPS, matematika dan IPA persentase yang mendapat nilai di atas 8 dominan laki-laki, kecuali pada bahsa Inggeris dan IPA pada kelompok nilai 8,01 sampai dengan 9 dominan perempuan. Adapun untuk ujian praktek (Lampiran 16) , secara umum hasil prestasi yang dicapai tidak setinggi hasil ujian tertulis. Hal itu terlihat dari tidak adanya siswa yang mencapai nilai lebih dari 9 untuk hampir semua mata-ajaran : Agama, PPKN, KTK, PJK, Bahasa Sunda dan Bahasa Inggeris, kecuali IPA. Namun demikian, terdapat kecenderungan dimana prestasi siswa perempuan yang memperoleh nilai antara 8,01 samapi 9 relatif dominan, khususnya untuk Bahasa Sunda, Inggeris, Agama dan PPKN; sementara untuk IPA untuk nilai di atas 9 dominan laki-laki dan untuk perempuan dominan pada kelompok nilai 8,01 sampai 9. Dugaan dimana lebih banyak anak perempuan dominan pada mata ajaran ilmu sosial tampaknya masih relevan. Untuk kasus Kabupaten Indramayu hanya melaporkan peserta UAN saja, belum dengan nilai UANnya. Itu sebabnya tidak dikemukkan dalam laporan

### 6.5.3. Kualitas Bahan Ajar

#### 6.5.3.1. Sebelum Kurikulum 2004

Pengetahuan kita mengenai sejauh mana kualitas bahan ajar yang diberikan kepada siswa/peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Jawa Barat sudah responsif gender atau tidak, belum bisa dijawab sepenuhnya. Studi yang dilakukan PSW UPI tentang Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Barat (Krishnayani dkk., 2003) tidak menyajikan informasi mengenai hal tersebut. Namun demikian, hasil studi yang dilakukan PSW-Lembaga Penelitian Universitas Negeri pada tahun 2000 yang dilakukan di 6 propinsi, termasuk propinsi Jawa Barat menemukan bahwa dari sejumlah 108 buku ajar yang dianalisis, sebagian diantaranya diterbitkan oleh Penerbit Grafindo Media Pratama dan PT Sarana Panca Karya Nusa yang berlokasi di Bandung. Buku-buku tersebut adalah buku PPKn Kelas 1,2,4 dan 5 serta buku Bahasa Indonesia Kelas 1, 4 dan 6. (Lampiran 17.). Selanjutnya, dari hasil studi terhadap bahan ajar tersebut secara rinci dikemukakan hasilnya sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 18 sampai dengan Lampiran 21.

Secara umum, peneliti PSW UPN Jakarta menemukan adanya bahan ajar bias gender yang ditemukan dalam ilustrasi gambar sebanyak 61,87 % dan sebanyak 36,87 % pada uraian materi. Berdasar nama mata ajarannya, diketahui bahwa bahan ajar yang bias gender tersebut ditemukan baik pada mata ajaran IPS maupun IPA. Pada mata ajaran IPS kelas III sampai dengan Kelas VI ditemukan materi bahan ajar yang bias gender berturut-turut sekitar 30 persen pada uraian materi dan 54,3 persen pada ilustrasi gambar. Sementara pada mata ajaran IPA kelas III s/d kelas VI, tidak dijumpai materi yang bis gender karena uraian materi tidak membahas masalah sosial. Namun demikian dalam ilustrasi gambar ditemukan sebanyak 70,73 persen materi yang bias gender. Khusus pada mata ajaran PPKN muatan bias gender dalam ilustrasi gambar lebih tinggi dibanding materi, berturut-turut sebesar 66,2 % pada materi dan 72 % pada ilustrasi gambar. Dengan demikian, temuan tersebut menunjukkan relatif masih besarnya para penulis bahan ajar yang secara langsung berkontribusi terhadap sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang bias gender pada anak didik.

### 6.5.3.2. Analisis Bahan Ajar : Kasus Kurikulum 2004 di Jawa Barat

Bahan ajar yang dianalisis adalah khususnya bahan ajar berbasis Kurikulum 2004 terbitan Penerbit Daerah, yaitu PT Remaja Rosdakarya yang berdomisili di Bandung. Hasil analisis disajikan pada Lampiran 22. Pada Lampiran 22 terlihat bahwa pada Buku Tangkas Pengetahuan Sosial Kelas 2 SD, persentase terbesar sudah memuat materi yang responsif gender (66,7 persen), sementara untuk Buku Tangkas Pengetahuan Sosial untuk Kelas 3, 5 dan 6 dominan tergolong netral gender. Hal terakhir dimungkinkan karena yang dibicarakan tentang pabrik, keragaman suku bangsa dan budaya. Adapun pada gambarnya ditemukan bahwa persentase tertinggi menunjukkan bias gender, khususnya pada Tangkas Pengetahuan Sosial Kelas 2 SD dan Kelas 3 SD. Sebaliknya pada Tangkas Pengetahuan Sosial Kelas 5 dan Kelas 6 SD dominan netral gender, diikuti oleh adanya materi yang bias gender, masing-masing sebanyak 25 persen.

Selanjutnya, pada Lampiran 22 terlihat hasil analisis bahan ajar untuk Tangkas Berbahasa Indonesia untuk Kelas 1 sampai dengan Kelas 6. Dari Lampiran 22 tersebut, khususnya dalam teks materi terlihat bahwa sebagian besar tergolong netral gender, namun demikian persentase yang tergolong bias gender menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibanding yang responsif gender, untuk semua Buku Tangkas berbahasa Indonesia mulai Kelas 1 sampai dengan Kelas 6. Namun demikian, ternyata gambar yang bias gender cenderung menunjukkan persentase yang tertinggi, kecuali untuk Buku Kelas 1. Pada Lampiran 23 dikemukakan teks bahan ajar yang pada bahan ajar Sekolah Dasar yang menggambarkan masih adanya bias gender dalam teks-teks pelajaran tersebut.

### 6.5.2.2. Analisis Materi Bahan Ajar Muatan Lokal : Kasus Kabupaten Indramayu

Pada Lampiran 24 disajikan hasil analisis Materi bahan Ajar Muatan Lokal untuk Bahasa Indramayu yang diambil dari Buku "Gelis Pinter Moco Lan Nulis" untuk Kelas 1 sampai dengan Kelas 3, serta buku Wulang Basa untuk Kelas 4 sampai dengan Kelas 6 SD. Dari analisis materi bahan ajar, hasilnya menunjukkan bahwa kecuali untuk Wulang Basa Kelas 4 SD, untuk buku selainnya dominan menunjukkan netral gender. Juga ditemukan adanya persentase relatif tinggi untuk yang responsif

gender, khususnya pada buku Gelis Pinter Lan Maca untuk buku Kelas 2 dan Kelas 4. Adapun dalam Ilustrasi Gambarnya, masih ditemukan adanya bias gender dengan persentase yang relatif besar, pada buku yang sama, yaitu untuk Kelas 2 dan Kelas 4 Selanjutnya pada Lampiran 25 tersebut juga dapat dilihat bahwa pada Tingkat SLTP khususnya dalam Muatan Lokal Mata ajaran Ketrampilan Tata Busana ditemukan materi yang netral gender. Selanjutnya, untuk materi Buku Pendidikan Budi Pekerti untuk Tingkat SMU ), untuk kelas 2 masih ditemukan bias gender khususnya pada 4 topik pelajaran; sementara selainnya netral gender. Adapun dalam Ilustrasi Gambar semuanya tergolong bias gender.

### 6.5.2.3. Penulis Bahan Ajar

Sebagaimana dikemukakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2003), secara umum proporsi penulis bahan ajar untuk semua jenjang pendidikan dasar menengah didominasi penulis laki-laki, dengan kecenderungan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi dominasi laki-laki. Pada jenjang SD, SLTP dan SLTA persentase penulis laki-laki berturut-turut sebesar 78,5 persen , 81, 9 persen dan 83,42 persen; sisanya penulis perempuan.

Khusus berdasar buku Berbasis Kurikulum 2004 tersebut di atas, diketahui bahwa untuk penulis bahan ajar SD (Lampiran 26), komposisi penulisnya sama (masing-masing 50 %) laki-laki dan perempuan, sementara penelaahnya 100 persen perempuan. Untuk penanggung-jawab terdapat mereka yang perempuan, khususnya pada Tangkas Berbahasa Kelas 5 dan Kelas 6. Dalam hal ilustrator, desain sampul dan perwajahannya 100 persen terdiri atas laki-laki. Dengan demikian, bias gender pada gambar dimungkinkan oleh karena ilustratornya dominan laki-laki yang sudah terinternalisasi dengan nilai-nilai gender dan lebih mengekspresikan atau melakukan visualisasi yang dipengaruhi stereotipi peran gender. Dengan demikian, sekalipu sudah terdapat sedikit pergeseran atau perubahan, setidaknya dalam hal persentase bahan ajar (teks) yang responsif gender. Hal ini diduga berhubungan dengan meningkatnya partisipasi penulis bahan ajar yang mengikuti Pelatihan Penulisan Bahan Ajar yang Responsif Gender, antara lain yang diberikan oleh Kelompok Kerja PUG Depdiknas.

## 6.6. Manajemen Pendidikan

### 6.6.1. Manajemen Dalam Pendidikan Formal

Sebagaimana diketahui, pelaku (aktor) yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai gender selain dalam keluarga adalah pelaku atau aktor dalam kelembagaan pendidikan, yang dalam hal ini sekolah. Pelaku-pelaku tersebut, khususnya guru, kepala sekolah dan pengawas yang berinteraksi secara kontinyu di sekolah dengan siswa sekolah. Itu sebabnya, aspek manajemen pendidikan menjadi bagian pnting untuk melihat sejauh mana terdapat komposisi yang proporsional antara pelaku laki-laki dan perempuan dalam manajemen pendidikan pada kelembagaan sekolah. Untuk itu, di bawah ini dikemukakan proporsi tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas menurut jenis kelamin. status sekolah pada periode 2001-2003.

**1) Tenaga Pendidik/Guru**

Profil Guru menurut jenjang pendidikan dan status sekolah di Jawa Barat pada periode tahun 2000 sampai dengan 2003 disajikan pada Tabel 6.42.

Tabel 6.42. Distribusi Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen)

| Jenjang | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| TK | 5.0 | 95.0 | 9534 | 15.0 | 85.0 | 13951 | 15.0 | 85.0 | 14230 |
| RA | 55.0 | 45.0 | 17269 | 55.0 | 45.0 | 17614 | 55.0 | 45.0 | 17966 |
| SD | 55.0 | 45.0 | 146958 | 55.0 | 45.0 | 149897 | 55.0 | 45.0 | 152896 |
| MI | 55.0 | 45.0 | 173594 | 55.0 | 45.0 | 177025 | 55.0 | 45.0 | 180565 |
| SMP | 55.0 | 45.0 | 60296 | 55.0 | 45.0 | 61552 | 55.0 | 45.0 | 62783 |
| MTs | 55.0 | 45.0 | 39502 | 55.0 | 45.0 | 40292 | 55.0 | 45.0 | 41097 |
| SMU | 55.0 | 45.0 | 28068 | 55.0 | 45.0 | 28629 | 55.0 | 45.0 | 29201 |
| MA | 55.0 | 45.0 | 39503 | 55.0 | 45.0 | 40293 | 55.0 | 45.0 | 41098 |
| SMK | 55.0 | 45.0 | 18805 | 55.0 | 45.0 | 19181 | 55.0 | 45.0 | 19564 |
| SLB | 40.7 | 59.3 | 1359 | 40.7 | 59.3 | 1359 | 40.5 | 59.5 | 1374 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Seperti terlihat pada tabel tersebut, kecuali pada TK dan Sekolah Luar Biasa (SLB), persentase guru perempuan pada semua jenjang pendidikan lainnya menunjukkan persentase yang lebih rendah di banding guru laki-laki. Pada tahun 2001, pada jenjang TK persentase perempuan sebagai guru 95 persen, smentara di SLB hampir 60 persen. Adapun pada jenjang pendidikan lainnya sebesar 45 persen. Sementara pada dua tahun berikutnya, persentase Guru TK perempuan menurun

menjadi 85 persen, atau menurun sekitar 10 persen. Khusus untuk SLB cenderung tetap.

Selanjutnya, untuk melihat kesenjangannya dapat dilihat dari Indeks Paritas dan Disparitasnya, seperti dapat dilihat pada Tabel 6.43.

Tabel 6.43. Distribusi Guru DI Jawa Barat Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2003

| Jenjang | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | IP | D | IP | D | IP | D |
| TK | 19.0 | 90 | 5.7 | 70 | 5.7 | 70 |
| RA | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SD | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| MI | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SMP | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| MTs | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SMU | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| MA | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SMK | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SLB | 1.5 | 19 | 1.5 | 19 | 1.5 | 19 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Terlihat bahwa indeks paritas pada TK sangat tinggi yakni 19, sementara pada jenjang pendidikan selainnya, baik di bawah Depdiknas maupun Departemen Agama menunjukkan di bawah 1. Dalam hal Disparitasnya pada TK menunjukkan tertinggi yaitu 90, dengan dominasi perempuan; sebaliknya pada jenjang pendidikan lainnya, kecuali SLB, menunjukkan kesenjangan 10 persen dengan dominasi laki-laki.

**2). Kepala Sekolah**

Seperti terlihat pada Tabel 6.44. di bawah ini, kecuali pada TK dan RA, pada semua jenjang pendidikan formal selainnya, proporsi perempuan yang menduduki posisi kepala sekolah lebih rendah dibanding laki-laki. Pada jenjang pendidikan TK dan RA masing-masing 85 %, sementara pada jenjang pendidikan formal lainnya proporsi perempuan hanya 45 %; sementara pada SLB lebih rendah lagi, yakni sekitar 34 %. Hal ini tampaknya berhubungan dengan persepsi bahwa perempuan jauh lebih tinggi kapasitasnya dalam melaksanakan fungsi pendidikan bagi pendidikan dini usia, karena kelembagaan TK/RA dipandang sebagai kepanjangan fungsi pendidikan dalam keluarga.

Tabel 6. 44. Distribusi Kepala Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen)

| Jenjang | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| TK | 15.0 | 85.0 | 3318 | 15.0 | 85.0 | 3318 | 15.0 | 85.0 | 3318 |
| RA | 15.0 | 85.0 | 1498 | 15.0 | 85.0 | 1498 | 15.0 | 85.0 | 1498 |
| SD | 55.0 | 45.0 | 20552 | 55.0 | 45.0 | 20552 | 55.0 | 45.0 | 20552 |
| MI | 55.0 | 45.0 | 3252 | 55.0 | 45.0 | 3252 | 55.0 | 45.0 | 3252 |
| SMP | 56.0 | 44.0 | 2231 | 56.0 | 44.0 | 2231 | 56.0 | 44.0 | 2231 |
| MTs | 56.0 | 44.0 | 1587 | 56.0 | 44.0 | 1587 | 56.0 | 44.0 | 1587 |
| SMU | 55.0 | 45.0 | 972 | 55.0 | 45.0 | 972 | 55.0 | 45.0 | 972 |
| MA | 55.0 | 45.0 | 529 | 55.0 | 45.0 | 529 | 55.0 | 45.0 | 529 |
| SMK | 55.1 | 44.9 | 651 | 55.1 | 44.9 | 651 | 55.1 | 44.9 | 651 |
| SLB | 68.6 | 31.4 | 169 | 62.8 | 37.2 | 218 | 62.8 | 37.2 | 218 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Karenanya, kesenjangan gender pada posisi kepala sekolah relatif dominan, seperti terlihat pada Tabel 6.45.

Tabel 6.45. Distribusi Kepala Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah

| Jenjang | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | IP | D | IP | D | IP | D |
| TK | 5.7 | 70 | 5.7 | 70 | 5.7 | 70 |
| RA | 5.7 | 70 | 5.7 | 70 | 5.7 | 70 |
| SD | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| MI | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SMP | 0.8 | -12 | 0.8 | -12 | 0.8 | -12 |
| MTs | 0.8 | -12 | 0.8 | -12 | 0.8 | -12 |
| SMU | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| MA | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SMK | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 | 0.8 | -10 |
| SLB | 0.5 | -37 | 0.6 | -26 | 0.6 | -26 |

### 3). Pengawas

Seperti dapat dilihat pada Tabel 6.46, dalam periode 2000-2003 juga ditemukan adanya kesenjangan gender pada status pengawas, meskipun jumlah pengawas tersebut menunjukkan penurunan pada periode tersebut. Pada tabel tersebut ditemukan dimana laki-laki dominan menjadi pengawas untuk semua jenjang pendidikan, dengan persentase berturut-turut sebesar 75 %, 91 % dan 87,5 % untuk jenjang pendidikan TK/SD, pendidikan menengah dan SLB. Kondisi tersebut dapat dikatakan hampir selalu terjadi pada setiap tahun dalam periode tahun 2001 sampai dengan 2003.

Tabel 6. 46. Distribusi Pengawas Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 (dalam persen)

| Jenjang | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| TK/SD | 75.0 | 25.0 | 2568 | 75.0 | 25.0 | 2154 | 75.0 | 25.0 | 2109 |
| DIKMEN | 92.3 | 7.7 | 78 | 91.3 | 8.7 | 69 | 91.3 | 8.7 | 69 |
| SLB | 87.5 | 12.5 | 8 | 87.5 | 12.5 | 8 | 87.5 | 12.5 | 8 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa kesenjangan gender pada kedudukan pengawas juga sangat tinggi. Sekalipun guru dan kepala sekolah TK didominasi oleh perempuan, namun IPnya sangat rendah (0,3) dan Disparitasnya sebesar -50 untuk tiga tahun berturut-turut seperti dapat dilihat pada Tabel 6.47.

Tabel 6.47. Distribusi Pengawas Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah

| Jenjang Pendidikan | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP | D | IP | D | IP | D |
| TK/SD | 0.3 | -50 | 0.3 | -50 | 0.3 | -50 |
| DIKMEN | 0.1 | -85 | 0.1 | -83 | 0.1 | -83 |
| SLB | 0.1 | -75 | 0.1 | -75 | 0.1 | -75 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

### 4) Partisipasi dalam Pelatihan

Untuk mengetahui sejauhmana manajemen pendidikan akses terhadap pengembangan kapasitasnya, pada Tabel 6.48. disajikan data tentang partisipasi mereka dalam pelatihan. Terlihat bahwa akses guru perempuan dalam mengikuti pelatihan menunjukkan lebih rendah dibanding laki-laki, kecuali untuk jenjang pendidikan TK dan SLB. Kecenderungannya adalah bahwa partisipasi perempuan berstatus guru mengikuti pelatihan lebih tinggi dibanding mereka yang berstatus kepala sekolah dan pengawas. Ini tampaknya menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam manajemen juga berpengaruh pada lebih tingginya akses laki-laki terhadap pelatihan.

Jika dilihat persentasenya, persentase terendah perempuan yang berpartisipasi dalam pelatihan dijumpai di jenjang SLTA, yakni hanya 11 persen, dengan disparitas sebesar -77.1 . Sebaliknya, pada TK disparitasnya 99, 3 persen. Hal tersebut menunjukkan relatif tingginya kesenjangan gender yang ditunjukkan IP yang lebih rendah dari satu dan Disparitas yang negatif, kecuali pada Guru TK.

Tabel 6.46. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003

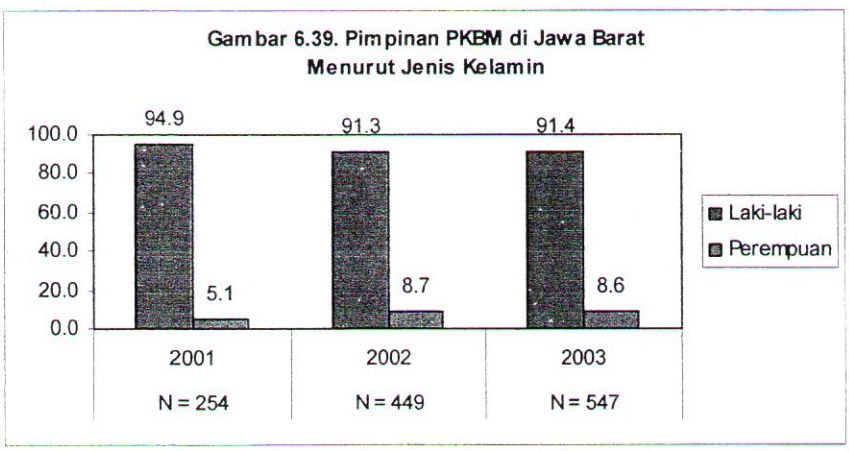
| Nama Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | IP | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Guru TK | 0.4 | 99.6 | 271 | 270 | 99.3 |
| Guru SD | 64.0 | 36.0 | 583 | 0.56 | -28.0 |
| Guru SMP | 59.7 | 40.3 | 663 | 0.67 | -19.5 |
| Guru SMA | 59.7 | 40.3 | 466 | 0.68 | -19.3 |
| Kepala SD | 65.7 | 34.3 | 210 | 0.52 | -31.4 |
| Kepala SMP | 76.4 | 23.6 | 140 | 0.31 | -52.9 |
| Kepala SMA | 88.6 | 11.4 | 70 | 0.13 | -77.1 |
| Pengawas TK/SD | 70.0 | 30.0 | 140 | 0.43 | -40.0 |
| Pengawas MP | 84.3 | 15.7 | 70 | 0.19 | -68.6 |

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003

## 6.6. 2.Manajemen Dalam Pendidikan Non Formal

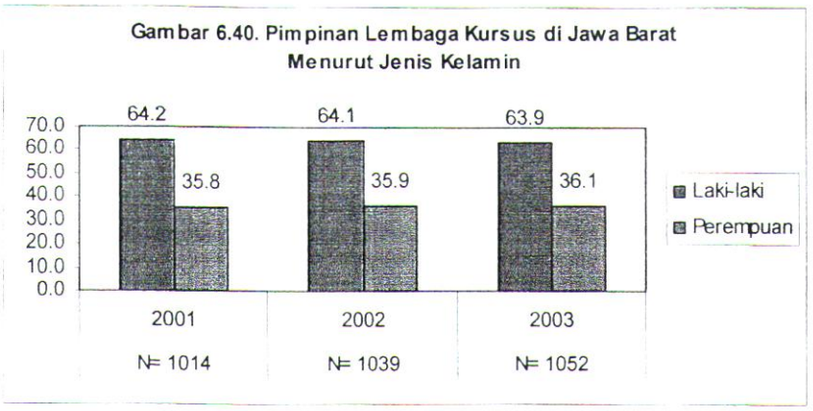
### 6.6.2.1. Pimpinan Kelembagaan

Partisipasi dan Kontrol perempuan atas kelembagaan pendidikan PLS jauh lebih rendah dibanding laki-laki, tercermin dari lebih rendahnya persentase perempuan yang berstatus sebagai Ketua PKBM dan Ketua Lembaga Penyelenggara Kursus, seperti terlihat pada Gambar 6.39 dan Gambar 6.40.




Pada Gambar 6.39 diketahui bahwa sekalipun kecenderungannya menunjukkan peningkatan, namun hanya kurang dari 10 persen perempuan yang menjadi pimpinan PKBM. Hal ini tampaknya berhubungan dengan kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai PKBM kepada para perempuan yang potensial menjadi Ketua PKBM di desanya masing-masing. Diduga hal ini

berhubungan dengan masih relatif kuatnya bias gender dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.




Di pihak lain, seperti terlihat pada Gambar 6.40. dalam hal pimpinan lembaga kursus yang lebih bersifat kelembagaan yang didirikan atas inisiatif dari bawah sepenuhnya, terlihat bahwa partisipasi perempuan sebagai pimpinan cenderung lebih tinggi, yakni sekitar 36 % untuk setiap tahunnya pada periode 2001-2003.

### 6.6.2.2. Tutor Pendidikan Non-formal

Demikian pula halnya dengan tutor pendidikan non formal. Sebagaimana terlihat pada Tabel 6.47 kecenderungan yang ada adalah bahwa representasi/akses laki-laki sebagai tutor pada program pendidikan Paket A, B dan C, Penilik PLS dan Tenaga Lapangan DIKMAS lebih tinggi dibanding perempuan. Sebaliknya, pada program pendidikan Keaksaraan Fungsional dan PADU representasi laki-laki sebagai tutor jauh lebih rendah dibanding perempuan.. Demikian pula halnya dalam klub olah raga, tidak seorangpun perempuan yang memimpin klub olah raga. Dari 24 klub olah raga pada tahun 2003 semuanya diketuai laki-laki.

Tabel 6.47. . Indeks Paritas dan Disparitas Tutor Pendidikan Non-Formal di Jawa Barat Menurut Jenjang Pendidikan dan dan Jenis Pendidikan Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003

| Jenjang Pendidikan | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP | D | IP | D | IP | D |
| KF | 1.3 | 14.4 | 1.4 | 15.8 | 1.2 | 8.6 |
| PADU | - | - | 0.0 | -14.9 | 5.7 | 70.0 |
| Paket A | 0.9 | -2.7 | 0.5 | -32.5 | 0.8 | -12.8 |
| Paket B | 0.9 | -6.9 | 0.7 | -18.8 | 0.5 | -34.1 |
| Paket C | 0.4 | -44.9 | 0.6 | -22.0 | 0.7 | -15.9 |

### 6.6.2.3. Representasi sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan

Pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, hanya terdapat 15,2 persen perempuan yang menduduki jabatan struktural.

## 6.7. Pembahasan

Berdasar hasil temuan yang dikemukakan dalam Data Pembuka Wawasan *(Eye Opener Data)*, diketahui bahwa meskipun kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Barat bersifat netral gender dan tidak diskriminatif, namun dalam pelaksanaan program/proyek/ kegiatan-kegiatan pendidikan baik pendidikan formal dan non-formal (PLS) menunjukkan bahwa secara umum akses laki-laki terhadap kesempatan program pendidikan, baik sebagai peserta (warga belajar), pengelola atau manajemen pendidikan maupun sebagai penulis bahan ajar lebih tinggi dibanding perempuan.

Dengan perkataan lain, sekalipun program pembangunan pendidikan di Jawa Barat, khususnya berdasar pada kebijakan pembangunan pendidikan pada periode 2000-2003 telah memberikan kemajuan kepada sumber daya manusia Jawa Barat, namun hasil analisis Data Pembuka Wawasan menunjukkan bahwa kebijakan/program pembangunan pendidikan yang netral gender dan tidak diskriminatif yang belum disertai dengan keadilan gender dalam semua sub-sistemnya belum mampu mewujudkan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam dokumen tersebut di atas juga belum dikemukakan secara tuntas apa yang menjadi faktor-faktor penyebab serta isu gender yang mempengaruhi kinerja program pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Sehubungan dengan itu, selanjutnya akan dianalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan gender, yang berkenaan dengan lebih rendahnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dalam pembangunan pendidikan di Jawa Barat, yang akan disajikan pada bab selanjutnya.

Diakui bahwa dewasa ini perspektif gender sudah menjadi bagian dalam kebijakan pembangunan di Jawa Barat, terlebih dalam program Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagaimana tertulis di dalam Analisis Situasi Kondisi serta RAD PUS Propinsi Jawa Barat (2004 -2009). Namun tampaknya kebijakan dan program yang telah dicanangkan tersebut belum mendasarkan secara spesifik sampai pada tingkatan program, proyek dan kegiatan. Di samping itu studi ini belum merumuskan program yang lebih terfokus dan dengan memperhatikan kinerja kabupaten/kota, perkotaan dan perdesaan.

# BAB VII. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN ISU GENDER DALAM PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

## 7. 1. Faktor-faktor Penyebab Kesenjangan Gender

### 7.1.1. Akses dan Partisipasi

Sebagaimana diketahui studi ini menemukan bahwa kesetaraan gender telah dicapai oleh Propinsi Jawa Barat dalam hal APS pada kelompok umur 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun. Namun pada tingkat kabupaten/kota masih ditemukan kesenjangan gender : (a) pada kelompok umur 7 – 12 tahun, khususnya pada 4 kabupaten dan 1 kota di daerah perkotaan dan 7 kabupaten di daerah di daerah pedesaan dan 1 kota di Jawa Barat, dan (b) kelompok umur 13 -15 tahun pada 3 kabupaten di perkotaan dan masing-masing satu kabupaten dan kota di pedesaan. Selanjutnya, kesenjangan gender pada tingkat propinsi, kesenjangan gender dalam pendidikan dimana anak perempuan menunjukkan akses yang lebih rendah dibanding laki-laki, yakni yang tercermin dari Indeks Paritas yang kurang dari 1 dan negatifnya Disparitas dalam hal terutama : (a) APS pada kelompok umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun, dan (b) APK serta APM pada jenjang pendidikan SLTA dan PT. Kesenjangan gender inipun ditemukan di banyak kabupaten dan beberapa kota yang ada di Jawa Barat, meskipun sudah ada kabupaten/kota yang telah melampaui capaian dari tingkat propinsi.

Sehubungan dengan hal di atas, kesenjangan gender dalam akses terhadap pendidikan formal tersebut tampaknya berhubungan dengan berbagai faktor seperti dijelaskan di bawah ini, sebagai berikut :

1) Masih relatif kuatnya pengaruh konstruksi sosial budaya yang bias gender di kalangan masyarakat Jawa Barat yang mayoritas penduduknya tergolong etnik Sunda. Sebenarnya sistim kekerabatan masyarakat Sunda itu tergolong bilenial, yakni sistim kekerabatan yang menempatkan anak laki-laki dan anak perempuan untuk akses dan kontrol terhadap aset sumberdaya keluarga baik dari pihak ibu maupun ayah (Koentjaraningrat, 1958; Soepomo, 1982). Namun nilai-nilai egaliter yang ada dalam sistim kekerabatan tersebut tampaknya terselimuti oleh masih kuatnya sosialisasi budaya gender yang dilakukan keluarga yang cenderung dominan memperkuat stereotipi peranan gender. Itu sebabnya rendahnya APS, APK

dan APM perempuan pada perguruan tinggi diduga juga dipengaruhi oleh nilai budaya masyarakat Sunda (sekalipun sudah mulai bergeser) yang menganggap peran laki-laki lebih penting dalam berbagai dimensi kehidupan produktif. Laki-laki dominan ditempatkan sebagai kepala keluarga, pemimpin masyarakat serta pemimpin dalam lembaga-lembaga birokrasi, sehingga orang tua lebih mendorong anak laki-lakinya untuk masuk PT.

2) Kelembagaan pendidikan (sekolah) beserta manajemennya yang didominasi laki-laki bersamaan dengan muatan bahan ajar yang dominan ditulis penulis laki-laki yang masih menganut budaya patriarkhi/paternalistik tampaknya memfasilitasi rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan. Hal-hal ini bersamaan dengan kurangnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang beragam program PLS menjadikan perempuan tidak akses terhadap informasi yang dapat memfasilitasi mereka menjadi pengelola dan ketua PKBM dan atau lembaga kursus
3) Di samping itu, terdapat faktor-faktor lain seperti : (a) budaya umur perkawinan pertama pada usia muda dalam masyarakat Sunda juga turut mempengaruhi kesenjangan gender dalam pendidikan, (b) rendahnya kemampuan ekonomi orangtua, (c) masih kuatnya nilai ekonomi anak di mata orangtua serta nilai yang menganggap anak menjadi sandaran hidup masa tua bukan memandirikan anak.

Ketidaktersediaan fasilitas sekolah menengah di setiap desa dan jarak yang relatif jauh dari rumah ke sekolah menengah tampaknya juga menjadi kendala rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan formal. Badan Pusat Statistik (2003) mengemukakan data mengenai hal-hal yang berkenaan dengan jarak ke sekolah fasilitas dan prasarana pendidikan, beasiswa dan lainnya yang dikemukakan di bawah ini . Tabel 7.1. di bawah ini mengemukakan hal yang berkenaan dengan jarak ke sekolah.

Seperti terlihat pada Tabel 7.1., terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin jauh jarak dari tempat tinggal siswa/mahasiswa, baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun jarak yang ditempuh siswa di perdesaan lebih jauh dibanding mereka yang ada di perkotaan, kecuali untuk SD. Pada Tabel 7.2. di bawah ini dikemukakan data mengenai persentase penduduk yang bersekolah menurut jenjang pendidikan dan jarak terdekat yang biasa ditempuh dari tempat tinggal ke sekolah.

Tabel 7.1 . Rata-rata Jarak Terdekat Yang Biasa Ditempuh dari Tempat Tinggal Ke sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Jawa Barat Tahun 2003

| Jenjang Pendidikan | Jawa Barat | | Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan |
| SD | 1.37 | 0.97 | 1.29 | 1.06 |
| SLTP | 2.90 | 3.15 | 2.66 | 3.41 |
| SMU | 4.89 | 9.08 | 4.33 | 7.08 |
| PT | 12.20 | 16.90 | 8.41 | 18.38 |

Sumber : BPS : Statistik Pendidikan 2003. Statistik Pendidikan 2003

Pada Tabel 7.2 dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi jarak yang ditempuh siswa untuk sampai ke sekolah. Persentase tertinggi dari siswa SD menempuh jarak kurang dari 1 km, baik untuk di perdesaan maupun di perkotaan, masing-masing sekitar 81 persen.

Tabel 7.2. Persentase Penduduk yang Bersekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jarak Jarak Terdekat yang Biasa Ditempuh dari Tempat tinggal ke Sekolah

| Jarak Terdekat (Cm) | Jenjang Pendidikan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SD | SLTP | SMU/K | PT |
| | Perkotaan | | | |
| <= 1 | 81.29 | 45.10 | 31.32 | 27.91 |
| 1,1 - 3 | 12.19 | 33.38 | 30.69 | 18.38 |
| 3,1 - 5 | 3.77 | 12.44 | 16.18 | 14.84 |
| > 5 | 2.75 | 9.07 | 21.81 | 38.87 |
| | Perdesaan | | | |
| <= 1 | 81.40 | 34.75 | 19.40 | 11.90 |
| 1,1 - 3 | 14.29 | 32.27 | 20.15 | 12.01 |
| 3,1 - 5 | 2.77 | 16.44 | 15.55 | 5.57 |
| > 5 | 1.55 | 16.54 | 44.90 | 70.42 |

Sumber : BPS : Statistik Pendidikan 2003. Statistik Pendidikan 2003

Namun demikian, begitu jenjang pendidikan meningkat terlihat bahwa persentase siswa/mahasiswa di pedesaan yang menempuh jarak lebih dari 5 Km menunjukkan persentase lebih tinggi, berturut-turut sebesar 16.5 persen untuk SMP, 44.9 persen untuk SMU dan untuk PT sekitar 70 persen. Adapun bagi mereka yang di perkotaan persentasenya hampir separuhnya. Dengan demikian, jika akses siswa baik laki-laki maupun perempuan di perdesaan lebih rendah dibanding mereka yang di perkotaan dapat dimaklumi. Terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin.

Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa sekalipun jarak yang ditempuh tampaknya relatif dekat, namun karena fasilitas prasarana jalan dan transportasi kurang sebaik di perkotaan maka waktu yang dibutuhkan siswa ke sekolah juga relatif lebih lama, seperti terlihat pada data di bawah ini (Tabel 7.3).

Tabel. 7.3. Rata-rata Lama Perjalanan yang Biasa Ditempuh Penduduk yang Bersekolah dari Tempat Tinggal ke sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Propinsi Jawa Barat (Menit)

| Jenjang Pendidikan | Perkotaan | Pedesaan | Total |
|---|---|---|---|
| SD | 13.73 | 14.64 | 14.18 |
| SLTP | 19.95 | 20.64 | 20.23 |
| SMU | 24.31 | 30.73 | 26.09 |
| PT | 42.43 | 46.04 | 42.90 |

Sumber : BPS : Statistik Pendidikan 2003. Statistik Pendidikan 2003

Sebagaimana terlihat dari tabel di atas, semakin tinggi jenjang penidikan semakin tinggi rata-rata lama perjalanan yang ditempuh siswa/mahasiswa. Namun jika membanding antar lokasi, terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan siswa/mahasiswa di pedesaan relatif lebih lama dibanding mereka yang tinggal di perkotaan.

Tabel 7.4. menyajikan data tentang sarana yang digunakan siswa di Jawa Barat untuk pergi ke sekolah.

Tabel 7.4. Persentase Penduduk yang Masih Bersekolah menurut Sarana Pergi ke Sekolah (2000)

| Sarana | Perkotaan | Pedesaan | Total |
|---|---|---|---|
| Bermotor | 3.66 | 2.37 | 3.09 |
| Tdk Bermotor | 2.34 | 2.32 | 2.33 |
| Umum Bermotor | 34.74 | 18.07 | 27.44 |
| Umum Tdk Bermotor | 3.60 | 1.09 | 2.50 |
| Orang Lain Gratis | 0.21 | 0.64 | 0.40 |
| Jalan Kaki | 55.46 | 75.51 | 64.24 |

Sumber : BPS : Statistik Pendidikan 2003. Statistik Pendidikan 2003

Seperti terlihat pada Tabel 7.4., sekalipun persentase terbesar dari siswa/mahasiswa di perkotaan dan di perdesaan berjalan kaki untuk pergi ke sekolah, namun persentase tertinggi ada di perdesaan, berturut-turut 55,46 % di perkotaan dan 75.5 persen di perdesaan. Persentase tertinggi berikutnya adalah kendaraan bermotor,

namun persentase di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan, berturut-turut sebesar 34.74 persen dan 18.07 persen.

Penjelasan di atas sepintas bukan merupakan masalah yang berhubungan dengan relasi gender dalam pendidikan. Namun dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan orang tua di desa –desa yang relatif terisolir kurang mendorong anak perempuan mereka untuk bersekolah pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi adalah karena jaraknya yang jauh dan kurangnya fasilitas transportasi murah. Sekalipun ada motor ojeg misalnya, namun orangtua kurang melepas anak perempuannya karena kekhawatiran secara psikologis yang menyangkut keselematan anaknya. Di lain pihak, rendahnya kemampuan ekonomi juga menjadi penyebabnya.

5) Ketertarikan anak perempuan untuk lebih awal memasuki pasar tenaga kerja. Seperti diketahui pada sebagian besar anak-anak perempuan yang telah memasuki usia kerja, dorongan untuk cepat bekerja agar dapat mengelola uang sendiri atau karena tuntutan orang tua menyebabkan motivasi belajar mereka untuk melanjutkan studi kurang. Itu sebabnya kita menjumpai bahwa anak-anak usia sekolah termasuk yang wajib belajar sudah bekerja di pabrik-pabrik atau bekerja di sektor informal, sekalipun jam kerja mereka relatif rendah.

6) Di lain pihak, aspek-aspek yang mendukung akses terhadap pendidikan, terutama pada keluarga miskin belum cukup memadai. Pada kasus dimana orangtua menghendaki anak-anak mereka untuk sekolah menengah dan tinggi, mereka terbentur dengan ketersediaan dukungan beasiswa yang bisa memfasilitasinya. Pada Tabel 7.5 di bawah ini dapat dilihat proporsi beasiswa yang diterima siswa sekolah di Jawa Barat. Tabel tersebut menunjukkan pada kita bahwa persentase siswa sekolah yang menerima beasiswa relatif rendah, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan. Kecuali untuk jenjang PT, persentase siswa penerima beasiswa di perkotaan sedikit lebih tinggi dibanding di perdesaan. Membanding dengan kondisi Indonesia, persentase siswa penerima beasiswa lebih rendah, untuk semua jenjang pendidikan dan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 7.5. . Proporsi Siswa Sekolah Penerima Beasiswa di Jawa Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2003

| Jenjang | Jawa Barat | | Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan |
| SD | 5.15 | 4.58 | 5.06 | 7.99 |
| SLTP | 6.28 | 6.11 | 7.71 | 12.32 |
| SMU | 3.69 | 2.98 | 5.17 | 7.41 |
| PT | 3.48 | 8.00 | 4.72 | 6.77 |

Sumber : BPS : Statistik Pendidikan 2003. Statistik Pendidikan 2003.

Dalam hal sumber beasiswa, ternyata sebagian besar diantara siswa menerima beasiswa yang bersumber dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) diikuti oleh GNOTA lan Sekolah, seperti terlihat pada Tabel 7.6.

Tabel .7. 6. Persentase Penduduk yang Bersekolah dan Menerima Beasiswa menurut Penggunaan Beasiswa Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan

| Penggunaan Beasiswa | SD | SLTP | SMU/K | PT |
|---|---|---|---|---|
| | Perkotaan | | | |
| Biaya Sekolah | 96.40 | 97.08 | 98.00 | 97.14 |
| Untuk Orang Tua Asuh | 12.83 | 7.08 | 6.17 | 8.28 |
| Untuk Jajan | 13.83 | 15.16 | 11.66 | 19.19 |
| Lainnya | 12.99 | 15.83 | 15.27 | 17.35 |
| | Perdesaan | | | |
| Biaya Sekolah | 97.72 | 98.45 | 99.54 | 100.00 |
| Untuk Orang Tua Asuh | 13.62 | 12.34 | 11.52 | 6.94 |
| Untuk Jajan | 19.23 | 20.65 | 21.11 | 4.54 |
| Lainnya | 21.59 | 22.86 | 27.60 | 16.33 |

Sumber : BPS : Statistik Pendidikan 2003. Statistik Pendidikan 2003.

Namun demikian, sumber beasiswa bagi siswa sekolah di perkotaan relatif lebih beragam dibanding perdesaan, kecuali untuk sekolah menengah. Peranan perorangan sebagai sumber beasiswa di pedeaan lebih rendah di banding di perkotaan. Adapun bentuk beasiswa yang diterima siswa sebagian besar dalam bentuk tunai, hanya saja persentase siswa di perdesaan yang menerima tunai (uang) lebih tinggi di perdesaan (Tabel 7.7.)

Tabel 7.7. Proporsi Penduduk yang Bersekolah dan Menerima Beasiswa menurut Bentuk Beasiswa, Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan

| Bentuk Beasiswa | SD | SLTP | SMU/K | PT |
|---|---|---|---|---|
| | Perkotaan | | | |
| Uang | 63.40 | 68.70 | 73.45 | 74.73 |
| Peralatan Sekolah | 7.76 | 4.55 | 3.01 | 0.86 |
| Pembayaran Uang Sekolah | 39.97 | 39.89 | 38.07 | 36.51 |
| Keringanan dr Sekolah | 14.44 | 13.35 | 10.13 | 10.98 |
| | Perdesaan | | | |
| Uang | 77.93 | 79.92 | 82.53 | 52.85 |
| Peralatan Sekolah | 9.46 | 3.99 | 2.78 | - |
| Pembayaran Uang Sekolah | 24.77 | 33.05 | 27.89 | 55.34 |
| Keringanan dr Sekolah | 10.07 | 6.30 | 7.30 | 22.23 |

Sumber : BPS : Statistik Pendidikan 2003. Statistik Pendidikan 2003.

Lebih lanjut, diketahui bahwa tidak semua besiswa yang diterima digunakan untuk keperluan sekolah, sebagaimana terlihat pada Tabel 7.8. di bawah ini .

Tabel 7.8. Persentase Penduduk yang Bersekolah dan Menerima Beasiswa menurut Penggunaan Beasiswa, Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan

| Penggunaan Beasiswa | SD | SLTP | SMU/K | PT |
|---|---|---|---|---|
| | Perkotaan | | | |
| Biaya Sekolah | 96.40 | 97.08 | 98.00 | 97.14 |
| Untuk Orang Tua Asuh | 12.83 | 7.08 | 6.17 | 8.28 |
| Untuk Jajan | 13.83 | 15.16 | 11.66 | 19.19 |
| Lainnya | 12.99 | 15.83 | 15.27 | 17.35 |
| | Perdesaan | | | |
| Biaya Sekolah | 97.72 | 98.45 | 99.54 | 100.00 |
| Untuk Orang Tua Asuh | 13.62 | 12.34 | 11.52 | 6.94 |
| Untuk Jajan | 19.23 | 20.65 | 21.11 | 4.54 |
| Lainnya | 21.59 | 22.86 | 27.60 | 16.33 |

Sumber : BPS : Statistik Pendidikan 2003. Statistik Pendidikan 2003.

Dari Tabel 7.8. tersebut , diketahui bahwa alokasi beasiswa untuk biaya sekolah yang dialokasikan siswa di perdesaan jauh lebih besar persentasenya dibanding siswa di perdesaan. Lebih lanjut diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi alokasi beasiswa untuk keperluan sekolah, kecuali pada PT di perkotaan.

Beasiswa juga ada yang dialokasikan kepada orangtua asuh, dimana persentasenya menunjukkan sedikit lebih tinggi di perdesaan, kecuali pada jenajang pendidikan PT.

Yang memprihatinkan adalah bahwa beasiswa juga dialokasikan untuk jajan dan lainnya. Hal ini dimungkinkan manakala penerima beasiswa tidak memahami sepenuhnya maksud pemberian beasiswa

### 7.1.2. Faktor Kontrol

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan juga dipengaruhi rendahnya kontrol anak perempuan dalam menentukan aspirasi pendididikan mereka, oleh karena proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga dalam hal proses pengambilan keputusan sudah terinternalisasi pada mereka. Sebagaimana diketahui, sekalipun budaya Sunda tergolong bilenial, namun karena tokoh ayah yang berfungsi sebagai kepala keluarga masih begitu dominan dalam proses pengambilan keputusan keluarga, khususnya keputusan untuk meneruskan dan memilih bidang studi yang harus diambil anak-anaknya (termasuk anak perempuan) maka diduga anak perempuan cenderung lebih taat pada keputusan orangtua, terutama ayah.

Selain faktor keluarga, diduga faktor lain yang mempengaruhi kesenjangan gender adalah belum atau rendahnya Sensitivitas Gender di Lingkungan Kelembagan Pendidikan. Seperti diketahui, selama ini ditengarai masih relatif banyaknya para penentu kebijakan dan pengambil keputusan pembangunan bidang pendidikan yang kurang sensitif gender, dan atau memandang kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan tidak harus dilaksanakan melalui tindakan-tindakan afirmatif yang diyakini pemerhati gender dalam pembangunan sebagai upaya mengakselarasi perempuan untuk akses, kontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan bidang pendidikan. Masih banyak penentu kebijakan yang beranggapan adanya bias gender dan "trickle down effect" dari suami kepada isteri dan anak-anak mereka dalam hal akses terhadap program pembangunan, sehingga masih beranggapan bahwa kepala keluarga/rumahtangga (KK) mesti laki-laki dan jika KK sudah terdedah, maka dipastikan anggota keluarga lainnya juga terdedah. Di pihak lain, masih belum terinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat kita juga turut andil di dalamnya. Selain hal di

atas, masih relatif tingginya manajemen pendidikan yang didominasi laki-laki disertai rendahnya sensitivitas gender mereka turut berkontribusi pada masih kesenjangan gender dalam pendidikan formal dan non-formal di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

### 7.1.3. Faktor Manfaat

Sebagaimana diketahui, dominannya laki-laki sebagai penentu kebijakan dalam struktur kelembagaan kependidikan di berbagai kelembagaan tingkatan pemerintahan maupun non-pemerintah (sekolah dan masyarakat), menyebabkan rendahnya peluang perempuan untuk memperoleh manfaat menduduki posisi strategis yang memfasilitasi mereka untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kesetaraan gender dalam pendidikan. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi terhadap lebih rendahnya manfaat berupa peningkatan penghasilan/pendapatan yang dapat diperoleh perempuan dibanding laki-laki. Umum diketahui, bahwa perempuan dominan dilibatkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan peranan domestik, khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan.

Pada tingkat masyarakat, dominasi laki-laki sebagai penentu kebijakan dan program/kegiatan pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan program pendidikan, juga telah menyebabkan rendahnya akses perempuan untuk memperoleh manfaat dari partisipasinya sebagai tutor dalam kegiatan pendidikan non-formal. Di lain pihak perempuan sendiri, oleh karena sudah terinternalisasi dengan budaya yang menempatkannya dalam peranan domestik, menganggap bahwa perpanjangan peran domestik yang dibawa ke lingkungan kelembagaan pendidikan merupakan hal yang wajar. Di pihak lain, relasi gender dalam keluarganya (dalam hubungannya dengan suaminya) juga menjadi penyebab rendahnya motivasi perempuan untuk tampil dalam jabatan struktural dan lainnya..

## 7.2. Isu-isue Gender

1) Sebagaimana telah dikemukakan di atas, studi ini menemukan bahwa kesetaraan gender telah dicapai pada jenajng pendidikan SD, khusus pada tingkat propinsi oleh Propinsi Jawa Barat dan bberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun

demikian, kesenjangan gender yang dominan masih ditemukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni pendidikan menengah dan tinggi. Pada kasus kita menemukan adanya Indeks Paritas 1 dan disparitas mendekati 0, maka hal itu bukan berarti ada kesetaraan gender yang utuh, mengingat kalau kita perhatikan angka partisipasi mereka, baik itu lakilaki maupun perempuan masih rendah, terutama karena adanya ketidaksetaraan kemajuan yang dicapai pada tingkat kabupaten/kota, perdesaan dan perkotaan. Kesenjangan gender dalam pendidikan menegah dan tinggi juga terjadi karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan per kapita pada rumahtangga yang juga berhubungan dengan wilayah, perdesaan dan perkotaan.

2) Isu gender masih ditemui pada buku ajar. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, materi yang bias gender, yakni yang lebih menanamkan stereotipi gender kepada subyek didik masih dominan ditemukan dalam buku ajar, terutama mata-mata pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, baik pada tingkat SD maupun SLTP. Di samping itu, penulis bahan ajarnya sendiri didominasi oleh laki-laki, yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai budaya gender.

3) Di samping itu penelitian ini menemukan bahwa tingkat putus sekolah lebih banyak terjadi pada siswa laki-laki, kecuali pada sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama. Ini menunjukkan bahwa manakala perempuan diberi peluang untuk akses terhadap pendidikan kemampuan perempuan menunjukkan relatif lebih tinggi untuk bertahan dan menyelesaikan studi di sekolah. Hal ini didukung oleh lebih tingginya persentase peserta didik perempuan yang berhasil menyelesaikan studi, yakni khususnya di SMU. Pada jenajng lainnya ternyata masih didominasi laki-laki, Hal ini diduga berhubungan dengan masalah lain yakni adanya kecenderungan di mana persentase peserta didik perempuan yang mengulang lebih tinggi dibanding laki-laki, khususnya baik pada jenjang TK/RA, SD, SMP/MTs dan menengah (SMU dan SMK). Relatif masih dominannya perempuan di lingkungan SMK tampaknya juga disebabkan oleh masih kuatnya gejala segregasi gender (*gender segregation*) dalam pemilihan jurusan atau program studi.

4) Status dan posisi perempuan yang cenderung subordinat dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga berdampak pada kondisi serupa dalam lingkungan kelembagaan dan bidang pendidikan. Ini pada gilirannya mengakibatkan kesenjangan gender dalam manajemen pendidikan terlembagakan dalam beragam aspek dan sub-sistem dalam sistem pendidikan. Sebagaimana temuan di tingkat nasional, sikap para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih bias gender secara konsisten dan berkesinambungan mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang bertahan dalam waktu yang lama.

5) Di lingkungan kelembagaan pendidikan –di berbagai tingkatan lembaga – di rasakan masih belum atau bahwa rendah dalam hal sensitivitas gendernya. Selama ini ditengarai masih relatif banyaknya para penentu kebijakan dan pengambil keputusan pembangunan bidang pendidikan yang kurang sensitif gender, dan atau memandang kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan tidak harus dilaksanakan melalui tindakan-tindakan afirmatif yang diyakini pemerhati gender dalam pembangunan sebagai upaya mengakselarasi perempuan untuk akses, kontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan bidang pendidikan. Di samping itu, belum terinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat kita turut andil di dalamnya. Masih relatif tingginya manajemen pendidikan yang didominasi laki-laki disertai rendahnya sensitivitas gender mereka turut berkontribusi pada masih kesenjangan gender dalam pendidikan formal dan non-formal di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

6) Sensitivitas gender yang belum atau masih rendah itu berdampak pada belum tersedianya dan dimanfaatkannya data kinerja pendidikan yang terpilah menurut jenis kelamin. Kesadaran akan pentingnya menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring ,evaluasi dan pelaporan program pembangunan bidang pendidikan (formal dan non-formal ) belum berbasis pada data pembuka wawasan yang menggambarkan capaian hasil-hasil pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Di pihak lain, sistem manajemen informasi pendidikan terpadu yang responsif terhadap penyediaan data yang terpilah menurut jenis kelamin juga belum terinternalisasi di hampir setiap sub-sistem lembaga

pendidikan, termasuk dinas pendidikan baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Di pihak lain, data yang sudah ada di lembaga masing-masing serta terutama pada lembaga sekolah dan Badan Pusat Statistik Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya dimaknai bagi penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang responsif gender yang lebih operasional, khususnya pada di tingkat program, proyek dan kegiatan, kecuali ada kebijakan pusat atau daerah yang mengharuskannya.

# VIII. REFORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG RESPONSIF GENDER

Dengan mengacu kepada Rencana Aksi Nasional (RAN) Depdiknas dalam hal PUG Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat mengemukakan komitmennya untuk mengadaptasi RAN ke dalam Rencana Aksi Daerah sebagaimana dikemukakan oleh POKJA PUG Jawa Barat dalam presentasinya pada Temu Koordinasi PUG Bidang Pendidikan di Solo. Hal itu ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan kebijakan, program, target dan sasaran yang responsif gender sesuai dengan misi pembangunan pendidikan Dinas Pendidikan Propinsi jawa Barat yang tertulis dalam Profil Pendidikan Berwawasan Gender Propinsi Jawa Barat 2003. Di pihak lain, Forum PUS, Propinsi Jawa Barat juga sudah mengemukakan kebijakan, program serta target dan sasaran program pembangunan pendidikan yang responsif gender seperti tertuang dalam Analisis Situasi Kondisi serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) 2004 -2005.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Jawa Barat telah menetapkan Visi dan Misi Tahun 2003 – 2008 yang mengupayakan proses percepatan (akselarasi) dalam rangka Visi Jawa Barat 2010. Visi Jawa Barat tersebut menyatakan kehendak kuat untuk "Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian visi Jawa Barat 2010". Dalam rangka visi tersebut, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemerintah propinsi Jawa Barat telah menetapkan adanya 5 prioritas *( 5 focal concern*), dan menempatkan upaya "Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Jawa Barat". Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, strategi pertama yang akan ditempuh adalah Percepatan/Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jawa Barat.

Pengakuan atas pendidikan yang sangat sentral dalam pembangunan kualitas dan produktivitas manusia, serta dalam rangka mewujudkan amanah nasional yang termaktub dalam amandemen Undang Undang 1945 pada tahun 2002 pasal 31 ayat 21 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III pasal 4, serta kesepakatan internasional (Konvensi Dakar), Pemerintah Jawa Barat telah menetapkan komitmen untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur No. 39 Tahun 2001 serta dengan memperhatikan kewenangan desentralisasi Propinsi dalam bidang pendidikan sebagaimana termaktub dalam PP No. 25 tahun 2000, Dinas Pendidikan Jawa Barat mempertegas komitmen terhadap PUG Bidang Pendidikan dengan menyusun *position paper* Integrasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Dengan Fokus Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat. Dokumen tersebut telah disajikan dalam *Roundtable Discussion* Tahap II Proyek PPMPMKPUG Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 dan 12 Desember di Hotel Bumi Asih Jaya, Bandung.

Dengan demikian, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Bappeda Jawa Barat telah mereformulasi kebijakan yang berkenaan dengan pembangunan bidang pendidikan yang responsif gender. Untuk memperoleh gambaran kronologis reformulasi kebijakan, strategi dan program Pembangunan Pendidikan di Propinsi Jawa Barat sehingga responsif gender, di bawah ini dikemukakan rincian hal tersebut.

### 8.1. Program Gender dalam Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat

Dalam Profil Pendidikan Berwawasan Gender Propinsi Jawa Barat 2003, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat mengemukakan rincian kebijakan, strategi, dan sasaran kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat seperti dideskripsikan di bawah ini.

**Kebijakan.** Kebijakan pembangunan pendidikan Propinsi Jawa Barat yang berwawasan gender meliputi :

1) Mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu yang berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan
2) Menurunkan tingkat keniraksaraan penduduk dewasa terutama perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan

**Strategi.** Strategi yang ditempuh untuk itu adalah :

1. Penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar yang merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal
2. Penyediaan akses pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat akses pada pendidikan formal
3. Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan
4. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka PUG bidang pendidikan
5. Memfasilitasi dan mengadvokasi kelembagaan pendidikan di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota agar menyelenggarakan pendididkan berwawasan gender

**Sasaran.** Sasaran pendidikan berwawasan gender ini adalah :

1. Meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang diikuti dengan semakin seimbangnya rasio siswa laki-laki dan perempuan
2. Meningkatnya partisipasi penduduk miskin laki-laki dan perempuan
3. Meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk yang berusia di atas usia sekolah laki-laki dan perempuan

**Kegiatan Pokok . Adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :**

1) Meningkatkan Koordinasi, Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Pendidikan berwawa-san gender dan mengembangkan informasi, antara lain melalui :
2) Meningkatkan jejaring kerja PUG dalam bidang pendidikan antar penyelenggara pendidikan dan stakeholders di tingkat kabupaten/kota dan propinsi;
3) Mewujudkan adanya website dan jaringan internet bidang pendidikan di setiap dinas dan sub dinas pendidikan
4) Melakukan analisis data berdasarkan jenis kelamin terutama untuk mengetahui kinerja pendidikan dari perspektif pendidikan berwawasan gender di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota

5) Mengembangkan strategi kampanye pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai bidang teknologi, lingkungan dan informasi yang mungkin dapat diikuti kaum perempuan
6) Menyosialisasikan gender manstreaming kepada para pelaku dan pengambil kebijakan di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota
7) Membangun komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengoptimalkan pelaksanaan program responsif gender
8) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PUG di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota
9) Memanfaatkan peran Pusat Studi Wanita dan pusat studi lainnya dan LSM, khususnya dalam lingkup bidang pendidikan untuk melakukan studi gender dalam pendidikan
10) Mendorong dilaksanakannya studi PUG bidang pendidikan untuk penyempurnaan kebijakan yang responsif gender
11) Mengembangkan model pendidikan keluarga yang responsif gender yang melibatkan penyelenggara dan *stakeholders* pendidikan

**Program.** Adapun rincian Program PUG bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat menurut jenis dan jenjang pendidikan (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003) dideskripsikan di bawah ini.

**1) Program Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar**

a. Pemberian subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar sekolah-sekolah swasta mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
b. Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu, dengan memperhatikan kesetaraan gender, agar mereka akses pada pendidikan serendah-rendahnya sampai tingkat SLTP/setara.

c. Peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan serta tenaga kependidikan lainnya yang seimbang dalam jumlah menurut jenis kelaminnya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas, citra, wibawa, harkat dan martabat guru.

d. Penyempurnaan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreatifitas guru, serta sesuai dengan kapasitas peserta didik. Penekanan perlu diberikan pada pentingnya kesetaraan gender dalam penguasaan pengetahuan (seperti matematik, bahasa, dan ilmu pengetahuan alam), wawasan kebangsaan, kepribadian, moral, sikap, tatakrama, menghargai sesama dan alam.

e. Penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat peralatan, serta perpustakaan, laboratorium, ruang Kelompok Kerja Guru (KKG), dan ruang lainnya dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender.

f. Pemberdayaan personil yang memperhatikan kesetaraan gender antara lain melalui training yang dilaksanakan oleh lembaga profesional, Program Pemberdayaan ini perlu diikuti dengan monitoring dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan.

g. Pemberian beasiswa/subsidi pendidikan yang lebih seimbang berdasarkan jenis kelamin dengan memberikan prioritas yang lebih besar bagi peserta didik perempuan yang berprestasi memadai tetapi secara ekonomis kurang mampu.

h. Alokasi yang lebih seimbang menurut jenis kelamin dalam pengangkatan guru baru baik guru kelas maupun guru setiap studi dan jenjang pendidikan terutama pada pendidikan dasar.

**2) Program Pendidikan Menengah**

a. Pemberian beasiswa untuk memberi kesempatan yang lebih luas dan proposional kepada siswa yang memiliki prestasi belajar memadai namun memiliki kemampuan ekonomi lemah.

b. Pemberian subsidi kepada sekolah swasta dengan prioritas kepada daerah-daerah yang kurang mampu dalam bentuk imbal swadaya dan bentuk lainnya.

c. Peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan secara adil dan proposional kepada guru melalui pemberian akreditasi dan sertifikasi mengajar bidang-bidang

tertentu yang dievaluasi secara priodik, serta penyempurnaan sistem angka kredit untuk peningkatan karir guru.

d. Penyempurnaan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, menekankan peningkatan wawasan kebangsaan, kepribadian, moral, sikap, tata krama, menghargai sesama, menghargai alam, mampu meningkatkan kemampuan sumber daya lulusan pendidikan menengah, dengan materi ajar yang tidak bias gender.
e. Pengadaan, penggunaan dan perawatan sarana serta prasarana pendidikan termasuk buku dan alat peraga yang responsif gender, bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta secara bertahap.
f. Pengembangan pendekatan proses pembelajaran melalui pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas pendidikan yang berwawasan gender.
g. Peningkatan efesiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan dan menghilangkan kesenjangan gender.
h. Pemberian beasiswa kepada siswa secara proposional untuk memasuki jurusan-jurusan atau program studi yang bias gender dengan tetap memperhitungkan kualitas.
i. Perekrutan dan pelatihan pengembangan kurikulum dan penulis buku pelajaran secara proposional dan bertahap.
j. Pengkajian dan evaluasi materi buku ajar yang bias gender.
k. Pemberian pemahaman dan penyadaran kepada lembaga-lembaga pendidikan menengah dan masyarakat tentang perlunya Pengarusutamaan Gender (PUG).

**3) Program Pendidikan Tinggi**

a. Peningkatan kualitas tenaga pengajar Pendidikan Tinggi dan peningkatan jumlah tenaga pengajar perempuan secara proposional sehingga dicapai keseimbangan jumlah tenaga pengajar menurut jenis kelamin.
b. Penyempurnaan kurikulum muatan lokal agar sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, termasuk pengembangan dan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender yang dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan.

c. Peningkatn kualitas peneliti melalui pendidikan lanjut dan pelatihan secara proposional.
d. Perluasan dan pemberdayaan pusa-pusat studi perempuan dalam PUG.
e. Penyebaran konsep PUG melalui pelatihan dan pendidikan di berbagai instansi.
f. Peningkatan jumlah mahasiswa di pendidikan tinggi secara proposional intervensi dilaksanakan dalam rangka merealisasikan kesetaraan dan keadilan gender.
g. Pengurangan kesenjangan gender di lembaga pendidikan tinggi melalui penerangan umum kepada masyarakat.

**4) Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda**

a. Percepatan penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional khususnya bagi penduduk usia 10-44 tahun, mengupayakan penuntasan tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar) dengan memberi perhatian khusus pada penduduk perempuan.
b. Pengembangan model pembelajaran untuk program pendidikan berkelanjutan yang tidak bias gender dan berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan. Jenis dan jangkauan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar, dan diarahkan kepada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta sebagai bekal kemampuan bekerja dan berusaha.
c. Penyempurnaan kurikulum muatan lokal dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berwawasan gender.
d. Peningkatan secara kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
e. Peningkatan kemampuan dan keterampilan pemuda dalam pemanfaatan iptek dalam rangka merealisasikan kesetaraan dan keadilan gender.
f. Pengembangan pusat-pusat dan pengembangan pemuda yang berwawasan gender.

**5) Program Pendidikan Olah Raga**

a. Permasalahan olahraga dan pengadaan prasarana olahraga yang berwawasan gender.
b. Penyelenggaraan penataran pembina, pengelola, pelatih, dan penyaluran minat dan bakat olahraga yang tidak bias gender.

c. Adanya keseimbangan pengelola, guru dan penulis buku olahraga dan rekruitmen serta penerimaan mahasiswa calon olahragawan berwawasan gender.
d. Adanya kesinambungan penerimaan siswa di PPLP/PPLM dan instruktur olahraga yang berwawasan gender.

**6) Mutu dan Relevansi Pendidikan**. Adapun kegiatan pokok yang menyangkut Mutu dan Relevansi Pendidikan, terdapat 5 hal yang akan dilaksanakan, meliputi :

1. Menyelenggarakan pelatihan dan penerangan umum melalui pertemuan dan media massa untuk meningkatkan kesadaran gender bagi pengelola dan pelaksana pendidikan serta masyarakat umum yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan.
2. Menyempurnakan statistik pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang dapat menghasilkan indikator pendidikan menurut gender secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan sistem penerimaan kepala dan pengawas sekolah yang dilandasi kesetaraan gender .
4. Menerapkan sistem pengangkatan para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan gender.
5. Mensosialisasikan proses pendidikan dan pembelajaran yang berwawasan gender melalui pelatihan dan penerangan umum kepada para pejabat pendidikan.

## 8.2. Kebijakan, Strategi, Target dan Sasaran Gender Bidang Pendidikan Dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) 2000- 2004

**Kebijakan.** Kebijakan pembangunan bidang pendiddikan di Jawa Barat, khususnya yang tertulis dalam Analisis Situasi Kondisi serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) 2000- 2004 yang dirumuskan Forum Pendidikan Untuk Semua, Propinsi Jawa Barat (2004), menliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan.
2) Menurunkan tingkat keniraksaraan penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang pendidikan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah, pendidikan kesetaraan dan

pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk dewasa.

3) Meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan gender.

**Strategi**. Strategi utama yang akan dilaksanakan mencakup 5 hal yaitu :

1) Penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki - laki dan perempuan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah
2) Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan
3) Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan.
4) Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengarustamakan pendidikan berwawasan gender; dan
5) Pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender.

**Sasaran dan Target Prioritas**. Dalam hal sasaran dan target prioritas pendidikan berkeadilan gender di Jawa Barat, dinyatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai pendidikan berwawasan gender, khususnya dalam akses pendidikan adalah meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang diikuti dengan semakin seimbangnya rasio siswa laki-laki dan perempuan. Di samping itu partisipasi penduduk miskin laki-laki dan perempuan yang masih rendah perlu ditingkatkan sehingga menjadi setara dengan penduduk dari kelompok kaya, dan bahwa meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk yang berusia di atas usia sekolah dalam pendidikan dasar dan menengah juga menjadi sasaran yang harus dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa oleh karena hasil analisis situasi di Jawa Barat menemukan adanya keragaman dalam hal partisipasi penduduk perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, dalam arti tidak selamanya partisipasi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, maka kondisi yang bervariasi tersebut membawa pada keperluan bentuk-bentuk intervensi yang bervariasi pula sehingga berbagai program yang dilaksanakan benar-benar dapat menurunkan kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasar temuan tersebut selanjutnya dikemukakan target sasaran sebagai berikut :

1. Untuk jenjang Sekolah Dasar atau kelompok penduduk usia 7-12 tahun, dengan rasio siswa laki-laki dan perempuan yang sudah baik maka penentuan prioritas perlu mempertimbangkan keragaman antar kabupaten/kota, dan kelompok pendapatan. . Propinsi yang memiliki IP relatif lebih rendah untuk jenjang SD.
2. Pada jenjang SLTP-MTs atau kelompok usia 13-15 tahun diketahui bahwa partisipasinya masih cukup rendah. Oleh karena itu upaya peningkatan partisipasi harus diupayakan baik pada penduduk laki-laki dan perempuan.
3. Pada jenjang SLTA dan PT yang berpartisipasi di Propinsi Jawa Barat masih sangat rendah maka upaya peningkatan partisipasi penduduk harus dilakukan pada setiap kelompok masyarakat dan pada semua wilayah dengan penekanan pada penduduk dengan status ekonominya rendah.
4. Dalam hal pendidikan keaksaraan, dinyatakan sangat jelas bahwa tingkat keaksaraan penduduk perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki baik di pedesaan maupun perkotaan, di setiap kelompok usia penduduk dewasa, dan setiap kelompok pengeluaran keluarga. Namun demikian prioritas utama diberikan pada upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk perempuan yang miskin, yang tinggal di daerah pedesaan dan berusia lebih dan 25 tahun karena kelompok inilah yang memiliki tingkat keaksaraan paling rendah yang diikuti penduduk laki-laki kelompok usia yang sama, yang miskin dan tinggal di pedesaan.
5. Seluruh upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan tingkat keaksaraan penduduk tersebut di atas didukung dengan upaya peningkatan kemampuan kelembagaan pendidikan sehingga memiliki kemampuan dalam merencanakan pendidikan yang responsif gender di samping meningkatkan pemahaman semua pihak mengenai pentingnya pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan.

## 8.3. Rencana Aksi Daerah Forum Pendidikan Untuk Semua Propinsi Jawa Barat

Forum Pendidikan Untuk Semua - Propinsi Jawa Barat (2004) juga telah menetapkan 3 Program Gender dalam Pembangunan Bidang Pendidikan di Jawa Barat, yang tertuang

dalam Analisis Situasi Kondisi serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) 2000- 2004 . Adapun rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan masing-masing program tersebut, dijelaskan di bawah ini.

**1. Pengembangan kapasitas kelembagaan berwawasan gender**

1) Meningkatkan jejaring kerja pengarusutamaan gender antar sektor di tingkat kabupaten dan propinsi.
2) Penyelenggaraan forum komunikasi yang memberi kesempatan bagi pelaku pendidikan untuk berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaiknya dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat.
3) Menjalin kerjasama dengan LSM dan organisasi perempuan/peduli pendidikan untuk memberikan fasilitas kepada keluarga/orang tua yang kurang mampu untuk memberikan hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan.
4) Mengintensifkan penggunaan sistem informasi dan pendataan pendidikan berdasarkan jenis kelamin dan melakukan analisis terhadap data tersebut terutama untuk mengetahui kinerja dan perencanaan pendidikan yang berwawasan gender di tingkat propinsi, kabupaten/kota guna perumusan kebijakan dan program pendidikan yang berwawasan gender.
5) Pengembangan instrumen perencanaan pendidikan setara dan adil gender.
6) Pengembangan pesan-pesan standar tentang pendidikan setara dan adil gender.
7) Mengembangkan pusat-pusat studi wanita baru atau memperluas cakupan pusat-pusat studi yang telah ada di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan berwawasan gender.
8) Meningkatkan peran pusat-pusat studi yang telah ada untuk melakukan berbagai studi masalah gender di bidang pendidikan.
9) Mengembangkan program studi gender dalam pembangunan pada jenjang sarjana, magister dan dokter pada perguruan tinggi yang memiliki pusat studi wanita sebagai penyedia sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan gender dalam pembangunan yang kelak dapat menjadi peneliti, pengambil kebijakan, perencana dan pelaksana program pembangunan yang berwawasan gender.
10) Melakukan analisis kebijakan yang masih bias gender baik peraturan perundangan, kurikulum maupun bahan ajar.

11) Melakukan berbagai studi mengenai praktik-praktik yang menyebabkan terjadinya pendidikan yang tidak responsif gender dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diusulkan.

12) Menyempurnakan peraturan perundangan, kurikulum dan bahan ajar yang masih bias gender.

13) Monitoring terhadap pelaksanaan program pengarusutamaan gender di tingkat propinsi, dan kabupaten/kota.

14) Evaluasi terhadap praktik-praktik yang dilaksanakan dan memberikan umpan balik untuk perbaikannya.

**2. Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender**

1) Mengembangkan strategi pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai bidang teknologi, lingkungan dan informasi yang mungkin dapat diikuti kaum perempuan.

2) Melaksanakan program advokasi dan KIE tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga sedini mungkin.

3) Mensosialisasikan gender manstreaming kepada para pelaku dan pengambil kebijakan ditingkat propinsi dan kabupaten/kota.

4) Membangun komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang responsif gender.

5) Mewujudkan adanya website dan jaringan internet bidang pendidikan di setiap dinas dan sub dinas pendidikan dengan data yang akurat dan terkini.

6) Meningkatkan peran media untuk pendidikan sebagai alat bagi para pendidik, pemerintah, maupun LSM untuk memajukan perempuan dan pembangunan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar.

**3. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender**

1) Merumuskan model uji coba pendidikan keluarga berwawasan gender bagi keluarga miskin.

2) Melakukan pemetaan dan pemutahiran data keluarga miskin.

3) Melakukan uji coba pendidikan keluarga berwawasan gender bagi keluarga miskin di beberapa daerah perkotaan dan pedesaan terpilih.

4) Mengevaluasi dan menyempurnakan konsep uji coba pendidikan keluarga berwawasan gender.
5) Melaksanakan pendidikan keluarga berwawasan gender bagi keluarga miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan.

### 8.4. Position Paper Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2004) telah menindaklanjuti upaya mengintegrasikan PUG dalam bidang pendidikan dengan memfokuskan pada Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 8 tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat. Di bawah ini disampaikan secara ringkas, tujuan , hasil yang diharapkan, strategi

Tujuan. Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan dengan focus "Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender" di Jawa Barat", bertujuan :

1. Mengejar ketercapaian Indeks Pendidikan Jawa Barat terhadap ketertinggalan selama tahun 2001-2003, agar tetap selaras dengan rencana atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya.
2. Menjaga konsistensi pencapaian target Indeks Pendidikan Jawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian visi Jawa Barat pada tahun 2010.
3. Meningkatkan angka partisipasi kasar atau murni penduduk Jawa Barat pada jenjang pendidikan SD/MI (7-12 tahun) dan SMP/MTs (13-15 tahun) dalam upaya meningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Hurut (AMH) Penduduk Jawa Barat;
4. Membantu masyarakat terutama yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya agar minimal memiliki Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Dinyatakan bahwa tujuan di atas dengan tetap secara konsisten mengupayakan ketercapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan pada setiap tujuan yang diraih.

**Hasil Yang Diharapkan**. Dengan dilaksanakannya Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan dengan focus "Program Percepatan Penuntasan Wajar

Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender" di Jawa Barat, hasil yang diharapkan dapat dicapai meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Secara gradual mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2008, tingkat partisipasi penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Jawa Barat terus meningkat yang disertai dengan semakin menurunnya tingkat kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan dasar, sampai tercapainya tuntas wajar dikdas 9 tahun pada tahun 2008.
2) Hal tersebut ditandai dengan pencapaian Angka Partisipasi Murni (ARM) SD/MI dan ARM SMP/MTs yang terus bergerak secara signifikan mulai dari tahun 2005-2008; dimulai tahun 2005 sebesar 95,8 % (SD/MI) dan 73,3 % (SMP/MTs), tahun 2006 sebesar 96,5 % (SD/MI) dan 77,6 % (SMP/MTs), tahun 2007 sebesar 97,2 % (SD/MI) dan 81,9 % (SMP/MTs) dan tahun 2008 sebesar 97,9 % (SD/MI) dan 86,2 % (SMP/MTs) pada saat tuntasnya wajar dikdas 9 tahun di Jawa Barat.
3) Kondisi tersebut di atas akan memberikan multilayer effect kepada pencapaian kinerja Indeks Pendidikan tahun 2008 dengan capaian RLS = 8,7 tahun dan AMH = 97,60 % serta IP sebesar 84,3, dimana pada kondisi tersebut selain wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dapat dituntaskan, juga semakin terwujudnya pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan sesuai dengan harapan Pendidikan Untuk Semua.

**Strategi**. Terdapat 5 Strategi Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yaitu :

1) Penerbitan Pedoman Operasional Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
2) Peningkatan Jangkauan dan Daya Tampung Pendidikan Dasar Berkesetaraan Gender. Kegiatannya meliputi
    a. Membuka Sistem Kelas Jauh
    b. Mengembangkan SMP/MTs Terbuka
    c. Mengembangkan Pendidikan Inklusi
    d. Mengembangkan Sistem Double Shift
    e. Mengembangkan PKBM-PKBM di Pondok Pesantren

3) Pemberdayaan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan di Jawa Barat ini antara lain :

a. Kampanye Pentingnya Pendidikan Berkesetaraan Gender
b. Rumah Dana Pendidikan
c. Gerakan Teman Asuh dan Orang Tua Asuh
d. Gerakan Amal Pendidikan Untuk Rakyat (GAPURA)
e. Gerakan Bulan Dana Pendidikan
f. Perusahaan/Industri Asuh Untuk Sekolah

4) Penerbitan Kartu Bebas Biaya Sekolah

5) Pemberian "Wajar Dikdas 9 Tahun Award" Berekesetaraan Gender

**Kegiatan Operasional**. Kelima Strategi tersebut dituangkan ke dalam 15 jenis kegiatan operasional, yang terdiri dari :

1. Penyusunan Database Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat
   a. Desain Instrument Pendataan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat, untuk wilayah Desa, Kecamatan dan Kab/Kota
   b. Pencetakan Instrument Pendataan
   c. Pendistribusian Instrument Pendataan
   d. Penjaringan Data Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
   e. Pengolahan Data Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
   f. Analisis dan Penyajian Informasi Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
   g. Pencetakkan Profil Wajar Dikdas 9 tahun Berkesetaraan Gender

2. Penyusunan Pedoman Operasional Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender, yang meliptui aktivitas-aktivitas :
   a. Pembentukan Tim Penyusun
   b. Studi dan Kajian Pustaka, Produk Hukum dan eraturan
   c. Penyususnan Draft Pedoman Operasional
   d. Finalisasi Draft Pedoman Operasional

e. Pencentakan Pedoman Operasional

3. Launching" Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender. Kegiatannya meliputi :

a. Pembentukan Panitia Launching
b. Penyampaian Undangan kepada Bupati/Walikota se Jawa Barat
c. Penyelenggaraan dan perbanyakan materi "launching"
d. Penyelenggaraan "launching" oleh Bapak Gubernur Jawa Barat

4. Rapat Kerja Dengan Kabupaten/Kota Tentang Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
   a. Pembentukan Panitia Rapat Kerja
   b. Penyampaian Undangan kepada Kab/Kota
   c. Penyiapan dan perbanyakan materi rapat kerja
   d. Penyelenggaraan Rapat Kerja dengan Kab/Kota
5. Pemberian Dana Stimulasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota tentang Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
6. Penyusunan Rencana Aksi Propinsi (RAP) tentang Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
   a. Pembentukan Tim Penyusun RAP
   b. Penyususnan draft RAP
   c. Finalisasi Draft RAP
   d. Pencentakan RAP
7. Road Show Dalam Rangka Keterpaduan RAP dan RAD
8. Kampanye Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
9. Pembuatan Media Publikasi dan Promosi Program Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender
10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD di Kab/Kota
11. Pemberian "Wajar Dikdas 9 Tahun Award" Berkesetaraan Gender
12. Rapat Kerja Evaluasi Dengan Kadisdik Kab/Kota Pembentukan Panitia Rapat Kerja
    a. Penyampaian Undangan kepada Kab/Kota
    b. Penyiapan dan perbanyakan materi Rapat Kerja
    c. Penyelenggaraan Rapat Kerja Evaluasi dengan Kab/Kota

13. Rapat Kerja Evaluasi Dengan Instansi Terkait dan *Stakeholder*
    a. Pembentukan Panitia Rapat Kerja
    b. Penyampaian Undangan kepada instansi terkait bidang KESRA
    c. Penyiapan dan perbanyakan materi Rapat Kerja
    d. Penyelenggaraan Rapat Kerja Evaluasi dengan instansi terkait dan *stakeholder*
14. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Program Propinsi Untuk Gubernur Jawa Barat
    a. Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kerja Tahunan
    b. Penyususnan Draft Laporan Kinerja Tahunan
    c. Finalisasi Draft Laporan Kinerja Tahunan
    d. Pencentakan Laporan Kinerja Tahunan
    e. Persentasi Laporan Kinerja Tahunan Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat di depan Gubernur Jawa Barat
15. Pemberdayaan MIS dan IT Untuk Percepatan Pendataan dan Penyajian Informasi Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender

Pada Lampiran 32 sampai dengan Lampiran 35 dikemukakan berbagai hal yang menyangkut Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat sampai dengan Rencana Pengalokasin Dana Kegiatan Pembangunan Bidang Propinsi Jawa barat Tahun 2005.

# IX. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 9.1 . Kesimpulan

### 9.1.1. Pencapaian Pembangunan Sumberdaya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada tahun 1996, 1999, dan 2002 ada pada kategori menengah, berturut-turut sebesar 68,2; 64,6 dan 65,8. Walaupun IPM Jawa Barat lebih tinggi dari IPM Indonesia, namun dibanding dengan propinsi lain IPM Jawa Barat pada tiga tahun tersebut berada pada rangking 14, 15, dan 17. Semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat berada pada katagori menengah. Dari tahun 1999 ke 2002, di antara 22 Kabupaten/Kota, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Subang mengalami penurunan IPM, selainnya ada 13 Kabupaten/Kota yang rangkingnya menurun, 5 Kabupaten/Kota meningkat, dan sisaya tetap. Pada tahun 2002, IPM tertinggi adalah Kota Depok (73,9) dan yang terendah adalah Kabupaten Indramayu (61,2). Berdasar kriteria BPS, Bappenas, UNDP (2001), dari 22 kabupaten/kota di propinsi ini, pada tahun 2002 hanya ada 4 kabupaten (Bandung, Tasikmalaya, Sumedang dan Bekasi) dan 6 kota di Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi dan Depok) yang tergolong IPM 'menengah atas', selainnya tergolong 'menengah bawah'. IPM ke 10 Kabupaten/Kota yang tergolong "menengah atas" tersebut berada di atas IPM tingkat Propinsi.
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Barat pada tahun 1999 sebesar 54,6 dan meningkat menjadi 56,3 pada tahun 2002. Berbeda dari IPM, IPG Jawa Barat berada di bawah IPG Indonesia yang sebesar 55,9 pada tahun 1999 dan 59,2 pada tahun 2002). Dibandingkan dengan IPG Propinsi lain di Indonesia, IPG Jawa Barat berada pada rangking 17 dan 21. Pada tahun 1999 terdapat 5 kabupaten yang IPGnya tergolong rendah, yaitu Sukabumi, Majalengka, Indramayu, Karawang dan Bekasi, adapun pada tahun 2002 yang IPGnya tergolong rendah bergeser ke Kabupaten Garut, Cirebon, Indramayu dan Karawang. Dibandingkan dengan tahun 1999, pada tahun 2002 terdapat sebanyak 12 Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan IPG, selebihnya menunjukkan penurunan. Terdapat 9 Kabupaten/Kota yang rangkingnya turun dan 8 Kabupaten/Kota yang rangkingnya meningkat, sedang sisanya tetap. Dalam peta Jawa Barat, pada kedua tahun tersebut, rangking IPG tertinggi dijumpai di Kota Bandung (62,6), sementara terendah di Kabupaten Indramayu (42,8).

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Barat berada di bawah rata-rata IDG Indonesia. Berbeda dari kondisi rata-rata Indonesia, IDG tersebut menunjukkan penurunan yakni dari 47,7 pada tahun 1999 menjadi 43,6 pada 2002. IDG Indonesia meningkat dari 49,5 pada tahun 1999 menjadi 54,6 pada tahun 2002. Dalam peta Jawa Barat, rangking teratas pada tahun 1999 diduduki Kabupaten Sumedang (IDG=58,6), dan pada tahun 2002 turun ke posisi kedua, sedangkan posisi pertama tersebut beralih ke Kabupaten Cianjur (IDG=56,4).
4. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Jawa Barat menunjukkan nilai yang tetap pada tahun 1998 dan 1999, yakni 26,9; dan selanjutnya menunjukkan perbaikan, yakni 23,0 pada tahun 2002. Dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia, posisi Jawa Barat meningkat dari rangking ke 15 pada tahun 1999 ke posisi 11 pada tahun 2002. Menurut kabupaten/kota, IKM terttinggi dijumpai di Kabupaten Cianjur, khususnya pada tahun 1998 dan 1999, sementara terendah Kota Cirebon. Pada tahun 2002 menunjukkan perubahan, Kota Bandung ada pada posisi terendah dan yang tertinggi adalah Kabupaten Karawang. Kabupaten/kota yang menurun IKM nya (menjadi jauh lebih baik) adalah Kabupaten-kabupaten Bandung, Ciamis, Garut, dan Cianjur. Sebaliknya, yang meningkat secara menyolok adalah Kota Cirebon, Kabupaten Subang dan Kota Bogor.

### 9.1.2 Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan di Propinsi Jawa Barat

Dari pernyataan beragam kebijakan pendidikan Propinsi Jawa Barat, khususnya Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran, serta strategi dalam program bidang pendidikan, khususnya yang dirumuskan pada periode tahun 2000-2000 -sebelum dilakukannya studi analisis kebijakan bidang pendidikan ini- diketahui bahwa pemerintah Propinsi Jawa Barat mempunyai komitmen terhadap pembangunan pendidikan yang diamanatkan oleh berbagai undang-undang yang relevan. Namun demikian, semua pernyataan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan pembangunan pendidikan tersebut bersifat netral gender, dalam arti tidak merujuk pada salah satu kelompok, laki-laki atau perempuan. Hal ini disebabkan anggapan yang ada di kalangan para penentu kebijakan pendidikan adalah bahwa setiap kebijakan pendidikan ditujukan kepada setiap individu anggota masyarakat, tidak membedakan laki-laki dan perempuan (tidak diskriminatif).

### 9.1.3. Data Pembuka Wawasan

Dengan kebijakan yang netral gender tersebut, kinerja pendidikan penduduk Jawa Barat menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

#### 9.1.3.1. Akses dan Pemerataan Pendidikan : Formal dan Non-Formal

1. Pembangunan pendidikan di Jawa Barat sudah menunjukkan keberhasilan yang ditunjukkan oleh kenaikan beberapa indikator pembangunan pendidikan. Pada tahun 2003, secara umum Angka Melek Hurup (AMH) tingkat propinsi meningkat menjadi 94,52 persen dibandingkan tahun 2000 yang sebesar 93,29 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 7,2 tahun pada tahun 2002 dibandingkan tahun 1999 yang sebesar 6,8 tahun. Walaupun demikian, terdapat 7 Kabupaten yang mempunyai AMH di bawah AMH rata-rata propinsi, yaitu Kabupaten Bogor, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Subang, dan Bekasi.
2. Dalam konteks indeks pembangunan gender, IPG Propinsi Jawa Barat meningkat dari 54,5 persen pada tahun 1999 menjadi 56,3 persen pada tahun 2002, akan tetapi secara Nasional kedudukan Jawsa Barat turun dari rangking ke 17 menjadi rangking ke 21. Dari indikator AMH, pada tahun 2003 kesetaraan gender masih belum tercapai (IP=0,95), dengan kesenjangan sebesar – 4,47 persen. Terdapat perbedaan menurut daerah, perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, AMHnya relatif lebih setara (IP=0,97) di bandingkan di perdesaan (IP=0,94), dengan kesenjangan sebesar -6,08 untuk di perdesaan, angka ini jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan yang sebesar -2,96.
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Jawa Barat -tingkat propinsi- pada periode tahun 2000-2003 menunjukkan kecenderungan meningkat pada semua kelompok umur, kecuali pada kelompok umur 19-24 tahun. Pada tahun 2003 APS pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 96,3 persen, pada 13-15 tahun sebesar 75,9 persen, sementara pada 16-18 tahun dan 19-24 tahun , berturut-turut sebesar 43,5 persen dan 9,2 persen. Juga ditemukan bahwa semakin tinggi kelompok umur semakin rendah APS dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender sudah dicapai pada kelompok umur 7-12 tahun (IP=1,01 dan kesenjangan 0,7 persen), dan 13-15 tahun (IP=1,01 dan kesenjangan 0,6 persen). Adapun ketidak-setaraan gender pada kelompok umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun

besar dibanding laki-laki, dan bahwa perempuan juga bekerja dalam kegiatan produktif, terlebih keluarga yang dikepalai perempuan. Angka IP untuk Program KF dan Magang/Beasiswa berturut-turut 1,7 dan 1,8 yang berarti laki-laki kurang akses dibanding perempuan dengan disparitas gender berturut-turut sebesar 26 dan 28 untuk KF dan Magang/Beasiswa. Disparitas tertinggi ditemukan pada Program Paket C, meskipun kecenderungannya menunjukkan penurunan, dari -53 pada 2001 ke -46 pada 2002 dan menurun lagi menjadi -38 pada 2003. Dalam hal kepemudaan, hanya pada Program SP3 dijumpai kecenderungan akses laki-laki dan perempuan yang proporsional, pada program selainnya menunjukkan lebih tingginya persentase peserta laki-laki yang akses dalam program kepemudaan. Data Tahun 2002 partisipasi perempuan lebih tinggi pada Program PPAN, yakni hampir 2 kalinya, sementara pada program lainnya akses perempuan terhadap program kepemudaan lebih redah dibanding HIV/AIDS, Miras, Narkoba dan Merokok serta program PPAP. Hal ini diduga karena dipengaruhi oleh stereotipi imej tentang anggapan bahwa yang potensial terkena HIV/Aids, Miras, Narkoba dan Merokok adalah laki-laki, demikian pula lainnya.

### 9.1.3.2. Mutu dan Relevansi

1. Membanding data antara tahun 2001 dan 2003, angka putus sekolah murid laki-laki menunjukkan penurunan pada jenjang RA, MI, SMP, SMU dan SMK. Pada murid perempuan penurunan angka putus sekolah hanya dijumpai pada jenjang TK, SD, dan MTs, sementara pada jenjang lainnya menunjukkan peningkatan. Demikian pula halnya dalam angka mengulang, pada anak perempuan menunjukkan persentase lebih tinggi dibanding anak laki-laki (lebih dari 50 %) pada jenjang pendidikan TK dan RA (kecuali pada tahun 2002), MI, SMP, dan SMK untuk semua tahun. Lebih lamanya waktu yang ditempuh anak pada jenjang TK/RA dimungkinkan oleh adanya kecenderungan dimana orangtua memasukkan anaknya pada usia terlalu dini (sekitar 4 tahun) oleh karena ibu mereka bekerja dengan anggapan bahwa TK berfungsi sebagai "tempat penitipan anak". Sementara pada pendidikan menengah diduga berhubungan dengan beban kerja dan/atau rendahnya pendampingan dari orangtua karena

lebih rendahnya pendidikan orangtua mereka, serta rendahnya akses siswa terhadap kursus-kursus karena rendahnya kemampuan ekonomi orangtua mereka.

2. Pada periode tahun 2000–2003 juga terjadi penurunan lulusan peserta didik perempuan, yakni pada TK dan SMP, sebaliknya pada jenjang pendidikan MI, MTs, SMU dan MA. Adapun pada RA dan SMK menunjukkan tidak ada perkembangan persentase lulusan. Daya bertahan perempuan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan lebih besar dibanding laki-laki. Lulusan siswa perempuan pada jenjang TK, SD, SMP dan SMK menunjukkan persentase lebih rendah dibanding siswa laki-laki, sebaliknya pada jenjang pendidikan menengah umum dan agama, khususnya SMU dan MA. Hal ini antara lain diduga karena tingkat kenakalan remaja laki-laki lebih tinggi sehingga mereka bermasalah dalam penyelesaian sekolahnya. Kesenjangan gender, dimana lulusan perempuan jauh lebih rendah dibanding anak laki-laki dijumpai pada tahun 2001 khususnya untuk SD dan MTs, dan MA, sementara kesenjangan sebaliknya dijumpai pada jenjang pendidikan MI, dimana lulusan peserta didik laki-laki jauh lebih rendah dibanding anak perempuan. Sementara pada tahun 2003, lulusan anak perempuan pada MI hampir 3 kali lipatnya anak laki-laki, sebaliknya pada SD.
3. Berdasar hasil Ujian Tertulis Ujian Akhir Nasional (UAN) dari kasus SD di Kota Bekasi diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai lebih dari 8 untuk mata ajaran PPKN dan Bahasa Sunda didominasi oleh perempuan, sementara untuk mata ajaran Agama, Bahasa Inggeris, IPS, matematika dan IPA dominan pada anak laki-laki. Pada bahasa Inggeris dan IPA untuk kelompok nilai 8,01 sampai dengan 9 dominan dijumpai perempuan. Dari hasil Ujian Praktek, secara umum hasil prestasi siswa yang dicapai tidak setinggi hasil ujian tertulis. Tidak seorang siswapun yang mencapai nilai lebih dari 9 untuk hampir semua mata-ajaran, kecuali IPA. Namun, siswa perempuan yang memperoleh nilai antara 8,01 sampai 9 relatif dominan, khususnya untuk Bahasa Sunda, Inggeris, Agama dan PPKN; sementara untuk IPA untuk nilai di atas 9 dominan laki-laki, sementara siswa perempuan dominan pada kelompok nilai 8,01 sampai 9. Dugaan dimana lebih banyak anak perempuan dominan pada mata ajaran ilmu sosial tampaknya masih relevan.

### 9.1.3.3. Manajemen Pendidikan

Ketidaksetaraan dan kesenjangan gender dalam manajemen pendidikan masih ditemui di Jawa Barat. Beberapa temuan antara lain meliputi :

1. Pada periode 2000-2003, kecuali pada TK dan SLB, persentase guru perempuan lebih rendah di banding guru laki-laki pada semua jenjang pendidikan, berturut-turut 45 persen dan 55 persen. Tahun 2000 TK dan SLB guru perempuan berturut-turut sebanyak 95 persen dan 60 persen, dan dua tahun berikutnya Guru TK perempuan menurun sekitar 10 persen, sementara untuk SLB cenderung tetap. Ketidaksetaraan tersebut ditunjukkan oleh Nilai IP dan disparitas pada TK yang sangat tinggi yakni 19 dan 90 dengan dominasi perempuan; sebaliknya pada jenjang pendidikan lainnya, kecuali SLB, menunjukkan disparitas 10 persen dengan dominasi laki-laki.
2. Kecuali pada TK dan RA, proporsi perempuan yang menjadi kepala sekolah lebih rendah dibanding laki-laki. Pada jenjang pendidikan TK dan RA masing-masing 85 %, sementara pada jenjang pendidikan formal lainnya proporsi perempuan hanya 45 %; sementara pada SLB lebih rendah lagi, yakni sekitar 34 %. Sekalipun guru dan kepala sekolah TK didominasi oleh perempuan, namun IPnya sangat rendah (0,3).
3. Laki-laki juga dominan menjadi pengawas untuk semua jenjang pendidikan, dengan persentase berturut-turut sebesar 75 %, 91 % dan 87,5 % untuk jenjang pendidikan TK/SD, pendidikan menengah dan SLB. Kondisi tersebut dapat dikatakan hampir selalu terjadi pada setiap tahun dalam periode tahun 2001 sampai dengan 2003.
4. Akses guru perempuan terhadap pelatihan menunjukkan lebih rendah dibanding laki-laki, kecuali untuk jenjang pendidikan TK dan SLB. Oleh karena manajemen pendidikan didominasi laki-laki, maka akses laki-laki terhadap pelatihan lebih tinggi. Kecuali pada Guru TK, persentase terendah perempuan yang berpartisipasi dalam pelatihan dijumpai pada jenjang SLTA, yakni hanya 11 persen, dengan disparitas sebesar -77.1 . Sebaliknya, pada TK disparitasnya 99, 3 persen. Hal tersebut menunjukkan relatif tingginya kesenjangan gender yang ditunjukkan IP yang lebih rendah dari satu dan Disparitas yang negatif, kecuali pada Guru TK.
5. Dalam hal pendidikan non-formal representasi/akses laki-laki sebagai tutor pada program pendidikan Paket A, B dan C, Penilik PLS dan Tenaga Lapangan

DIKMAS juga lebih tinggi dibanding perempuan, sebaliknya pada program pendidikan Keaksaraan Fungsional dan PADU. Hal serupa dijumpai dalam penyelenggaraan PKBM dan klub olah raga. Perempuan yang memimpin PKBM kurang dari 10 persen, bahkan tidak seorang perempuan pun yang memimpin klub olah raga, Pada tahun 2003, dari 24 klub olah raga semuanya diketuai laki-laki. Sebaliknya, partisipasi perempuan sebagai pimpinan lembaga pendidikan yang dibentuk atas inisiatif sendiri cenderung lebih tinggi, yakni sekitar 36 % untuk setiap tahunnya pada periode 2001-2003.

6. Dalam kelembagaan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, hanya terdapat 15,2 persen perempuan yang menduduki jabatan struktural.
7. Berdasar hasil studi PSW Universitas Negeri Jakarta (2000) tentang analisis bahan ajar diantaranya yang diterbitkan Penerbit Grafindo Media Pratama dan PT Sarana Panca Karya Nusa, untuk buku-buku PPKn Kelas 1,2,4 dan 5 serta Bahasa Indonesia Kelas 1, 4 dan 6, secara umum diketahui adanya bahan ajar bias gender yang ditemukan dalam ilustrasi gambar sebanyak 61,87 % dan 36,87 % pada uraian materi. Berdasar mata ajarannya, diketahui bahwa hal tersebut ditemukan baik pada mata ajaran IPS maupun IPA kelas III sampai dengan kelas VI dengan sedikit perbedaan. Pada mata ajaran IPS materi bahan ajar yang bias gender berturut-turut sekitar 30 persen pada uraian materi dan 54,3 persen pada ilustrasi gambar, sementara pada IPA hanya ditemukan dalam ilustrasi gambar, yaitu sebanyak 70,73 persen. Pada mata ajaran PPKN muatan bias gender baik pada materi maupun ilustrasi gambar lebih tinggi dibanding materi, berturut-turut sebesar 66,2 % dan 72 %. Kondisi tersebut berhubungan dengan relatif masih dominannya jumlah/persentase para penulis dan ilustrator buku laki-laki yang secara langsung berkontribusi terhadap sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang bias gender pada anak didik. Proporsi penulis bahan ajar untuk semua jenjang pendidikan dasar menengah didominasi penulis laki-laki, dengan kecenderungan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi dominasi laki-laki. Pada jenjang SD, SLTP dan SLTA persentase penulis laki-laki berturut-turut sebesar 78,5 persen , 81, 9 persen dan 83,42 persen; sisanya penulis perempuan.
8. Pada bahan ajar berbasis Kurikulum 2004 terbitan Penerbit Daerah, yaitu PT Remaja Rosdakarya (Bandung), pada Buku Tangkas Pengetahuan Sosial Kelas 2 SD, persentase terbesar sudah memuat materi yang responsif gender (66,7 persen), sementara pada gambarnya menunjukkan persentase bias gender yang lebih

tinggi, khususnya pada Tangkas Pengetahuan Sosial Kelas 2 SD dan Kelas 3 SD. Adapun pada Tangkas Pengetahuan Sosial Kelas 5 dan Kelas 6 SD dominan netral gender, sementara materi yang bias gender sebesar 25 persen. Demikian pula untuk Tangkas Berbahasa Indonesia untuk Kelas 1 sampai dengan Kelas 6, sebagian besar tergolong netral gender.

9. Khusus hasil analisis bahan Ajar Muatan Lokal (Mulok) yaitu Bahasa Indramayu yang ada pada Buku "Gelis Pinter Moco Lan Nulis" untuk Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3, serta buku Wulang Basa untuk Kelas 4 sampai dengan Kelas 6 SD ditemukan bahwa kecuali pada buku Wulang Basa Kelas 4 SD, pada buku selainnya dominan netral gender; bahkan ditemukan adanya bahan ajar yang responsif gender, khususnya pada buku Kelas 2 dan Kelas 4. Namun, bias gender pada ilustrasi gambar menunjukkan masih relatif besar, khususnya pada buku Kelas 2 dan Kelas 4. Pada bahan ajar Mulok Tingkat SLTP, hasil analisis mata ajaran Ketrampilan Tata Busana menemukan bahwa materinya netral gender. Namun, pada materi Mulok (Buku Pendidikan Budi Pekerti) Tingkat SMU kelas 2 masih bias gender, yakni pada 4 topik pelajaran dan semua ilustrasi gambar.
10. Adanya perubahan dalam materi bahan ajar, khususnya dalam buku Berbasis Kurikulum 2004, berhubungan dengan relatif setaranya proporsi penulis bahan ajar SD, yakni terdiri dari masing-masing 50 % laki-laki dan perempuan, sementara penelaahnya 100 persen perempuan. Untuk penanggung-jawab terdapat mereka yang perempuan, khususnya pada Tangkas Berbahasa Kelas 5 dan Kelas 6. Masih dijumpainya bias gender dalam gambar juga dimungkinkan karena ilustrator, desain sampul dan perwajahannya 100 persen terdiri atas laki-laki.. Perubahan yang terjadi pada Kurikulum 2004 diduga berhubungan dengan meningkatnya partisipasi penulis bahan ajar yang mengikuti Pelatihan Penulisan Bahan Ajar yang Responsif Gender, antara lain oleh Kelompok Kerja PUG Depdiknas.

### 9.1.4. Faktor-faktor Penyebab dan Isu Gender

#### 9.1.4.1. Faktor-faktor Penyebab

1. Kesenjangan gender dalam akses terhadap dan partisipasi dalam pendidikan formal dan non formal, khususnya yang ditunjukkan oleh masih relatif lebih rendahnya akses perempuan terhadap jenjang pendidikan lanjutan dan tinggi, tampaknya berhubungan dengan berbagai faktor, diantaranya adalah :

a. Masih relatif kuatnya pengaruh proses sosialisasi dan konstruksi sosial budaya yang bias gender bersamaan dengan faktor-faktor lain seperti budaya umur perkawinan pertama bagi anak perempuan pada usia muda, rendahnya kemampuan ekonomi orangtua, serta masih kuatnya nilai ekonomi anak dan nilai yang menganggap anak menjadi sandaran hidup masa tua di mata orangtua dalam keluarga dan masyarakat etnik Sunda di Jawa Barat.
b. Dominasi laki-laki pada kelembagaan pendidikan, manajemen pendidikan dan penulisan/ilustrasi materi bahan ajar yang masih menganut budaya bias gender serta kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang beragam program PLS di kalangan perempuan yang potensial menjadi pengelola dan ketua PKBM dan atau lembaga kursus
c. Kendala berupa ketidaktersediaan fasilitas sekolah menengah di setiap desa dan jarak yang relatif jauh dari rumah ke sekolah menengah tampaknya juga menjadi kendala rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan formal.
d. Ketertarikan anak-anak perempuan usia kerja untuk lebih awal memasuki pasar tenaga kerja, khususnya di pabrik/perusahaan dengan motivasi baik karena ingin mengelola uang sendiri atau karena tuntutan orang tua.
e. Masih rendahnya atau belum memadainya ketersediaan dana beasiswa baik yang sifatnya swadaya di kalangan masyarakat, LSM maupun dari pemerintah, terutama bagi keluarga miskin baik di perdesaan maupun perkotaan.

2. Rendahnya partisipasi perempuan dalam kontrol berkenaan dengan aspirasi pendidikan mereka juga dipengaruhi oleh: (a) dominannya peranan ayah –sebagai kepala keluarga- dalam proses pengambilan keputusan tentang aspek meneruskan dan memilih bidang studi, (b) rendahnya sensitivitas gender di lingkungan manajemen pendidikan dan atau masih dominannya mereka yang memandang kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan tidak harus dilaksanakan melalui tindakan-tindakan afirmatif, dan (c) belum terinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, yang ditunjukkan oleh perilaku untuk lebih melibatkan laki-laki dalam hal kontrol terhadap pembangunan pendidikan.

3. Rendahnya peluang perempuan untuk memperoleh manfaat menduduki posisi strategis yang memfasilitasi mereka untuk mengambil keputusan dan peningkatan pendapatan mereka juga dimungkinkan oleh masih dominannya

laki-laki sebagai penentu kebijakan dalam struktur kelembagaan kependidikan baik di lingkungan pemerintahan, sekolah maupun masyarakat. Perempuan dominan dilibatkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan peranan domestik atau administratif.

4. Dalam hal pendidikan non-formal. dominasi laki-laki sebagai penentu kebijakan dan program/kegiatan pendidikan juga telah menyebabkan rendahnya akses perempuan untuk memperoleh manfaat dari partisipasinya sebagai tutor, manajemen pendidikan (ketua PKBM). Relasi gender dalam keluarganya (dalam hubungannya dengan suaminya) juga menjadi penyebab rendahnya motivasi perempuan untuk tampil dalam jabatan struktural dan lainnya. Selain itu, pihak perempuan sendiri sudah terinternalisasi dengan budaya yang menempatkannya dalam peranan domestik, sehingga menganggap bahwa perpanjangan peran domestik yang dibawa ke lingkungan kelembagaan pendidikan merupakan hal yang wajar.

**9.1.4.2. Isu-isu Gender.**

1. Kecuali pada jenjang pendidikan SD dan SLTP, kesenjangan gender dalam pendidikan di tingkat Propinsi dan di beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat ditemukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni pendidikan menengah dan tinggi. Namun demikian, adanya Indeks Paritas sebesar 1 dan disparitas yang mendekati 0 tidak berarti ada kesetaraan gender yang utuh, mengingat angka partisipasi (APS, APK dan APM) baik laki-laki maupun perempuan tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan. Keragaman yang terjadi antar Kabupaten/Kota terutama karena adanya ketidaksetaraan kemajuan yang dicapai pada tingkat kabupaten/kota, perdesaan dan perkotaan. Kesenjangan gender dalam pendidikan menengah dan tinggi juga terjadi karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan per kapita pada rumahtangga.

2. Masih ditemukannya materi bahan ajar yang bias gender, yakni yang menanamkan stereotipi gender kepada subyek didik, terutama pada beberapa mata pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, baik pada tingkat SD maupun SLTP. Di samping itu, penulis bahan ajarnya sendiri serta ilustratornya didominasi oleh laki-laki, yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai budaya gender.

3. Relatif lebih banyaknya anak laki-laki yang bermasalah menyebabkan lebih tingginya tingkat putus sekolah di kalangan siswa laki-laki, kecuali pada sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama. Selain itu, terdapat kecenderungan lebih tingginya persentase peserta didik perempuan yang mengulang dibanding laki-laki, khususnya baik pada jenjang TK/RA, SD, SMP/MTs dan menengah (SMU dan SMK). Namun demikian, kecuali pada jenjang pendidikan SMU, lulusan siswa pada jenjang pendidikan lainnya masih didominasi laki-laki.

4. Masih kuatnya gejala segregasi gender (*gender segregation*) dalam pemilihan jurusan atau program studi menyebabkan relatif masih dominannya perempuan di lingkungan SMK, yang disebabkan relatif tingginya subordinasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan kelembagaan pendidikan. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan kesenjangan gender dalam manajemen pendidikan terlembagakan dalam beragam aspek dan sub-sistem pendidikan. Sebagaimana temuan di tingkat nasional, sikap para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih bias gender secara konsisten dan berkesinambungan mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang bertahan dalam waktu yang lama.

5. Masih relatif banyaknya para penentu kebijakan dan pengambil keputusan pembangunan bidang pendidikan yang kurang sensitif gender, dan atau memandang kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan tidak harus dilaksanakan melalui tindakan-tindakan afirmatif sebagai upaya mengakselarasi perempuan untuk akses, kontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan bidang pendidikan. Di samping itu, belum terinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat kita turut andil di dalamnya. Masih relatif tingginya pelaku manajemen pendidikan yang didominasi laki-laki disertai rendahnya sensitivitas gender mereka turut berkontribusi pada masih kesenjangan gender dalam pendidikan formal dan non-formal di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

6. Belum atau masih rendahnya sensitivitas gender di lingkungan manajemen pendidikan berdampak pada belum tersedianya dan dimanfaatkannya data kinerja pendidikan yang terpilah menurut jenis kelamin, termasuk dinas pendidikan baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, juga masih rendahnya

kesadaran akan pentingnya menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan bidang pendidikan (formal dan non-formal) belum berbasis pada data pembuka wawasan yang menggambarkan capaian hasil-hasil pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Di pihak lain, data yang ada di lembaga masing masing, khususnya pada lembaga sekolah dan Badan Pusat Statistik Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya dimaknai bagi penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang responsif gender yang lebih operasional, khususnya pada tingkat program, proyek dan kegiatan, kecuali ada kebijakan pusat atau daerah yang mengharuskannya.

### 9.1.6. Reformulasi Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender

1. Pada tahun 2003, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat telah mengemukakan komitmennya untuk mengadaptasi RAN Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan ke dalam Rencana Aksi Daerah sebagaimana dikemukakan oleh POKJA PUG Jawa Barat dalam presentasinya pada Temu Koordinasi PUG Bidang Pendidikan di Solo. Selanjutnya, komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan kebijakan, program, target dan sasaran yang responsif gender sesuai dengan misi pembangunan pendidikan Dinas Pendidikan Propinsi jawa Barat yang tertulis dalam Profil Pendidikan Berwawasan Gender Propinsi Jawa Barat 2003.
2. Pada tahun 2004, Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Propinsi Jawa Barat juga sudah mengemukakan kebijakan, program serta target dan sasaran program pembangunan pendidikan yang responsif gender seperti tertuang dalam Analisis Situasi Kondisi serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) 2004 -2005. Terdapat 3 Program PUG yang telah ditetapkan Forum PUS Propinsi Jawa Barat, yaitu : (1) Pengembangan kapasitas kelembagaan berwawasan gender, (2) Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender, dan (3) Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender.
3. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat mempertegas komitmen terhadap PUG Bidang Pendidikan dengan menyusun *position paper* Integrasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Dengan Fokus "*Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat*". Dokumen tersebut telah disajikan dalam *Roundtable Discussion* Tahap II Proyek PPMPMKPUG

Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 dan 12 Desember 2004 di Hotel Bumi Asih Jaya, Bandung. Meskipun dalam rumusan tujuan Integrasi PUG dalam Bidang Pendidikan tersebut masih tergolong netral gender, namun satu dari 3 rumusan tentang hasil yang diharapkan dapat dicapai secara eksplisit menyatakan bahwa "*Secara gradual mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2008, tingkat partisipasi penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Jawa Barat terus meningkat yang disertai dengan semakin menurunnya tingkat kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan dasar, sampai tercapainya tuntas wajar dikdas 9 tahun pada tahun 2008*". Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah ditetapkan 5 Strategi Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat yang meliputi : (1) Penerbitan Pedoman Operasional Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender, (2) Peningkatan Jangkauan dan Daya Tampung Pendidikan Dasar Berkesetaraan Gender, (3) Pemberdayaan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat, (4) Penerbitan Kartu Bebas Biaya Sekolah dan (5) Pemberian "Wajar Dikdas 9 Tahun Award" Berekesetaraan Gender

## 9.2. Rekomendasi

Sebagaimana telah dikemukakan, pemerintah Jawa Barat, baik itu Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat maupun Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua telah menetapkan kebijakan tentang Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan. Kedua instansi pemerintah tersebut telah mengemukakan kebijakan, program, tujuan dan sasaran serta target atau hasil yang diharapkan pembangunan bidang pendidikan yang responsif gender, bahkan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat bahkan telah secara eksplisit merumuskan kebijakan yang berfokus pada "Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat" dengan strategi percepatan yang juga responsif gender. Namun demikian, mengingat kebijakan yang telah dirumuskan belum mengacu pada capaian kinerja menurut kabupaten/kota dan daerah (perkotaan dan perdesaan), maka berdasar pada hasil dan permasalahan yang ditemukan dalam studi ini rekomendasi yang dikemukakan pada sub-bab ini bersifat holistik, meliputi semua jenis dan jenjang pendidikan tersebut dengan memberi prioritas sesuai kinerja pendidikan menurut kabupaten/kota dan daerah (perkotaan dan perdesaan). Selanjutnya, sesuai dengan

indikator pembangunan bidang pendidikan, maka rekomendasi yang dideskripsikan di bawah ini meliputi tiga aspek. yaitu akses dan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi serta manajemen pendidikan.

### 9.2.1. Akses dan Pemerataan Pendidikan

#### 9.2.1.1. Pendidikan Formal

Kinerja pendidikan formal yang dilihat melalui indikator APS, APM dan APK pada tingkat propinsi khususnya sampai pada tahun 2003 menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan propinsi Jawa Barat dalam mencapai IPM 80. Lebih lanjut, oleh karena kinerja pendidikan pada tingkat propinsi ditentukan oleh kinerja pada tingkat kabupaten/kota, maka studi ini merekomendasikan untuk memprioritaskan kabupaten/kota yang capaian kinerjanya masih berada di bawah rata-rata tingkat propinsi,sebagaimana terlihat pada Lampiran 36 sampai dengan Lampiran 42.

Secara umum, berdasar data pada lampiran-lampiran tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tujuan PUG dalam pendidikan di Jawa Barat, sebaiknya dilaksanakan dengan memprioritaskan kabupaten/kota di perkotaan dan di perdesaan yang kinerja pendidikan pada anak laki-laki maupun anak perempuannya di bawah rata-rata propinsi. Namun demikian, manakala ada keterbatasan sumberdaya (dana, manusia), perlu memprioritaskan kabupaten/kota yang tingkat kesenjangan atau indikator disparitasnya menunjukkan urutan tertinggi. Berdasar hal tersebut di bawah ini dikemukakan prioritas utama menurut tingkat kesenjangan tertinggi pada APS, APK dan APM menurut kabupaten/kota dan daerah/wilayah (perkotaan dan perdesaan).

(1) Prioritas Peningkatan APS di Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur.

a. Kelompok umur 7-12 tahun:

Baik di perkotaan maupun di perdesaan, prioritas pada anak perempuan dan anak laki-laki diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan kesenjangan tertinggi, yaitu di atas 2 persen. Pada anak perempuan, di perkotaan, diprioritaskan bagi Kabupaten-kabupaten Cianjur, Indramayu, dan Bekasi, sementara di perdesaan di Kabupaten Kuningan. Bagi anak laki-laki diberikan kepada Kabupaten-kabupaten Purwakarta, Sumedang, Kuningan, dan Cirebon

untuk di perkotaan, sementara di perdesaan di Kota Bogor serta Kabupaten-kabupaten Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, dan Bogor.

a. Kelompok umur 13 – 15 tahun:

Baik di perkotaan maupun di perdesaan, prioritas pada anak perempuan dan anak laki-laki juga diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan kesenjangan tertinggi, yaitu di atas 2 persen. Pada anak perempuan, di perkotaan, diprioritaskan bagi Kabupaten-kabupaten Kabupaten-kabupaten Indramayu, Majalengka, Karawang, dan Bekasi; sementara di perdesaan di Tasikmalaya, Purwakarta, dan Cianjur. Pada anak laki-laki, di perkotaan, untuk Kabupaten-kabupaten Cianjur, Kuningan, Garut, Bandung, Purwakarta, dan Cirebon; sementara di perdesaan Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cirebon.

b. Kelompok umur 16-18 tahun:

Di perkotaan, diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan kesenjangan tertinggi, dengan disparitas di atas 15 persen. Pada anak perempuan prioritas diberikan untuk Kabupaten-kabupaten Sumedang, Garut, Kuningan, Karawang, Sukabumi, dan Indramayu, sementara pada anak laki-laki hanya di Kabupaten Sukabumi. Adapun di perdesaan, prioritas diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan kesenjangan tertinggi, yakni dengan disparitas di atas 10 persen. Pada anak perempuan prioritas diberikan untuk Kabupaten-kabupaten Subang, Kab. Bekasi, Kab. Purwakarta, Kab. Tasikmalaya, sementara pada anak laki-laki hanya di Kabupaten Cirebon.

d. Kelompok Umur 19 – 24 tahun

Baik di perkotaan maupun di perdesaan prioritas sebaiknya diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan kesenjangan tinggi, dengan disparitas di atas 3 persen Pada anak perempuan, di perkotaan prioritas diberikan untuk Kabupaten-kabupaten Karawang, Sukabumi, Indramayu, Bandung, Cirebon, Garut, Cianjur, Majalengka dan Subang, sementara di perdesaan di kabupaten-kabupaten Garut, Karawang, Bogor, dan Sukabumi. Pada anak laki-laki, di perkotaan, diprioritaskan di Kabupaten Ciamis, Kota Sukabumi, dan Kota Cirebon, sementara di perdesaan hanya di Kabupaten Subang.

(2) Prioritas Peningkatan APK dan APM di Kabupaten/Kota Menurut Tingkat Pendidikan .

a. Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar

*Angka Partisipasi Kasar (APK).* Baik di perkotaan maupun pedesaan, baik pada anak perempuan dan laki-laki sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten/Kota dengan tingkat kesenjangan (disparitas) di atas 5 persen. Pada anak perempuan, di perkotaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten-kabupaten Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu dan Ciamis serta di Kota Bekasi dan Kota Bandung; sementara di perdesaan hanya di Kabupaten Kuningan. Adapun pada anak laki-laki, di perkotaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten-kabupaten Purwakarta, Bogor, Kuningan, Majalengka, Subang, Karawang, dan Kota Bogor; sementara di perdesaan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

*Angka Partisipasi Murni (APM).* Seperti halnya APK, peningkatan APM bagi anak perempuan dan laki-laki, di perkotaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten/Kota dengan tingkat kesenjangan di atas 5 persen, sementara di perdesaan dengan tingkat kesenjangan 4 persen. Di perkotaan, pada anak perempuan, sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten-kabupaten Subang, Cianjur, dan Indramayu; sementara di perdesaan di Kabupaten Indramayu. Pada anak laki-laki, di perkotaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten Purwakarta, sementara di perdesaan di Kota Bogor dan Kabupaten Bandung.

b. Jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)

*Angka Partisipasi Kasar (APK).* Baik di perkotaan maupun pedesaan, baik pada anak perempuan dan laki-laki sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten/Kota dengan tingkat kesenjangan (disparitas) di atas 10 persen. Pada anak perempuan, di perkotaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten-kabupaten Bogor, Majalengka, Indramayu, Karawang serta Kota Bogor, dan Kota Bekasi; sementara di perdesaan hanya di Kabupaten- Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya. Adapun pada anak laki-laki, di perkotaan sebaiknya di Kabupaten-kabupaten Sumedang, Ciamis, Cirebon dan Cianjur, serta Kota Cirebon; sementara di perdesaan di Kabupaten-kabupaten Karawang, Bandung, dan Cirebon.

*Angka Partisipasi Murni (APM).* Peningkatan APM bagi anak perempuan dan laki-laki, di perkotaan dan perdesaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten/Kota dengan tingkat kesenjangan di atas 10 persen. Di perkotaan,

pada anak perempuan, sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten-kabupaten Indramayu, Bekasi dan Sukabumi; sementara di perdesaan di Kabupaten Sukabumi dan Bogor. Pada anak laki-laki, di perkotaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten-kabupaten Kuningan, Cirebon, Cianjur, Sumedang, Purwakarta, dan Garut; sementara di perdesaan di. Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bandung..

c. Jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

*Angka Partisipasi Kasar (APK).* Baik di perkotaan maupun pedesaan, baik pada anak perempuan dan laki-laki sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten/Kota dengan tingkat kesenjangan (disparitas) di atas 10 persen. Pada anak perempuan di perkotaan, prioritas sebaiknya diberikan di Kabupaten-kabupaten Sumedang, Indramayu, Kuningan, Sukabumi, Karawang, Purwakarta, Garut, Cirebon , Majalengka dan Cianjur; sementara di perdesaan di Kabupaten Purwakarta dan Bogor. Adapun pada anak laki-laki, di perkotaan diprioritaskan bagi Kabupaten Bogor saja dan untuk di perdesaan di Kota Bogor.

*Angka Partisipasi Murni (APM).* Sebagaimana APK, peningkatan APM bagi anak perempuan dan laki-laki, di perkotaan dan perdesaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten/Kota dengan tingkat kesenjangan di atas 10 persen. Di perkotaan, pada anak perempuan, sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten-kabupaten Sumedang, Karawang, Sukabumi, Indramayu, Purwakarta, Kuningan, Garut, Cirebon, dan Majalengka; sementara di perdesaan di Kabupaten Subang, Bekasi dan Purwakarta. Pada anak laki-laki, di perkotaan sebaiknya diprioritaskan di Kota Sukabumi, sementara di perdesaan di. Kota Bogor.

d. Jenjang Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK). Baik di perkotaan maupun pedesaan, baik pada anak perempuan dan laki-laki sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten/Kota dengan tingkat kesenjangan (disparitas) di atas 3 persen. Pada perempuan di perkotaan, prioritas sebaiknya diberikan di Kabupaten-kabupaten Karawang , Indramayu, Bandung, Majalengka, Bekasi, Sukabumi, dan Cirebon.; sementara di perdesaan di Kabupaten-kabupaten Tasikmalaya, Bandung dan Bogor. Adapun pada anak laki-laki, di perkotaan diprioritaskan bagi Kabupaten-kabupaten Purwakarta, Sukabumi, dan Cirebon, sementara di

perdesaan tidak satu kabupaten/kota pun yang tingkat kesenjangannya di atas 3 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM). Sebagaimana APK, peningkatan APM bagi anak perempuan dan laki-laki, di perkotaan dan perdesaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten/Kota dengan tingkat kesenjangan di atas 3 persen. Di perkotaan, pada anak perempuan, sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten-kabupaten Karawang, Sukabumi, Indramayu, Tasikmalaya,Bandung, Cirebon dan Majalengka; sementara di perdesaan di Kabupaten Bandung. Pada anak laki-laki, di perkotaan sebaiknya diprioritaskan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang serta Kota-kota Sukabumi dan Cirebon, sementara di perdesaan tidak ada yang di atas 3 persen.

3. Target pencapaian APS, APM dan APK untuk setiap sasaran Kabupaten/Kota tersebut di atas, agar supaya paling sedikit sama dengan APS, APK, dan APM tingkat Propinsi pada tahun 2003 dapat dilihat pada Lampiran 42 sampai dengan 47. Sebagai contoh, berdasar data pada Lampiran 42 untuk mengejar ketertinggalan APS anak laki-laki pada kelompok umur 7-12 tahun di wilayah perkotaan, khususnya untuk Kabupaten Cirebon, perlu meningkatkan APS sebesar 3,57 persen, sementara untuk Kabupaten Purwakarta sebesar 3.44 persen. Adapun pada anak perempuan, di Kabupaten Cianjur dan Kuningan berturut-turut harus mengejar ketertinggalan sebesar 15.78 persen dan 19.11 persen. Demikian selanjutnya untuk di perdesaan serta untuk APS kelompok umur selanjutnya, serta untuk APK dan APM di perkotaan dan perdesaan.
4. Masih relatif kuatnya segregasi gender dalam pendidikan kejuruan, simana anak perempuan dominan pada jurusan atau program studi yang berdomain "reproduktif", sebaliknya pada siswa laki-laki, perlu diusahakan agar lebih proporsional. Upaya untuk itu antara lain dengan memberi besiswa pada siswa perempuan untuk belajar pada SMK dengan keahlian pada domain "laki-laki" serta memberikan edukasi mengenai pentingnya perempuan menguasai teknologi yang salama ini dianggap domainnya laki-laki.
5. Berdasarkan kinerja Angka Melek Huruf penduduk umur 10 tahun ke atas, maka pencapaian kinerja AMH Propinsi dapat dijadikan basis penetapan prioritas AMH Kabupaten/Kota. Oleh karena AMH perempuan jauh lebih rendah dibanding AMH laki-laki, maka prioritas sasaran Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi kesetaraan dan tingkat kesenjangan gender AMHnya

adalah untuk kelompok penduduk perempuan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di wilayah perkotaan adalah di Kabupaten-kabupaten Indramayu, Karawang, Cirebon, Subang, Bekasi, Kuningan, Majalengka, Bogor, dan Cianjur. Adapun untuk di perdesaan di Kabupaten-kabupaten Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Kuningan, Cirebon dan Bogor.

### 9.2.1.2. Pendidikan Non-formal (Pendidikan Luar Sekolah)

1. Perlu ada komunikasi antara sekolah formal untuk semua jenjang pendidikan dengan pihak Dinas Pendidikan, khususnya Sub-dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam hal siswa putus sekolah, dan/atau tidak melanjutkan pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini penting untuk mengantisipasi perencanaan dan pelaksanaan program-program PLS bagi mereka yang terpaksa putus sekolah dan/atau tidak melanjutkan sekolah, baik untuk Paket Kejar A, B maupun C. Di pihak lain dalam hal program-program pendidikan non-formal (PLS), untuk masa-masa mendatang perlu melaksanakan manajemen sistem informasi, setidaknya untuk peserta didik menurut jenis kelamin dan sebarannya di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini diperlukan untuk menganalisis kesetaraan dan kesenjangan gender menurut tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
2. Adanya kesenjangan yang besar dengan dominasi perempuan dalam program KBU dan Magang/Beasiswa, perlu diikuti dengan pengalokasian kepada peserta atau warga belajar laki-laki secara proporsional .
3. Perlu ada studi analisis kebijakan untuk Pengarusutamaam Gender dalam Pendidikan Luar Sekolah, oleh karena data dan informasi yang dianalisis dalam studi ini baru dilakukan pada tingkat propinsi, belum menurut kabupaten/kota dan wilayah perkotaan dan perdesaan. Studi ini juga penting untuk melihat sejauhmana efektivitas penyelenggaraan PLS dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan gender.
4. Penyusunan formulir atau kuesioner baku untuk pelaporan data kependidikan (formal dan PLS) yang responsif gender untuk mendukung Manajemen Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Gender, baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota serta meningkatkan sinergi semua sub-dinas di lingkungan Dinas Pendidikan , baik pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

### 9.2.2. Mutu dan Relevansi Pendidikan

1. Untuk mengatasi tingginya persentase siswa perempuan yang mengulang sebaiknya dilakukan penelitian studi kasus, untuk memperoleh pemahaman tentang sebab-sebabnya disertai dengan upaya pemberian pendalaman materi bahan ajar sesuai permasalahan. Di samping itu, kepada mereka sebaiknya diberikan pelajaran tambahan atau "pendalaman materi" agar dapat meningkatkan kemampuan peningkatan kognisi mereka akan mata ajaran yang menjadi kelemahan mereka. Manakala siswa perempuan yang mengulang itu disebabkan oleh karena harus berperan membantu ekonomi keluarga, kepada mereka sebaiknya diberikan beasiswa siswa sekolah dan kepada orangtua siswa tersebut, khususnya yang tergolong miskin, termasuk keluara/rumahtangga yang dikepalai perempuan diberikan bantuan modal berusaha atau pelatihan kecakapan hidup agar tidak mengganggu konsentrasi anaknya yang sedang sekolah. Hal yang sama juga diberikan pada kasus .
2. Demikian halnya bagi anak laki-laki yang putus sekolah. Kepada mereka sebaiknya segera dimotivasi untuk mengikuti Paket Belajar A, B dan C disertai dengan pemberian bea siswa dan/atau modal untuk menciptakan/mengembangkan usaha ekonomis produktif berskala kecil atau mikro atau dilibatkan dalam pelatihan ketrampilan kecakapan (life skill based training) sesuai dengan keunggulan lokal . Di pihak lain, oleh karena persentase lulusan siswa laki-laki juga lebih rendah dibanding siswa perempuan, kepada mereka sebaiknya diberikan pelajaran tambahan atau "pendalaman materi" agar dapat meningkatkan kemampuan peningkatan kognisi mereka akan mata ajaran yang menjadi kelemahan mereka.
3. Untuk menyusun materi dan ilustrasi bahan ajar yang responsif gender baik pada bidang IPS dan IPA, serta untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai penulis, ilustrator, dan perancang perwajahan buku bahan ajar standar nasional maupun muatan lokal yang responsif gender, sebaiknya dilakukan dengan cara :
   a. Meningkatkan frekuensi pelatihan penulisan dan pengilustrasian materi bahan ajar yang responsif gender bagi para penulis, ilustrator, dan perancang perwajahan buku bahan ajar baik laki-laki maupun perempuan, yang ada di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Selain itu,

memberikan pelatihan kepada perempuan yang potensial dan berminat menjadi penulis dan ilustrator bahan ajar yang responsif gender dengan proporsi yang lebih besar dibanding laki-laki.

b. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas beragam pelatihan PUG dalam buku ajar juga sebaiknya melibatkan *stakeholder* di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, seperti BP-PLSP Regional II Jayagiri baik sebagai penyelenggara dan fasilitator, serta para penulis dan ilustrator yang telah menyusun buku ajar yang responsif gender untuk berbagi pengalaman dalam penyusunan buku ajar yang berwawasan gender.

2. Untuk dapat mengetahui mutu dan relevansi berkenaan gender dan hasil pendidikan formal, diperlukan manajemen sistem informasi data Nilai UAN pada setiap mata ajaran untuk semua jenjang pendidikan yang terpilah menurut jenis kelamin, kabupaten/kota, jenis/status sekolah, dan wilayah perdesaan dan perkotaan.
3. Meningkatkan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi lain yang relevan dan berkompeten untuk menjadi fasilitator dan atau pendamping baik pada pendidikan formal (mencegah angka mengulang dan putus sekolah yang tinggi) serta pada program/kegiatan PLS.

### 9.2.3. Manajemen Pendidikan

1. Meningkatkan partisipasi dan ketrampilan perempuan dalam manajemen pendidikan formal dan non-formal dengan cara melaksanakan KIE tentang manajemen pendidikan formal kepada para guru/staf pengajar perempuan pada setiap jenjang pendidikan melalui beragam metode dan teknik pengajaran, diantaranya pelatihan kepemimpinan dan manajerial pendidikan. Bersamaan dengan itu, juga komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) penyadaran akan hak dan kewajiban yang sama antara pendidik laki-laki maupun perempuan.
2. Menyelenggarakan *capacity building*, baik itu sosialisasi, pelatihan dan *roundtable discussion* berkenaan PUG dalam bidang pendidikan pada setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, dengan memberikan prioritas kepada kabupaten/kota yang kinerja pendidikannya menunjukkan ketidaksetaraan dan kesenjangan gender relatif tinggi , baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.

3. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) dengan intensitas tinggi untuk meningkatkan peluang perempuan berpendidikan tinggi untuk berpartisipasi dalam beragam aspek berkenaan dengan pengelolaan PLS berbasis masyarakat, seperti PKBM, Keaksaraan Fungsional dan lainnya .
4. Meningkatkan sensitivitas gender di kalangan penentu atau pengambil keputusan yang berkenaan kebijakan, program dan proyek PUG bidang pendidikan, baik pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota .
5. Meningkatkan kinerja POKJA PUG Pendidikan di tingkat Propinsi serta membentuk dan/atau meningkatkan kinerja POKJA PUG Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang beranggotakan Dinas Pendidikan dan *stakeholders* termasuk PSW dan atau Pusat Studi lain di lingkungan perguruan tinggi lokal yang bertanggung-jawab dan mampu menciptakan sinergi PUG Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

### 9.3. Meningkatkan Diseminasi dan Advokasi Informasi Kinerja Pembangunan Pendidikan

1. Menyosialisasikan rencana dan/atau capaian PUG Bidang Pendidikan, baik pada pendidikan formal maupun PLS melalui jalur struktural dan beragam media (massa) serta kelembagaan LSM dan PSW, khususnya "*Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat*", sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dari beragam lapisan dan golongan akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan di Jawa Barat.
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi mengenai KKG Bidang Pendidikan beragam kelembagaan pendidikan formal dan non formal, termasuk pesantren dan kelompok pengajian atau majlis talim, dan PKK untuk mengakselerasai Program PUG bidang Pendidikan, tak hanya Wajar Dikdas, tapi juga PLS dan jenjang pendidikan formal lanjutan serta tinggi.
3. Melaksanakan lomba penulisan ilmiah bagi pelajar dan mahasiswa mengenai KKG Bidang Pendidikan di Jawa Barat bekerjasama dengan media massa lokal, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

## DAFTAR PUSTAKA


Anonymous, 2000. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Republik Indonesia. Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Sekretariat Jenderal MPR, RI, Jakarta.

_____, 2001. Panduan Pelaksanaan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.

Badan Perencanaan Daerah Propinsi Jawa Barat, 2002. Rencana Pembangunan Regional Makro Pendidikan Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik, 2002a. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002. Buku-1. Propinsi., Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2002b. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002. Buku-2. Kabupaten, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2003a. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003 Buku-1. Propinsi., Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2003b. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003. Buku-2. Kabupaten, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, 2000. Data Susenas Jawa Barat 2000.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, 2001. Data Susenas Jawa Barat 2001.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, 2002. Data Susenas Jawa Barat 2002.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, 2003. Data Susenas Jawa Barat 2003.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, 2003. Jawa Barat Dalam Angka 2002.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2003. Indramayu Dalam Angka 2002.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi , 2003. Indramayu Dalam Angka 2002.

Badan Pusat Statistik-BAPPENAS-UNDP, 2001. Laporan Pembangunan Manusia. 2001. Menuju Konsensus Baru. Demokrasi dan Pembangunan manusia di Indonesia. Katalog BPS : 1164.

BPS Statistics Indonesia – BAPPENAS - UNDP, 2004. Indonesia Human Development Report 2004. The Economics of Democracy. Financing Human Development in Indonesia.. Katalog BPS : 1164.

Badan Pusat Statistik, 2003. Statistik Pendidikan 2003. Survei Sosial Ekonomi Nasional. BPS, Jakarta. Katalog BPS :4402

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Acuan Penyusunan Bahan Pelajaran Responsif Gender. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Direktorat Pendidikan Masyarakat. Jakarta.

_____, 2003. Pedoman Penulisan Bahan Ajar Berwawasan Gender. Proyek Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Jakarta.

_____, 2004. Pendidikan Untuk Semua (PUS). Pedoman Untuk Menyiapkan Rencana PUS yang Responsif Gender. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Direktorat Pendidikan Masyarakat. Jakarta.

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2003. Profil Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Barat. Sub-dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Bandung.

_____, 2003. Position Paper Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan dengan Fokus Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat.

Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Propinsi Jawa Barat. 2004. Analisis Situasi Kondisi serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS).

International Labour Office, 2000. Gender, Poverty and Employment : Turning Capabilities into Entitlements. Geneva.

Kelompok Kerja Pengembang/Tim Perekayasa Kurikulum/GBPP 1994 Muatan Lokal Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2001. Ketrampilan Tata Busana untuk SLTP Kelas 1, Cawu 1, 2 dan 3. Rakaditu, Jakarta.

Kelompok Kerja Pengembang/Tim Perekayasa Kurikulum/GBPP 1994 Muatan Lokal Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, 1998. Ketrampilan Tata Busana untuk SLTP Kelas 2, Cawu 1, 2 dan 3. Rakaditu, Jakarta.

Kelompok Kerja Pengembang/Tim Perekayasa Kurikulum/GBPP 1994 Muatan Lokal Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, 1998. Ketrampilan Tata Busana untuk SLTP Kelas 3, Cawu 1, 2 dan 3. Rakaditu, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1958. Skema Pengertian-pengertian Baru Untuk Menelaah Sistem Kekerabatan, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Yogyakarta.

Krishnayani Prawira Winata, A. Olim, Y. A. Dharma, M. Purwasasmita, S. Supiarti, dan D.Hardiyana,2003. Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Barat. Pusat Studi Peranan Wanita, Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Mugniesyah, S.S.S. 2004. Profil Gender Dalam Pendidikan Luar Sekolah di Propinsi Jawa Barat. Makalah dipresentasikan pada Capacity Building Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Di Propinsi Jawa Barat, Lembang-Bandung.

Muthali'in, Ahmad. 2001. Bias Gender dalam Pendidikan. Muhammadiyah University, Surakarta.

Pemerintah Kabupaten Indramayu, 2003. Pendidikan Budi Pekerti Untuk SMU/SMK/MA Kelas I. INKA, Indramayu.

Pemerintah Kabupaten Indramayu, 2003. Pendidikan Budi Pekerti Untuk SMU/SMK/MA Kelas II. INKA, Indramayu.

Pemerintah Kabupaten Indramayu, 2003. Pendidikan Budi Pekerti Untuk SMU/SMK/MA Kelas III. INKA, Indramayu.

POKJA PUG Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2004. Kondisi Pendidikan Berwawasan Gender di Jawa Barat. Disajikan dalam Temu Koordinasi PUG Bidang Pendidikan, Solo 2004.

Pusat Studi Wanita Universitas Nasional Jakarta. 2002. Studi Analisis Bahan Ajar Berprespektif Gender, Jakarta.

Rosalin, L.N., Soedarti S., Yulfita R., Elizabeth C., dan Hertomo H., 2001. Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan Pembangunan.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Women"s Support Project CIDA, Jakarta.

Sardjunani, N.2004. Disparitas Gender dalam Pendidikan. Makalah Disajikan pada Temu Konsultasi di Solo 23-27 April 2004. Bappenas RI.

Soepomo, 1982. Hukum Perdata Adat Jawa Barat. Penerbit IKAPI.

Surbakti, S., Y. Rahardjo, L.N.Rosalin, E. Carriere, A.Ahnaf, N.Iriana, 2001. Indikator Gender untuk Perencanaan Pembangunan. Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan Women's Support Project II-CIDA

Tim Penulis Bahasa Indonesia. 2004. Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 1. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tim Penulis Bahasa Indonesia, 2004. Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 2. Remaja Rosdakarya, Bandung

_____, 2004. Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 3. Remaja Rosdakarya, Bandung

_____, 2004. Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 4. Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, 2004. Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 5. Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, 2004. Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 6. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tim Penulis Pengetahuan Sosial, 2004. Tangkas Pengetahuan Sosial SD Kelas 2. Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, 2004. Tangkas Pengetahuan Sosial SD Kelas 3. Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, 2004. Tangkas Pengetahuan Sosial SD Kelas 5. Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, 2004. Tangkas Pengetahuan Sosial SD Kelas 6. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tim Penyusun Buku Bahasa dan Sastra Indramayu, 2000. Gelis Pinter Maca Lan Nulis Kangge Sekolah Dasar Kelas 1. Dinamika, Cirebon.

_____, 1995. Gelis Pinter Maca Lan Nulis Kangge Sekolah Dasar Kelas 2. Yudhistira, Jakarta.

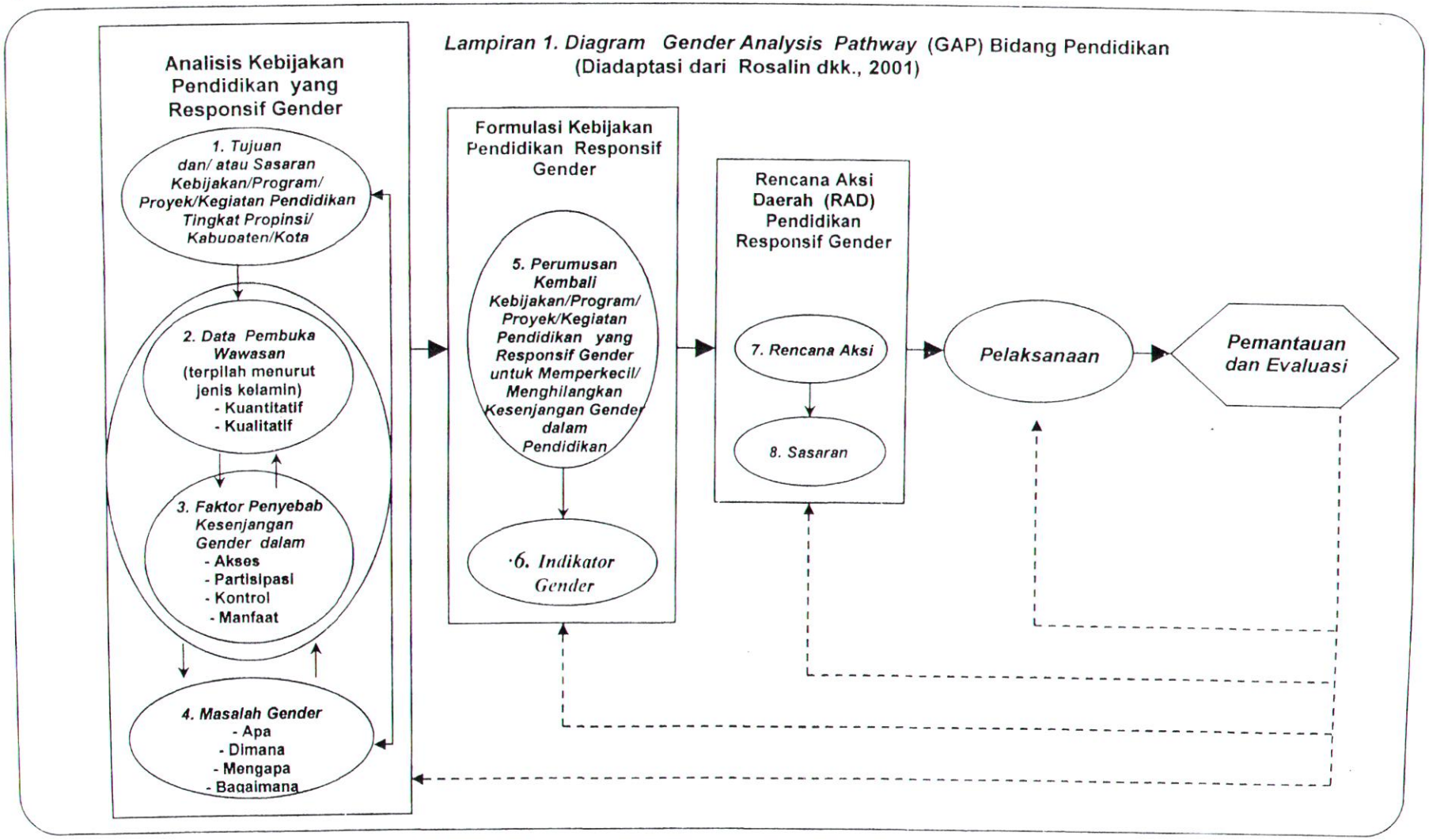
_____, 2000. Wulang Basa Kangge Sekolah Dasar Kelas 3. Dinamika, Cirebon.

_____, 1995. Wulang Basa Kangge Sekolah Dasar Kelas 4. Yudhistira, Jakarta.

_____, 1995. Wulang Basa Kangge Sekolah Dasar Kelas 5. Yudhistira, Jakarta.

_____, 2000. Wulang Basa Kangge Sekolah Dasar Kelas 6. Dinamika, Cirebon.

*Lampiran 1. Diagram Gender Analysis Pathway* (GAP) Bidang Pendidikan
(Diadaptasi dari Rosalin dkk., 2001)



**Lampiran 2. Penghitungan Angka Partisipasi Siswa Dalam Pendidikan Formal**

$$APS_{7\text{-}12} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 yang sedang sekolah di SD+MI+SLTP+MTs}}{\text{Jumlah penduduk 7 – 12 tahun}}$$

$$APS_{13\text{-}15} = \frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 yang sedang sekolah di SD+MI+SLTP+MTs+SLTA+MA}}{\text{Jumlah penduduk 13 – 15 tahun}}$$

$$APS_{16\text{-}18} = \frac{\text{Jumlah anak usia 16-18 yang sedang sekolah di SLTP+MTs+SLTA+MA}}{\text{Jumlah penduduk 16 – 18 tahun}}$$

$$APK_{SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa SD + MI}}{\text{Jumlah penduduk 7 – 12 tahun}}$$

$$APK_{SLTP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa SLTP + MTs}}{\text{Jumlah penduduk 13 – 15 tahun}}$$

$$APK_{SLTA\ (SMU+SMK+MA)} = \frac{\text{Jumlah siswa SLTA (SMU+SMK+MA)}}{\text{Jumlah penduduk 16 – 18 tahun}}$$

$$APM_{SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa SD + MI yang berusia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk 7 – 12 tahun}}$$

$$APM_{SLTP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa SLTP + MTs yang berusia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk 13 – 15 tahun}}$$

$$APM_{SLTA\ (SMU/SMK/MA)} = \frac{\text{Jumlah siswa SLTA (SMU+SMK+MA) yang berusia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk 16 – 18 tahun}}$$

Lampiran 3. Penduduk Propinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2002 dan Tahun 2003

| No | Kabupaten/ Kota | Tahun 2002 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-6 Tahun | | 7-12 Tahun | | 13-15 Tahun | | 16-18 Tahun | | 19-24 Tahun | | 25+ Tahun | | Jumlah |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| | | Tahun 2002 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kab. Bogor | 8.4 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 4.8 | 5.5 | 23.6 | 21.6 | 3599462 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 25.7 | 24.8 | 2126404 |
| 3 | Kab. Cianjur | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 3.0 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.4 | 4.5 | 25.9 | 24.8 | 1993727 |
| 4 | Kab. Bandung | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 6.5 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 4.7 | 5.7 | 25.2 | 24.7 | 4335578 |
| 5 | Kab. Garut | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 4.7 | 4.6 | 23.9 | 24.2 | 2101534 |
| 6 | Kab. Tasikmalaya | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 26.1 | 27.7 | 2103591 |
| 7 | Kab. Ciamis | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 5.2 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 28.8 | 31.2 | 1638988 |
| 8 | Kab. Kuningan | 6.5 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 26.1 | 28.3 | 998484 |
| 9 | Kab. Cirebon | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 3.4 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 5.6 | 5.4 | 24.3 | 25.4 | 1977828 |
| 10 | Kab. Majalengka | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 5.1 | 5.3 | 27.0 | 28.4 | 1134202 |
| 11 | Kab. Sumedang | 7.0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 5.4 | 5.7 | 27.3 | 28.0 | 991467 |
| 12 | Kab. Indramayu | 7.0 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 5.0 | 5.7 | 26.7 | 26.6 | 1610745 |
| 13 | Kab. Subang | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 4.8 | 29.6 | 29.6 | 1352354 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 5.5 | 5.3 | 25.1 | 25.3 | 724560 |
| 15 | Kab. Karawang | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.3 | 5.8 | 26.3 | 25.7 | 1837930 |
| 16 | Kab. Bekasi | 7.6 | 7.0 | 8.4 | 5.8 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 24.9 | 23.6 | 1786709 |
| 17 | Kota Bogor | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 5.7 | 6.9 | 24.7 | 24.8 | 891880 |
| 18 | Kota Sukabumi | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 5.1 | 6.1 | 26.1 | 26.4 | 261861 |
| 19 | Kota Bandung | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 7.3 | 7.0 | 26.5 | 26.9 | 2142914 |
| 20 | Kota Cirebon | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 25.4 | 28.0 | 274542 |
| 21 | Kota Bekasi | 4.9 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 3.7 | 2.4 | 3.7 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 26.3 | 25.0 | 1809306 |
| 22 | Kota Depok | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 6.5 | 6.4 | 25.9 | 25.8 | 1220817 |
| | ***Jawa Barat*** | *7.0* | *6.4* | *6.8* | *6.3* | *3.0* | *2.7* | *3.1* | *2.9* | *5.0* | *5.3* | *25.8* | *25.7* | *36914883* |
| | | Tahun 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kab. Bogor | 8.4 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 5.1 | 6.4 | 23.4 | 21.4 | 3791781 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.2 | 25.9 | 25.2 | 2168569 |
| 3 | Kab. Cianjur | 6.8 | 7.0 | 7.9 | 6.9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 25.5 | 25.3 | 2041131 |
| 4 | Kab. Bandung | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 5.7 | 5.2 | 25.4 | 25.2 | 4504387 |
| 5 | Kab. Garut | 8.2 | 7.3 | 7.6 | 6.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 24.0 | 23.8 | 2187882 |
| 6 | Kab. Tasikmalaya | 6.7 | 5.2 | 5.1 | 6.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 4.4 | 4.7 | 27.3 | 27.9 | 2153962 |
| 7 | Kab. Ciamis | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 3.8 | 4.4 | 29.4 | 31.5 | 1664869 |
| 8 | Kab. Kuningan | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 25.9 | 28.6 | 1034394 |
| 9 | Kab. Cirebon | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 6.2 | 5.3 | 25.1 | 24.6 | 2038263 |
| 10 | Kab. Majalengka | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 4.9 | 4.6 | 28.0 | 28.5 | 1153442 |
| 11 | Kab. Sumedang | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 5.6 | 5.5 | 28.2 | 28.2 | 1014319 |
| 12 | Kab. Indramayu | 7.1 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 4.5 | 4.7 | 27.1 | 26.9 | 1653146 |
| 13 | Kab. Subang | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 5.4 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 4.0 | 29.2 | 30.0 | 1371005 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 7.4 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 5.4 | 6.0 | 26.1 | 25.9 | 745917 |
| 15 | Kab. Karawang | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 6.0 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 2.4 | 4.0 | 5.1 | 27.2 | 25.8 | 1882025 |
| 16 | Kab. Bekasi | 6.2 | 5.9 | 7.6 | 7.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 5.3 | 5.1 | 25.9 | 25.4 | 1858925 |
| 17 | Kota Bogor | 5.1 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 6.4 | 5.7 | 25.5 | 25.6 | 792657 |
| 18 | Kota Sukabumi | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 5.9 | 5.4 | 26.7 | 27.3 | 267807 |
| 19 | Kota Bandung | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 4.9 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 7.0 | 7.2 | 26.5 | 26.2 | 2228268 |
| 20 | Kota Cirebon | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 5.1 | 24.8 | 27.2 | 272673 |
| 21 | Kota Bekasi | 5.6 | 4.7 | 7.1 | 6.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 5.8 | 25.8 | 25.1 | 1845005 |
| 22 | Kota Depok | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 7.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 6.4 | 6.5 | 25.5 | 25.1 | 1309995 |
| | ***Jawa Barat*** | *6.7* | *6.4* | *6.7* | *6.3* | *3.0* | *2.8* | *3.1* | *2.8* | *5.1* | *5.3* | *26.0* | *25.8* | *37980422* |



at Studi Wanita-LPPM IPB bekerjasama dengan Proyek PPMPKPUG, Depdiknas, 2004

**Lampiran 4. Angkatan Kerja di Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 dan 2002**

| Propinsi/Kabupaten/ Kota | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | | Pengangguran Terbuka (%) | | Jam Kerja Tenaga Kerja | | | | Tenaga Kerja di sektor informal (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1999 | | 2002 | | | |
| | | | | | <14 jam per minggu (%) | <35 jam per minggu (%) | <14 jam per minggu (%) | <35 jam per minggu (%) | | |
| | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | | | | | 1999 | 2002 |
| 03. Bogor | 59.2 | 62.9 | 12.4 | 13.3 | 8.2 | 28.5 | 5.63 | 26.61 | 46.8 | 54.9 |
| 04. Sukabumi | 64.6 | 65.0 | 5.9 | 11.1 | 9.6 | 50.1 | 5.95 | 42.28 | 61.6 | 65.7 |
| 05. Cianjur | 68.9 | 69.9 | 10.6 | 8.4 | 11.2 | 56.8 | 8.34 | 47.86 | 66.2 | 78.9 |
| 06. Bandung | 59.3 | 65.5 | 9.9 | 15.5 | 4.1 | 25.3 | 5.88 | 22.46 | 40.5 | 45.1 |
| 07. Garut | 60.6 | 67.7 | 7.0 | 11.1 | 9.1 | 44.6 | 4.14 | 34.53 | 71.4 | 69.3 |
| 08. Tasik malaya | 68.7 | 67.8 | 6.0 | 12.0 | 12.2 | 44.7 | 7.87 | 35.24 | 58.3 | 67.6 |
| 09. Ciamis | 66.5 | 70.3 | 3.1 | 8.4 | 10.1 | 46.0 | 8.92 | 43.77 | 65.8 | 77.7 |
| 10. Kuningan | 62.0 | 65.3 | 6.2 | 10.4 | 17.3 | 48.5 | 20.85 | 51.17 | 84.0 | 73.8 |
| 11. Cirebon | 63.0 | 64.9 | 9.9 | 11.5 | 11.9 | 35.3 | 9.98 | 40.05 | 52.0 | 75.1 |
| 12. Majalengka | 67.6 | 68.5 | 6.6 | 9.2 | 13.3 | 46.8 | 9.59 | 44.97 | 68.5 | 67.8 |
| 13. Sumedang | 61.8 | 66.8 | 7.6 | 12.4 | 14.8 | 46.8 | 14.60 | 42.97 | 72.1 | 69.1 |
| 14. Indramayu | 62.6 | 66.0 | 4.5 | 9.3 | 18.4 | 50.1 | 12.85 | 40.62 | 61.2 | 74.6 |
| 15. Subang | 65.2 | 63.7 | 6.2 | 9.7 | 7.7 | 38.7 | 8.42 | 42.49 | 66.9 | 80.4 |
| 16. Purwakarta | 66.0 | 66.2 | 7.7 | 10.4 | 11.7 | 40.8 | 7.28 | 35.13 | 63.3 | 56.0 |
| 17. Karawang | 60.1 | 61.0 | 11.6 | 15.2 | 9.9 | 37.8 | 8.11 | 31.33 | 67.2 | 59.0 |
| 18. Bekasi | 54.2 | 58.8 | 8.9 | 13.8 | 1.4 | 21.6 | 5.09 | 13.99 | 61.8 | 43.8 |
| 71. Bogor | 52.1 | 57.0 | 11.9 | 15.2 | 2.7 | 13.2 | 1.69 | 10.33 | 43.0 | 30.4 |
| 72. Sukabumi | 58.3 | 56.1 | 20.3 | 23.1 | 4.7 | 19.4 | 3.36 | 20.91 | 49.0 | 40.2 |
| 73. Bandung | 56.7 | 58.6 | 13.4 | 15.0 | 6.6 | 21.1 | 3.54 | 15.84 | 39.1 | 35.0 |
| 74. Cirebon | 60.2 | 60.4 | 12.6 | 15.8 | 8.4 | 22.2 | 5.09 | 20.24 | 53.0 | 45.5 |
| 76. Bekasi | 55.9 | 59.7 | 13.5 | 14.7 | 2.3 | 9.7 | 2.24 | 10.89 | 59.8 | 26.5 |
| 77. Depok | - | 54.5 | - | 16.4 | - | - | 4.28 | 14.96 | - | 27.8 |
| *32. Jawa Barat* | *61.2* | *64.0* | *9.0* | *12.9* | *9.3* | *36.0* | *7.31* | *31.84* | *58.9* | *59.0* |

**Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 1996, 1999 and 2002**

| Provinsi/Kabupaten/ Kota | Umur Harapan Hidup (tahun) | | | Angka Melek Huruf (%) | | | Rata-rata Lama Sekolah (years) | | | IPM | | | Rangking IPM (Jawa-Barat) | | | Rangking IPM (Indonesia) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1996 | 1999 | 2002 | 1996 | 1999 | 2002 | 1996 | 1999 | 2002 | 1996 | 1999 | 2002 | 1996 | 1999 | 2002 | 1996 | 1999 | 2002 |
| 03. Bogor | 63.8 | 65.2 | 66.1 | 59.8 | 93.7 | 91.5 | 6.8 | 8.0 | 6.2 | 68.5 | 66.6 | 65.6 | 9 | 6 | 11 | 97 | 82 | 181 |
| 04. Sukabumi | 61.0 | 62.4 | 63.0 | 93.5 | 96.0 | 94.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 66.6 | 63.2 | 63.8 | 14 | 15 | 17 | 155 | 176 | 251 |
| 05. Cianjur | 62.2 | 63.6 | 64.1 | 94.4 | 95.6 | 95.7 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 67.6 | 63.6 | 64.5 | 11 | 14 | 15 | 128 | 167 | 223 |
| 06. Bandung | 65.2 | 66.6 | 66.8 | 92.6 | 94.7 | 97.0 | 6.6 | 7.0 | 8.1 | 69.8 | 66.6 | 68.8 | 7 | 7 | 7 | 74 | 81 | 87 |
| 07. Garut | 58.0 | 59.4 | 59.9 | 92.9 | 96.8 | 95.7 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 63.9 | 61.7 | 62.8 | 18 | 18 | 20 | 223 | 223 | 275 |
| 08. Tasikmalaya | 64.1 | 65.5 | 66.1 | 95.1 | 96.2 | 97.4 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 68.7 | 65.3 | 67.1 | 8 | 9 | 9 | 93 | 109 | 141 |
| 09. Ciamis | 62.5 | 63.9 | 64.0 | 92.4 | 93.9 | 95.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 68.5 | 64.8 | 65.3 | 10 | 11 | 13 | 100 | 127 | 194 |
| 10. Kuningan | 63.5 | 64.9 | 65.1 | 88.1 | 91.7 | 90.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 12 | 10 | 14 | 131 | 123 | 201 |
| 11. Cirebon | 61.6 | 63.0 | 63.3 | 86.2 | 86.6 | 87.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 64.6 | 61.6 | 62.4 | 17 | 19 | 21 | 200 | 227 | 282 |
| 12. Majalengka | 61.6 | 63.0 | 63.5 | 87.9 | 88.9 | 91.0 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 66.2 | 62.8 | 64.4 | 15 | 17 | 16 | 167 | 192 | 225 |
| 13. Sumedang | 65.1 | 65.5 | 66.7 | 93.1 | 95.6 | 95.3 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 70.1 | 66.6 | 67.5 | 6 | 8 | 8 | 67 | 79 | 128 |
| 14. Indramayu | 61.9 | 63.3 | 63.7 | 67.0 | 66.7 | 76.2 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 60.4 | 56.5 | 61.2 | 20 | 21 | 22 | 263 | 269 | 303 |
| 15. Subang | 63.6 | 65.0 | 65.6 | 82.4 | 86.2 | 84.2 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 65.7 | 63.1 | 63.0 | 16 | 16 | 18 | 173 | 182 | 270 |
| 16. Purwakarta | 62.1 | 63.5 | 64.1 | 90.7 | 94.5 | 94.9 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 66.8 | 64.3 | 65.6 | 13 | 13 | 12 | 148 | 144 | 185 |
| 17. Karawang | 61.0 | 62.4 | 62.9 | 80.8 | 84.8 | 87.2 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 63.4 | 60.9 | 62.9 | 19 | 20 | 19 | 231 | 237 | 272 |
| 18. Bekasi | 65.2 | 66.6 | 67.0 | 90.1 | 87.6 | 91.1 | 8.0 | 6.8 | 7.4 | 70.6 | 64.7 | 66.9 | 5 | 12 | 10 | 61 | 131 | 144 |
| 71. Bogor | 66.3 | 67.7 | 68.0 | 97.7 | 97.4 | 97.4 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 72.3 | 69.7 | 71.9 | 4 | 2 | 4 | 39 | 29 | 40 |
| 72. Sukabumi | 64.3 | 65.7 | 66.2 | 99.0 | 97.6 | 98.6 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 73.4 | 68.4 | 69.2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 49 | 82 |
| 73. Bandung | 66.8 | 68.2 | 68.8 | 97.6 | 98.3 | 98.9 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 74.3 | 70.7 | 73.0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | 24 |
| 74. Cirebon | 65.7 | 67.1 | 67.6 | 95.1 | 94.6 | 95.3 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 73.7 | 68.1 | 69.2 | 2 | 5 | 6 | 21 | 55 | 81 |
| 76. Bekasi | - | 66.6 | 68.1 | - | 97.1 | 98.0 | - | 9.4 | 10.4 | - | 68.7 | 72.8 | - | 3 | 3 | - | 43 | 26 |
| 77. Depok | - | - | 71.8 | - | - | 96.1 | - | - | 9.7 | - | - | 73.9 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| ***32. Jawa Barat*** | ***62.9*** | ***64.3*** | ***64.5*** | ***89.7*** | ***92.1*** | ***93.1*** | ***6.4*** | ***6.8*** | ***7.2*** | ***68.2*** | ***64.6*** | ***65.8*** | | | | ***14*** | ***15*** | ***17*** |

**Lampiran 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Propinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 dan 2002**

| Provinsi/Kabupaten/ Kota | Proporsi Population (%) | | | | Umur Harapan Hidup (tahun) | | | | Angka Melek Huruf (%) | | | | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | | | | Kontribusi dalam Pendapatan (%) | | | | IPG | | Rangking IPG (Jawa Barat) | | Rangking IPG (Indonesia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1999 | | 2002 | | 1999 | | 2002 | | 1999 | | 2002 | | 1999 | | 2002 | | 1999 | | 2002 | | | | | | | |
| | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 |
| 03. Bogor | 50.3 | 49.7 | 48.1 | 51.9 | 67.1 | 63.2 | 68.0 | 64.1 | 91.8 | 95.8 | 89.3 | 93.6 | 7.5 | 8.5 | 5.6 | 6.8 | 25.6 | 74.4 | 24.1 | 75.9 | 55.7 | 54.6 | 8 | 8 | 164 | 203 |
| 04. Sukabumi | 49.3 | 50.7 | 49.8 | 50.2 | 64.3 | 60.5 | 64.8 | 61.1 | 94.9 | 97.2 | 92.5 | 96.2 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 19.8 | 80.2 | 23.2 | 76.8 | 47.4 | 50.9 | 18 | 16 | 259 | 262 |
| 05. Cianjur | 49.6 | 50.4 | 47.7 | 52.3 | 65.5 | 61.7 | 65.9 | 62.1 | 93.2 | 98.1 | 93.7 | 97.6 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 26.3 | 73.7 | 24.7 | 75.3 | 53.9 | 54.6 | 14 | 9 | 195 | 207 |
| 06. Bandung | 48.7 | 51.3 | 48.8 | 51.2 | 68.3 | 64.6 | 68.7 | 64.8 | 93.1 | 96.4 | 95.8 | 98.1 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 24.5 | 75.5 | 29.4 | 70.6 | 55.9 | 61.7 | 7 | 3 | 154 | 73 |
| 07. Garut | 50.0 | 50.0 | 49.6 | 50.4 | 61.2 | 57.6 | 61.6 | 58.0 | 95.8 | 98.2 | 94.0 | 97.4 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 29.1 | 70.9 | 21.1 | 78.9 | 54.1 | 48.0 | 13 | 19 | 191 | 290 |
| 08. Tasik malaya | 50.7 | 49.4 | 49.2 | 50.8 | 67.4 | 63.6 | 67.9 | 64.1 | 95.0 | 97.5 | 95.8 | 98.9 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 25.8 | 74.2 | 21.0 | 79.0 | 54.5 | 52.4 | 12 | 13 | 186 | 239 |
| 09. Ciamis | 49.8 | 50.2 | 51.3 | 48.7 | 65.8 | 62.0 | 65.9 | 62.1 | 91.7 | 97.1 | 93.4 | 97.3 | 6.0 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 36.8 | 63.2 | 26.8 | 73.2 | 62.0 | 54.6 | 2 | 10 | 34 | 206 |
| 10. Kuningan | 50.8 | 49.2 | 50.5 | 49.5 | 66.8 | 62.9 | 66.9 | 63.1 | 87.6 | 96.1 | 86.6 | 94.6 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 24.9 | 75.1 | 24.0 | 76.0 | 53.0 | 52.2 | 15 | 15 | 206 | 242 |
| 11. Cirebon | 49.5 | 50.5 | 49.6 | 50.4 | 64.8 | 61.1 | 65.2 | 61.4 | 81.5 | 91.9 | 81.4 | 92.6 | 5.0 | 6.4 | 5.4 | 6.7 | 23.5 | 76.5 | 20.4 | 79.6 | 49.3 | 46.9 | 16 | 20 | 248 | 303 |
| 12. Majalengka | 51.4 | 48.6 | 50.2 | 49.8 | 64.8 | 61.1 | 65.4 | 61.6 | 85.1 | 93.0 | 86.7 | 95.5 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 7.0 | 22.9 | 77.1 | 22.2 | 77.8 | 48.5 | 49.9 | 17 | 17 | 251 | 277 |
| 13. Sumedang | 50.5 | 49.5 | 49.2 | 50.8 | 68.4 | 64.5 | 68.6 | 64.7 | 93.6 | 97.7 | 93.6 | 97.1 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 29.2 | 70.8 | 32.7 | 67.3 | 58.5 | 62.4 | 4 | 2 | 92 | 62 |
| 14. Indramayu | 49.1 | 50.9 | 50.3 | 49.7 | 65.1 | 61.3 | 65.6 | 61.8 | 55.2 | 78.6 | 67.4 | 85.1 | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 19.9 | 80.1 | 19.1 | 80.9 | 40.2 | 42.8 | 21 | 21 | 288 | 325 |
| 15. Subang | 50.2 | 49.8 | 50.9 | 49.1 | 66.9 | 63.1 | 67.5 | 63.6 | 80.6 | 91.9 | 79.0 | 89.6 | 4.7 | 6.0 | 4.7 | 5.9 | 29.9 | 70.1 | 27.4 | 72.6 | 55.7 | 53.0 | 9 | 12 | 162 | 229 |
| 16. Purwakarta | 48.3 | 51.7 | 49.6 | 50.4 | 65.3 | 61.5 | 65.9 | 62.1 | 91.9 | 97.1 | 92.4 | 97.4 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 7.4 | 28.5 | 71.5 | 25.8 | 74.2 | 57.1 | 55.1 | 5 | 6 | 130 | 195 |
| 17. Karawang | 50.6 | 49.4 | 49.9 | 50.1 | 64.3 | 60.5 | 64.7 | 60.9 | 80.1 | 89.3 | 83.3 | 91.1 | 4.7 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 21.9 | 78.1 | 22.5 | 77.5 | 46.1 | 49.1 | 19 | 18 | 274 | 281 |
| 18. Bekasi | 47.6 | 52.5 | 48.0 | 52.0 | 68.5 | 64.6 | 69.0 | 65.0 | 82.4 | 92.6 | 88.2 | 94.0 | 6.2 | 7.4 | 6.8 | 8.0 | 13.8 | 86.2 | 20.4 | 79.6 | 42.6 | 52.3 | 20 | 14 | 284 | 241 |
| 71. Bogor | 49.3 | 50.7 | 50.8 | 49.2 | 69.4 | 65.7 | 69.9 | 65.9 | 96.4 | 98.4 | 95.9 | 99.0 | 8.7 | 9.8 | 8.9 | 10.4 | 26.8 | 73.2 | 20.7 | 79.3 | 60.6 | 55.1 | 3 | 7 | 55 | 196 |
| 72. Sukabumi | 51.6 | 48.4 | 49.5 | 50.5 | 67.6 | 63.7 | 68.1 | 64.2 | 97.1 | 98.2 | 98.0 | 99.3 | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 9.2 | 25.5 | 74.5 | 20.0 | 80.0 | 56.4 | 53.1 | 6 | 11 | 144 | 228 |
| 73. Bandung | 50.3 | 49.7 | 49.6 | 50.4 | 70.2 | 66.2 | 70.8 | 66.8 | 97.2 | 99.5 | 98.4 | 99.4 | 9.0 | 10.3 | 9.8 | 10.9 | 28.7 | 71.3 | 26.1 | 73.9 | 62.4 | 62.6 | 1 | 1 | 29 | 59 |
| 74. Cirebon | 50.1 | 49.9 | 51.3 | 48.7 | 69.1 | 65.1 | 69.5 | 65.6 | 92.1 | 97.6 | 92.9 | 97.9 | 7.7 | 9.2 | 8.2 | 9.5 | 23.8 | 76.2 | 24.2 | 75.8 | 55.7 | 56.2 | 10 | 5 | 163 | 173 |
| 76. Bekasi | 48.6 | 51.4 | 48.4 | 51.6 | 68.5 | 64.6 | 70.0 | 66.1 | 95.7 | 98.8 | 96.7 | 99.2 | 8.7 | 10.1 | 9.8 | 11.0 | 21.7 | 78.3 | 27.8 | 72.2 | 55.4 | 61.7 | 11 | 4 | 169 | 74 |
| 77. Depok | - | - | 48.9 | 51.1 | - | - | 73.7 | 69.8 | - | - | 94.0 | 98.3 | - | - | 9.1 | 10.3 | - | - | 23.7 | 76.3 | - | - | - | - | - | - |
| *32. Jawa Barat* | *49.6* | *50.4* | *49.3* | *50.7* | *66.2* | *62.4* | *66.3* | *62.5* | *89.2* | *95.2* | *90.5* | *95.7* | *6.2* | *7.3* | *6.7* | *7.7* | *26.1* | *73.9* | *26.6* | *73.4* | *54.6* | *56.3* | | | *17* | *21* |

**Lampiran 7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Propinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 and 2002**

| Propinsi/Kabupaten /Kota | Partisipasi Perempuan di Parlemen (% dari total) | | Perempuan pekerja, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan (% dari total) | | Perempuan dalam Angkatan Kerja (% dari total) | | Penduduk Perempuan (% dari total) | | Rata-rata Upah di Sektor Non-Pertanian (ribu Rp) | | | | IDG | | Rangking IDG (Jawa Barat) | | Rangking IDG (Indonesia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1999 | | 2002 | | | | | | | |
| | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | P | L | P | L | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 |
| 03. Bogor | 11.1 | 13.3 | 33.3 | - | 30.6 | 27.9 | 0.503 | 48.1 | 413.518 | 529.725 | 489.1 | 597.9 | 49.3 | 54.7 | 6 | 3 | 83 | 29 |
| 04. Sukabumi | 6.7 | 6.7 | 31.6 | - | 31.0 | 31.1 | 0.493 | 48.8 | 163.882 | 298.283 | 332.0 | 496.8 | 38.4 | 39.8 | 17 | 18 | 246 | 241 |
| 05. Cianjur | 11.1 | 13.3 | 51.2 | - | 34.1 | 34.3 | 0.496 | 47.7 | 193.141 | 280.331 | 311.0 | 494.1 | 53.6 | 56.4 | 3 | 1 | 34 | 20 |
| 06. Bandung | 6.7 | 6.7 | 39.6 | - | 30.8 | 34.0 | 0.487 | 48.8 | 254.929 | 348.944 | 538.4 | 666.0 | 47.1 | 41.9 | 12 | 12 | 119 | 206 |
| 07. Garut | 6.7 | 6.7 | 36.1 | - | 35.5 | 35.9 | 0.500 | 49.6 | 207.675 | 277.951 | 276.0 | 579.7 | 47.9 | 40.5 | 8 | 16 | 102 | 230 |
| 08. Tasik malaya | 6.7 | 6.7 | 47.6 | - | 39.3 | 36.1 | 0.507 | 49.2 | 157.729 | 293.511 | 230.9 | 491.0 | 47.4 | 44.1 | 10 | 8 | 111 | 173 |
| 09. Ciamis | 0.0 | 0.0 | 44.9 | - | 37.6 | 37.9 | 0.498 | 51.3 | 282.839 | 292.338 | 268.7 | 448.1 | 47.7 | 41.6 | 9 | 14 | 105 | 211 |
| 10. Kuningan | 4.4 | 4.4 | 39.2 | - | 34.4 | 35.7 | 0.508 | 50.5 | 176.716 | 278.768 | 294.5 | 518.4 | 43.2 | 44.1 | 16 | 9 | 193 | 171 |
| 11. Cirebon | 8.9 | 8.9 | 34.1 | - | 33.6 | 34.2 | 0.495 | 49.6 | 164.352 | 270.918 | 242.8 | 492.0 | 45.7 | 32.0 | 14 | 21 | 143 | 304 |
| 12. Majalengka | 6.7 | 6.7 | 59.0 | - | 36.5 | 37.0 | 0.514 | 50.2 | 176.032 | 340.295 | 230.9 | 477.0 | 43.8 | 42.7 | 15 | 11 | 177 | 197 |
| 13. Sumedang | 15.6 | 8.9 | 40.0 | - | 33.0 | 36.0 | 0.505 | 49.2 | 276.033 | 330.015 | 490.2 | 567.0 | 58.6 | 56.4 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 14. Indramayu | 2.2 | 2.2 | 35.6 | - | 34.3 | 35.2 | 0.491 | 50.3 | 136.865 | 287.748 | 318.9 | 731.8 | 35.5 | 35.7 | 20 | 19 | 270 | 278 |
| 15. Subang | 6.7 | 11.1 | 37.9 | - | 33.8 | 33.7 | 0.502 | 50.9 | 207.102 | 247.476 | 354.0 | 474.9 | 50.1 | 52.3 | 5 | 4 | 66 | 50 |
| 16. Purwakarta | 2.2 | 6.7 | 54.4 | - | 34.9 | 31.5 | 0.483 | 49.6 | 252.820 | 340.065 | 465.0 | 613.6 | 46.2 | 45.1 | 13 | 7 | 138 | 152 |
| 17. Karawang | 4.4 | 4.4 | 31.0 | - | 27.1 | 27.7 | 0.506 | 49.9 | 261.975 | 348.231 | 495.9 | 654.4 | 36.7 | 40.7 | 19 | 15 | 260 | 225 |
| 18. Bekasi | 6.7 | 6.7 | 24.4 | - | 18.6 | 25.3 | 0.476 | 48.0 | 265.275 | 379.905 | 601.4 | 797.0 | 28.9 | 43.9 | 21 | 10 | 285 | 182 |
| 71. Bogor | 8.9 | 6.7 | 33.0 | - | 28.6 | 32.8 | 0.493 | 50.8 | 433.728 | 473.526 | 423.7 | 791.4 | 48.9 | 39.9 | 7 | 17 | 92 | 239 |
| 72. Sukabumi | 6.7 | 10.0 | 50.9 | - | 34.8 | 25.8 | 0.516 | 49.5 | 226.743 | 353.974 | 418.2 | 583.8 | 47.2 | 41.9 | 11 | 13 | 115 | 205 |
| 73. Bandung | 8.9 | 8.9 | 39.3 | - | 35.5 | 35.3 | 0.503 | 49.5 | 285.359 | 389.341 | 512.7 | 792.8 | 51.9 | 52.1 | 4 | 5 | 49 | 54 |
| 74. Cirebon | 0.0 | 0.0 | 47.1 | - | 35.9 | 35.9 | 0.501 | 51.3 | 215.996 | 387.849 | 358.3 | 628.4 | 38.2 | 33.6 | 18 | 20 | 247 | 293 |
| 76. Bekasi | 15.6 | 13.3 | 50.4 | - | 27.2 | 31.5 | 0.486 | 48.4 | 310.186 | 418.933 | - | - | 54.9 | - | 2 | - | 21 | - |
| 77. Depok | - | 8.9 | - | - | - | 30.3 | - | 48.9 | - | - | 620.9 | 867.6 | - | 48.1 | - | 6 | - | 103 |
| ***32. Jawa Barat*** | ***7.8*** | ***3.0*** | ***36.0*** | - | ***32.4*** | ***33.1*** | ***0.496*** | ***49.3*** | ***283.960*** | ***384.404*** | ***488.2*** | ***664.7*** | ***47.7*** | ***43.6*** | | | ***14*** | ***24*** |

**Lampiran 8. Indeks Kemiskinan Manusia Propinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 1998, 1999 and 2002**

| Provinsi /Kabupaten/ Kota | Penduduk yg Diperkirakan Tdk mencapai umur 40 thn (%) | | | Angka Melek Huruf (%) | | | Penduduk tanpa akses thd air bersih (%) | | | Penduduk tanpa akses thd sarana kesehatan (%) | | | Balita Kurang Gizi (%) | | | IKM | | | Rangking IKM (Jawa Barat) | | | Rangking IKM (Indonesia) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1998 | 1999 | 2002 | 1998 | 1999 | 2002 | 1998 | 1999 | 2002 | 1998 | 1999 | 2002 | 1998 | 1999 | 2002 | 1998 | 1999 | 2002 | 1998 | 1999 | 2002 | 1998 | 1999 | 2002 |
| 03. Bogor | 16.7 | 16.7 | 15.1 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 59.0 | 59.0 | 55.9 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 29.5 | 29.5 | 20.7 | 24.9 | 24.9 | 22.2 | 15 | 15 | 13 | 167 | 128 | 124 |
| 04. Sukabumi | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 56.6 | 56.6 | 50.1 | 34.6 | 34.6 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 16.2 | 29.9 | 29.9 | 24.7 | 5 | 5 | 9 | 94 | 201 | 178 |
| 05. Cianjur | 19.4 | 19.4 | 18.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 62.2 | 62.2 | 57.9 | 55.9 | 55.9 | 38.5 | 31.8 | 31.8 | 17.8 | 35.3 | 35.3 | 27.4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 268 | 228 |
| 06. Bandung | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 5.3 | 5.3 | 3.0 | 70.8 | 70.8 | 61.2 | 14.3 | 14.3 | 20.1 | 21.2 | 21.2 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 25.0 | 14 | 14 | 8 | 162 | 133 | 188 |
| 07. Garut | 26.9 | 26.9 | 26.0 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 64.9 | 64.9 | 59.2 | 21.2 | 21.2 | 28.1 | 25.9 | 25.9 | 20.0 | 28.8 | 28.8 | 27.7 | 6 | 6 | 4 | 107 | 188 | 235 |
| 08. Tasik malaya | 16.1 | 16.1 | 15.2 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 80.0 | 80.0 | 63.6 | 10.4 | 10.4 | 29.7 | 30.5 | 30.5 | 24.8 | 28.5 | 28.5 | 27.8 | 7 | 7 | 3 | 112 | 183 | 237 |
| 09. Ciamis | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 6.1 | 6.1 | 4.7 | 60.7 | 60.7 | 55.1 | 13.6 | 13.6 | 16.0 | 27.7 | 27.7 | 19.7 | 24.9 | 24.9 | 22.6 | 16 | 16 | 11 | 167 | 128 | 134 |
| 10. Kuningan | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 65.3 | 65.3 | 60.0 | 22.4 | 22.4 | 19.0 | 32.3 | 32.3 | 15.0 | 28.5 | 28.5 | 23.0 | 8 | 8 | 10 | 112 | 183 | 150 |
| 11. Cirebon | 20.6 | 20.6 | 20.0 | 13.4 | 13.4 | 13.0 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 23.4 | 23.4 | 19.8 | 33.9 | 33.9 | 31.6 | 28.1 | 28.1 | 26.7 | 9 | 9 | 6 | 117 | 178 | 213 |
| 12. Majalengka | 20.6 | 20.6 | 19.6 | 11.1 | 11.1 | 9.0 | 53.5 | 53.5 | 48.8 | 12.6 | 12.6 | 14.3 | 37.3 | 37.3 | 26.3 | 25.7 | 25.7 | 22.6 | 12 | 12 | 12 | 155 | 140 | 137 |
| 13. Sumedang | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 59.1 | 59.1 | 42.6 | 34.3 | 34.3 | 29.1 | 19.9 | 19.9 | 16.2 | 26.7 | 26.7 | 21.1 | 10 | 10 | 15 | 137 | 158 | 114 |
| 14. Indramayu | 20.1 | 20.1 | 19.3 | 33.3 | 33.3 | 23.8 | 59.7 | 59.7 | 57.5 | 30.4 | 30.4 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 27.8 | 32.5 | 32.5 | 28.8 | 2 | 2 | 2 | 59 | 236 | 254 |
| 15. Subang | 16.9 | 16.9 | 16.0 | 13.8 | 13.8 | 15.8 | 70.7 | 70.7 | 58.3 | 29.3 | 29.3 | 24.8 | 34.8 | 34.8 | 21.4 | 32.0 | 32.0 | 25.6 | 3 | 3 | 7 | 64 | 231 | 195 |
| 16. Purwakarta | 19.7 | 19.7 | 18.7 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 53.1 | 53.1 | 39.7 | 22.2 | 22.2 | 33.6 | 28.9 | 28.9 | 16.0 | 25.5 | 25.5 | 22.2 | 13 | 13 | 14 | 156 | 139 | 126 |
| 17. Karawang | 21.7 | 21.7 | 20.9 | 15.2 | 15.2 | 12.8 | 70.1 | 70.1 | 65.4 | 26.9 | 26.9 | 31.7 | 32.5 | 32.5 | 25.4 | 31.5 | 31.5 | 29.8 | 4 | 4 | 1 | 70 | 225 | 264 |
| 18. Bekasi | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 12.4 | 12.4 | 8.9 | 51.2 | 51.2 | 36.9 | 24.3 | 24.3 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 20.4 | 21.4 | 21.4 | 17.1 | 17 | 17 | 19 | 214 | 81 | 54 |
| 71. Bogor | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 68.9 | 68.9 | 46.5 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 31.4 | 31.4 | 7.4 | 26.1 | 26.1 | 15.6 | 11 | 11 | 20 | 147 | 148 | 39 |
| 72. Sukabumi | 15.8 | 15.8 | 15.1 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 47.2 | 47.2 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 10.9 | 10.9 | 12.8 | 15.5 | 15.5 | 18.1 | 19 | 19 | 18 | 267 | 28 | 70 |
| 73. Bandung | 11.8 | 11.8 | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 33.8 | 33.8 | 32.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 22.9 | 22.9 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 13.5 | 20 | 20 | 22 | 272 | 23 | 20 |
| 74. Cirebon | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 17.8 | 17.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 27.3 | 27.3 | 29.2 | 12.6 | 12.6 | 18.5 | 21 | 21 | 16 | 279 | 16 | 75 |
| 76. Bekasi | 14.3 | 14.3 | 12.0 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 74.9 | 74.9 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.6 | 11.6 | 32.1 | 20.8 | 20.8 | 18.4 | 18 | 18 | 17 | 224 | 71 | 73 |
| 77. Depok | - | - | 7.3 | - | - | 3.9 | - | - | 46.2 | - | - | 8.5 | - | - | 9.6 | - | - | 15.1 | - | - | 21 | - | - | 32 |
| *32. Jawa Barat* | *18.2* | *18.2* | *18.0* | *7.8* | *7.8* | *6.9* | *62.1* | *62.1* | *53.0* | *22.4* | *22.4* | *19.0* | *27.2* | *27.2* | *21.5* | *26.9* | *26.9* | *23.0* | | | | *15* | - | *11* |

Lampiran 9. Tujuan dan Sasaran Program Pendidikan di Jawa Barat Menurut Misi Program

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| Misi 1. Mengembangkan kehidupan manusia yang beriman dan bertaqwa, mandiri dan bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Jawa Barat (*silih asah, silih asih, silih asuh, cageur, bageur, bener, pinter tur singer)* dan berwawasan kebangsaan . | |
| 1. Menciptakan SDM Jawa Barat yang menjunjung tinggi dan memiliki nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa<br>2. Menciptakan SDM Jawa Barat yang menjunjung tinggi dan memiliki penghargaan terhadap nilai kulture atau budaya Jawa Barat<br>3. Menciptakan SDM Jawa Barat yang menjunjung tinggi dan memiliki penghargaan terhadap nilai kebangsaan atau nasionalisme. | 1. Terselenggaranya penataran guru semua jenjang sekolah tentang Budi Pekerti<br>2. Terwujudnya penerimaan bantuan buku pelajaran agama, akhlak, atau budi pekerti kepada sekolah<br>3. Terwujudnya penerimaan bannian pengadaan tempat ibadah (mushola), kitab suci Al-Quran dan perlengkapan alat sholat kepada sekolah<br>4. Terselenggaranya kurikulum muatan lokal Bahasa Sunda di sekolah-sekolah<br>5. Terwujudnya penerimaan bantuan pengadaan tempat kegiatan siswa dan perlengkapan gamelan sunda atau angklung antara kepada sekolah<br>6. Terwujudnya pembinaan gugus depan Pramuka di sekolah-sekolah<br>7. Terselenggaranya Kemah / Jambore Pramuka sekali per tahun<br>8. Terwujudnya pembinaan kegiatan upacara bendera di sekolah-sekolah<br>9. Terwujudnya penerimaan bantuan buku pelajaran sejarah perjuangan bangsa kepada sekolah-sekolah. |
| Misi 2. Menciptakan suasana kondusif dalam upaya mengembangkan pendidikan guna mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, trengginas, sehat jasmani dan rohani, kreatif, inovatif dan produktif serta memiliki keunggulan kompetitif. | |
| 1. Menciptakan SDM Jawa Barat yang cerdas, terampil, trengginas, sehat jasmani dan rohani.<br>2. Menciptakan SDM Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi, selalu berpikir inovasi dan bekerja secara | 1. Terselenggaranya Lomba Cepat Tepat Antar Sekolah se Jawa Barat sekali per tahun<br>2. Terselenggaranya MTQ Antar Sekolah se Jawa Barat sekali per tahun<br>3. Terwujudnya pembinaan olah raga dalam rangka pencarian bibit atlit berbakat di sekolah-sekolah<br>4. Terselenggaranya PORSENI dua tahunan antar Kabupaten/Kota se Jawa Barat<br>5. Terwujudnya pembinaan implementasi Broad Based Education dan Life Skill di |

| | |
|---|---|
| produktif sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam berbagai bidang pengetahuan dan teknologi<br>3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Barat yang memadai sehingga dapat mendukung proses pendidikan.<br>4. Menyediakan daya tampung sekolah di Jawa Barat pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang memadai.<br>5. Menyediakan tenaga guru di Jawa Barat baik dalam segi jumlah dan kualitas<br>6. Meningkatkan kesejahteraan atau gaji guru di Jawa Barat terutama di daerah terpencil.<br>7. Menyelenggarakan manajemen sekolah yang baik dan handal di setiap jenjang sekolah. | sekolah-sekolah<br>6. Terwujudnya pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (Students Scient Club) di sekolah -sekolah<br>7. Terselenggaranya Lomba Karya Ilmiah Antar Sekolah se Jawa Barat sekali per tahun<br>8. Terwujudnya penerimaan bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pengadaan mebeleir baru, pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan di sekolah-sekolah<br>9. Terwujudnya bantuan pembangunan SLTP Negeri di kabupaten/kota<br>10. Terwujudnya bantuan pembangunan SMU Negeri di kabupaten/kota<br>11. Terwujudnya bantuan pembangunan SMK Negeri di kabupaten/kota<br>12. Terwujudnya bantuan pendirian SLTP Terbuka di kabupaten/kota<br>13. Terwujudnya bantuan pembangunan SLB Negeri di kabupaten/kota<br>14. Terwujudnya pemberdayaan PLS (Kejar Paket A, B dan C) di Kabupaten/Kota<br>15. Terwujudnya pembangunan gedung Balai Pelatihan Guru di Propinsi<br>16. Terwujudnya pengadaan mebeleir untuk Balai Pelatihan Guru di Propinsi<br>17. Terwujudnya pembinaan organisnsi Balai Pelatihan Guru di Propinsi<br>18. Terselenggaranya penataran guru bidang studi untuk sejnua jenjang sekoiah<br>19. Terwujudnya pengangkatan tenaga guru sukarelawan untuk daerah terpencil<br>20. Terwujudnya pembinaan guru sukarelawan untuk daerah bidang pertanian dan peternakan<br>21. Tersusunnya pedoman sistem penggajian guru dalam rangka peningkatan kesejahteraan<br>22. Terselenggaranya penataran tanaga penyusunan rencana pendidikan dan sistem anggaran pendidikan bagi Kabupaten/Kota dan Propinsi<br>23. Terselenggaranya penataran penyusunan RAPBS bagi Kepala Sekolah dan Dewan Sekolah<br>24. Terselenggaranya kursus manajemen bagi Kepala Sekolah dan Dewan Sekolah<br>25. Terselenggaranya penataran manajemen sekolah bagi tenaga administrasi pendidikan di sekolah |

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| Misi 3 . Mempelopori perubahan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan. | |
| 1. Mengimplementasikan School Based Management (SBM) dan Dewan Sekolah di Jawa Barat yang sejalan dengan desentralisasi pendidikan dan tidak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional<br>2. Mengimplementasikan Broad Based Education dengan Life Skill di Jawa Barat untuk menjawab kebutuhan masyarakat luas tentang pendidikan pada saat ini.<br>3. Menyusun Standart Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat<br>4. Mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Pada Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat | 1.Terwujudnya penyusunan pedoman implementasi School Based Management di Jawa Barat<br>2.Terselenggaranya sosialisasi School Based Management (SBM) sekali per tahun<br>3.Terselenggaranya pelatihan School Based Management (SBM) sekali per tahun<br>4.Terwujudnya pembentukan Dewan Sekolah di sekolah-sekolah di Jawa Barat<br>5.Terwujudnya pembentukan Dewan Pendidikan Daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat<br>6.Tersusunnya pedoman implementasi BBE dan Life Skill Jawa Barat<br>7.Terselenggaranya sosialisasi implementasi BBE dan Life Skill di Jawa Barat sekali per tahun<br>8.Terselenggaranya pelatihan BBE dan Life Skill sekali per tahun<br>9.Tersusunnya pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Kota di Jawa Barat<br>10. Terselenggaranya sosialisasi SPM Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat sekali per tahun<br>11. Terselenggaranya pelatihan SPM Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat<br>12. Tersusunnya pedoman implementasi Kurikulum Berbasis Kompentensi (KBK) Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat .<br>13. Terselenggaranya sosialisasi KBK Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat sekali per tahun<br>14. Terselenggaranya pelatihan KBK Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat sekali per tahun |

| Misi 4. Meningkatkan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. | |
|---|---|
| 1. Mengimplementasikan Pusat Layanan Informasi Pendidikan (PLIP) di Jawa Barat, yang mampu memberikan layanan informasi pendidikan secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat luas.<br>2. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang baik dan handal di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung penyelenggaraan aktivitas manajemen dan pengambilan keputusan di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. | 1. Terwujudnya pembangunan Gedung Pusat Layanan Informasi Pendidikan di Propinsi Jawa Barat<br>2. Terwujudnya pengadaan mebeuleir untuk Pusat Layanan Informasi Pendidikan di Jawa Barat<br>3. Terwujudnya pembinaan organisasi Pusat Layanan Informasi Pendidikan di Jawa Barat<br>4. Tersusunnya pedoman Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat<br>5. Terselenggaranya sosialisasi SIM Dinas Pendidikan Propinsi sekali per tahun<br>6. Terselenggaranya pelatihan SIM Dinas Pendidikan Propinsi sekali per tahun<br>7. Terselenggaranya pelatihan bagi Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, dan Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Staft tentang Intranet dan Internet Dinas Pendidikan Propinsi |

| Misi 5. Meningkatkan penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan global. | |
|---|---|
| 1. Mewujudkan penggunaan jaringan kompuler LAN dan WAN, jaringan intranet dan jaringan internet dalam proses komunikasi dan pertukaran informasi baik antar Unit di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, maupun dengan pihak-pihak luar.<br>2. Mengimplementasikan sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet (On-Line Learning) | 1. Terwujudnya implementasi Jaringan Komputer, Internet dan Website Pusat Layanan Informasi Pendidikan di Jawa Barat<br>2. Terwujudnya implementasi Jaringan Komputer LAN, WAN, Intranet, Internet Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat<br>3. Terselenggaranya pendataan persekolahan di Jawa Barat<br>4. Terwujudnya Pemetaan Persekolahan Jawa Barat Berbasis Komputer<br>5. Terbangunnya infrastruktur Jaringan Komputer Untuk On-Line Learning<br>6. Tersusunnya modul pembelajaran siswa berbasis internet<br>7. Terselenggaranya sosialisasi tentang ON-Line Learning sekali per tahun<br>8. Terselenggaranya pelatihan ON-Line Learning sekali per tahun |

Lampiran 10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003

| Kabupaten / Kota | 7 - 12 Tahun | | | 13 - 15 Tahun | | | . 16 - 18 Tahun | | | 19 - 24 Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| | PERKOTAAN | | | | | | | | | | | |
| 1. Bogor | 94.71 | 96.63 | 95.64 | 80.39 | 80.22 | 80.31 | 49.99 | 42.31 | 46.34 | 4.52 | 4.43 | 4.47 |
| 2. Sukabumi | 98.39 | 98.33 | 98.36 | 91.30 | 88.00 | 89.59 | 59.37 | 39.12 | 50.91 | 16.07 | 5.71 | 12.09 |
| 3. Cianjur | 97.02 | 91.05 | 94.03 | 70.02 | 81.25 | 75.82 | 45.26 | 44.46 | 44.89 | 9.09 | 2.78 | 6.59 |
| 4. Bandung | 97.14 | 98.54 | 97.78 | 85.71 | 92.22 | 88.72 | 56.03 | 52.69 | 54.55 | 15.86 | 6.56 | 11.51 |
| 5. Garut | 97.30 | 96.83 | 97.08 | 80.00 | 88.89 | 85.00 | 60.98 | 29.40 | 46.66 | 10.87 | 3.33 | 6.61 |
| 6. Tasikmalaya | 100.00 | 98.65 | 99.14 | 88.57 | 85.71 | 87.50 | 44.00 | 43.24 | 43.55 | 9.84 | 7.41 | 8.70 |
| 7. Ciamis | 98.11 | 100.00 | 98.94 | 73.34 | 73.68 | 73.47 | 55.01 | 47.36 | 51.28 | 3.70 | 13.80 | 8.93 |
| 8. Kuningan | 96.97 | 100.00 | 98.26 | 66.69 | 77.79 | 72.57 | 53.59 | 24.01 | 39.65 | 5.41 | 3.33 | 4.48 |
| 9. Cirebon | 93.86 | 96.18 | 95.10 | 81.54 | 83.79 | 82.36 | 55.74 | 41.94 | 48.78 | 10.57 | 2.89 | 7.05 |
| 10. Majalengka | 100.00 | 97.82 | 99.03 | 78.95 | 65.21 | 71.42 | 50.00 | 44.98 | 47.91 | 8.00 | 2.70 | 5.75 |
| 11. Sumedang | 95.83 | 100.00 | 97.75 | 90.90 | 92.85 | 91.66 | 77.77 | 42.11 | 59.46 | 17.86 | 18.51 | 18.18 |
| 12. Indramayu | 96.29 | 93.19 | 94.90 | 80.96 | 50.00 | 64.45 | 54.54 | 35.01 | 45.24 | 10.34 | 0.00 | 4.68 |
| 13. Subang | 96.30 | 96.97 | 96.67 | 77.78 | 77.77 | 77.77 | 50.00 | 47.36 | 48.48 | 6.46 | 11.11 | 8.63 |
| 14. Purwakarta | 93.99 | 100.00 | 97.19 | 84.61 | 89.99 | 86.95 | 57.67 | 46.39 | 51.82 | 4.92 | 6.75 | 5.92 |
| 15. Karawang | 98.98 | 100.00 | 99.39 | 86.10 | 78.11 | 82.34 | 64.71 | 42.41 | 55.95 | 21.66 | 4.22 | 12.21 |
| 16. Bekasi | 98.55 | 95.11 | 96.80 | 85.49 | 81.25 | 83.34 | 63.46 | 54.39 | 58.72 | 10.34 | 7.96 | 9.17 |
| 17. Kota Bogor | 95.59 | 94.93 | 95.27 | 86.44 | 87.33 | 86.92 | 61.26 | 64.29 | 62.81 | 23.38 | 23.19 | 23.29 |
| 18. Kota Sukabumi | 96.84 | 98.11 | 97.51 | 92.29 | 90.73 | 91.49 | 51.73 | 67.24 | 59.42 | 13.29 | 19.78 | 16.42 |
| 19 Kota Bandung | 98.59 | 96.76 | 97.73 | 89.48 | 92.94 | 91.11 | 70.88 | 67.47 | 69.00 | 33.59 | 22.14 | 27.77 |
| 20. Kota Cirebon | 96.10 | 96.72 | 96.40 | 87.70 | 91.12 | 89.21 | 60.55 | 56.33 | 58.44 | 15.14 | 20.78 | 17.99 |
| 21. Kota Bekasi | 100.00 | 98.61 | 99.32 | 96.12 | 92.59 | 94.31 | 84.61 | 74.35 | 79.48 | 22.37 | 23.53 | 22.99 |
| 22. Kota Depok | 99.39 | 98.94 | 99.15 | 97.47 | 88.47 | 93.00 | 80.00 | 70.53 | 74.86 | 21.84 | 18.75 | 20.29 |
| **Jawa Barat** | **97.43** | **97.33** | **97.38** | **85.80** | **85.49** | **85.65** | **61.98** | **54.12** | **58.10** | **16.60** | **11.83** | **14.22** |
| | PERDESAAN | | | | | | | | | | | |
| 1. Bogor | 82.63 | 85.54 | 84.08 | 49.35 | 48.22 | 48.87 | 22.73 | 18.18 | 20.45 | 3.19 | 0.00 | 1.46 |
| 2. Sukabumi | 95.16 | 96.47 | 95.79 | 67.07 | 65.71 | 66.45 | 29.55 | 25.00 | 27.63 | 3.06 | 0.00 | 1.46 |
| 3. Cianjur | 96.12 | 97.70 | 96.84 | 59.26 | 52.05 | 55.84 | 18.46 | 17.39 | 17.91 | 3.06 | 1.94 | 2.49 |
| 4. Bandung | 92.98 | 97.52 | 95.32 | 64.29 | 65.85 | 65.06 | 21.82 | 24.49 | 23.08 | 4.12 | 2.13 | 3.14 |
| 5. Garut | 95.90 | 94.97 | 95.48 | 72.73 | 66.67 | 70.13 | 21.18 | 27.42 | 23.81 | 7.50 | 0.79 | 4.07 |
| 6. Tasikmalaya | 94.26 | 98.48 | 96.46 | 76.39 | 63.41 | 69.48 | 29.41 | 18.87 | 24.79 | 1.19 | 1.02 | 1.10 |
| 7. Ciamis | 98.96 | 99.00 | 98.98 | 65.90 | 73.01 | 70.09 | 27.50 | 24.99 | 26.31 | 3.95 | 4.44 | 4.22 |
| 8. Kuningan | 97.78 | 93.26 | 95.53 | 78.05 | 72.50 | 75.31 | 34.54 | 37.52 | 35.79 | 2.00 | 1.35 | 1.61 |
| 9. Cirebon | 96.81 | 97.70 | 97.24 | 54.35 | 60.00 | 56.79 | 24.39 | 38.46 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Majalengka | 98.86 | 97.87 | 98.35 | 73.80 | 66.66 | 70.23 | 19.99 | 24.38 | 22.22 | 1.47 | 0.00 | 0.72 |
| 11. Sumedang | 97.56 | 97.68 | 97.62 | 81.47 | 72.97 | 76.56 | 35.00 | 52.93 | 43.24 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| 12. Indramayu | 96.48 | 96.64 | 96.55 | 67.18 | 78.00 | 71.93 | 32.35 | 44.00 | 37.29 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| 13. Subang | 96.92 | 98.02 | 97.40 | 75.93 | 86.54 | 81.14 | 46.67 | 16.67 | 32.19 | 1.30 | 6.94 | 4.03 |
| 14. Purwakarta | 93.27 | 94.69 | 94.01 | 65.08 | 55.32 | 60.91 | 31.25 | 19.99 | 26.31 | 6.02 | 7.14 | 6.58 |
| 15. Karawang | 95.80 | 98.18 | 96.94 | 47.45 | 67.92 | 57.14 | 16.66 | 24.99 | 19.99 | 3.28 | 0.00 | 1.41 |
| 16. Bekasi | 93.83 | 98.48 | 95.92 | 73.08 | 88.00 | 80.39 | 48.39 | 20.83 | 36.37 | 2.33 | 5.00 | 3.62 |
| 17. Kota Bogor | 79.78 | 100.00 | 85.54 | 33.33 | 100.00 | 71.08 | 66.36 | 33.33 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Kota Sukabumi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 74.93 | 100.00 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 Kota Bandung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Kota Cirebon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Kota Bekasi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.70 | 50.04 | 57.18 | 28.60 | 20.01 | 25.02 |
| 22. Kota Depok | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.01 | 100.00 | 83.34 | 16.60 | 14.25 | 15.33 |
| **Jawa Barat** | **94.48** | **95.93** | **95.19** | **65.20** | **66.67** | **65.91** | **27.57** | **25.89** | **26.81** | **3.32** | **1.92** | **2.60** |

Lampiran 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2003

| Kabupaten / Kota | SD | | | SLTP | | | SLTA | | | PT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| | PERKOTAAN | | | | | | | | | | | |
| 1. Bogor | 101.58 | 111.23 | 106.26 | 90.20 | 63.74 | 77.73 | 37.21 | 49.99 | 43.29 | 4.52 | 3.94 | 4.19 |
| 2. Sukabumi | 103.23 | 105.00 | 104.10 | 95.65 | 88.00 | 91.67 | 65.62 | 34.78 | 52.72 | 12.50 | 8.57 | 10.99 |
| 3. Cianjur | 100.00 | 94.03 | 97.01 | 80.03 | 96.89 | 88.73 | 50.02 | 38.90 | 44.89 | 1.82 | 2.78 | 2.20 |
| 4. Bandung | 97.96 | 99.03 | 98.45 | 102.86 | 105.55 | 104.10 | 61.21 | 53.76 | 57.89 | 15.38 | 6.01 | 11.00 |
| 5. Garut | 106.76 | 111.11 | 108.76 | 88.58 | 80.00 | 83.75 | 56.10 | 38.23 | 48.00 | 4.35 | 6.67 | 5.66 |
| 6. Tasikmalaya | 123.81 | 102.70 | 110.34 | 88.57 | 95.24 | 91.07 | 36.00 | 40.54 | 38.71 | 8.20 | 7.41 | 7.83 |
| 7. Ciamis | 105.67 | 100.00 | 103.19 | 63.34 | 89.46 | 73.47 | 60.02 | 52.64 | 56.42 | 7.41 | 10.35 | 8.93 |
| 8. Kuningan | 101.52 | 110.19 | 105.22 | 66.70 | 77.80 | 72.58 | 57.16 | 24.01 | 41.53 | 5.41 | 3.33 | 4.48 |
| 9. Cirebon | 105.26 | 100.76 | 102.85 | 83.08 | 105.43 | 91.19 | 52.46 | 35.48 | 43.90 | 7.32 | 3.85 | 5.73 |
| 10. Majalengka | 100.00 | 106.52 | 102.91 | 84.22 | 69.56 | 76.19 | 53.58 | 39.98 | 47.91 | 8.00 | 2.70 | 5.75 |
| 11. Sumedang | 102.09 | 97.57 | 100.01 | 86.34 | 114.25 | 97.19 | 83.34 | 36.86 | 59.47 | 16.07 | 18.51 | 17.27 |
| 12. Indramayu | 103.70 | 97.73 | 101.02 | 66.68 | 54.17 | 60.01 | 68.17 | 30.01 | 49.99 | 10.35 | 0.00 | 4.69 |
| 13. Subang | 100.00 | 106.06 | 103.33 | 77.78 | 77.77 | 77.77 | 50.00 | 47.36 | 48.48 | 6.46 | 7.41 | 6.90 |
| 14. Purwakarta | 85.99 | 107.01 | 97.19 | 103.83 | 94.98 | 99.98 | 69.21 | 49.94 | 59.21 | 1.64 | 5.41 | 3.71 |
| 15. Karawang | 100.00 | 106.06 | 102.44 | 102.75 | 87.49 | 95.57 | 66.67 | 36.34 | 54.76 | 18.34 | 2.82 | 9.92 |
| 16. Bekasi | 115.94 | 107.69 | 111.74 | 82.26 | 71.88 | 76.99 | 59.61 | 54.38 | 56.88 | 11.21 | 6.19 | 8.73 |
| 17. Kota Bogor | 97.48 | 103.17 | 100.31 | 89.84 | 78.87 | 83.85 | 67.50 | 70.24 | 68.91 | 27.28 | 24.65 | 26.04 |
| 18. Kota Sukabumi | 103.16 | 103.80 | 103.50 | 74.98 | 87.01 | 81.11 | 69.61 | 72.69 | 71.14 | 13.29 | 20.87 | 16.94 |
| 19. Kota Bandung | 106.14 | 100.54 | 103.53 | 96.84 | 108.24 | 102.23 | 82.53 | 60.33 | 70.31 | 32.82 | 24.35 | 28.52 |
| 20. Kota Cirebon | 98.44 | 100.79 | 99.59 | 89.45 | 100.05 | 94.12 | 67.56 | 61.95 | 64.76 | 16.15 | 19.79 | 17.99 |
| 21. Kota Bekasi | 111.45 | 98.15 | 104.96 | 97.08 | 98.15 | 97.63 | 87.18 | 75.22 | 81.20 | 25.46 | 26.73 | 26.14 |
| 22. Kota Depok | 104.27 | 102.13 | 103.13 | 112.66 | 100.01 | 106.37 | 77.50 | 76.84 | 77.14 | 29.31 | 21.02 | 25.14 |
| **Jawa Barat** | **103.99** | **102.91** | **103.46** | **92.18** | **89.33** | **90.80** | **63.72** | **54.36** | **59.11** | **16.60** | **12.48** | **14.53** |
| | PERDESAAN | | | | | | | | | | | |
| 1. Bogor | 91.0 | 96.4 | 93.7 | 37.66 | 37.49 | 37.59 | 22.73 | 10.60 | 16.67 | 4.25 | 0.00 | 1.95 |
| 2. Sukabumi | 100.5 | 102.9 | 101.7 | 68.29 | 65.71 | 67.10 | 23.86 | 20.31 | 22.37 | 3.06 | 0.93 | 1.95 |
| 3. Cianjur | 100.5 | 101.2 | 100.8 | 51.85 | 47.94 | 50.00 | 18.46 | 20.29 | 19.40 | 2.04 | 0.97 | 1.49 |
| 4. Bandung | 107.0 | 103.3 | 105.1 | 50.00 | 70.73 | 60.24 | 21.82 | 18.37 | 20.19 | 4.12 | 0.00 | 2.09 |
| 5. Garut | 101.0 | 97.5 | 99.4 | 69.33 | 71.22 | 70.14 | 23.53 | 22.59 | 23.13 | 4.17 | 2.38 | 3.25 |
| 6. Tasikmalaya | 108.2 | 112.1 | 110.2 | 68.06 | 48.78 | 57.79 | 20.59 | 16.98 | 19.01 | 4.76 | 1.02 | 2.75 |
| 7. Ciamis | 102.1 | 102.0 | 102.0 | 68.18 | 74.60 | 71.96 | 25.00 | 33.32 | 28.94 | 2.63 | 2.22 | 2.41 |
| 8. Kuningan | 104.5 | 97.8 | 101.1 | 92.68 | 72.50 | 82.71 | 30.91 | 35.02 | 32.64 | 0.00 | 2.70 | 1.61 |
| 9. Cirebon | 104.3 | 108.1 | 106.1 | 45.65 | 57.14 | 50.61 | 24.39 | 26.92 | 25.37 | 1.33 | 0.00 | 0.72 |
| 10. Majalengka | 112.5 | 103.2 | 107.7 | 54.75 | 57.14 | 55.94 | 24.99 | 29.26 | 27.15 | 2.94 | 0.00 | 1.44 |
| 11. Sumedang | 102.4 | 102.3 | 102.4 | 88.87 | 86.48 | 87.49 | 32.50 | 35.28 | 33.78 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| 12. Indramayu | 101.4 | 100.0 | 100.8 | 65.62 | 93.99 | 78.07 | 29.41 | 42.00 | 34.74 | 3.09 | 1.03 | 2.06 |
| 13. Subang | 101.5 | 97.0 | 99.6 | 75.94 | 96.16 | 85.86 | 48.89 | 23.81 | 36.78 | 0.00 | 2.78 | 1.34 |
| 14. Purwakarta | 103.8 | 101.8 | 102.8 | 63.50 | 59.57 | 61.82 | 28.12 | 17.99 | 23.68 | 1.21 | 2.38 | 1.80 |
| 15. Karawang | 104.2 | 108.2 | 106.1 | 42.37 | 66.03 | 53.56 | 11.67 | 12.50 | 12.00 | 1.64 | 1.23 | 1.41 |
| 16. Bekasi | 102.5 | 109.1 | 105.4 | 69.24 | 72.00 | 70.59 | 29.03 | 20.84 | 25.46 | 4.65 | 2.50 | 3.62 |
| 17. Kota Bogor | 79.8 | 116.9 | 90.4 | 99.07 | 99.29 | 99.20 | 0.00 | 16.90 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Kota Sukabumi | 122.3 | 159.7 | 135.6 | 49.85 | 0.00 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Kota Bandung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Kota Cirebon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Kota Bekasi | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 133.41 | 75.06 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Kota Depok | 111.1 | 115.4 | 113.6 | 199.75 | 100.00 | 139.90 | 60.02 | 100.00 | 66.68 | 33.28 | 14.25 | 23.04 |
| **Jawa Barat** | **102.0** | **102.5** | **102.3** | **60.39** | **65.39** | **62.79** | **25.06** | **22.76** | **24.02** | **3.07** | **2.62** | **2.16** |

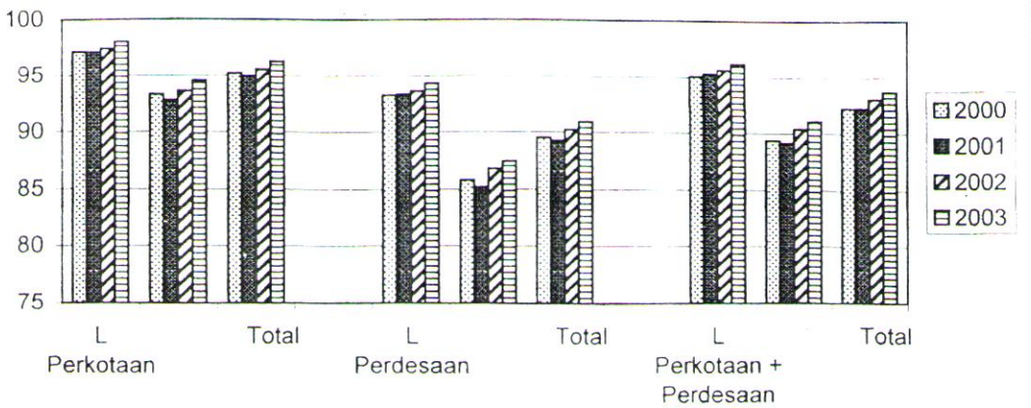
Lampiran 12. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2003

| Kabupaten / Kota | SD | | | SLTP | | | SLTA | | | PT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| | PERKOTAAN | | | | | | | | | | | |
| 1. Bogor | 90.48 | 93.82 | 92.10 | 61.77 | 56.05 | 59.07 | 33.72 | 35.90 | 34.75 | 2.58 | 3.94 | 3.35 |
| 2. Sukabumi | 95.16 | 93.33 | 94.26 | 82.61 | 68.01 | 75.00 | 53.12 | 30.43 | 43.63 | 10.71 | 5.71 | 8.79 |
| 3. Cianjur | 92.54 | 85.07 | 88.81 | 50.02 | 75.00 | 62.91 | 40.49 | 38.90 | 39.76 | 1.82 | 2.78 | 2.20 |
| 4. Bandung | 87.76 | 90.24 | 88.89 | 74.28 | 81.11 | 77.44 | 43.97 | 43.01 | 43.54 | 11.06 | 4.92 | 8.18 |
| 5. Garut | 94.59 | 93.65 | 94.16 | 60.00 | 71.12 | 66.25 | 48.78 | 26.46 | 38.66 | 4.35 | 3.33 | 3.77 |
| 6. Tasikmalaya | 97.62 | 98.65 | 98.28 | 65.72 | 71.43 | 67.86 | 20.00 | 29.73 | 25.81 | 4.92 | 1.85 | 3.48 |
| 7. Ciamis | 96.23 | 92.68 | 94.68 | 60.01 | 57.90 | 59.19 | 50.01 | 42.10 | 46.16 | 3.70 | 10.35 | 7.14 |
| 8. Kuningan | 93.94 | 95.92 | 94.78 | 45.86 | 59.28 | 52.96 | 46.44 | 24.01 | 35.87 | 2.71 | 3.33 | 2.99 |
| 9. Cirebon | 90.35 | 91.60 | 91.02 | 56.93 | 70.29 | 61.78 | 42.63 | 30.64 | 36.59 | 7.32 | 0.96 | 4.41 |
| 10. Majalengka | 94.73 | 95.65 | 95.14 | 57.88 | 56.52 | 57.13 | 50.00 | 39.98 | 45.83 | 8.00 | 2.70 | 5.75 |
| 11. Sumedang | 91.67 | 95.13 | 93.26 | 68.15 | 92.85 | 77.76 | 61.11 | 31.59 | 45.95 | 12.50 | 16.66 | 14.54 |
| 12. Indramayu | 94.44 | 88.64 | 91.84 | 57.14 | 37.50 | 46.67 | 54.54 | 30.01 | 42.86 | 3.45 | 0.00 | 1.56 |
| 13. Subang | 96.30 | 87.88 | 91.67 | 55.56 | 55.55 | 55.55 | 42.86 | 42.10 | 42.42 | 6.46 | 7.41 | 6.90 |
| 14. Purwakarta | 77.99 | 98.25 | 88.78 | 65.37 | 79.99 | 71.72 | 53.83 | 32.10 | 42.56 | 1.64 | 2.70 | 2.22 |
| 15. Karawang | 92.86 | 98.48 | 95.12 | 77.77 | 68.74 | 73.52 | 54.91 | 30.29 | 45.24 | 11.66 | 2.82 | 6.87 |
| 16. Bekasi | 94.93 | 93.01 | 93.95 | 62.91 | 46.87 | 54.76 | 50.00 | 38.60 | 44.04 | 7.76 | 5.31 | 6.55 |
| 17. Kota Bogor | 90.56 | 91.77 | 91.16 | 72.88 | 66.20 | 69.23 | 53.75 | 61.91 | 57.93 | 22.73 | 22.47 | 22.61 |
| 18. Kota Sukabumi | 93.69 | 90.57 | 92.05 | 71.12 | 74.01 | 72.59 | 42.81 | 56.35 | 49.52 | 8.18 | 17.58 | 12.70 |
| 19. Kota Bandung | 91.04 | 91.35 | 91.19 | 81.06 | 88.24 | 84.45 | 62.14 | 53.18 | 57.21 | 29.01 | 19.93 | 24.39 |
| 20. Kota Cirebon | 89.84 | 90.15 | 90.00 | 71.88 | 75.55 | 73.50 | 54.90 | 47.87 | 51.39 | 12.12 | 16.83 | 14.50 |
| 21. Kota Bekasi | 97.36 | 92.59 | 95.03 | 82.53 | 83.33 | 82.94 | 67.52 | 61.53 | 64.52 | 15.52 | 21.39 | 18.68 |
| 22. Kota Depok | 88.42 | 89.36 | 88.92 | 87.34 | 80.77 | 84.08 | 61.25 | 61.05 | 61.14 | 20.12 | 16.48 | 18.29 |
| **Jawa Barat** | **91.87** | **92.23** | **92.04** | **70.01** | **70.82** | **70.40** | **50.12** | **44.31** | **47.26** | **12.59** | **10.07** | **11.33** |
| | PERDESAAN | | | | | | | | | | | |
| 1. Bogor | 81.44 | 84.94 | 83.18 | 29.87 | 16.07 | 24.06 | 16.67 | 7.57 | 12.12 | 2.13 | 0.00 | 0.98 |
| 2. Sukabumi | 93.01 | 92.35 | 92.70 | 42.67 | 39.99 | 41.44 | 20.45 | 17.19 | 19.08 | 1.02 | 0.00 | 0.49 |
| 3. Cianjur | 95.15 | 94.83 | 95.00 | 45.68 | 36.98 | 41.56 | 15.39 | 15.94 | 15.67 | 1.02 | 0.97 | 0.99 |
| 4. Bandung | 91.23 | 95.87 | 93.62 | 38.09 | 51.22 | 44.58 | 20.00 | 12.25 | 16.35 | 4.12 | 0.00 | 2.09 |
| 5. Garut | 93.33 | 91.82 | 92.66 | 54.55 | 56.07 | 55.20 | 15.30 | 20.97 | 17.69 | 3.33 | 0.79 | 2.03 |
| 6. Tasikmalaya | 92.62 | 96.97 | 94.88 | 41.66 | 36.58 | 38.96 | 19.12 | 16.98 | 18.18 | 0.00 | 1.02 | 0.55 |
| 7. Ciamis | 97.92 | 95.00 | 96.43 | 47.72 | 53.97 | 51.40 | 22.50 | 22.21 | 22.37 | 2.63 | 2.22 | 2.41 |
| 8. Kuningan | 92.22 | 91.01 | 91.62 | 65.85 | 50.00 | 58.02 | 27.27 | 32.52 | 29.48 | 0.00 | 1.35 | 0.81 |
| 9. Cirebon | 94.68 | 94.25 | 94.48 | 36.96 | 34.28 | 35.80 | 21.95 | 26.92 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Majalengka | 95.46 | 96.81 | 96.15 | 35.70 | 38.09 | 36.90 | 19.99 | 24.38 | 22.22 | 1.47 | 0.00 | 0.72 |
| 11. Sumedang | 93.90 | 94.19 | 94.05 | 59.24 | 56.75 | 57.80 | 30.00 | 35.28 | 32.43 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| 12. Indramayu | 96.48 | 92.44 | 94.64 | 54.68 | 70.00 | 61.40 | 27.94 | 36.00 | 31.36 | 1.03 | 0.00 | 0.52 |
| 13. Subang | 92.31 | 92.08 | 92.21 | 51.86 | 69.23 | 60.38 | 42.23 | 16.67 | 29.89 | 0.00 | 2.78 | 1.34 |
| 14. Purwakarta | 91.34 | 92.92 | 92.16 | 42.86 | 34.05 | 39.09 | 21.87 | 10.00 | 16.66 | 1.21 | 2.38 | 1.80 |
| 15. Karawang | 94.96 | 95.46 | 95.20 | 32.20 | 49.06 | 40.18 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.64 | 0.00 | 0.70 |
| 16. Bekasi | 92.59 | 93.94 | 93.20 | 38.46 | 40.01 | 39.22 | 29.03 | 16.67 | 23.64 | 2.33 | 2.50 | 2.41 |
| 17. Kota Bogor | 79.78 | 100.00 | 85.54 | 33.33 | 74.47 | 56.63 | 0.00 | 16.90 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Kota Sukabumi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.85 | 0.00 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Kota Bandung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Kota Cirebon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Kota Bekasi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.73 | 88.90 | 66.70 | 50.04 | 57.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Kota Depok | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 60.02 | 100.00 | 66.68 | 16.60 | 14.25 | 15.33 |
| **Jawa Barat** | **92.56** | **93.14** | **92.84** | **43.73** | **45.21** | **44.44** | **21.33** | **18.78** | **20.18** | **1.82** | **0.89** | **1.34** |

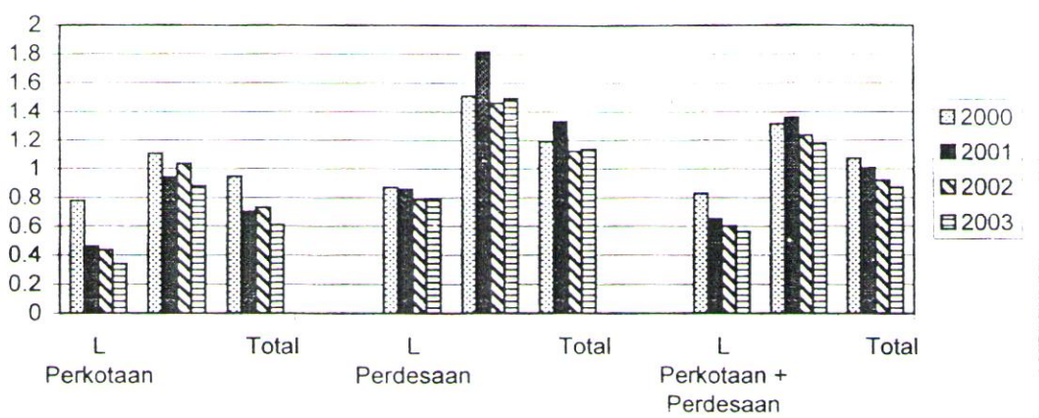
**Lampiran 13. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas di Propinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kota Desa Tahun 2000 - 2003**

| No | Kabupaten / Kota | Tahun 2000 | | | Tahun 2001 | | | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| | | **Perkotaan** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kab. Bogor | 98.07 | 93.31 | 95.69 | 97.88 | 95.61 | 96.84 | 97.22 | 92.91 | 95.20 | 97.96 | 95.52 | 96.74 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 99.81 | 90.59 | 95.14 | 95.51 | 92.15 | 93.87 | 97.43 | 92.47 | 94.88 | 99.71 | 96.38 | 98.13 |
| 3 | Kab. Cianjur | 97.90 | 94.23 | 96.09 | 98.64 | 95.43 | 96.98 | 97.58 | 94.72 | 96.26 | 97.43 | 93.58 | 95.55 |
| 4 | Kab. Bandung | 99.76 | 99.90 | 99.82 | 98.16 | 96.62 | 97.39 | 98.53 | 97.92 | 98.22 | 101.40 | 101.07 | 101.26 |
| 5 | Kab. Garut | 99.42 | 97.28 | 98.38 | 99.76 | 99.83 | 99.81 | 97.93 | 95.89 | 96.91 | 97.25 | 94.54 | 95.86 |
| 6 | Kab. Tasikmalaya | 99.31 | 99.94 | 99.62 | 98.76 | 96.85 | 97.80 | 100.12 | 96.44 | 98.26 | 100.12 | 99.20 | 99.65 |
| 7 | Kab. Ciamis | 99.59 | 94.41 | 97.05 | 96.91 | 93.73 | 95.25 | 96.35 | 96.18 | 96.25 | 98.88 | 98.25 | 98.53 |
| 8 | Kab. Kuningan | 96.90 | 93.70 | 95.23 | 98.08 | 89.90 | 93.96 | 98.76 | 95.56 | 97.14 | 97.00 | 91.26 | 94.14 |
| 9 | Kab. Cirebon | 95.61 | 87.52 | 91.59 | 94.38 | 87.68 | 91.00 | 93.80 | 86.16 | 90.01 | 95.75 | 87.61 | 91.73 |
| 10 | Kab. Majalengka | 105.03 | 96.24 | 100.55 | 96.04 | 89.28 | 92.68 | 96.81 | 90.98 | 93.93 | 94.47 | 90.01 | 92.27 |
| 11 | Kab. Sumedang | 94.35 | 91.45 | 92.86 | 96.98 | 95.13 | 96.07 | 101.10 | 97.66 | 99.40 | 99.13 | 101.87 | 100.50 |
| 12 | Kab. Indramayu | 80.35 | 71.90 | 75.95 | 91.80 | 73.55 | 82.74 | 89.29 | 76.30 | 82.67 | 89.56 | 72.85 | 81.29 |
| 13 | Kab. Subang | 96.20 | 89.81 | 92.82 | 94.41 | 87.12 | 90.77 | 94.26 | 91.69 | 92.93 | 95.35 | 89.29 | 92.15 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 99.53 | 97.65 | 98.56 | 98.40 | 95.90 | 97.14 | 98.43 | 95.27 | 96.86 | 98.05 | 95.18 | 96.57 |
| 15 | Kab. Karawang | 104.44 | 107.37 | 105.69 | 96.06 | 90.35 | 93.25 | 97.34 | 94.83 | 96.00 | 97.74 | 89.92 | 94.00 |
| 16 | Kab. Bekasi | 88.07 | 77.03 | 82.94 | 96.92 | 90.79 | 93.84 | 98.47 | 94.46 | 96.56 | 97.84 | 92.29 | 95.07 |
| 17 | Kota Bogor | 98.76 | 96.50 | 97.62 | 98.30 | 93.69 | 96.07 | 98.79 | 95.27 | 97.00 | 98.81 | 97.21 | 98.02 |
| 18 | Kota Sukabumi | 99.40 | 97.70 | 98.54 | 99.14 | 96.17 | 97.68 | 99.31 | 97.79 | 98.55 | 99.72 | 98.42 | 99.06 |
| 19 | Kota Bandung | 100.04 | 99.55 | 99.81 | 99.84 | 98.61 | 99.23 | 99.32 | 98.94 | 99.13 | 99.74 | 99.54 | 99.64 |
| 20 | Kota Cirebon | 97.64 | 93.50 | 95.55 | 98.52 | 92.63 | 95.50 | 98.12 | 93.66 | 95.83 | 99.64 | 96.77 | 98.18 |
| 21 | Kota Bekasi | 99.38 | 99.40 | 99.39 | 97.79 | 95.18 | 96.52 | 99.70 | 97.16 | 98.48 | 98.35 | 97.45 | 97.89 |
| 22 | Kota Depok | | | | 97.45 | 94.26 | 95.86 | 97.89 | 93.80 | 95.89 | 98.75 | 94.96 | 96.86 |
| | **Jawa Barat** | **97.09** | **93.28** | **95.17** | **97.07** | **92.78** | **94.94** | **97.40** | **93.59** | **95.51** | **98.01** | **94.51** | **96.27** |
| | | **Perdesaan** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kab. Bogor | 96.09 | 90.64 | 93.40 | 90.30 | 81.87 | 86.12 | 92.88 | 89.89 | 91.45 | 94.12 | 87.26 | 90.81 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 97.25 | 92.33 | 94.94 | 97.05 | 91.86 | 94.48 | 94.16 | 90.75 | 92.46 | 96.36 | 92.33 | 94.41 |
| 3 | Kab. Cianjur | 98.04 | 92.01 | 95.10 | 97.75 | 94.34 | 96.04 | 97.92 | 94.39 | 96.20 | 98.61 | 95.54 | 97.10 |
| 4 | Kab. Bandung | 98.08 | 91.78 | 94.84 | 99.86 | 96.79 | 98.32 | 98.37 | 96.38 | 97.44 | 98.51 | 97.88 | 98.18 |
| 5 | Kab. Garut | 96.65 | 93.42 | 95.02 | 96.65 | 96.09 | 96.36 | 97.82 | 93.91 | 95.84 | 98.25 | 95.64 | 97.02 |
| 6 | Kab. Tasikmalaya | 98.73 | 97.10 | 97.99 | 98.81 | 94.43 | 96.62 | 98.48 | 95.76 | 97.14 | 99.03 | 97.80 | 98.41 |
| 7 | Kab. Ciamis | 97.36 | 92.83 | 95.03 | 95.61 | 89.44 | 92.44 | 97.64 | 92.39 | 94.97 | 96.05 | 91.57 | 93.72 |
| 8 | Kab. Kuningan | 94.88 | 87.22 | 90.89 | 95.07 | 89.13 | 92.15 | 94.06 | 86.10 | 89.95 | 94.27 | 87.06 | 90.43 |
| 9 | Kab. Cirebon | 94.13 | 86.66 | 90.47 | 94.51 | 84.06 | 89.40 | 91.98 | 78.27 | 85.24 | 89.01 | 79.88 | 84.71 |
| 10 | Kab. Majalengka | 92.62 | 87.24 | 89.93 | 90.50 | 84.02 | 87.14 | 94.88 | 86.53 | 90.54 | 96.35 | 88.00 | 92.17 |
| 11 | Kab. Sumedang | 95.86 | 91.06 | 93.39 | 98.01 | 92.07 | 95.04 | 98.21 | 94.89 | 96.53 | 98.30 | 95.76 | 97.01 |
| 12 | Kab. Indramayu | 80.24 | 62.66 | 71.48 | 81.85 | 60.95 | 71.81 | 83.83 | 67.72 | 75.61 | 85.32 | 67.11 | 76.42 |
| 13 | Kab. Subang | 90.69 | 85.00 | 87.73 | 90.67 | 84.19 | 87.42 | 89.49 | 79.49 | 84.39 | 92.74 | 84.90 | 88.83 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 94.54 | 84.15 | 89.45 | 94.03 | 84.75 | 89.49 | 96.95 | 90.49 | 93.77 | 97.95 | 91.25 | 94.72 |
| 15 | Kab. Karawang | 91.17 | 78.90 | 85.21 | 90.61 | 78.21 | 84.54 | 88.63 | 78.39 | 83.60 | 88.83 | 77.23 | 83.18 |
| 16 | Kab. Bekasi | 89.85 | 79.01 | 84.96 | 86.68 | 70.95 | 79.04 | 89.30 | 82.99 | 86.16 | 91.16 | 77.22 | 84.32 |
| 17 | Kota Bogor | 100.00 | 100.56 | 100.28 | 100.00 | 86.67 | 92.66 | 100.43 | 98.28 | 99.47 | 100.00 | 102.33 | 101.08 |
| 18 | Kota Sukabumi | 97.67 | 92.78 | 95.17 | 99.45 | 96.43 | 98.00 | 93.99 | 97.42 | 95.50 | 100.00 | 97.67 | 98.92 |
| 19 | Kota Bandung | 109.38 | 112.15 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Kota Cirebon | 84.38 | 68.00 | 77.19 | 4.55 | 3.92 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 1.09 |
| 21 | Kota Bekasi | 81.48 | 72.00 | 76.92 | 93.18 | 83.17 | 87.69 | 98.00 | 100.00 | 98.96 | 97.67 | 89.80 | 93.48 |
| 22 | Kota Depok | | | | 95.50 | 89.81 | 92.69 | 88.25 | 87.04 | 87.63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | **Jawa Barat** | **93.24** | **85.82** | **89.55** | **93.33** | **85.19** | **89.27** | **93.60** | **86.84** | **90.23** | **94.27** | **87.49** | **90.92** |

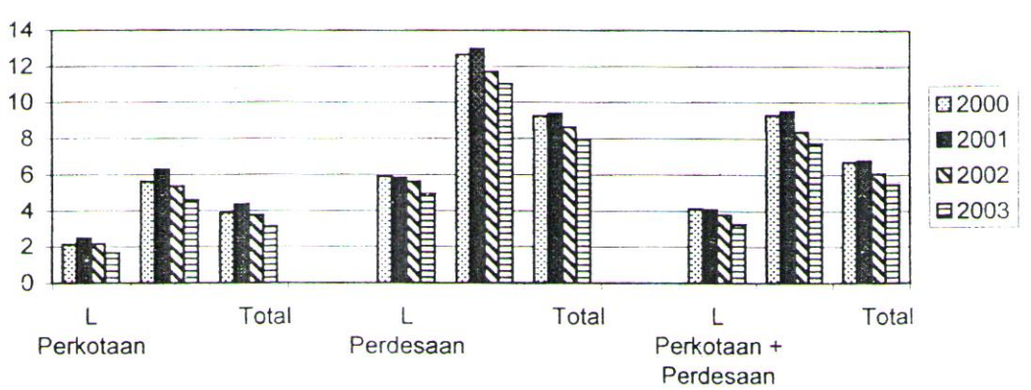
**Lampiran 14a. Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin**




**Lampiran 14b. Kemampuan Membaca dan Menulis Lainnya**




**Lampiran 14c. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis**



Lampiran 15. Sebaran Nilai UAN Tertulis Siswa SD Bekasi Jaya 1 menurut Rentang Nilai, Mata Pelajaran dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Tahun 2003/2004

| No | Rentang Nilai | Persentase | | Jumlah | IP | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | | | |
| **PPKn** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 37.50 | 62.50 | 8 | 1.67 | 25.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 48.15 | 51.85 | 27 | 1.08 | 3.70 |
| 3 | 7.01-8.00 | 57.50 | 42.50 | 40 | 0.74 | -15.00 |
| 4 | 6.01-7.00 | 57.14 | 42.86 | 21 | 0.75 | -14.29 |
| 5 | ≤6.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Agama** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 66.67 | 33.33 | 3 | 0.50 | -33.33 |
| 2 | 8.01-9.00 | 50.00 | 50.00 | 20 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 7.01-8.00 | 55.10 | 44.90 | 49 | 0.81 | -10.20 |
| 4 | 6.01-7.00 | 33.33 | 66.67 | 12 | 2.00 | 33.33 |
| 5 | ≤6.00 | 66.67 | 33.33 | 12 | 0.50 | -33.33 |
| **IPS** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 75.00 | 25.00 | 4 | 0.33 | -50.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 53.85 | 46.15 | 26 | 0.86 | -7.69 |
| 3 | 7.01-8.00 | 60.71 | 39.29 | 28 | 0.65 | -21.43 |
| 4 | 6.01-7.00 | 55.56 | 44.44 | 18 | 0.80 | -11.11 |
| 5 | ≤6.00 | 35.00 | 65.00 | 20 | 1.86 | 30.00 |
| **Bahasa Indonesia** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 55.56 | 44.44 | 9 | 0.80 | -11.11 |
| 2 | 8.01-9.00 | 51.35 | 48.65 | 37 | 0.95 | -2.70 |
| 3 | 7.01-8.00 | 57.14 | 42.86 | 21 | 0.75 | -14.29 |
| 4 | 6.01-7.00 | 57.14 | 42.86 | 21 | 0.75 | -14.29 |
| 5 | ≤6.00 | 37.50 | 62.50 | 8 | 1.67 | 25.00 |
| **Bahasa Sunda** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 25.00 | 75.00 | 16 | 3.00 | 50.00 |
| 3 | 7.01-8.00 | 54.84 | 45.16 | 31 | 0.82 | -9.68 |
| 4 | 6.01-7.00 | 62.50 | 37.50 | 32 | 0.60 | -25.00 |
| 5 | ≤6.00 | 62.50 | 37.50 | 16 | 0.60 | -25.00 |
| **Bahasa Inggris** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 76.92 | 23.08 | 13 | 0.30 | -53.85 |
| 2 | 8.01-9.00 | 44.00 | 56.00 | 25 | 1.27 | 12.00 |
| 3 | 7.01-8.00 | 62.50 | 37.50 | 24 | 0.60 | -25.00 |
| 4 | 6.01-7.00 | 38.46 | 61.54 | 13 | 1.60 | 23.08 |
| 5 | ≤6.00 | 47.62 | 52.38 | 21 | 1.10 | 4.76 |
| **Matematika** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 52.63 | 47.37 | 19 | 0.90 | -5.26 |
| 3 | 7.01-8.00 | 50.00 | 50.00 | 26 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 6.01-7.00 | 53.33 | 46.67 | 15 | 0.88 | -6.67 |
| 5 | ≤6.00 | 51.52 | 48.48 | 33 | 0.94 | -3.03 |
| **IPA** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 75.00 | 25.00 | 8 | 0.33 | -50.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 37.04 | 62.96 | 27 | 1.70 | 25.93 |
| 3 | 7.01-8.00 | 64.00 | 36.00 | 25 | 0.56 | -28.00 |
| 4 | 6.01-7.00 | 47.62 | 52.38 | 21 | 1.10 | 4.76 |
| 5 | ≤6.00 | 57.14 | 42.86 | 14 | 0.75 | -14.29 |

Lampiran 16. Sebaran Nilai UAN Praktek Siswa SD Bekasi Jaya 1 menurut Rentang Nilai, Mata Pelajaran dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, Tahun 2003/2004

| No | Rentang Nilai | Persentase | | Jumlah | IP | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | | | |
| **Agama** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 32.14 | 67.86 | 28 | 2.11 | 35.71 |
| 3 | 7.01-8.00 | 56.36 | 43.64 | 55 | 0.77 | -12.73 |
| 4 | 6.01-7.00 | 84.62 | 15.38 | 13 | 0.18 | -69.23 |
| 5 | ≤6.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Bahasa Indonesia** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 7.01-8.00 | 42.25 | 57.75 | 71 | 1.37 | 15.49 |
| 4 | 6.01-7.00 | 86.96 | 13.04 | 23 | 0.15 | -73.91 |
| 5 | ≤6.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **IPA** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 33.33 | 66.67 | 12 | 2.00 | 33.33 |
| 3 | 7.01-8.00 | 55.95 | 44.05 | 84 | 0.79 | -11.90 |
| 4 | 6.01-7.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ≤6.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **KTK** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 7.01-8.00 | 51.09 | 48.91 | 92 | 0.96 | -2.17 |
| 4 | 6.01-7.00 | 100.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | -100.00 |
| 5 | ≤6.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **PJK** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 50.00 | 50.00 | 8 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 7.01-8.00 | 57.53 | 42.47 | 73 | 0.74 | -15.07 |
| 4 | 6.01-7.00 | 33.33 | 66.67 | 15 | 2.00 | 33.33 |
| 5 | ≤6.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Bahasa Sunda** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 7.01-8.00 | 57.69 | 42.31 | 52 | 0.73 | -15.38 |
| 4 | 6.01-7.00 | 48.84 | 51.16 | 43 | 1.05 | 2.33 |
| 5 | ≤6.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Bahasa Inggris** | | | | | | |
| 1 | >9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8.01-9.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -100.00 |
| 3 | 7.01-8.00 | 47.06 | 52.94 | 34 | 1.13 | 5.88 |
| 4 | 6.01-7.00 | 55.88 | 44.12 | 34 | 0.79 | -11.76 |
| 5 | ≤6.00 | 53.85 | 46.15 | 26 | 0.86 | -7.69 |

**Lampiran 17. Nama-nama Penerbit Beberapa Bahan Ajar SD dan SMP Menurut Mata Pelajaran**

| No | Judul Buku | Penerbit | Kota Asal Penerbit |
|---|---|---|---|
| **SD** | | | |
| **Bahasa Indonesia** | | | |
| 1 | BI. KLS. 1 | Penerbit Erlangga/PT Sarana Panca Karya Nusa | Jakarta/Bandung |
| 2 | BI. KLS. 2 | Penerbit Erlangga | Jakarta |
| 3 | BI. KLS. 3 | PT. Tiga Serangkai | Solo |
| 4 | BI. KLS. 4 | Grafindo Media Pratama | Bandung |
| 5 | BI. KLS. 6 | Penerbit Erlangga/PT. Tiga Serangkai/ Grafindo Media Pratama | Jakarta/Solo/Bandung |
| **Ilmu Pengetahuan Sosial** | | | |
| 1 | IPS. KLS. 3 | Penerbit Erlangga | Jakarta |
| 2 | IPS. KLS. 4 | Penerbit Erlangga | Jakarta |
| **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** | | | |
| 1 | PPKn. KLS.1 | Grafindo Media Pratama | Bandung |
| 2 | PPKn. KLS.2 | Grafindo Media Pratama | Bandung |
| 3 | PPKn. KLS.4 | Grafindo Media Pratama | Bandung |
| 4 | PPKn. KLS.5 | PT. Sarana Panca Karya Nusa | Bandung |
| | | | |
| **SMP** | | | |
| **Bahasa Indonesia** | | | |
| 1 | BI. KLS. 1 | CV. Teguh Karya | Solo |
| 2 | BI. KLS. 2 | Epsilon Grup | Bandung |
| 3 | BI. KLS. 3 | CV. Teguh Karya | Solo |
| **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** | | | |
| 1 | PPKn. KLS.1 | CV. Teguh Karya | Solo |
| 2 | PPKn. KLS.2 | Epsilon Grup | Bandung |
| 3 | PPKn. KLS.3 | Epsilon Grup | Bandung |

**Lampiran 18. Analisis Materi Bahan Ajar Bahasa Indonesia (BI)**

| No. | Judul Buku Penerbit | Jumlah Pokok Bahasan (bab) | Materi Berperspektif Gender | Hasil Penilaian | | Jumlah Gambar | Gambar Berperspektif Gender | Hasil Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bias (%) | Tidak Bias (%) | | | Bias (%) | Tidak Bias (%) | |
| 1 | BI, KLS. 1, EL | 139 (26) | 16 | 75 | 25 | 786 | 77 | 44,2 | 55,8 | EL = Erlangga |
| 2 | BI, KLS. 2, EL | 56 (11) | 69 | 47,5 | 52,5 | 292 | 49 | 36,7 | 63,3 | |
| 3 | BI, KLS. 3, EL | 55 (11) | 11 | 27,3 | 72,7 | 211 | 28 | 57,1 | 42,9 | |
| 4 | BI, KLS. 1, EL | 45 (9) | 30 | 33,3 | 66,7 | 265 | 8 | 87,5 | 12,5 | |
| 5 | BI, KLS. 2, EL | 68 (17) | 47 | 17,2 | 82,8 | 339 | 35 | 31,4 | 68,6 | |
| 6 | BI, KLS. 3, EL | 84 (21) | 113 | 13,3 | 86,7 | 206 | 35 | 68,6 | 31,4 | |
| 7 | BI, KLS. 4, EL | 85 (17) | 43 | 60,5 | 39,5 | 131 | 26 | 47,2 | 52,8 | |
| 8 | BI, KLS. 5, EL | 36 (9) | 47 | 32 | 68 | 70 | 26 | 69,2 | 30,8 | |
| 9 | BI, KLS. 6, EL | 32 (8) | 74 | 20,3 | 79,7 | 41 | 14 | 92,9 | 7,1 | |
| 10 | BI, KLS. 1, BP | 130 (10) | 1 | 100 | 0 | - | 6 | 100 | 0 | BP = Balai Pustaka |
| 11 | BI, KLS. 2, BP | 74 (10) | 10 | 50 | 50 | 74 | - | - | - | |
| 12 | BI, KLS. 3, BP | 21 (21) | 1 | 100 | 0 | 101 | 37 | 59,5 | 40,5 | |
| 13 | BI, KLS. 4, BP | 0 (18) | 2 | 50 | 50 | 110 | 12 | 58,3 | 41,7 | |
| 14 | BI, KLS. 5, BP | 0 (17) | 1 | 100 | 0 | 86 | 6 | 83,3 | 16,7 | |
| 15 | BI, KLS. 1, YT | 0 (17) | 49 | 40,8 | 59,2 | 357 | 42 | 86 | 14 | YT =Yudistira |
| 16 | BI, KLS. 2, YT | 0 (17) | 6 | 100 | 0 | 250 | 6 | 50 | 50 | |
| 17 | BI, KLS. 3, YT | 0 (10) | - | - | - | 23 | 1 | 100 | 0 | |
| 18 | BI, KLS. 4, YT | 0 (18) | 3 | 100 | 0 | 38 | - | - | - | |
| 19 | BI, KLS. 5, YT | 70 (9) | 26 | 46,2 | 53,8 | 34 | 13 | 46,2 | 53,8 | |
| 20 | BI, KLS. 6, YT | 93 (16) | 25 | 80 | 20 | 68 | 13 | 100) | 0 | |
| 21 | BI, KLS. 1, IP | 0 (9) | 35 | 31,4 | 68,6 | 353 | 11 | 81,8) | 18,2 | IP = Intan Pariwara |
| 22 | BI, KLS. 2, IP | 0 (9) | 17 | 88,2 | 11,8 | 110 | 17 | 70,6 | 29,4 | |
| 23 | BI, KLS. 3, IP | 0 (11) | 35 | 54,3 | 45,7 | 121 | 12 | 91,6 | 8,4 | |
| 24 | BI, KLS. 4, IP | 0 (9) | 30 | 60 | 40 | 186 | 70 | 68,6 | 31,4 | |
| 25 | BI, KLS. 5, IP | 0 (9) | 1 | 0 | 100 | 176 | - | - | - | |
| 26 | BI, KLS. 6, IP | 0 (8) | 43 | 14 | 86 | 157 | 54 | 51,8 | 48,2 | |
| Jumlah | | | 735 | 36,87 | 62,78 | | 598 | 61,87 | 38,13 | |

Sumber : Pusat Studi Wanita-Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta, 2000

**Lampiran 19. Analisis Materi Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)**

| No. | Judul Buku Penerbit | Jumlah Pokok Bahasan (bab) | Materi Berperspektif Gender | Hasil Penilaian | | Jumlah Gambar | Gambar Berperspektif Gender | Hasil Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bias (%) | Tidak Bias (%) | | | Bias (%) | Tidak Bias (%) | |
| 1 | IPA, KLS. 3, EL | 153 (12) | - | - | - | 173 | 9 | 55,5 | 44,5 | EL = Erlangga |
| 2 | IPA, KLS. 4, EL | 101 (11) | - | - | - | 194 | 3 | 100 | 0 | |
| 3 | IPA, KLS. 5, EL | 168 (12) | 1 | 0 | 100 | 221 | 14 | 100 | 0 | |
| 4 | IPA, KLS. 6, EL | 150 (11) | - | - | - | 216 | - | - | - | |
| 5 | IPA, KLS. 3, IP | 19 (9) | - | - | - | 345 | 3 | 100 | 0 | IP = Intan Pariwara |
| 6 | IPA, KLS. 4, IP | 26 (11) | 2 | 0 | 100 | 482 | 16 | 100 | 0 | |
| 7 | IPA, KLS. 5, IP | 30 (11) | - | - | - | 530 | 4 | 75 | 25 | |
| 8 | IPA, KLS. 3, YT | 21 (10) | - | - | - | 274 | 6 | 83,3 | 16,7 | YT = Yudhistira |
| 9 | IPA, KLS. 4, YT | 31 (11) | - | - | - | 531 | 11 | 45,5 | 54,5 | |
| 10 | IPA, KLS. 5, YT | 33 (10) | 6 | 0 | 100 | 539 | 34 | 79,4 | 20,6 | |
| 11 | IPA, KLS. 6, YT | 18 (7) | - | - | - | 123 | 4 | 0 | 100 | |
| 12 | IPA, KLS. 3, BP | 52 (11) | - | - | - | 93 | 15 | 73,3 | 26,7 | BP = balai Pustaka |
| 13 | IPA, KLS. 4, BP | 66 (11) | - | - | - | 210 | 4 | 25 | 75 | |
| 14 | IPA, KLS. 5, BP | 53 (10) | 4 | 0 | 100 | 174 | 39 | 59 | 41 | |
| 15 | IPA, KLS. 6, BP | 40 (9) | - | - | - | 108 | 2 | 0 | 100 | |
| Jumlah | | | 13 | 0 | 100 | 164 | 13 100 | 70,73 | 29,27 | |

Sumber : Pusat Studi Wanita-Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta, 2000

**Lampiran 20. Analisis Materi Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)**

| No. | Judul Buku Penerbit | Jumlah Pokok Bahasan (bab) | Materi Berperspektif Gender | Hasil Penilaian | | Jumlah Gambar | Gambar Berperspektif Gender | Hasil Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bias (%) | Tidak Bias (%) | | | Bias (%) | Tidak Bias (%) | |
| 1 | IPS, KLS. 3 YT | 39 (11) | 39 | 25,6 | 74,4 | 114 | 22 | 77,3 | 22,7 | YT = Yudhistira |
| 2 | IPS, KLS. 4 YT | 23 (7) | 4 | 50 | 50 | 164 | 15 | 40 | 60 | |
| 3 | IPS, KLS. 5 YT | 29 (9) | 14 | 2,4 | 97,6 | 148 | 11 | 81,9 | 18,1 | |
| 4 | IPS, KLS. 6 YT | 26 (11) | 7 | 57,1 | 42,9 | 115 | 9 | 22,2 | 77,8 | |
| 5 | IPS, KLS. 3 BP | 40 (9) | 1 | 0 | 100 | 113 | 16 | 68,8 | 31,2 | BP = Balai Pustaka |
| 6 | IPS, KLS. 4 BP | 80 (13) | 37 | 13,5 | 86,5 | 51 | 2 | 22,2 | 77,8 | |
| 7 | IPS, KLS. 5 BP | 4 (14) | 1 | 100 | 0 | 81 | 6 | 0 | 100 | |
| 8 | IPS, KLS. 6 BP | 75 (18) | 1 | 100 | 0 | 96 | 2 | 50 | 1 (50) | |
| 9 | IPS, KLS. 3 IP | 33 (11) | 13 | 69,2 | 30,8 | 281 | 63 | 65 | 35 | IP = Intan Pariwara |
| 10 | IPS, KLS. 4 IP | 36 (10) | | 0 | | 316 | 22 | 54,6 | 45,4 | |
| 11 | IPS, KLS. 6 IP | 33 (12) | 5 | 60 | 40 | 288 | 8 | 50 | 50 | |
| 12 | IPS, KLS. 3 EL | 42 (3) | 20 | 20 | 80 | 36 | 17 | 53 | 47 | EL = Erlangga |
| 13 | IPS, KLS. 4 EL | 77 (6) | | | | 40 | 15 | 53,3 | 46,7 | |
| 14 | IPS, KLS. 5 EL | 69 (7) | 20 | 45 | 55 | 60 | 4 | 100 | 0 | |
| 15 | IPS, KLS. 6 EL | 75 (9) | 2 | 100 | 0 | 81 | 20 | 0 | 100 | |
| Jumlah | | | 164 | 31,10 | 68,90 | | 232 | 54,31 | 45,69 | |

Sumber : Pusat Studi Wanita-Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta, 2000

**Lampiran 21. Analisis Materi Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**

| No. | Judul Buku Penerbit | Jumlah Pokok Bahasan (bab) | Materi Berperspektif Gender | Hasil Penilaian | | Jumlah Gambar | Gambar Berperspektif Gender | Hasil Penilaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bias (%) | Tidak Bias (%) | | | Bias (%) | Tidak Bias (%) | |
| 1 | PPKn, KLS. 3 BP | 15 (15) | 26 | 38,5 | 61,5 | 39 | 15 | 66,7 | 33,3 | BP= Balai Pustaka |
| 2 | PPKn, KLS. 4 BP | 15 (15) | 34 | 64,7 | 35,3 | 41 | 18 | 33,3 | 66,7 | |
| 3 | PPKn, KLS. 5 BP | 15 (15) | | | | 25 | | | | |
| 4 | PPKn, KLS. 6 BP | 15 (15) | 28 | 53,3 | 46,4 | 24 | 15 | 40 | 60 | |
| 5 | PPKn, KLS. 1 BP | 75 (15) | | | | 40 | 10 | 70 | 30 | |
| 6 | PPKn, KLS. 1 YT | 45 (11) | 15 | 66,7 | 33,3 | 112 | 3 | 100 | 0 | YT = Yudhistira |
| 7 | PPKn, KLS. 2 YT | 90 (10) | 11 | 54,5 | 45,5 | 179 | | | | |
| 8 | PPKn, KLS. 3 YT | 42 (12) | 19 | 78,9 | 21,1 | 82 | 6 | 100 | 0 | |
| 9 | PPKn, KLS. 4 YT | 27 (11) | 14 | 78,6 | 21,4 | 55 | 11 | 90,9 | 9,1 | |
| 10 | PPKn, KLS. 5 YT | 34 (13) | 19 | 63,8 | 7 (36,8) | 60 | 16 | 75 | 25 | |
| 11 | PPKn, KLS. 6 YT | 32 (12) | | | | 64 | | | | |
| 12 | PPKn, KLS. 1 EL | 28 (11) | 22 | 86,4 | 13,6 | 279 | 17 | 76,5 | 23,5 | EL = Erlangga |
| 13 | PPKn, KLS. 2 EL | 60 (10) | 17 | 53 | 47 | 139 | 7 | 100 | 0 | |
| 14 | PPKn, KLS. 3 EL | 25 (12) | 15 | 100 | 0 | 101 | 15 | 60 | 40 | |
| 15 | PPKn, KLS. 4 EL | 22 (11) | 15 | 60 | 40 | 102 | 15 | 80 | 20 | |
| 16 | PPKn, KLS. 5EL | 26 (13) | 31 | 54,8 | 45,2 | 105 | 18 | 77,8 | 22,2 | |
| 17 | PPKn, KLS. 6 EL | 24 (12) | 21 | 81 | 19 | 170 | 12 | 66,7 | 33,3 | |
| 18 | PPKn, KLS. 2 IP | 5 (5) | 9 | 100 | 0 | 84 | 5 | 100 | 0 | IP = Intan Pariwara |
| Jumlah | | | 296 | 66,2 | 33,8 | | 178 | 72 | 28 | |

Sumber : Pusat Studi Wanita-Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta, 2000

**Lampiran 22. Analisis Materi Bahan Ajar Tangkas Pengetahuan Sosial SD Kelas 2, 3, 5 dan 6, Berbasis Kurikulum 2004**

| No | Judul Buku Penerbit | Jumlah Pokok Bahasan (Bab) | Analisis Materi | | | Jumlah Gambar | Analisis Gambar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bias Gender | Netral Gender | Responsif Gender | | Bias Gender | Netral Gender | Responsif Gender |
| **Tangkas Pengetahuan Sosial SD Kelas 2, 3, 5 dan 6** | | | | | | | | | |
| 1 | Tangkas Pengetahuan Sosial, KLS 2, RR | 15 (5) | 2 (13.33%) | 3 (20%) | 10 (66.67%) | 103 | 52 (50.49%) | 26 (25.24%) | 25 (24.27) |
| 2 | Tangkas Pengetahuan Sosial, KLS 3, RR | 30 (10) | 9 (30%) | 16 (53.33%) | 5 (16.67%) | 140 | 88 (62.9%) | 28 (20%) | 24 (17.1%) |
| 3 | Tangkas Pengetahuan Sosial, KLS 5, RR | 33 (10) | - | 33 (100%) | - | 143 | 36 (25.17%) | 93 (65.03%) | 14 (9.79%) |
| 4 | Tangkas Pengetahuan Sosial, KLS 6, RR | 28 (9) | - | 28 (100%) | - | 88 | 22 (25%) | 49 (55.68%) | 17 (19.32%) |
| **Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6** | | | | | | | | | |
| 1 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 1, RR | 88 (17) | 16(18.18%) | 60(68.18%) | 12(13.63%) | 508 | 157 (30.91%) | 319 (62.80%) | 32 (6.30%) |
| 2 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 2, RR | 83 (17) | 26(31.33%) | 46(55.42%) | 11(13.25%) | 180 | 88 (46.44%) | 53 (29.78%) | 39 (21.91%) |
| 3 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 3, RR | 71 (16) | 12(16.9%) | 53(74.65%) | 6(8.45%) | 88 | 47 (53.41%) | 23 (26.14%) | 18 (20.45%) |
| 4 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 4, RR | 64 (16) | 24(37.5%) | 32(50%) | 8(12.5%) | 89 | 43 (48.31%) | 31 (34.83%) | 15 (16.85%) |
| 5 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 5, RR | 60 (14) | 10(16.67%) | 43(71.67%) | 7(11.67) | 69 | 41 (59.42%) | 13 (18.84%) | 15 (21.74%) |
| 6 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 6, RR | 63 (15) | 11 (17.46%) | 44(69,84%) | 8 (12.70%) | 47 | 26 (55.32%) | 12 (25.53%) | 9 (19.15%) |

Ket : RR = Remaja Rosdakarya

**Lampiran 23. Contoh-contoh Teks Bahan Ajar Bias Gender**

**A. Materi Tangkas Berbahasa Indonesia**

Teks Bias Gender yang terdapat dalam materi Tangkas Berbahasa Indonesia SD, penerbit Remaja Rosdakarya Bandung, dapat dilihat dalam 4 kategori :

**1. Sifat Gender Maskulin – Feminin.**

*a). Model/tokoh anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.*

Dalam teks bahan ajar seringkali dijumpai model atau tokohnya anak laki-laki saja atau anak perempuan saja. Sebaiknya dalam suatu ilustrasi cerita ada 2 tokoh, anak laki-laki dan perempuan, sehingga dapat melihat adanya penggambaran anak laki-laki dan perempuan yang sama-sama mandiri.

Hal ini dapat dilihat dalam percakapan, artikel maupun cerita :

1) Kelas 1
   - Pelajaran 1
     "Ini saya. Nama saya Ani. Umur saya 7 tahun. Saya sudah bisa mandiri sendiri. Bagaimana dengan teman-teman?"
     "Saya Ani. Umur saya 7 tahun. Saya murid kelas satu....."
   - Pelajaran 9
     "Rumah Gino terbakar akibat kompor meledak. Warga datang membantu. Api dapat dipadamkan
     "Saya ingin jadi dokter," kata Budi
     "Saya ingin jadi insinyur pertanian...", kata Arif
     "Saya ingin jadi guru....", kata Maman
     "Saya ingin jadi pedagang besar.....", kata Amin.
   - Pelajaran 16
     "Hai teman-teman, dengar cerita saya. Tadi di jalan Toni dan Budi cerita Roni sakit perut, sekarang dirawat akibat jajan sembarangan."
2) Kelas 2
   - Pelajaran 2
     "Aku Falah, tiap hari aku melaksanakan sendiri kegiatan."
   - Pelajaran 3
     "Gibran, Rangga dan Fatur murid kelas dua. Mereka bersama-sama ke sekolah."
   - Pelajaran 3
     "Rusli sedang menyampaikan pesan kakek kepada ayah dan ibu."
3) Kelas 3
   - Pelajaran 4
     "Sementara itu, Apip, Anggara, dan Priyo tidak bermain. Mereka waspada terhadap pemuda pengedar narkoba."
4) Kelas 5
   - Pelajaran 9
     Percakapan Ayu dan Rika.

*b). Anak laki-laki menyukai permainan/olah raga keras atau memerlukan fisik yang kuat, terlihat gagah berani.*

1) Kelas 1
   - Pelajaran 5
     "Cecep dan Wawan main bola. Iwan dan Candra ikut pula. Mereka gemar main bola, karena itu mereka sehat."
   - Pelajaran 12
     "Lukman suka bermain layang-layang....."

2) Kelas 2
   - Pelajaran 5
     "Anton, Luki, Dino, dan Piter ke lapangan. Mereka akan bermain bola."

3) Kelas 5
   - Pelajaran 5
     Percakapan antara Sony dan Rizki tentang pertandingan sepak bola
     Sony : "Suporter dari kedua kesebelasan juga tampaknya hampir sama banyak."
     Rizky : "Tapi kamu menjagokan kesebelasan kita, kan?"

4) Kelas 6
   - Pelajaran 10
     Edi : Belanda akan menyerang kita. Bagaimana sikap kalian?
     Teguh : Kita harus mengatur siasat yang jitu.
     Dedi : Usul yang baik
     Ari : Kalau begitu kita harus bertindak cepat.

c) *Anak laki-laki digambarkan lebih pintar, bertanggung jawab, rajin*

1) Kelas 1
   - Pelajaran 15
     "....Piter mewakili sekolah kami. Piter menjadi juara."

2) Kelas 2
   - Pelajaran 2
     "Fatmah memang anak yang rajin. Keperluan sekolah diurus sendiri...."
   - Pelajaran 6
     "Aku Rangga. Aku suka bangun pagi. Suka pula merapikan tempat tidurku.....Aku tidak suka jajan sembarangan....."
   - Pelajaran 9
     "Olan adalah anak yang rajin belajar. Dia amat senang membaca buku."
   - Pelajaran 11
     "Hadi hidupnya miskin. Walaupun miskin salatnya tidak pernah ditinggal."
   - Pelajaran 15
     "Nazarudin suka sekali berolok-olok. Nazarudin tidak kehabisan akal....."
   - Pelajaran 17
     "Apa sebabnya tidak tuan usir pula opor itu sebelum tuan makan? Kalau diusir opor itu, tentu akan menjadi dua kakinya. Ya kan, Tuan!" kata Nazarudin pintar."

3) Kelas 3.
   - Pelajaran 1
     "Dr. Peter Van Houtman adalah seorang sarjana kehewanan yang berasal dari Belanda....."
   - Pelajaran 2
     "Andi terkenal sebagai anak yang rajin."
     "Hai, Minah! Jangan buang sampah di parit!" seru Andi kepada gadis cilik yang hendak membuang sampah ke parit.
   - Pelajaran 11
     "Untuk itu, jangan membaca satu buku saja, baca pula buku bahasa Indonesia yang lain." kata Deni

4) Kelas 4.
   - Pelajaran 9
     "Paman Dahlan akan berangkat ke Jerman karena mendapat tugas belajar dari tempat ia bekerja."

*d) Anak laki-laki seringkali mengalami hal-hal yang menakutkan, mengerikan, sembrono, suka terhadap hal-hal yang menantang, membahayakan.*

1) Kelas 1
- Pelajaran 12
  ".....Saya ke sekolah, di tengah jalan saya dikejar anjing, saya takut, saya berlari cepat.....", cerita Andi

2) Kelas 2
- Pelajaran 2
  "....Bahuku tersenggol sepeda itu. Aku terjatuh.....Aku kurang hati-hati...."
- Pelajaran 9
  "Arif adalah temanku. Kira-kira jam sembilan tadi pagi ia memanjat pohon. Agak tinggi pohon itu. Licin pula batangnya. Karena itu kaki arif terpeleset."
- Pelajaran 10
  "Di dekat sekolah banyak makanan yang dijual orang. Makanan itu tidak pernah ditutup.....Beberapa kue dilahap Heri. Tak lama kemudian perutnya terasa sakit."
- Pelajaran 15
  "Lopez tidak suka berlatih menulis. Ia suka bermain sepeda saja."

*e) Anak perempuan menyukai permainan yang lembut, kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghibur*

1) Kelas 1
- Pelajaran 15
  "Ida dan Fani tidak sekolah. Mereka main bekel."

2) Kelas 2
- Pelajaran 4
  "Di sekolah kami ada lomba menyanyi. Wakil dari lima sekolah siap ikut lomba. Sekolah kami diwakili oleh Waljiah."

3) Kelas 4
- Pelajaran 1.
  "Lina murid kelas 4. Ia bersekolah di SD Margamulya Kecamatan Padasuka. Ia sangat menyenangi pelajaran Bahasa Indonesia, terutama membaca puisi."
- Pelajaran 2
  "Hari ini di sekolah Lina diadakan lomba membuat tumpeng."
- Pelajaran 10
  "Berbeda dengan Lina yang gemar membaca puisi, kegemaran Yusi adalah melukis."

4) Kelas 5
- Pelajaran 2
  "Cici tidak pernah membeda-bedakan sahabat.

*f) Anak perempuan lebih gampang untuk menunjukkan perasaan sedih, sakit, gampang tersentuh hatinya, lembut perasaannya, timbul rasa ingin menolong.*

1) Kelas 1
- Pelajaran 16
  "....Rini tampak agak pucat.....Saya tidak makan apa-apa, kemarin saya makan rujak, rujak itu pedas sekali....."

2) Kelas 4
- Pelajaran 8
  "Setelah ibunya keluar, hati Lina berbisik, untunglah aku hemat, kalau tidak? Bagaimana aku menolong ibuku. Lina pun merasa bahagia.

3) Kelas 5
- Pelajaran 5

"Keesokan harinya, pukul delapan malam, ibu mondar-mandir gelisah di depan rumah menunggu ayah pulang. Biasanya pukul lima sore ayah sudah sampai di rumah."

4) Kelas 6
- Pelajaran 9

Ayah Novi ternyata harus diopname. Padahal di kampung Novi dan sekitarnya belum ada rumah sakit. Oleh karena itu, Novi harus membawanya ke kota. Sungguh di luar dugaan semua orang, ternyata Novi mampu membayar seluruh biaya perawatan ayahnya.

*g). Anak laki-laki berwatak keras, berpendirian teguh*

1) Kelas 3
- Pelajaran 15

"Dengan linggis bertuahnya, Candra tetap teguh membuat saluran air meskipun mendapat cemooh dari Praya Wangsa."

*h). Anak laki-laki menyukai wayang*

1). Kelas 4
- Pelajaran 3

"Apakah yang sedang dilakukan Beni dan temannya? Pernahkah kamu bermain wayang?

*i) Anak laki-laki suka membangkang, jahat, kejam*

1) Kelas 5
- Pelajaran 11

"Perempuan tua celaka. Kau bukan ibuku. Aku tak kenal siapa kau. Pergi kau!" kata Sampuraga.
- Pelajaran 13

"Namun, Dewata Cengkar tidak mengetahui kalau Haji Saka itu seorang yang sakti yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk membinasakan dan mengakhiri perbuatan sewenang-wenangnya.
- Pelajaran 14

Dalam dialog

Marni : Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Itu pesan ibu.

Edi : Tidak bisa. Aku harus berangkat sekarang.

*j) Anak laki-laki nakal, gampang marah/tersinggung.*

1) Kelas 3
- Pelajaran 7

"Kenakalan Ronal dan Tedi sedikit demi sedikit mempengaruhi Encas. Encas yang semula disiplin, mulai berubah menjadi anak yang nakal."

2) Kelas 4
- Pelajaran 4

"Mengapa kamu terlambat lagi, Don?" tanya Bu Ida. Maaf Bu, jalan macet," kata Doni

2) Kelas 6
- Pelajaran 3

"Loreng, jangan-jangan kau telah menerkam anakku?" kata sang suami sambil menahan marahnya.

*k) Anak perempuan seringkali dituntut untuk cantik, lemah lembut, menawan*

1). Kelas 6

- Pelajaran 11
  "Karena kecantikan Roro Anteng yang luar biasa itulah, seorang perompak dari Laut Utara datang ke Pananjakan untuk melamar Roro Anteng."

## 2. Peran Gender Produktif dan Reproduktif.

*a) Peran Produktif*

Laki-laki seringkali digambarkan berperan produktif di ranah publik. Tanggung jawab laki-laki dalam keluarga untuk mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini dapat kita dapatkan di beberapa contoh di bawah ini.

1). Kelas 1

- Pelajaran 14
  "Pak Wardoyo petani teladan

2). Kelas 2

- Pelajaran 11
  "Ayah, kutahu engkau sangat lelah, setelah membanting tulang demi kami sekeluarga."
- Pelajaran 14
  "Ayah ke sawah"
- Pelajaran 16
  "Siang itu Dudi mengantarkan makanan. Makanan untuk Ayah yang bekerja."

3). Kelas 3

- Pelajaran 5
  "Pak Tata telah berangkat menengok orang yang bekerja di sawah."

4). Kelas 4

- Pelajaran 16
  "Pamanku seorang petani."

5). Kelas 5

- Pelajaran 4
  "Ayah Tia, salah seorang murid SD Sekar Sari, adalah seorang ahli ekonomi."

6). Kelas 6

- Pelajaran 1
  "karena tugas ayahku, terpaksa aku meninggalkanmu"
- Pelajaran 4
  "Tampak seorang bapak sedang bekerja di kebun cengkih."
  Selaku petugas PPL, Pak Darto menjelaskannya dengan panjang lebar.

Dalam materi bahan ajar Tangkas Berbahasa Indonesia juga digambarkan perempuan yang berperan produktif di ranah publik, namun demikian pembagian kerja secara gender masih terjadi. Pekerjaan seperti perawat, seringkali digambarkan seorang perempuan, sedangkan polisi, dokter adalah laki-laki. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa contoh di bawah ini :

1). Kelas 2

- Pelajaran 9
  "Nama ibuku Yuliana. Pekerjaan perawat. Bertugas di Rumah Sakit."
- Pelajaran 9
  "Maaf, Bu, dimana tempat praktik dr. Iwan?"

2). Kelas 5

- Pelajaran 3

  Dialog antara pewawancara dengan polisi

  Pewawancara : Bapak, akhir-akhir ini sering terdengar adanya peristiwa penculikan, benarkah?

  Polisi : Benar. Penculikan dilakukan oleh orang-orang yang menyamar sebagai pedagang makanan.

3). Kelas 6

- Pelajaran 14

  "Pasien nomor 23 masuk. Pria berbaju putih itupun mempersilahkan duduk. Sang pasien ditanya berbagai keluhan yang dialaminya. Selanjutnya ia diperiksa dengan teliti."

*b) Peran Reproduktif*

Perempuan diberi label berperan semata-mata dalam kegiatan domestik (mencuci, belanja), suatu kegiatan yang tidak dianggap sebagai pekerjaan ekonomi. Bahkan mulai dari kecil, anak perempuan sudah ditekankan bahwa mereka harus bisa mengerjakan pekerjaan/kegiatan domestik

1). Kelas 1

- Pelajaran 8

  "Ani mencuci piring"

  "Ibu ke pasar"

- Pelajaran 11

  ".....Ibu sibuk di dapur. Ayah mencuci motor. Santi menyapu halaman...."

2). Kelas 2

- Pelajaran 3

  "Bu, sedang apa? Sedang masak, Nak!"

- Pelajaran 9

  "Dini membantu ibu di dapur. Edi membersihkan halaman rumah."

- Pelajaran 10

  "Apa yang sedang dilakukan Yani? Dia sedang menyapu halaman."

- Pelajaran 11

  "Ayah bekerja di halaman. Ibu bekerja di dapur."

- Pelajaran 14

  "Pagi-pagi ibu ke pasar"

3). Kelas 3

- Pelajaran 11

  "Tak lama kemudian, Bawang putih datang dari sungai dengan membawa keranjang berisi cucian pakaian."

- Pelajaran 15

  "Ibumu pasti sering memasak untuk makan seluruh anggota keluarga."

4). Kelas 4

- Pelajaran 5

  "Bu Hamzah memasak untuk makan pagi bersama-sama."

- Pelajaran 15

  "Adik Lina yang masih bayi akan dibawa ibunya ke posyandu"

**3. Peran Sosial**

Seringkali kegiatan sosial yang ada di masyarakat dilaksanakan oleh kaum laki-laki, perempuan hanya bersifat membantu.

**Lanjutan Lampiran 23. Contoh-contoh Teks Bahan Ajar Bias Gender**

1). Kelas 2

- Pelajaran 3

  Percakapan ;

  Anak : Ke mana, Ayah?
  Ayah : Ke pos RW, Nak
  Anak : Ada apa di sana?
  Ayah : Ada kegiatan kerja bakti!

2). Kelas 4

- Pelajaran 7

  "Bapak-bapak dan para pemuda bahwa pada hari Minggu pagi akan diadakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan jalan dan selokan sepanjang jalan desa."

- Pelajaran 13

  "Bukan, ayah bukan mau ke kantor. Ayah mau pergi ke Kelurahan."

**4. Status gender**

Laki-laki dalam hal status gender dalam keluarga, masyarakat, dan negara diberi label sebagai pemimpin atau kepala keluarga, pemimpin masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, ketua kegiatan, direktur perusahaan, sedangkan perempuan hanya sebagai anggota/pengikut.

1). Kelas 1

- Pelajaran 16

  "Pak Guru memimpin senam itu"

2). Kelas 2

- Pelajaran 12

  Percakapan;

  "Selamat malam, Pak RT!" kata Anton
  "Selamat malam, anton!
  "Begini, Pak RT, saya melaporkan jembatan Tambe rusak berat diterjang banjir."

- Pelajaran 13

  "Apa di sini, rumah pak RW?"

3). Kelas 3

- Pelajaran 3

  "Pada zaman dahulu, ada seorang Baginda Raja yang mempunyai seorang anak gagah perkasa yang bernama Pangeran Agung."
  "Perhatian, barisan siap grak!" seru Adis. Adis lalu berjalan memeriksa barisan...."

- Pelajaran 10

  "Ayah Pia adalah seorang pengusaha. Sementara itu, ibu Pia adalah seorang ibu rumah tangga."

4). Kelas 4

- Pelajaran 11

  "Pak Kusnadi, guru kelas VI, bertindak sebagai Pembina Upacara.

5). Kelas 5

- Pelajaran 10

  Panitia Karyawisata SD Sekarsari ke Bandar Udara Soekarno-Hatta
  Ketua : Fahmi Atmawijaya
  Bendahara : Rika Ayuningtyas
  Sekretaris : Tia Setiati

6). Kelas 6

- Pelajaran 5

"Rizky selaku ketua kelas VI diserahi tugas oleh wali kelas untuk memimpin diskusi awal dalam rangka persiapan rencana karyawisata tersebut."

**Lanjutan Lampiran 23. Contoh-contoh Teks Bahan Ajar Bias Gender**

**B. Materi Tangkas Pengetahuan Sosial**

**1. Sifat Gender Maskulin – Feminin.**

*a). Model/tokoh lebih banyak anak laki-laki dan anak laki-laki digambarkan lebih pintar dan cerdik*

1) Kelas 2

- Bab 3 "Hidup Hemat"

"Ronal berkata pada ibunya. Kalau ada uang simpan saja dulu, Bu! Siapa tahu besok ada yang lebih penting. Uang itu dapat kita manfaatkan....."

".....Syaiful melihat lampu ruang tamu dan dapur menyala. Syaiful segera mematikannya....."

"Angga adalah murid kelas 2. Setiap hari mendapat uang jajan dari ibunya. Uang itu tidak pernah dihabiskannya. Sebagian ia tabungkan sendiri....."

"Digo naik ke kelas dua. Nilai rapornya bagus-bagus. Ia juara pertama. Digo merasa bahagia"

2) Kelas 3

- Bab 1 "Kejujuran"

".....Danil telah berbicara jujur. Ia berterus terang kepada ibunya bahwa bukunya telah habis....."

"Danil.....Harganya Rp 4.500,00. Masih ada sisa uang Rp 500,00. Ini sisa uangnya, Bu!

- Bab 9 "Denah Sekolah"

".....Dengan memperhatikan denah, Zulkifli berangkat menuju rumah kepala sekolah. Tanpa banyak bertanya Zulkifli dengan mudah menemukan rumah kepala sekolah."

*b). Anak laki-laki ceroboh, nakal, suka membolos*

Anak laki-laki cenderung digambarkan ceroboh, tidak peduli dengan keadaan sekitar.

1) Kelas 2

- Bab 3 "Hidup Hemat"

".....Selesai mencuci, Rudi tidak menutup kran air. Air tetap mengalir membasahi halaman....."

2) Kelas 3

- Bab 1 "Kejujuran"

".....Tanpa berpikir panjang Teja membuka dompet itu. Di dalamnya ada 4 lembar uang kertas lima ribuan. Diambilnya 3 lembar....."

"Di sekolah Teja sering berbuat tidak jujur. Ia sering bolos dari sekolah. Alasannya sakit. Teman-teman sering melihat ia bermain....."

"Teja sering berbuat curang. Gogo dan Sino sering kecewa dan marah....."

*c). Nilai gender feminin, dimana seorang isteri (perempuan) digambarkan sebagai seorang yang lembut, penuh kasih sayang, tabah dan tegar.*

1) Kelas 3

- Bab 1 "Peristiwa Penting dalam Keluarga"

".....Peristiwa demi peristiwa itu membuat Pak Salam patah semangat. Untung isterinya selalu tabah dan tegar....."

d). Anak laki-laki diharapkan bersikap sportif

1) Kelas 3

- Bab 1 "Kejujuran"

  "Maaf, Pak! Maaf, Bu! Kaca jendela pecah terkena bola voli. Kami bermain voli. Bola voli melenceng dan mengenai kaca jendela.....Roni dan Ruri anak yang baik....."

**2. Peran Produktif dan Reproduktif**

*a. Peran Produktif*

Peran laki-laki dalam peran produktif, bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Peran ibu juga penting, namun sepertinya lebih menunjukkan lebih penting peran ayah dalam keluarga. Seharusnya lebih menunjukkan adanya kerjasama antara suami dan istri dalam keluarga.

1) Kelas 3

- Bab 2 "Kedudukan dan Peran Anggota Keluarga"

  "Ayah sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga ayah memiliki tanggung jawab yang besar. Kedudukan ibu dalam keluarga juga penting....."

*b. Peran Reproduktif*

Ibu berperan reproduktif, peran yang dianggap tidak menghasilkan secara ekonomi. Merawat dan mengasuh anak merupakan tanggung jawab ayah dan ibu.

1) Kelas 3

- Bab 2 "Kedudukan dan Peran Anggota Keluarga"

  ".....Peran lain yang dilakukan ibu adalah merawat dan mengasuh anak.

**3. Peran Sosial**

Peran sosial, dimana ada kegiatan gotong royong peran utamanya adalah laki-laki, sedangkan kaum perempuannya membantu untuk menyiapkan makanan dan minuman.

1) Kelas 3

- Bab 3 "Kerjasama di Lingkungan Tetangga"

  "....Kaum ibu membantu menyiapkan makanan dan minuman....."

**4. Status gender**

Laki-laki diberi label sebagai pemimpin atau kepala keluarga, bertanggung jawab terhadap keluarganya, dalam hal menentukan sekolah anak seringkali diputuskan oleh suami/laki-laki, tidak terlihat adanya kerjasama dengan seorang istri. Di dalam masyarakat, seringkali yang menjadi ketua RT, RW, Kepala Desa adalah laki-laki. Seperti terlihat dalam contoh di bawah ini :

1) Kelas 3

- Bab 2 "Kedudukan dan Peran Anggota Keluarga"

  ".....Sebagai kepala keluarga, peran ayah lebih besar dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain."

2). Kelas 3

- Bab 7 "Hak dan Kewajiban Individi sebagai Warga Masyarakat "

  "Pak Yaman mempunyai seorang anak. Usia anaknya sudah memenuhi syarat untuk masuk kelas satu sekolah dasar. Pak Yaman mendaftarkan anaknya ke sekolah....."

  "Pak Lutfi warga Rt 08 Rw 04. Pak RT mendatangi rumah Pak lutfi....."

Lampiran 24. Analisis Materi Bahan Ajar Muatan Lokal "Gelis Pinter Maca Lan Nulis" dan "Wulang Basa" SD, "Ketrampilan Tata Busana SLTP dan "Pendidikan Budi Pekerti" SMU/SMK/MA di Kabupaten Indramayu

| No | Judul Buku Penerbit | Jumlah Pokok Bahasan (Bab) | Analisis Materi | | | Jumlah Gambar | Analisis Gambar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bias Gender | Netral Gender | Responsif Gender | | Bias Gender | Netral Gender | Responsif Gender |
| | | Gelis Pinter Maca lan Nulis dan Wulang Basa | | | | | | | |
| 1 | Gelis Pinter Maca lan Nulis, KLS 1, YD | 31 (6) | 4 (12.90%) | 17 (54.84%) | 10 (32.26%) | 48 | 12 (25%) | 28 (58.33%) | 8 (16.67%) |
| 2 | Gelis Pinter Maca lan Nulis, KLS 2, YD | 20 | 1(5%) | 11(55) | 8 (40%) | 24 | 18(75%) | 1(4.17%) | 5 (20.83%) |
| 3 | Gelis Pinter Maca lan Nulis, KLS 3, YD | 15 (6) | 3(20%) | 11(73.33%) | 1(6.67%) | 14 | 4(28.57%) | 8(57.14%) | 2 (14.29%) |
| 4 | Wulang Basa, KLS 4, YD | 11 (3) | 4(36.36) | 3(27.27%) | 4 (36.36) | 14 | 7(50%) | 4(28.57%) | 3 (21.43%) |
| 5 | Wulang Basa, KLS 5, YD | 21 (17) | 1(4.76%) | 17(80.95%) | 3 (14.29%) | 15 | 4(26.67%) | 10(66.67%) | 1(6.67%) |
| 6 | Wulang Basa, KLS 6, YD | 16 (7) | 1(6.25%) | 14(87.5%) | 1(6.25%) | 7 | 2(28.57%) | 5(71.43%) | - |
| | | Ketrampilan Tata Busana | | | | | | | |
| 1 | Ketrampilan Tata Busana, KLS 1, YD | 7 | - | 7 (100%) | - | - | - | - | - |
| 2 | Ketrampilan Tata Busana, KLS 2, YD | 6 | - | 6 (100%) | - | 4 | 4 (100%) | - | - |
| 3 | Ketrampilan Tata Busana, KLS 3, YD | 7 | - | 7 (100%) | - | 6 | 3 (50%) | - | 3 (50%) |
| | | Pendidikan Budi Pekerti | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Budi Pekerti, KLS 1, YD | 5 | - | 5 (100%) | - | 5 | 3 (60%) | - | - |
| 2 | Pendidikan Budi Pekerti, KLS 2, YD | 5 | 5 (100%) | - | - | 3 | 3 (100%) | - | - |
| 3 | Pendidikan Budi Pekerti, KLS 3, YD | 5 | - | 5 (100%) | - | 2 | 2 (100%) | - | - |

**Lampiran 25. Contoh-contoh Teks Bahan Ajar Muatan Lokal Bias Gender di Kabupaten Indramayu**

A. **Tingkat SD**

**"GELIS PINTER MACA LAN NULIS dan WULANG BASA**

1. Kelas 1 "GELIS PINTER MACA LAN NULIS"
   a. Pelajaran 4
      *Peran produktif*, dimana seorang bapak berangkat bekerja ke kebun. Bapak berperan mencari nafkah untuk keluarga
   b. Pelajaran 6
      "Guneman"
      *Peran reproduktif*, seorang ibu berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
      "Kiprah Kanda"
      *Sifat maskulin* untuk anak laki-laki, anak laki-laki bisa bermain jauh, berani untuk menyeberang sungai dengan perahu kecil.
      "Guneman"
      *Peran reproduktif*, seorang ibu dan anak perempuan yang belanja ke warung untuk membeli berbagai kebutuhan.

2. Kelas 2 "GELIS PINTER MACA LAN NULIS"
   Pelajaran 3
   *Peran produktif*, laki-laki sebagai seorang kepala keluarga yang mencari nafkah

3. Kelas 3 "WULANG BASA"
   a. Pelajaran 3
      *Sifat maskulin* laki-laki, dimana laki-laki digambarkan sebagai seorang yang berani, gagah dan kuat
   b. Pelajaran 4
      *Sifat maskulin* laki-laki, dalam pewayangan satria-satria yang gagah berani seringkali digambarkan laki-laki
   c. Pelajaran 5
      *Sifat maskulin* laki-laki, murid laki-laki lebih berani untuk berkunjung ke rumah pak guru

4. Kelas 4 "WULANG BASA"
   a. Pelajaran 2
      "Nyuwun Pitulung"
      *Sifat maskulin* laki-laki, murid laki-laki lebih berani untuk berkunjung ke rumah pak guru
   b. Pelajaran 3
      "Mbantoni Emak"
      *Peran reproduktif domestik*, anak perempuan sudah dilatih untuk membantu ibunya di mengerjakan pekerjaan rumah tangga, jadi anak perempuan akan merasa bersalah bila tidak melakukan pekerjaan tersebut.
      "Akhire Jaman Penjajahan"
      *Sifat maskulin* laki-laki yang menyebabkan anak laki-laki tertarik untuk membicarakan tentang sejarah perjuangan bangsa.

5. Kelas 5 "WULANG BASA"
   Pelajaran 7
   "Guneman"
   *Adanya sifat maskulin*, dimana anak laki-laki diharapkan lebih bertanggungjawab, berani, lebih pintar.

6. Kelas 6 "WULANG BASA"
   Pelajaran 1
   "Siswa Ingkang Utama"
   *Adanya sifat perilaku gender maskulin*. Tokoh Diran digambarkan seseorang yang rajin dan pintar. Pandangan masyarakat terhadap laki-laki, bahwa seorang laki-laki tegar, berani, cerdik, pintar dan sebagainya.

**B. Tingkat SLTP "KETRAMPILAN TATA BUSANA"**

Bahan ajar materi "Ketrampilan Tata Busana" untuk SLTP kelas 1, 2 dan 3 termasuk netral gender. Buku pelajaran Ketrampilan Tata Busana diharapkan memberikan keseimbangan kepada anak didik dalam penguasaan praktik beserta teorinya.

**C. Tingkat SMU/SMK/MA "PENDIDIKAN BUDI PEKERTI"**

Bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti untuk *kelas 1*, termasuk netral gender. Bab yang dipelajari dalam buku tersebut adalah sebagai berikut: Bersyukur, Berusaha Membahagiakan Orang Lain, Efisiensi, Berinisiatif, dan Dinamis. Demikian halnya dengan pelajaran Pendidikan Budi Pekerti untuk kelas 3, juga termasuk netral gender. Bab yang dipelajari dalam buku adalah sebagai berikut ; Mensyukuri Segala Nikmat/Ucapan Terima Kasih, Memelihara Hewan Secara Layak, Tidak Mencemari Sumber Air dan Lahan, Etika Bergaul, Menghargai Diri Sendiri.

Sedangkan bahan ajar untuk *kelas 2* terdapat beberapa yang bias gender. Analisis terhadap bahan ajar ini dilakukan dengan melihat kepada dua peran, yaitu :

1. *Peran gender dalam Kategori Peran Sosial (Kegiatan Kemasyarakatan)*
   "……..Beberapa orang pemuda berkumpul dibawah komando kepala kampung/lurah. Mereka giat bekerja, saling bahu membahu dengan gigih……."

Kegiatan kemasyarakatan merujuk kepada semua aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Namun pada kenyataannya seringkali kegiatan sosial ini, misal kerja bakti digambarkan/diperankan oleh laki-laki.

2. *Nilai gender maskulin dan feminin*
   "Hidup yang dijalani Salim sangat sederhana……..Salim bergaul dengan teman,……..ia gemar olah raga……ia taat melaksanakan kewajiban agama yang dianutnya……."
   "Sumardi……..Predikat yang disandangnya adalah atlit remaja cabang atletik…..mengikuti pelatihan di bawah asuhan KONI Tingkat Kabupaten……."
   "Si Ani duduk di kursi depan rumahnya, didampingi ibunya, ibunya menyampaikan saran, agar kalau sudah pulang dari sekolah jangan main jalan-jalan dengan teman-temannya setiap hari, disarankan agar Ani memanfaatkan waktu untuk mengikuti tambahan belajar baik les maupun kursus……."

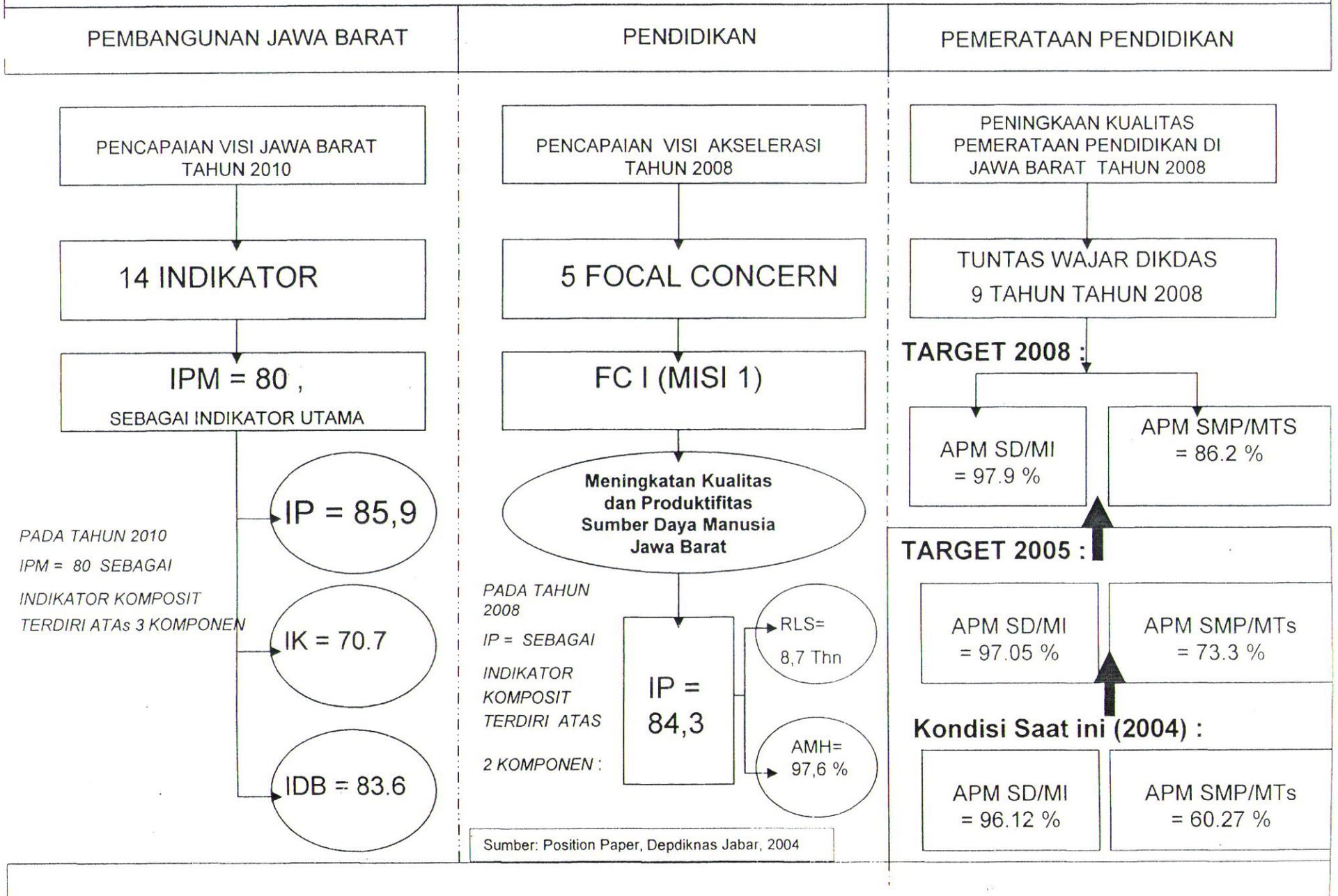
Contoh-contoh diatas terlihat adanya nilai gender, yang merupakan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan dengan nilai-nilai yang diharapkan. Pada contoh 1 dan 2 terdapat nilai gender maskulin, dimana laki-laki digambarkan lebih pintar, dapat dijadikan contoh, memiliki kecenderungan untuk menyukai olah raga yang keras, memerlukan banyak energi (kuat, agresif). Padahal olah raga atletik juga bisa dimainkan oleh perempuan.

Sedangkan pada contoh ketiga, perempuan dilabelkan dengan sifat feminin (lembut, halus, menurut). Anak perempuan selalu menurut pada orangtuanya (ibunya), anak perempuan akan merasa bersalah jika tidak mengikuti kata-kata orang tuanya.

Lampiran 26. Karakteristik SDM yang Berpartisipasi dalam Penulisan Bahan Ajar Tangkas Berbahasa Indonesia dan Tangkas Pengetahuan Sosial, Berbasis Kurikulum 2004

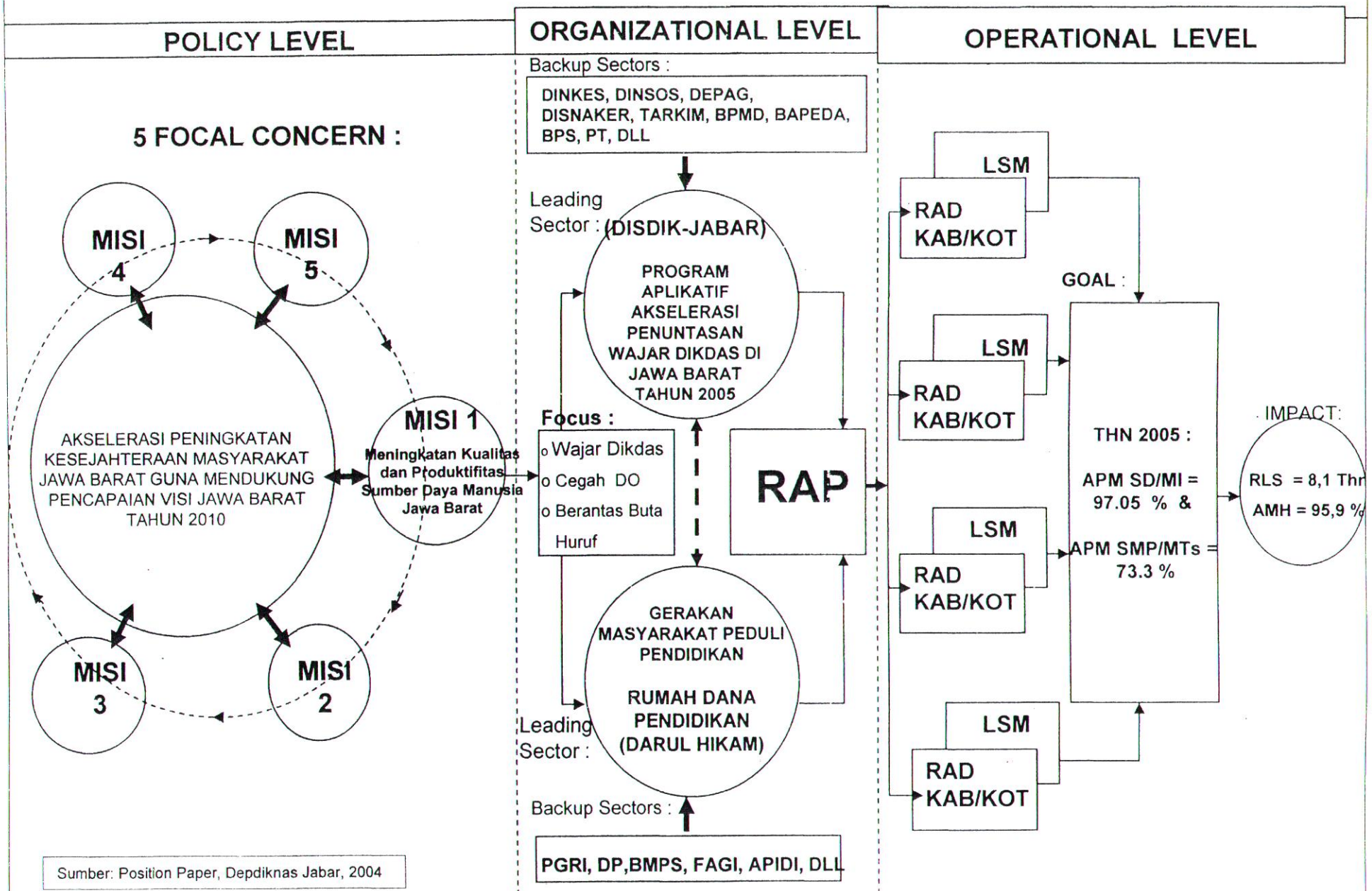
| No | Judul Buku Penerbit | Penelaah | | | Penulis | | | Penanggung Jawab | | | Editor | | | Desain Sampul | | | Ilustrator | | | Perwajahan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML |
| **Tangkas Berbahasa Indonesia SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Berbasis Kurikulum 2004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 1, RR | - | 1(100%) | 1 | 3 (50%) | 3 (50%) | 6 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| 2 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 2, RR | - | 1(100%) | 1 | 3 (50%) | 3 (50%) | 6 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| 3 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 3, RR | - | 1(100%) | 1 | 3 (50%) | 3 (50%) | 6 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| 4 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 4, RR | - | 1(100%) | 1 | 3 (50%) | 3 (50%) | 6 | 1 (50%) | 1 (50%) | 2 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| 5 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 5, RR | - | 1(100%) | 1 | 3 (50%) | 3 (50%) | 6 | - | 2 (100%) | 2 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| 6 | Tangkas Berbahasa Indonesia, KLS 6, RR | - | 1(100%) | 1 | 3 (50%) | 3 (50%) | 6 | - | 1 (100%) | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| **Tangkas Pengetahuan Sosial SD Kelas 2, 3, 5, dan 6, Berbasis Kurikulum 2004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tangkas Pengetahuan Sosial, KLS 2, RR | - | 1(100%) | 1 | 2(66.67%) | 1(33.33%) | 3 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| 2 | Tangkas Pengetahuan Sosial, KLS 3, RR | - | 1(100%) | 1 | 2(66.67%) | 1(33.33%) | 3 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| 3 | Tangkas Pengetahuan Sosial, KLS 5, RR | - | 1(100%) | 1 | 2(66.67%) | 1(33.33%) | 3 | - | 1 (100%) | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |
| 4 | Tangkas Pengetahuan Sosial, KLS 6, RR | - | 1(100%) | 1 | 2(66.67%) | 1(33.33%) | 3 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 | 1 (100%) | - | 1 |

## Lampiran 27. Sasaran Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Jawa Barat



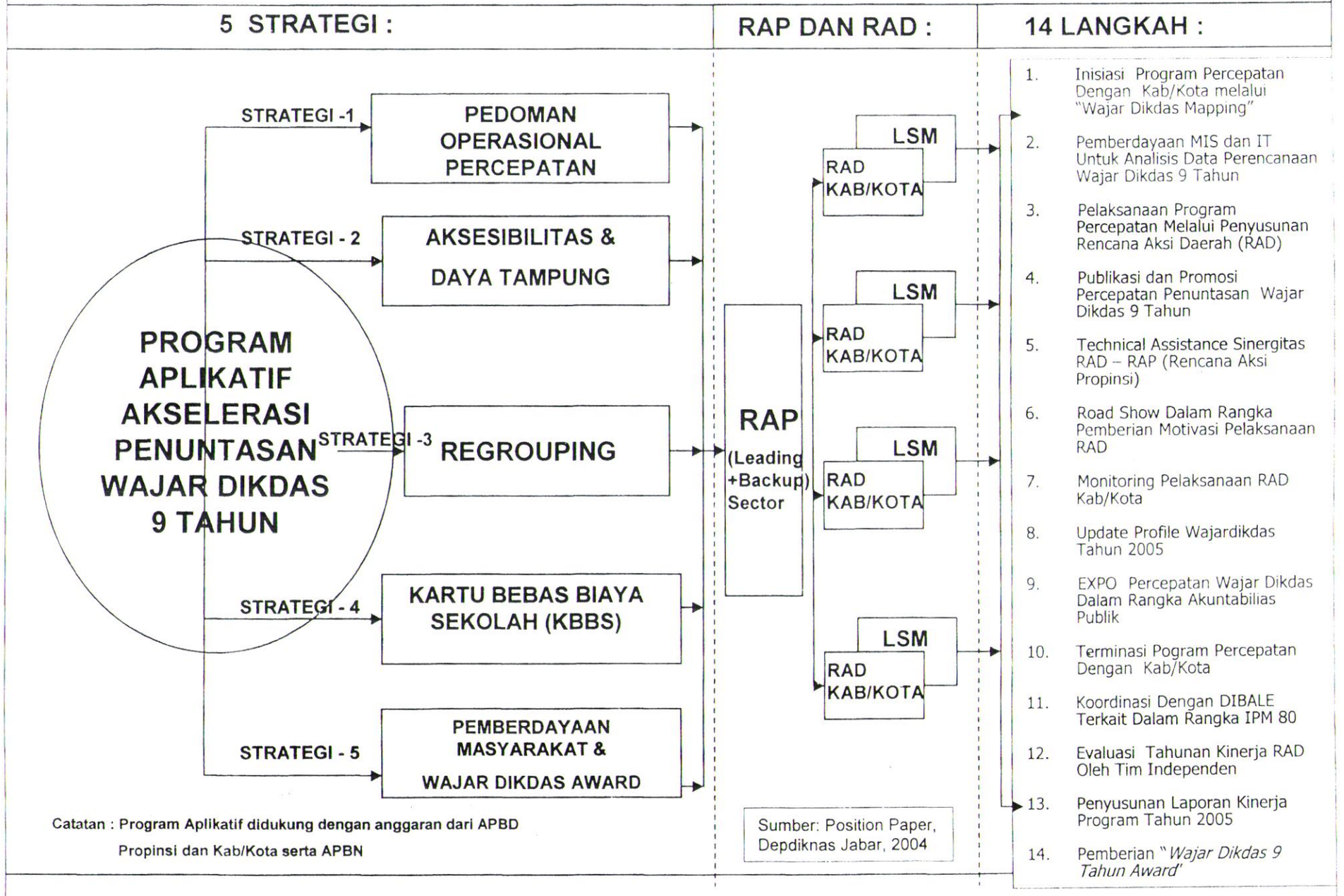

Sumber: Position Paper, Depdiknas Jabar, 2004

## Lampiran 28. Pola Pikir Program Aplikatif Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun




Sumber: Position Paper, Depdiknas Jabar, 2004

## Lampiran 29. Program Aplikatif Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun



**Lampiran 30. Ruang Lingkup Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2005 yang Relevan dengan Upaya Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun (APBD)**

| NO | KEGIATAN | SASARAN UTAMA | ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyusuan Rencana Aksi Propinsi dan Pemasyarakatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat | 25 Kab/Kota | 3,000,000,000 |
| 2 | Peningkatan Mutu PraSarana dan Sarana Pendidikan Dasar | RKB SMP = 600 Lokal, MTs = 250 Lokal, '@ Rp 40.000.000,- Rehab Bangunan : SMP = 400 Lokal, MTs = 200 Lokal @32.500.000,- | 54,100,000,000 |
| 3 | Pemberdayaan SMP Terbuka | Lama : 432 Unit, Baru : 91 Unit | 13,151,996,000 |
| 4 | Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dari Keluarga Tak Mampu | 64.800 Siswa, SMP/MTs @ 1.453.000,- Subsidi PSB, 64.800 Siswa @ 100.000,- | 111,604,500,000 |
| 5 | Pemberian Beasiswa Bagi Siswa SMA/SMK Yang Tidak Mampu | 1.750 Siswa @ 2.500.000,- | 4,400,000,000 |
| 6 | Peningkatan Prasarana & Sarana SMA dan SMK | Rehabilitasi : SMA = 110 Lokal, SMK= 64 Lokal @ 50.000.000,- RKB SMA = 50, RKB SMK = 25 @60.000.000,- | 17,200,000,000 |
| 7 | Pengembangan Sarana & Prasarana SLB | Rehabilitasi : SLB = 17 Lokal @Rp 40.000.000,- | 3,500,000,000 |
| 8 | Peningkatan Pelayanan PLS Melalui Kejar Paket A (Keaksaraan Fungsional) dan Peningkatan Mutu PKBM | WB = 121.491 Orang PKBM = 650 PKBM | 13,000,000,000 |
| 9 | Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) & PAUD | 25 Kab/Kota | 1,100,000,000 |
| 10 | Reward Guru PNS (SD/MI) Pada Daerah Terpencil & Pengangkatan GBS Daerah SD/MI Untuk Daerah Terpencil | 1000 guru @ Rp 1.000.000,- 16 Kab X 100 guru x Rp 500.000,- x 12 bln | 1,500,000,000 10.500.000.000 |

Sumber : Subdinas Bina Program-Disdik Jabar, 2004

## Lampiran 31. Ruang Lingkup Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2005 dari APBN (Dalam Ribuan – Rp)

| No | PROGRAM | SASARAN POKOK KEGIATAN | Rp |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | -Taman Kanak Kanak | 10.026.000,0 |
| 2 | WAJAR DIKDAS | -PLB<br>-SD/MI | 4.142.900,0<br>12.658.200,0 |
| 3 | PENDIDIKA DASAR | -SMP | 114.953.200,0 |
| 4 | DIKMENUM | -SMU<br>-SMLB | 40.283.000,0<br>975.000,0 |
| 5 | DIKMENJUR | -SMK | 64.789.750,0 |
| 6 | WAJAR DIKDAS 9 TH ( PLS ) | -Propinsi<br>-25 Kab/Kota | 11.628.930,0<br>18.008.520,0 |
| 7 | PENDIDIKAN NON FORMAL | -Propinsi<br>-25 Kab/Kota | 12.748.655,0<br>5.128.100,0 |
| 8 | PENGEMBANGAN ANAK DINI USIA | -PADU PLS | 4.499.000,0 |
| 9 | PEMBINAAN KEPEMUDAAN | -Peningkatan Partisipasi Pemuda Jabar<br>-SP3 JABAR<br>-SP3 KAB. SUBANG | 1.703.000,0<br>406.770,0<br>190.230,0 |
| 10 | PENGUATAN KELEMBAGAAN GENDER | -Pengarusutamaan Gender dan Anak | 514.920,0 |
| 11 | PEMBINAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | -Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga | 3.169.000,0 |
| 12 | BEA SISWA | -Bea Siswa Bakat dan Prestasi*) | 4.062.000,0 |
| 13 | PERENCANAAN TERPADU | -SIM Perencanaan | 550.000,0 |
| 14 | UAN | -Pengendalian Evaluasi Belajar | 0 |
| | JUMLAH | | 306.375.175 |

Sumber : Subdinas Bina Program-Disdik Jabar, 2004

| NO | KEGIATAN | TAHUN 2004 | | | TAHUN 2005 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OKT | NOV | DES | JAN | PEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| | **A. TAHAP PERSIAPAN :** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Membangun komitment dan kebersamaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Membangun paradigma baru budaya dan etos kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Menciptakan iklim lingkungan kerja yang menyenangkan/kondusif | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Memperkuat jaringan kerja sama (networking) Kab/Kota, DIBALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Menciptakan 'Baseline' awal data dan informasi Dengan Update Database Untuk **Profil Tahun 2004** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan **Pedoman Operasional** Percepatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **'Launching"** Program Percepatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B. TAHAP PELAKSANAAN :** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Inisiasi Program Percepatan Dengan Kab/Kota melalui Wajar Dikdas Mapping | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pemberdayaan MIS dan IT Untuk Analisis Data Perencanaan Wajar Dikdas 9 Tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Program Percepatan melalui Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Publikasi dan Promosi Percepaan Penuntasan Wajardikdas 9 Tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Tech, Assistance Sinergitas RAP dan RAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Road Show Dalam Rangka Pemberian Motivasi Pelaksanaan RAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Monitoring Pelaksanaan RAD Kab/Koa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Update Profile Wajardikdas Tahun 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | EXPO Percepaan Wajar Dikdas Dalam Rangka Akuntabilitas Publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Terminasi Pogram Percepatan Dengan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Koordinasi Dengan DIBALE Terkait Dalam Rangka IPM 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Evaluasi Tahunan Kinerja RAD Oleh Tim Independen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Penyusunan Laporan Kinerja Program Tahun 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pemberian "Wajar Dikdas 9 Tahun Award" | | | | | | | | | | | | | | | |

## Lampiran 33. Pembagian Tugas Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat

| NO | KEGIATAN PEMBANGUNAN | TUGAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PUSAT | PROPINSI | KABUPATEN/KOTA | MASYARAKAT |
| A | Sarana/Prasarana : | | | | |
| 1 | PAUD dan TK/RA | | | | |
| 2 | Pendidikan SD/MI | | | | |
| 3 | Pendidikan SMP/MTs | | | | |
| 4 | Pendidikan SMA/MA | | | | |
| 5 | Pendidikan SMK | | | | |
| 6 | PLS | | | | |
| 7 | Pendidikan Khusus | | | | |
| 8 | Pendidikan Tinggi | | | | |
| | | | | | |
| B | Beasiswa : | | | | |
| 1 | SD/MI | | | | |
| 2 | SMP/MTs | | | | |
| 3 | SMA/SMK/MA | | | | |
| | | | | | |
| C | Diklat : | | | | |
| 1 | Guru | | | | |
| 2 | Kepala Sekolah | | | | |
| 3 | Pengawas | | | | |
| | | | | | |
| D | Pengadaan Buku : | | | | |
| 1 | SD/MI | | | | |
| 2 | SMP/MTs | | | | |
| 3 | SMA/SMK/MA | | | | |
| 4 | PLS | | | | |
| | | | | | |
| | KETERANGAN : | | | | |

= UTAMA

= PENDUKUNG

= PRA-SYARAT

## Lampiran 34. Backup Sector dalam Rangka Kegiatan Pemerataan Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005

| NO | KEGIATAN | PROPINSI | KAB/KOTA |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyusuan Rencana Aksi Propinsi dan Pemasyarakatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat | BPS, BPMD, BAPEDA, DALPROG, RDP | DISDIK, KCD, DESA/LURAH DKM, BUPATI/WALIKOTA DP, KOMITE SEKOLAH LSM, MEDIA |
| 2 | Peningkatan Mutu PraSarana dan Sarana Pendidikan Dasar | BAPEDA, DALPROG, TARKIM, KEUANGAN | DISDIK, KOMITE SEKOLAH |
| 3 | Pemberdayaan SMP Terbuka | BAPEDA, DALPROG | DISDIK, KCD, KOMITE SEKOLAH |
| 4 | Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dari Keluarga Tak Mampu | BAPEDA, DALPROG, KEUANGAN | DISDIK, KCD, DESA/LURAH, KOMITE SEKOLAH |
| 5 | Pemberian Beasiswa Bagi Siswa SMA/SMK Yang Tidak Mampu | BAPEDA, DALPROG, KEUANGAN | DISDIK, KCD, DESA/LURAH, KOMITE SEKOLAH |
| 6 | Peningkatan Prasarana & Sarana SMA dan SMK | BAPEDA, DALPROG, TARKIM, KEUANGAN | DISDIK, KOMITE SEKOLAH |
| 7 | Pengembangan Sarana & Prasarana SLB | BAPEDA, DALPROG, TARKIM, KEUANGAN | DISDIK, KOMITE SEKOLAH |
| 8 | Peningkatan Pelayanan PLS Melalui Kejar Paket A (Keaksaraan Fungsional) dan Peningkatan Mutu PKBM | BPS, BPMD, BAPEDA, DALPROG | DISDIK, KCD, DESA/LURAH DKM, DP, PENILIK PLS, LSM |
| 9 | Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) & PAUD | BAPEDA, DALPROG | DISDIK, KCD, DESA/LURAH DKM |
| 10 | Perintisan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bidang Pendidikan Kepada Desa | BPS, BPMD, BAPEDA, DALPROG, BIRO DEKON | DISDIK, KCD, DESA, KOMITE SEKOLAH, LSM |

## Lampiran 35. Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Tahun 2005

| NO | KEGIATAN | PEMERATAAN | PENINGKATAN MUTU | RELEVANSI | EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusuan Rencana Aksi Propinsi dan Pemasyarakatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat | 3,000,000,000 | | | |
| 2 | Peningkatan Mutu PraSarana dan Sarana Pendidikan Dasar | 54,100,000,000 | | | |
| 3 | Pemberdayaan SMP Terbuka | 13,151,996,000 | | | |
| 4 | Pembenan Beasiswa Bagi Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dari Keluarga Tak Mampu | 101,104,500,000 | | | |
| 5 | Pemberian Beasiswa Bagi Siswa SMA/SMK Yang Tidak Mampu | 4,400,000,000 | | | |
| 6 | Jaringan Pengembangan Inovasi Pendidikan dan Komunikasi Bahasa Inggris | | 1,500,000,000 | | |
| 7 | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK | | 1,500,000,000 | | |
| 8 | Peningkatan Prasarana & Sarana SMA dan SMK | 17,200,000,000 | | | |
| 9 | Implementasi BBE & Life Skill SMA/SMK dan Akreditasi SMA/SMK/SLB | | | 2,300,000,000 | |
| 10 | Peningkatan Mutu PLB | | 2,500,000,000 | | |
| 11 | Pengembangan Sarana & Prasarana SLB | 3,500,000,000 | | | |
| 12 | Peningkatan Pelayanan PLS Melalui Kejar Paket A (Keaksaraan Fungsional) dan Peningkatan Mutu PKBM | 13,000,000,000 | | | |
| 13 | Peningkatan Mutu Kurus PLSP | | 1,000,000,000 | | |
| 14 | Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) & PAUD | 1,100,000,000 | | | |
| 15 | Peningkatan Potensi Atlit2 Melalui PPLP | | 2,500,000,000 | | |
| 16 | Pengiriman Kontingen pada POPNAS II | | 2,600,000,000 | | |
| 17 | Perencanaan, Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan | | | | 1,500,000,000 |
| 18 | Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat | | | | 1,000,000,000 |
| 19 | Peningkatan Pelayanan dan Akuntabillitas Lembaga Melalui Penyelenggaraan Sistem | | | | 750,000,000 |
| 20 | Rehabilitasi Berat Gedung "G" dan "J" dan Pengadaan Sarana Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat | | | | 5,000,000,000 |
| 21 | Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan | | 3,000,000,000 | | |
| 22 | Pemilihan Guru dan Siswa Berprestasi | | 500,000,000 | | |
| 23 | Pemberdayaan Tenaga Edukatif pada Jenjang Pendidikan Dasar | | 1,500,000,000 | | |
| 24 | Pelatihan Guru SLB Negeri & Swasta | | 1,000,000,000 | | |
| 25 | Peningkatan Mutu dan Pemberdayaan Hasil Riset dan Teknologi Pendidikan | | 1,500,000,000 | | |
| 26 | Pengkajian dan Pengembangan Bahasa Daerah Dalam Rangka Pembelajaran | | | 1,500,000,000 | |
| 27 | Reward Guru PNS (SD/MI) Pada Daerah Terpencil<br>Pengangkatan GBS Daerah SD/MI Untuk Daerah Terpencil | 1,500,000,000<br>10,500,000,000 | | | |
| | JUMLAH | 222,556,496,000 | 19,100,000,000 | 3,800,000,000 | 8,250,000,000 |
| | TOTAL | | | | 253,706,496,000 |

**Lampiran 36. Kabupaten Kota menurut Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 7-15 Tahun Terhadap Rata-rata x Tingkat Propinsi**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- 12 tahun | | | 13-15 tahun | | | 7- 12 tahun | | | 13-15 tahun | | |
| Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP |
| *Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Cianjur | -5.97 | 0.94 | Kab.Indramayu | -30.96 | 0.62 | Kab.Bogor | 2.91 | 1.04 | Kab.Purwakarta | -9.76 | 0.85 |
| Kab.Indramayu | -3.10 | 0.97 | Kab.Majalengka | -13.74 | 0.83 | Kab.Purwakarta | 1.42 | 1.02 | Kab.Cianjur | -7.21 | 0.88 |
| Kab.Cirebon | 2.32 | 1.02 | Kab.Cianjur | 11.23 | 1.16 | | | | Kab.Cirebon | 5.65 | 1.10 |
| Kab.Bogor | 1.92 | 1.02 | Kab.Kuningan | 11.10 | 1.17 | | | | Kab.Bandung | 1.56 | 1.02 |
| Kab.Subang | 0.67 | 1.01 | Kab.Bekasi | -4.24 | 0.95 | | | | Kab.Bogor | -1.13 | 0.98 |
| Kota Bogor | -0.66 | 0.99 | Kab.Cirebon | 2.25 | 1.03 | | | | | | |
| Kota Cirebon | 0.62 | 1.01 | Kab.Ciamis | 0.34 | 1.00 | | | | | | |
| Kab.Garut | -0.47 | 1.00 | Kab.Bogor | -0.17 | 1.00 | | | | | | |
| | | | Kab.Subang | -0.01 | 1.00 | | | | | | |
| *Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Bekasi | -3.44 | 0.97 | Kab.Karawang | -7.99 | 0.91 | Kab.Kuningan | -4.52 | 0.95 | Kab.Tasikmalaya | -12.98 | 0.83 |
| Kota Bandung | -1.83 | 0.98 | | | | Kab.Garut | -0.93 | 0.99 | Kab.Majalengka | -7.14 | 0.90 |
| | | | | | | | | | Kab.Sukabumi | -1.36 | 0.98 |
| *Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Purwakarta | 6.01 | 1.06 | Kab.Bandung | 6.51 | 1.08 | Kota Bogor | 20.22 | 1.25 | Kota Bogor | 66.67 | 3.00 |
| Kab.Sumedang | 4.17 | 1.04 | Kab.Purwakarta | 5.38 | 1.06 | Kab.Bekasi | 4.65 | 1.05 | Kab.Karawang | 20.47 | 1.43 |
| Kab.Kuningan | 3.03 | 1.03 | Kab.Garut | 8.89 | 1.11 | Kab.Bandung | 4.54 | 1.05 | | | |
| Kab.Bandung | 1.40 | 1.01 | | | | Kab.Tasikmalaya | 4.22 | 1.04 | | | |
| Kota Sukabumi | 1.27 | 1.01 | | | | | | | | | |

**Lampiran 37. Kabupaten Kota Menurut Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-24 Tahun Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 18 tahun | | | 19 - 24 tahun | | | 16 - 18 tahun | | | 19 - 24 tahun | | |
| Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP |
| *Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Garut | -31.58 | 0.48 | Kab.Sukabumi | -10.36 | 0.36 | Kab.Karawang | 8.33 | 1.50 | Kab.Karawang | -3.28 | - |
| Kab.Kuningan | -29.58 | 0.45 | Kab.Indramayu | -10.34 | 0.00 | Kab.Bogor | -4.55 | 0.80 | Kab.Bogor | -3.19 | - |
| Kab.Sukabumi | -20.25 | 0.66 | Kab.Bandung | -9.30 | 0.41 | Kab.Majalengka | 4.39 | 1.22 | Kab.Sukabumi | -3.06 | - |
| Kab.Indramayu | -19.53 | 0.64 | Kab.Cirebon | -7.68 | 0.27 | Kab.Bandung | 2.67 | 1.12 | Kab.Majalengka | -1.47 | - |
| Kab.Cirebon | -13.80 | 0.75 | Kab.Garut | -7.54 | 0.31 | Kab.Ciamis | -2.51 | 0.91 | Kab.Kuningan | -0.65 | 0.68 |
| Kab.Purwakarta | -11.28 | 0.80 | Kab.Cianjur | -6.31 | 0.31 | Kab.Cianjur | -1.07 | 0.94 | Kab.Tasikmalaya | -0.17 | 0.86 |
| Kab.Bogor | -7.68 | 0.85 | Kab.Majalengka | -5.30 | 0.34 | | | | | | |
| Kab.Ciamis | -7.65 | 0.86 | Kab.Subang | 4.65 | 1.72 | | | | | | |
| Kab.Majalengka | -5.02 | 0.90 | Kab.Tasikmalaya | -2.43 | 0.75 | | | | | | |
| Kab.Bandung | -3.34 | 0.94 | Kab.Bekasi | -2.38 | 0.77 | | | | | | |
| Kab.Subang | -2.64 | 0.95 | Kab.Kuningan | -2.08 | 0.62 | | | | | | |
| Kab.Cianjur | -0.80 | 0.98 | Kab.Purwakarta | 1.83 | 1.37 | | | | | | |
| Kab.Tasikmalaya | -0.76 | 0.98 | Kab.Bogor | -0.09 | 0.98 | | | | | | |
| *Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Sumedang | -35.66 | 0.54 | Kab.Karawang | -17.44 | 0.19 | Kab.Subang | -30.00 | 0.36 | Kab. Garut | -6.71 | 0.11 |
| Kab.Karawang | -22.30 | 0.66 | | | | Kab.Bekasi | -27.56 | 0.43 | | | |
| | | | | | | Kab.Purwakarta | -11.26 | 0.64 | | | |
| | | | | | | Kab.Tasikmalaya | -10.54 | 0.64 | | | |
| | | | | | | Kab.Sukabumi | -4.55 | 0.85 | | | |
| *Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kota Sukabumi | 15.51 | 1.30 | Kab.Ciamis | 10.10 | 3.73 | Kab.Cirebon | 14.07 | 1.58 | Kab.Subang | 5.64 | 5.34 |
| Kota Cirebon | -4.22 | 0.93 | Kota Sukabumi | 6.49 | 1.49 | Kab.Garut | 6.24 | 1.29 | Kab.Bekasi | 2.67 | 2.15 |
| Kota Bogor | 3.03 | 1.05 | Kota Cirebon | 5.64 | 1.37 | | | | Kab.Cianjur | -1.12 | 0.63 |
| | | | | | | | | | Kab.Indramayu | 0.00 | 1.00 |

Lampiran 38. Kabupaten/ Kota Menurut Kinerja Partisipasi Pendidikan Dasar Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | | | APM | | | APK | | | APM | | |
| Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP |
| *Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Cianjur | -5.97 | 0.94 | Kab.Bandung | 2.48 | 1.03 | Kab.Bogor | 5.37 | 1.06 | Kab.Bogor | 3.50 | 1.04 |
| Kab.Indramayu | -5.97 | 0.94 | Kab.Cirebon | 1.25 | 1.01 | Kab.Subang | -4.51 | 0.96 | Kab.Purwakarta | 1.56 | 1.02 |
| Kab.Sumedang | -4.52 | 0.96 | Kota Bogor | 1.21 | 1.01 | Kab.Garut | -3.54 | 0.96 | Kab.Kuningan | -1.21 | 0.99 |
| Kota Cirebon | 2.35 | 1.02 | Kota Depok | 0.94 | 1.01 | Kab.Indramayu | -1.41 | 0.99 | Kab.Subang | -0.23 | 1.00 |
| Kab.Bandung | 1.07 | 1.01 | Kota Cirebon | 0.31 | 1.00 | Kab.Cianjur | 0.66 | 1.01 | | | |
| | | | Kota Bandung | 0.31 | 1.00 | Kota Bekasi | 0.00 | 1.00 | | | |
| *Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Tasikmalaya | -21.11 | 0.83 | Kab.Subang | -8.42 | 0.91 | Kab.Kuningan | -6.70 | 0.94 | Kab.Indramayu | -4.04 | 0.96 |
| Kota Bekasi | -13.30 | 0.88 | Kab.Cianjur | -7.47 | 0.92 | Kab.Purwakarta | -2.07 | 0.98 | Kab.Garut | -1.51 | 0.98 |
| Kab.Ciamis | -5.67 | 0.95 | Kab.Indramayu | -5.80 | 0.94 | Kab.Sumedang | -0.11 | 1.00 | Kab.Sukabumi | -0.66 | 0.99 |
| Kota Bandung | -5.60 | 0.95 | Kota Sukabumi | -3.12 | 0.97 | Kab.Ciamis | -0.08 | 1.00 | | | |
| Kab.Cirebon | -4.50 | 0.96 | | | | | | | | | |
| Kota Depok | -2.14 | 0.98 | | | | | | | | | |
| *Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Purwakarta | 21.02 | 1.24 | Kab.Purwakarta | 20.26 | 1.26 | Kota Bogor | 37.12 | 1.47 | Kota Bogor | 20.22 | 1.25 |
| Kab.Bogor | 9.65 | 1.09 | Kab.Sumedang | 3.46 | 1.04 | Kab.Sukabumi | 2.40 | 1.02 | Kab.Bandung | 4.64 | 1.05 |
| Kab.Kuningan | 8.67 | 1.09 | Kab.Bogor | 3.34 | 1.04 | | | | | | |
| Kab.Majalengka | 6.52 | 1.07 | | | | | | | | | |
| Kab.Subang | 6.06 | 1.06 | | | | | | | | | |
| Kab.Karawang | 6.06 | 1.06 | | | | | | | | | |
| Kota Bogor | 5.69 | 1.06 | | | | | | | | | |
| Kab.Sukabumi | 1.77 | 1.02 | | | | | | | | | |
| Kota Sukabumi | 0.64 | 1.01 | | | | | | | | | |

**Lampiran 39. Kabupaten Kota menurut menurut Kinerja Partisipasi Pendidikan Lanjutan Pertama Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | | | APM | | | APK | | | APM | | |
| Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP |
| ***Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Bogor | -26.46 | 0.71 | Kab.Indramayu | -19.64 | 0.66 | Kota Sukabumi | -49.85 | 0.00 | Kab.Bogor | -13.80 | 0.54 |
| Kab.Majalengka | -14.66 | 0.83 | Kab.Bekasi | -16.04 | 0.75 | Kab.Cirebon | 11.49 | 1.25 | Kab.Purwakarta | -8.81 | 0.79 |
| Kab.Indramayu | -12.51 | 0.81 | Kab.Kuningan | 13.42 | 1.29 | Kab.Cianjur | -3.91 | 0.92 | Kab.Tasikmalaya | -5.08 | 0.88 |
| Kota Sukabumi | 12.03 | 1.16 | Kab.Cirebon | 13.36 | 1.23 | Kab.Majalengka | 2.39 | 1.04 | Kab.Sukabumi | -2.68 | 0.94 |
| Kab.Kuningan | 11.10 | 1.17 | Kab.Bogor | -5.72 | 0.91 | Kab.Bogor | -0.17 | 1.00 | Kab.Cirebon | -2.68 | 0.93 |
| Kota Bogor | -10.97 | 0.88 | Kab.Ciamis | -2.11 | 0.96 | | | | Kab.Majalengka | 2.39 | 1.07 |
| Kab.Bekasi | -10.38 | 0.87 | Kab.Majalengka | -1.36 | 0.98 | | | | Kab.Bekasi | 1.55 | 1.04 |
| Kab.Garut | -8.58 | 0.90 | Kab.Subang | -0.01 | 1.00 | | | | | | |
| Kab.Subang | -0.01 | 1.00 | | | | | | | | | |
| ***Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Karawang | -15.26 | 0.85 | Kab.Sukabumi | -14.60 | 0.82 | Kab.Tasikmalaya | -19.28 | 0.72 | Kota Depok | -100.00 | 0.00 |
| Kab.Sukabumi | -7.65 | 0.92 | Kab.Karawang | -9.03 | 0.88 | Kab.Purwakarta | -3.93 | 0.94 | Kota Sukabumi | -49.85 | 0.00 |
| | | | Kota Bogor | -6.68 | 0.91 | | | | Kab.Cianjur | -8.70 | 0.81 |
| ***Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Sumedang | 27.91 | 1.32 | Kab.Cianjur | 24.98 | 1.50 | Kab.Karawang | 23.66 | 1.56 | Kota Bogor | 41.14 | 2.23 |
| Kab.Ciamis | 26.12 | 1.41 | Kab.Sumedang | 24.70 | 1.36 | Kab.Bandung | 20.73 | 1.41 | Kab.Karawang | 16.86 | 1.52 |
| Kab.Cirebon | 22.35 | 1.27 | Kab.Purwakarta | 14.62 | 1.22 | | | | Kab.Bandung | 13.13 | 1.34 |
| Kab.Cianjur | 16.86 | 1.21 | Kab.Garut | 11.12 | 1.19 | | | | | | |
| Kota Cirebon | 10.60 | 1.12 | Kab.Tasikmalaya | 5.71 | 1.09 | | | | | | |
| Kab.Tasikmalaya | 6.67 | 1.08 | | | | | | | | | |

**Lampiran 40. Kabupaten Kota menurut Kinerja Partisipasi Pendidikan Lanjutan SLTA Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | | | APM | | | APK | | | APM | | |
| Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP |
| *Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Kuningan | -33.15 | 0.42 | Kab.Kuningan | -22.43 | 0.52 | Kota Bogor | 16.9 | ##### | Kota Bogor | 16.9 | ~~ |
| Kab.Garut | -17.87 | 0.68 | Kab.Garut | -22.32 | 0.54 | Kab.Bogor | -12.13 | 0.47 | Kab.Bogor | -9.1 | 0.5 |
| Kab.Cirebon | -16.98 | 0.68 | Kab.Cirebon | -11.99 | 0.72 | Kab.Tasikmalaya | -3.61 | 0.82 | Kab.Bandung | -7.8 | 0.6 |
| Kab.Majalengka | -13.60 | 0.75 | Kab.Bekasi | -11.40 | 0.77 | Kab.Sukabumi | -3.55 | 0.85 | Kab.Sukabumi | -3.3 | 0.8 |
| Kab.Bogor | 12.78 | 1.34 | Kab.Majalengka | -10.02 | 0.80 | Kab.Bandung | -3.45 | 0.84 | Kab.Tasikmalaya | -2.1 | 0.9 |
| Kab.Cianjur | -11.12 | 0.78 | Kab.Tasikmalaya | 9.73 | 1.49 | Kab.Cianjur | 1.83 | 1.10 | Kab.Cianjur | 0.5 | 1.0 |
| Kab.Bandung | -7.45 | 0.88 | Kab.Ciamis | -7.91 | 0.84 | Kab.Garut | -0.94 | 0.96 | Kab.Karawang | 0.0 | 1.0 |
| Kab.Ciamis | -7.38 | 0.88 | Kab.Bogor | 2.18 | 1.06 | Kab.Karawang | 0.83 | 1.07 | | | |
| Kab.Tasikmalaya | 4.54 | 1.13 | Kab.Cianjur | -1.59 | 0.96 | | | | | | |
| Kab.Subang | -2.64 | 0.95 | Kab.Bandung | -0.96 | 0.98 | | | | | | |
| | | | Kab.Subang | -0.76 | 0.98 | | | | | | |
| *Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Sumedang | -46.48 | 0.44 | Kab.Sumedang | -29.52 | 0.52 | Kab.Purwakarta | -10.13 | 0.64 | Kab.Subang | -25.56 | 0.39 |
| Kab.Indramayu | -38.16 | 0.44 | Kab.Karawang | -24.62 | 0.55 | Kab.Bekasi | -8.19 | 0.72 | Kab.Bekasi | -12.36 | 0.57 |
| Kab.Sukabumi | -30.84 | 0.53 | Kab.Indramayu | -24.53 | 0.55 | | | | Kab.Purwakarta | -11.87 | 0.46 |
| Kab.Karawang | -30.33 | 0.55 | Kab.Sukabumi | -22.69 | 0.57 | | | | | | |
| Kab.Purwakarta | -19.27 | 0.72 | Kab.Purwakarta | -21.73 | 0.60 | | | | | | |
| *Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Bekasi | -5.23 | 0.91 | Kota Sukabumi | 13.54 | 1.32 | Kab.Ciamis | 8.32 | 1.33 | Kab.Garut | 5.67 | 1.37 |
| | | | | | | Kab.Majalengka | 4.27 | 1.17 | Kab.Majalengka | 4.39 | 1.22 |
| | | | | | | Kab.Cirebon | 2.53 | 1.10 | | | |

**Lampiran 41. Kabupaten Kota menurut Kinerja Partisipasi Pendi[illegible] ikan T[illegible] ngkat Perguruan Tinggi Terhadap Rata-rata Tingkat Propinsi**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | | | APM | | | APK | | | APM | | |
| Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP | Kab/Kota | Disparitas | IP |
| ***Partisipasi (L[illegible]P) < r[illegible]ta-rata (L+P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Indramayu | -10.35 | 0.00 | Kab.Karawang | -8.[illegible]4 | 0 _ 24 | Kab.Majalengka | -2.94 | 0.00 | Kab.Karawang | -1.64 | 0.00 |
| Kab.Bandung | -9.37 | 0.39 | Kab.Cirebon | -6.[illegible]6 | 0 _ 13 | Kab.Sukabumi | -2.13 | 0.30 | Kab.Majalengka | -1.47 | 0.00 |
| Kab.Majalengka | -5.30 | 0.34 | Kab.Bandung | -6.[illegible]4 | 0 _ 44 | Kab.Cirebon | -1.33 | 0.00 | Kab.Indramayu | -1.03 | 0.00 |
| Kab.Bekasi | -5.02 | 0.55 | Kab.Majalengka | -5.[illegible]0 | 0 _ 34 | Kab.Purwakarta | 1.17 | 1.97 | Kab.Sukabumi | -1.02 | 0.00 |
| Kab.Sukabumi | -3.93 | 0.69 | Kab.Sukabumi | -5.[illegible]0 | 0 _ 53 | Kab.Cianjur | -1.07 | 0.48 | | | |
| Kab.Purwakarta | 3.77 | 3.30 | Kab.Indramayu | -3.[illegible]5 | 0 _ 00 | Kab.Ciamis | -0.41 | 0.84 | | | |
| Kab.Cirebon | -3.47 | 0.53 | Kab.Tasikmalaya | -3.[illegible]7 | 0 _ 38 | Kab.Karawang | -0.41 | 0.75 | | | |
| Kab.Ciamis | 2.94 | 1.40 | Kab.Bekasi | -2.[illegible]5 | 0 _ 68 | | | | | | |
| Kab.Garut | 2.32 | 1.53 | Kab.Bogor | 1.[illegible]6 | 1 _ 53 | | | | | | |
| Kab.Kuningan | -2.08 | 0.62 | Kab.Purwakarta | 1.[illegible]6 | 1 _ 65 | | | | | | |
| Kab.Cianjur | 0.96 | 1.53 | Kab.Garut | -1.[illegible]2 | 0 _ 77 | | | | | | |
| Kab.Subang | 0.95 | 1.15 | Kab.Cianjur | 0.[illegible]6 | 1 _ 53 | | | | | | |
| Kab.Tasikmalaya | -0.79 | 0.90 | Kab.Subang | 0.[illegible]5 | 1 _ 15 | | | | | | |
| Kab.Bogor | -0.58 | 0.87 | Kab.Kuningan | 0.[illegible]2 | 1 _ 23 | | | | | | |
| ***Partisipas[illegible] (P) < r[illegible]ata-rata (P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Karawang | -15.52 | 0.15 | | | | Kab.Bogor | -4.25 | 0.00 | Kab.Bandung | -4.12 | 0.00 |
| | | | | | | Kab.Bandung | -4.12 | 0.00 | Kab.Garut | -2.54 | 0.24 |
| | | | | | | Kab.Tasikmalaya | -3.74 | 0.21 | Kab.Bogor | -2.13 | 0.00 |
| | | | | | | Kab.Bekasi | -2.15 | 0.54 | | | |
| | | | | | | Kab.Indramayu | -2.06 | 0.33 | | | |
| | | | | | | Kab.Garut | -1.79 | 0.57 | | | |
| ***Partisipas[illegible] (L) < r[illegible]ata-rata (L) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kota Sukabumi | 7.58 | 1.57 | Kab.Ciamis | 6.[illegible]5 | 2.80 | Kab.Subang | 2.8 | ~~ | Kab.Subang | 2.78 | 0.00 |
| Kota Cirebon | 3.64 | 1.23 | Kota Sukabumi | 9.[illegible]0 | 2.15 | Kab.Kuningan | 2.7 | ~~ | Kab.Kuningan | 1.35 | 0.00 |
| Kab.Sumedang | 2.44 | 1.15 | Kota Cirebon | 4.[illegible]1 | 1.39 | | | | Kab.Purwakarta | 1.17 | 1.97 |
| | | | Kab.Sumedang | 4.[illegible]6 | 1.33 | | | | Kab.Tasikmalaya | 1.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | | Kab.Cianjur | -0.05 | 0.95 |

**Lampiran 42. Kabupaten Kota menurut Selisih Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 7-15 Tahun Terhadap Tingkat Propinsi.**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- 12 tahun | | | 13-15 tahun | | | 7- 12 tahun | | | 13-15 tahun | | |
| Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P |
| | | | *Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi* | | | Kab[redacted]Kota | | | | | |
| Kab.Cianjur | -0.41 | -6.28 | Kab.Indramayu | -4.84 | -35.49 | Ka[redacted].Bog[redacted]r | -11.85 | -10.39 | Kab.Purwakarta | -0.12 | -11.35 |
| Kab.Indramayu | -1.14 | -4.14 | Kab.Majalengka | -6.85 | -20.28 | Ka[redacted].Pur[redacted]akarta | -1.21 | -1.24 | Kab.Cianjur | -5.94 | -14.62 |
| Kab.Cirebon | -3.57 | -1.15 | Kab.Cianjur | -15.78 | -4.24 | | | | Kab.Cirebon | -10.85 | -6.67 |
| Kab.Bogor | -2.72 | -0.70 | Kab.Kuningan | -19.11 | -7.70 | | | | Kab.Bandung | -0.91 | -0.82 |
| Kab.Subang | -1.13 | -0.36 | Kab.Bekasi | -0.31 | -4.24 | | | | Kab.Bogor | -15.85 | -18.45 |
| Kota Bogor | -1.84 | -2.40 | Kab.Cirebon | -4.26 | -1.70 | | | | | | |
| Kota Cirebon | -1.33 | -0.61 | Kab.Ciamis | -12.46 | -11.81 | | | | | | |
| Kab.Garut | -0.13 | -0.50 | Kab.Bogor | -5.41 | -5.27 | | | | | | |
| | | | Kab.Subang | -8.02 | -7.72 | | | | | | |
| | | | *Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi* | | | | | | | | |
| Kab.Bekasi | 1.12 | -2.22 | Kab.Karawang | 0.30 | -7.38 | Ka[redacted].Kunir[redacted]gan | 3.30 | -2.67 | Kab.Tasikmalaya | 11.19 | -3.26 |
| Kota Bandung | 1.16 | -0.57 | | | | Ka[redacted].Garu[redacted] | 1.42 | -0.96 | Kab.Majalengka | 8.60 | -0.01 |
| | | | | | | | | | Kab.Sukabumi | 1.87 | -0.96 |
| | | | *Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi* | | | | | | | | |
| Kab.Purwakarta | -3.44 | 2.67 | Kab.Bandung | -0.09 | 6.73 | Ko[redacted]a Bog[redacted]r | -14.70 | 4.07 | Kota Bogor | -31.87 | 33.33 |
| Kab.Sumedang | -1.60 | 2.67 | Kab.Purwakarta | -1.19 | 4.50 | Ka[redacted].Beka[redacted]si | -0.65 | 2.55 | Kab.Karawang | -17.75 | 1.25 |
| Kab.Kuningan | -0.46 | 2.67 | Kab.Garut | -5.80 | 3.40 | Ka[redacted].Band[redacted]ung | -1.50 | 1.59 | | | |
| Kab.Bandung | -0.29 | 1.21 | | | | Ka[redacted].Tasik[redacted]malaya | -0.22 | 2.55 | | | |
| Kota Sukabumi | -0.59 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | | | 85.80 | 85.49 | | 94.48 | 95.93 | | 65.20 | 66.67 |
| **APS Jawa Barat** | **97.43** | **97.33** | | | | | | | | | |

**Lampiran 43. Kabupaten Kota Menurut Selisih Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-24 Tahun Terhadap Tingkat Propinsi.**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 18 tahun | | | 19 - 24 tahun | | | 16 - 18 tahun | | | 19 - 24 tahun | | |
| Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P |
| ***Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Garut | -1.00 | -24.72 | Kab.Sukabumi | -0.53 | -6.12 | Kab.Karawang | -10.91 | -0.90 | Kab.Karawang | -0.04 | -1.92 |
| Kab.Kuningan | -8.39 | -30.11 | Kab.Indramayu | -6.26 | -3.87 | Kab.Bogor | -4.84 | -7.71 | Kab.Bogor | -0.13 | -1.92 |
| Kab.Sukabumi | -2.61 | -15.00 | Kab.Bandung | -0.74 | -5.27 | Kab.Majalengka | -7.58 | -1.51 | Kab.Sukabumi | -0.26 | -1.92 |
| Kab.Indramayu | -7.44 | -19.11 | Kab.Cirebon | -6.03 | -8.94 | Kab.Bandung | -5.75 | -1.40 | Kab.Majalengka | -1.85 | -1.92 |
| Kab.Cirebon | -6.24 | -12.18 | Kab.Garut | -5.73 | -8.50 | Kab.Ciamis | -0.07 | -0.90 | Kab.Kuningan | -1.32 | -0.57 |
| Kab.Purwakarta | -4.31 | -7.73 | Kab.Cianjur | -7.51 | -9.05 | Kab.Cianjur | -9.11 | -8.50 | Kab.Tasikmalaya | -2.13 | -0.90 |
| Kab.Bogor | -11.99 | -11.81 | Kab.Majalengka | -8.60 | -9.13 | | | | | | |
| Kab.Ciamis | -6.97 | -6.76 | Kab.Subang | -6.26 | -11.83 | | | | | | |
| Kab.Majalengka | -11.98 | -9.14 | Kab.Tasikmalaya | -6.76 | -4.42 | | | | | | |
| Kab.Bandung | -5.95 | -1.43 | Kab.Bekasi | -11.68 | -5.08 | | | | | | |
| Kab.Subang | -11.98 | -6.76 | Kab.Kuningan | -11.19 | -8.50 | | | | | | |
| Kab.Cianjur | -16.72 | -9.66 | Kab.Purwakarta | -10.14 | -0.72 | | | | | | |
| Kab.Tasikmalaya | -17.98 | -10.88 | Kab.Bogor | -12.08 | -7.40 | | | | | | |
| ***Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Sumedang | 15.79 | -12.01 | Kab.Karawang | 5.06 | -7.61 | Kab.Subang | 19.10 | -9.22 | Kab. Garut | 4.18 | -1.13 |
| Kab.Karawang | 2.73 | -11.71 | | | | Kab.Bekasi | 20.82 | -5.06 | | | |
| | | | | | | Kab.Purwakarta | 3.68 | -5.90 | | | |
| | | | | | | Kab.Tasikmalaya | 1.84 | -7.02 | | | |
| | | | | | | Kab.Sukabumi | 1.98 | -0.89 | | | |
| ***Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kota Sukabumi | -10.25 | 13.12 | Kab.Ciamis | -12.90 | 1.97 | Kab.Cirebon | -3.18 | 12.57 | Kab.Subang | -2.02 | 5.02 |
| Kota Cirebon | -1.43 | 2.21 | Kota Sukabumi | -3.31 | 7.95 | Kab.Garut | -6.39 | 1.53 | Kab.Bekasi | -0.99 | 3.08 |
| Kota Bogor | -0.72 | 10.17 | Kota Cirebon | -1.46 | 8.95 | | | | Kab.Cianjur | -0.26 | 0.02 |
| | | | | | | | | | Kab.Indramayu | -1.26 | 0.14 |
| | | | | | | | | | | | |
| **APS Jawa Barat** | **61.98** | **54.12** | | **16.60** | **11.83** | | **27.57** | **25.89** | | **3.32** | **1.92** |

Lampiran 44. Kabupaten/ Kota Menurut Selisih Kinerja Partisipasi Pendidikan Dasar Terhadap Tingkat Propinsi

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | | | APM | | | APK | | | APM | | |
| Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P |
| ***Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Cianjur | -3.99 | -8.88 | Kab.Bandung | -4.11 | -1.99 | Kab.Bogor | -11.02 | -6.11 | Kab.Bogor | -11.12 | -8.20 |
| Kab.Indramayu | -0.29 | -5.18 | Kab.Cirebon | -1.52 | -0.63 | Kab.Subang | -0.50 | -5.47 | Kab.Purwakarta | -1.22 | -0.22 |
| Kab.Sumedang | -1.90 | -5.34 | Kota Bogor | -1.31 | -0.46 | Kab.Garut | -1.02 | -5.02 | Kab.Kuningan | -0.34 | -2.13 |
| Kota Cirebon | -5.55 | -2.12 | Kota Depok | -3.45 | -2.87 | Kab.Indramayu | -0.63 | -2.50 | Kab.Subang | -0.25 | -1.06 |
| Kab.Bandung | -6.03 | -3.88 | Kota Cirebon | -2.03 | -2.08 | Kab.Cianjur | -1.55 | -1.35 | | | |
| | | | Kota Bandung | -0.83 | -0.88 | Kota Bekasi | -2.04 | -2.50 | | | |
| ***Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Tasikmalaya | 19.82 | -0.21 | Kab.Subang | 4.43 | -4.35 | Kab.Kuningan | 2.41 | -4.75 | Kab.Indramayu | 3.92 | -0.70 |
| Kota Bekasi | 7.46 | -4.76 | Kab.Cianjur | 0.67 | -7.16 | Kab.Purwakarta | 1.80 | -0.73 | Kab.Garut | 0.77 | -1.32 |
| Kab.Ciamis | 1.68 | -2.91 | Kab.Indramayu | 2.57 | -3.59 | Kab.Sumedang | 0.40 | -0.17 | Kab.Sukabumi | 0.45 | -0.79 |
| Kota Bandung | 2.15 | -2.37 | Kota Sukabumi | 1.82 | -1.66 | Kab.Ciamis | 0.04 | -0.50 | | | |
| Kab.Cirebon | 1.27 | -2.15 | | | | | | | | | |
| Kota Depok | 0.28 | -0.78 | | | | | | | | | |
| ***Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Purwakarta | -18.00 | 4.10 | Kab.Purwakarta | -13.88 | 6.02 | Kota Bogor | -22.26 | 14.40 | Kota Bogor | -12.78 | 6.86 |
| Kab.Bogor | -2.41 | 8.32 | Kab.Sumedang | -0.20 | 2.90 | Kab.Sukabumi | -1.50 | 0.44 | Kab.Bandung | -1.33 | 2.73 |
| Kab.Kuningan | -2.47 | 7.28 | Kab.Bogor | -1.39 | 1.59 | | | | | | |
| Kab.Majalengka | -3.99 | 3.61 | | | | | | | | | |
| Kab.Subang | -3.99 | 3.15 | | | | | | | | | |
| Kab.Karawang | -3.99 | 3.15 | | | | | | | | | |
| Kota Bogor | -6.51 | 0.26 | | | | | | | | | |
| Kab.Sukabumi | -0.76 | 2.09 | | | | | | | | | |
| Kota Sukabumi | -0.83 | 0.89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **APK/APM Jawa Barat** | 103.99 | 102.91 | | 91.87 | 92.23 | | 102.0 | 102.5 | | 92.56 | 93.14 |

**Lampiran 45. Kabupaten Kota menurut Selisih Kinerja Partisipasi Pendidikan Lanjutan Pertama Terhadap Tingkat Propinsi**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | | | APM | | | APK | | | APM | | |
| Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P |
| ***Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Bogor | -1.98 | -25.59 | Kab.Indramayu | -12.87 | -33.32 | Kota Sukabumi | -10.54 | -65.39 | Kab.Bogor | -13.86 | -29.14 |
| Kab.Majalengka | -7.96 | -19.77 | Kab.Bekasi | -7.10 | -23.95 | Kab.Cirebon | -14.74 | -8.25 | Kab.Purwakarta | -0.87 | -11.16 |
| Kab.Indramayu | -25.50 | -35.16 | Kab.Kuningan | -24.15 | -11.54 | Kab.Cianjur | -8.54 | -17.45 | Kab.Tasikmalaya | -2.07 | -8.63 |
| Kota Sukabumi | -17.20 | -2.32 | Kab.Cirebon | -13.08 | -0.53 | Kab.Majalengka | -5.64 | -8.25 | Kab.Sukabumi | -1.06 | -5.22 |
| Kab.Kuningan | -25.48 | -11.53 | Kab.Bogor | -8.24 | -14.77 | Kab.Bogor | -22.73 | -27.90 | Kab.Cirebon | -6.77 | -10.93 |
| Kota Bogor | -2.34 | -10.46 | Kab.Ciamis | -10.00 | -12.92 | | | | Kab.Majalengka | -8.03 | -7.12 |
| Kab.Bekasi | -9.92 | -17.45 | Kab.Majalengka | -12.13 | -14.30 | | | | Kab.Bekasi | -5.27 | -5.20 |
| Kab.Garut | -3.30 | -9.33 | Kab.Subang | -14.45 | -15.27 | | | | | | |
| Kab.Subang | -14.40 | -11.56 | | | | | | | | | |
| ***Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Karawang | 10.57 | -1.84 | Kab.Sukabumi | 12.60 | -2.81 | Kab.Tasikmalaya | 7.67 | -16.61 | Kota Depok | 56.27 | -45.21 |
| Kab.Sukabumi | 3.47 | -1.33 | Kab.Karawang | 7.76 | -2.08 | Kab.Purwakarta | 3.11 | -5.82 | Kota Sukabumi | 6.12 | -45.21 |
| | | | Kota Bogor | 2.87 | -4.62 | | | | Kab.Cianjur | 1.95 | -8.23 |
| ***Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi*** | | | | | | | | | | | |
| Kab.Sumedang | -5.84 | 24.92 | Kab.Cianjur | -19.99 | 4.18 | Kab.Karawang | -18.02 | 0.64 | Kota Bogor | -10.40 | 29.26 |
| Kab.Ciamis | -28.84 | 0.13 | Kab.Sumedang | -1.86 | 22.03 | Kab.Bandung | -10.39 | 5.34 | Kab.Karawang | -11.53 | 3.85 |
| Kab.Cirebon | -9.10 | 16.10 | Kab.Purwakarta | -4.64 | 9.17 | | | | Kab.Bandung | -5.64 | 6.01 |
| Kab.Cianjur | -12.15 | 7.56 | Kab.Garut | -10.01 | 0.30 | | | | | | |
| Kota Cirebon | -2.73 | 10.72 | Kab.Tasikmalaya | -4.29 | 0.61 | | | | | | |
| Kab.Tasikmalaya | -3.61 | 5.91 | | | | | | | | | |
| **APK/APM Prop Jawa Barat** | **92.18** | **89.33** | | **70.01** | **70.82** | | **60.39** | **65.39** | | **43.73** | **45.21** |

Lampiran 46. Kabupaten Kota menurut Selisih Kinerja Partisipasi Pendidikan Lanjutan SLTA Terhadap Tingkat Propinsi

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | | | APM | | | APK | | | APM | | |
| Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P |
| *Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Kuningan | -6.56 | -30.35 | Kab.Kuningan | -3.68 | -20.30 | Kota Bogor | -25.06 | -5.86 | Kota Bogor | -21.33 | -1.88 |
| Kab.Garut | -7.62 | -16.13 | Kab.Garut | -1.34 | -17.85 | Kab.Bogor | -2.33 | -12.16 | Kab.Bogor | -4.66 | -11.21 |
| Kab.Cirebon | -11.26 | -18.88 | Kab.Cirebon | -7.49 | -13.67 | Kab.Tasikmalaya | -4.47 | -5.78 | Kab.Bandung | -1.33 | -6.53 |
| Kab.Majalengka | -10.14 | -14.38 | Kab.Bekasi | -0.12 | -5.71 | Kab.Sukabumi | -1.20 | -2.45 | Kab.Sukabumi | -0.88 | -1.59 |
| Kab.Bogor | -26.51 | -4.37 | Kab.Majalengka | -0.12 | -4.33 | Kab.Bandung | -3.24 | -4.39 | Kab.Tasikmalaya | -2.21 | -1.80 |
| Kab.Cianjur | -13.70 | -15.46 | Kab.Tasikmalaya | -30.12 | -14.58 | Kab.Cianjur | -6.60 | -2.47 | Kab.Cianjur | -5.94 | -2.84 |
| Kab.Bandung | -2.51 | -0.60 | Kab.Ciamis | -0.11 | -2.21 | Kab.Garut | -1.53 | -0.17 | Kab.Karawang | -11.33 | -8.78 |
| Kab.Ciamis | -3.70 | -1.72 | Kab.Bogor | -16.40 | -8.41 | Kab.Karawang | -13.39 | -10.26 | | | |
| Kab.Tasikmalaya | -27.72 | -13.82 | Kab.Cianjur | -9.63 | -5.41 | | | | | | |
| Kab.Subang | -13.72 | -7.00 | Kab.Bandung | -6.15 | -1.30 | | | | | | |
| | | | Kab.Subang | -7.26 | -2.21 | | | | | | |
| *Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Sumedang | 19.62 | -17.50 | Kab.Sumedang | 10.99 | -12.72 | Kab.Purwakarta | 3.06 | -4.77 | Kab.Subang | 20.90 | -2.11 |
| Kab.Indramayu | 4.45 | -24.35 | Kab.Karawang | 4.79 | -14.02 | Kab.Bekasi | 3.97 | -1.92 | Kab.Purwakarta | 0.54 | -8.78 |
| Kab.Sukabumi | 1.90 | -19.58 | Kab.Indramayu | 4.42 | -14.30 | | | | Kab.Bekasi | 7.70 | -2.11 |
| Kab.Karawang | 2.95 | -18.02 | Kab.Sukabumi | 3.00 | -13.88 | | | | | | |
| Kab.Purwakarta | 5.49 | -4.42 | Kab.Purwakarta | 3.71 | -12.21 | | | | | | |
| *Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Bekasi | -4.11 | 0.02 | Kota Sukabumi | -7.31 | 12.04 | Kab.Ciamis | -0.06 | 10.56 | Kab.Garut | -6.03 | 2.19 |
| | | | | | | Kab.Majalengka | -0.07 | 6.50 | Kab.Majalengka | -1.34 | 5.60 |
| | | | | | | Kab.Cirebon | -0.67 | 4.16 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **APK/APM Jawa Barat** | **63.72** | **54.36** | | **50.12** | **44.31** | | **25.06** | **22.76** | | **21.33** | **18.78** |

**Lampiran 47. Kabupaten Kota menurut Selisih Kinerja Partisipasi Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi Terhadap Tingkat Propinsi**

| Daerah Perkotaan | | | | | | Daerah Perdesaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | | | APM | | | APK | | | APM | | |
| Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P | Kab/Kota | L | P |
| *Partisipasi (L+P) < rata-rata (L+P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Indramayu | -6.25 | -12.48 | Kab.Karawang | -10.95 | -7.37 | Kab.Majalengka | -0.13 | -2.62 | Kab.Karawang | -0.18 | -0.89 |
| Kab.Bandung | -1.22 | -6.47 | Kab.Cirebon | -5.27 | -9.11 | Kab.Sukabumi | -0.01 | -1.69 | Kab.Majalengka | -0.35 | -0.89 |
| Kab.Majalengka | -8.60 | -9.78 | Kab.Bandung | -1.53 | -5.15 | Kab.Cirebon | -1.74 | -2.62 | Kab.Indramayu | -0.79 | -0.89 |
| Kab.Bekasi | -5.39 | -6.29 | Kab.Majalengka | -4.59 | -7.37 | Kab.Purwakarta | -1.86 | -0.24 | Kab.Sukabumi | -0.80 | -0.89 |
| Kab.Sukabumi | -4.10 | -3.91 | Kab.Sukabumi | -1.88 | -4.36 | Kab.Cianjur | -1.03 | -1.65 | | | |
| Kab.Purwakarta | -14.96 | -7.07 | Kab.Indramayu | -4.83 | -4.76 | Kab.Ciamis | -0.44 | -0.40 | | | |
| Kab.Cirebon | -9.28 | -8.63 | Kab.Tasikmalaya | -7.67 | -8.22 | Kab.Karawang | -1.43 | -1.39 | | | |
| Kab.Ciamis | -9.19 | -2.13 | Kab.Bekasi | -0.93 | -7.25 | | | | | | |
| Kab.Garut | -12.25 | -5.81 | Kab.Bogor | -10.01 | -6.13 | | | | | | |
| Kab.Kuningan | -11.19 | -9.15 | Kab.Purwakarta | -6.13 | -2.66 | | | | | | |
| Kab.Cianjur | -14.78 | -9.70 | Kab.Garut | -8.24 | -6.74 | | | | | | |
| Kab.Subang | -10.14 | -5.07 | Kab.Cianjur | -10.77 | -7.29 | | | | | | |
| Kab.Tasikmalaya | -8.40 | -5.07 | Kab.Subang | -9.14 | -10.07 | | | | | | |
| Kab.Bogor | -12.08 | -8.54 | Kab.Kuningan | -9.88 | -6.74 | | | | | | |
| *Partisipasi (P) < rata-rata (P) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kab.Karawang | 1.74 | -9.66 | | | | Kab.Bogor | 1.18 | -2.62 | Kab.Bandung | 2.30 | -0.89 |
| | | | | | | Kab.Bandung | 1.05 | -2.62 | Kab.Garut | 1.51 | -0.10 |
| | | | | | | Kab.Tasikmalaya | 1.69 | -1.60 | Kab.Bogor | 0.31 | -0.89 |
| | | | | | | Kab.Bekasi | 0.02 | -1.59 | | | |
| | | | | | | Kab.Indramayu | 1.58 | -0.12 | | | |
| | | | | | | Kab.Garut | 1.10 | -0.24 | | | |
| *Partisipasi (L) < rata-rata (L) Propinsi* | | | | | | | | | | | |
| Kota Sukabumi | -3.31 | 8.39 | Kab.Ciamis | -8.89 | 0.28 | Kab.Subang | -3.07 | 0.16 | Kab.Subang | -1.82 | 1.89 |
| Kota Cirebon | -0.45 | 7.31 | Kota Sukabumi | -4.41 | 7.51 | Kab.Kuningan | -3.07 | 0.08 | Kab.Kuningan | -1.82 | 0.46 |
| Kab.Sumedang | -0.53 | 6.03 | Kota Cirebon | -0.47 | 6.76 | | | | Kab.Purwakarta | -0.61 | 1.49 |
| | | | Kab.Sumedang | -0.09 | 6.59 | | | | Kab.Tasikmalaya | -1.82 | 0.13 |
| | | | | | | | | | Kab.Cianjur | -0.8 | 0.08 |
| | | | | | | | | | | | |
| **APK/APM Jawa Barat** | **16.60** | **12.48** | | **12.59** | **10.07** | | **3.07** | **2.62** | | **1.82** | **0.89** |